



Republik Indonesia



LAPORAN KINERJA

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

2020



**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TA 2020**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas untuk tahun anggaran 2020 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas TA 2020 menjadi tanggung jawab manajemen Kementerian PPN/Bappenas.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas atas Laporan Kinerja dan telah disajikan secara akuntabel. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja ini.

Jakarta, 24 Februari 2021

Inspektur Utama,



Ir. Wismana Adi Suryabrata, MIA

NIP 19630225 199003 1 003

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Laporan Kinerja disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



Selama tahun 2020, Kementerian PPN/Bappenas telah menghasilkan beberapa dokumen perencanaan pembangunan nasional dengan telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024 dan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021. Selain itu Kementerian PPN/Bappenas juga telah melakukan perubahan terhadap RKP Tahun 2021 dengan telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2020 tentang Pemuktahiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021.

Selain itu, Kementerian PPN/Bappenas telah menjalankan peran sebagai *clearing house* yang memastikan: (1) konsistensi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2021; (2) seluruh rencana pembangunan prioritas nasional dijalankan oleh K/L maupun di daerah sesuai dengan RPJMN Tahun 2020-2024 dan RKP Tahun 2020, termasuk kegiatan *Major Project*; dan (3) pengendalian pelaksanaan pembangunan RKP Tahun 2020.

Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan informasi atas pencapaian kinerja bagi pemangku kepentingan. Selain itu dapat menjadi acuan dan tolak ukur dalam meningkatkan kinerja pada masa yang akan datang.

Jakarta, 25 Februari 2021

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



Suharso Monoarfa

RINGKASAN EKSEKUTIF

LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

TAHUN 2020

Capaian Indikator Kinerja Utama:

IKU 1: Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional



Tercapai **93,55** dari **75**

- Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional diukur dari (1) Integrasi Perencanaan Pembangunan Pusat; (2) Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pusat; dan (3) Sinergi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah
- Capaian IKU belum tercapai nilai 100 dikarenakan: (1) belum selarasnya muatan nomenklatur RO Renja K/L 2021 dan RO RKA K/L 2021 dengan muatan nomenklatur dan anggaran Kegiatan Prioritas (KP) RKP 2021; dan (2) belum selarasnya sinergi perencanaan pembangunan pusat dan daerah
- Upaya peningkatan capaian IKU melalui meningkatkan koordinasi dengan Mitra K/L/D melalui pemanfaatan teknologi daring/online pada masa pandemi Covid-19

- IKU baru yang bertujuan untuk mengukur pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan Jabatan Fungsional Perencana, dan program pendidikan dan pelatihan kepada institusi pusat dan daerah di bidang perencanaan pembangunan nasional
- Hasil capaian kinerja diukur dari: (1) % jumlah JFP yang memenuhi standar kompetensi; (2) % jumlah karyawan yang lulus program pendidikan; (3) % jumlah peserta terlatih; dan (4) % tingkat Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Diklat dan JFP.
- Upaya perbaikan kedepan, Kementerian PPN/Bappenas berkomitmen untuk meningkatkan kurikulum dan meningkatkan pelayanan penyelenggaraan Diklat dan JFP

IKU 2 : Persentase Perencana yang Memenuhi Standar Kompetensi



Tercapai **99,19%** dari **85%**

IKU 3: Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional



Tercapai **100%** dari **84%**

- Wabah pandemic Covid-19 mengakibatkan terpuruknya pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya Indonesia serta terjadi *refocusing* anggaran pembangunan yang dialihkan untuk penanganan penyebaran dampak Covid-19
- **Capaian kinerja PN RKP 2020 (Triwulan III) sebesar 74,87%**, terdiri dari rata-rata kinerja sasaran PN (71,72%) dan rata-rata dukungan output K/L (78,01%)
- Kementerian PPN/Bappenas telah berupaya pengendalian di tingkat pusat dan daerah melalui penyampaian **rekomendasi peningkatan capaian kinerja PN RKP 2020 yang telah ditindaklanjuti oleh K/L/D sebesar 100%**
- Kedepan, Kementerian PPN/Bappenas akan terus meningkatkan koordinasi dengan mitra K/L/D, melalui pemantauan dan evaluasi serta pengendalian RKP

- Capaian Kinerja IKU ini diukur melalui besaran kebijakan yang dihasilkan dari penugasan Presiden dan Wakil Presiden RI kepada Kementerian PPN/Bappenas terkait isu strategis pembangunan nasional yang ditindaklanjuti oleh K/L
- Kedepan, Kementerian PPN/Bappenas berkomitmen meningkatkan kinerja untuk terus menghasilkan kebijakan-kebijakan strategis pembangunan nasional, baik penugasan dari Presiden dan Wakil Presiden RI maupun respon cepat terhadap isu permasalahan pembangunan terkini

IKU 4: Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L



Tercapai **100%** dari **85-87,9%**

RINGKASAN EKSEKUTIF

LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

TAHUN 2020

Capaian Indikator Kinerja Utama:

IKU 5: Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L



- Capaian Kinerja IKU ini diukur melalui besaran rekomendasi Kementerian PPN/Bappenas terkait kebijakan inovasi pembangunan nasional yang dijalankan oleh K/L dan belum ada di tahun sebelumnya
- Walaupun capaian kinerja sudah optimal, Kementerian PPN/Bappenas akan terus berinovasi untuk menciptakan kebijakan perencanaan pembangunan yang inovatif guna percepatan capaian target Agenda Pembangunan Nasional 2020-2024 maupun Prioritas Nasional RKP

- Capaian Kinerja IKU Indeks RB diukur dari penilaian oleh Kementerian PANRB (nilai resmi masih menunggu)
- Capaian Kinerja Indeks RB mengalami **peningkatan dari 82,48 (2019) menjadi 83,93 (2020)**
- Upaya peningkatan: meningkatkan peran Agen Perubahan RB Kementerian PPN/Bappenas dan meningkatkan pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RB

IKU 6: Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas



IKU 7: Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional



- IKU ini merupakan IKU baru yang belum ada di tahun sebelumnya
- Capaian Kinerja IKU Indeks Kepuasan ini diukur melalui hasil kuesioner kepuasan *stakeholder* terhadap layanan Kementerian PPN/Bappenas
- Kedepan, Kementerian PPN/Bappenas akan terus meningkatkan koordinasi dengan *stakeholder* untuk mencapai pembangunan nasional

- Capaian Kinerja IKU ini diukur melalui telaah terhadap aplikasi yang dimiliki oleh Kementerian PPN/Bappenas untuk menyelenggarakan perencanaan pembangunan nasional
- IKU ini merupakan IKU baru yang belum ada di tahun sebelumnya
- Kedepan, akan dilaksanakan penyempurnaan data dan informasi renbang berbasis Tematik, Holistik, Integrasi, dan Spasial (THIS)

IKU 8: Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional



Tercapai **88,89%** dari **85%**

RINGKASAN EKSEKUTIF

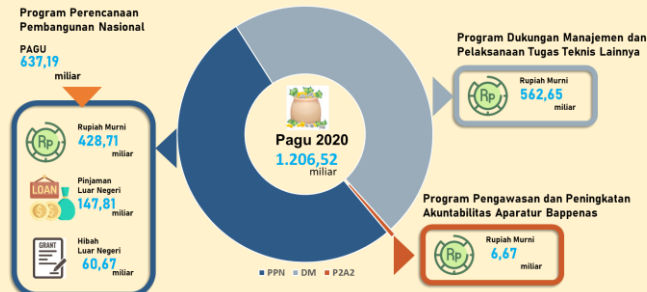
LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

TAHUN 2020

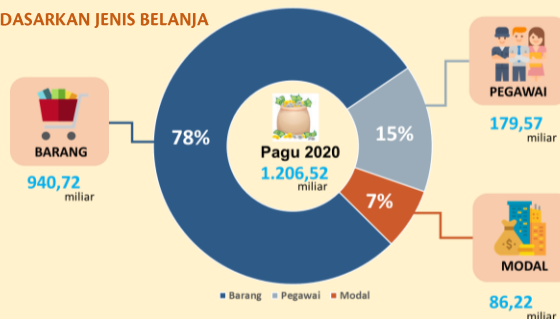
Capaian Kinerja Anggaran:

Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2020

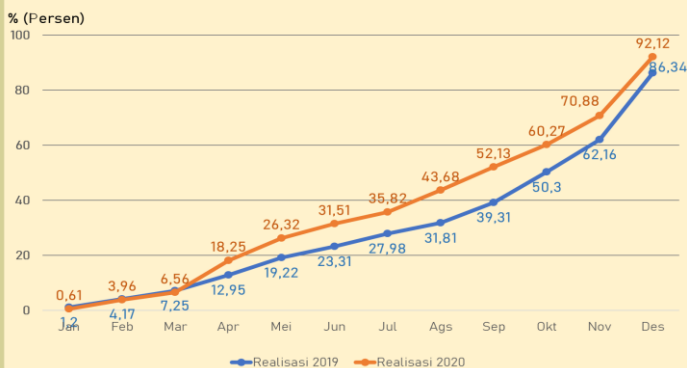
BERDASARKAN PROGRAM



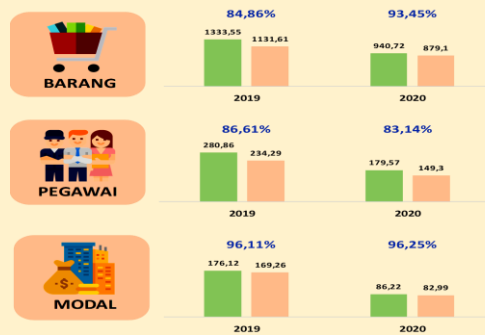
BERDASARKAN JENIS BELANJA



Realisasi Anggaran Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2019 – 2020



BERDASARKAN JENIS BELANJA



Permasalahan Capaian Kinerja Anggaran:

- Wabah pandemik Covid-19 berakibat kegiatan yang sudah dianggarkan tidak terlaksana
- Pembatasan kegiatan koordinasi perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional secara tatap muka
- Belum optimalnya kinerja Koordinator Kegiatan di masing-masing unit kerja untuk percepatan realisasi anggaran yang akuntabilitas
- Pengelolaan kegiatan dan anggaran PHLN belum optimal

Upaya Perbaikan Capaian Kinerja Anggaran kedepan:

- Mengoptimalkan koordinasi perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional secara daring atau on-line
- Meningkatkan koordinasi PPK, Koordinator Kegiatan, dan Pimpinan Unit Kerja dalam pelaksanaan kegiatan
- Mengoptimalkan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kegiatan dan anggaran dalam rangka percepatan realisasi anggaran
- Menyusun SOP terkait pengelolaan kegiatan dan anggaran PHLN

Tindak Lanjut Kedepan:

Dalam upaya meningkatkan kinerja Kementerian PPN/Bappenas di masa yang akan datang, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan antara lain:

- Meningkatkan peran koordinasi dan kerjasama berkelanjutan antar sektor guna mempercepat pembangunan prioritas nasional di pusat maupun daerah, salah satunya melalui peningkatan kegiatan bersama lintas sektor dengan melihat langsung pelaksanaan kegiatan Major Project dan pencapaian proyek prioritas dalam RKP.
- Meningkatkan kegiatan pemantauan dan evaluasi lintas sektor atas pelaksanaan PN-PP-KP-ProP dan Major Project sehingga sasaran dan target pembangunan nasional dalam RKP dapat tercapai.
- Merumuskan kebijakan pengelolaan dan integrasi data dan informasi perencanaan pembangunan nasional untuk mewujudkan Satu Data Indonesia di tingkat pusat dan daerah.
- Memperbaiki tata kelola ASN di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas, diantaranya melalui pemutakhiran data seluruh pegawai PNS maupun PPNPN, pengembangan pola karir PNS, dan evaluasi pelaksanaan pengadaan PPNPN.
- Melakukan pembinaan dan koordinasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan Integrated Digital Workspace (IDW) dan Smart Office (SO) masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-2
1.2. Kedudukan dan Peran Kementerian PPN/Bappenas.....	I-2
1.2.1. Tugas dan Fungsi Kementerian PPN/Bappenas.....	I-2
1.2.2. Struktur Organisasi Kementerian PPN/Bappenas	I-5
1.3. Sumber Daya Manusia Kementerian PPN/Bappenas	I-8
1.4. Potensi dan Permasalahan Strategis	I-10
1.4.1. Potensi Strategis	I-10
1.4.2. Permasalahan Strategis.....	I-11
BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA	II-1
2.1. Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024.....	II-1
2.2. Peran Kementerian PPN/Bappenas dalam Prioritas Pembangunan Nasional	II-5
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	II-7
2.4. Pengukuran Kinerja Tahun 2020	II-8
2.5. Alokasi Anggaran	II-25
2.5.1. Alokasi Anggaran 2020	II-25
2.5.2. Perbandingan Alokasi Anggaran Tahun 2019-2020.....	II-27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	III-1
3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama	III-1
SS-1: Terwujudnya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Nasional	III-4
IKU 1: Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional.....	III-5
IKU 2: Persentase Perencana yang Memenuhi Standar Kompetensi	III-33

SS-2: Terwujudnya Efektivitas Pengendalian Pembangunan Nasional	III-40
IKU 3: Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional	III-40
SS-3: Terwujudnya Kebijakan Pembangunan Nasional yang Visioner	III-53
IKU 4: Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L	III-54
IKU 5: Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L	III-57
SS-4: Terwujudnya Kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang Bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM	III-59
IKU 6: Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas	III-59
IKU 7: Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder</i>) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional	III-65
IKU 8: Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional	III-68

3.2. Capaian Kinerja Lainnya Tahun 2020

3.2.1. Perumusan Kebijakan Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional	III-75
3.2.2. Perencanaan Strategis Pemindahan Ibu Kota Negara	III-77
3.2.3. Trilateral Meeting Kinerja	III-78
3.2.4. Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat	III-79
3.2.5. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	III-82
3.2.6. Penyelenggaraan ICCTF	III-84
3.2.7. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)	III-89
3.2.8. Pengelolaan Program Kerjasama Bilateral dan Multilateral	III-90
3.2.9. Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD)	III-92
3.2.10. Dukungan Capaian Rencana Aksi Nasional (RAN)	III-95
3.2.11. Perkuatan <i>Clearing House</i> Pembangunan dalam RKP 2022	III-97

3.3. Pagu dan Realisasi Anggaran

3.2.1. Perkembangan Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2015-2020	III-100
3.2.2. Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2020	III-102

BAB IV PENUTUP	IV-1
4.1. Simpulan	IV-1
4.2. Tindak Lanjut.....	IV-4

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Peran dan Fungsi Kementerian PPN/Bappenas	I-6
Tabel 2.1.	Indikator Kinerja Utama (IKU) Level Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020	II-4
Tabel 2.2.	Perjanjian Kinerja Menteri PPN/Kepala Bappenas	II-7
Tabel 2.3.	Pemetaan Cascading IKU Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020	II-8
Tabel 2.4.	Pemetaan IKU Perjanjian Kinerja Menteri PPN/Kepala Bappenas Tahun 2020-2024.....	II-9
Tabel 2.5.	Mekanisme Kerja dan Peranan PJ PN/PP/KP dalam Perencanaan dan Pengendalian.....	II-12
Tabel 2.6.	Kamus Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020	II-17
Tabel 2.7.	Alokasi Anggaran dan Perubahannya Tahun 2020	II-25
Tabel 2.8.	Program dan Anggaran Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020	II-26
Tabel 2.9.	Alokasi Anggaran Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020	II-29
Tabel 3.1.	<i>Bridging</i> IKU PK 2020 ke IKU 2020-2024.....	III-1
Tabel 3.2.	Perbandingan Capaian Kinerja IKU Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2019 dan Tahun 2020	III-3
Tabel 3.3.	Capaian Kinerja Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020	III-5
Tabel 3.4.	Rincian Detail Capaian Kinerja Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020.....	III-7
Tabel 3.5.	Rekapitulasi (%) Keselarasan Muatan RPJMN 2020-2024 dengan Muatan RPJPN 2005-2025.....	III-10
Tabel 3.6.	Rekapitulasi (%) Keselarasan Muatan Renstra K/L 2020-2024 dengan Muatan RPJMN 2020-2024	III-12
Tabel 3.7.	Rekapitulasi Persentase (%) Keselarasan Muatan RKP 2021 dengan Muatan RPJMN 2020-2024	III-14
Tabel 3.8.	Rekapitulasi Persentase (%) Keselarasan Muatan Renja K/L 2021 dengan Muatan RKP 2021	III-17

Tabel 3.9.	Rekapitulasi Persentase (%) Keselarasan Muatan RKA K/L 2021 dengan Muatan RKP 2021	III-19
Tabel 3.10.	Pengukuran Persentase Perencanaan yang Memenuhi Standar Kompetensi.....	III-33
Tabel 3.11.	Perbandingan Tingkat Kelulusan Peserta Pelatihan Fungsional Perencana Tahun 2019 dan 2020	III-34
Tabel 3.12.	Perbandingan Tingkat Kelulusan Karyasiswa Pendidikan 2019 dan 2020 .	III-36
Tabel 3.13.	Perbandingan Penyelenggaraan Pelatihan Tahun Anggaran 2019 dan 2020.....	III-37
Tabel 3.14.	Hasil Penilaian Tingkat Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Diklat dan JFP Tahun 2020	III-37
Tabel 3.15.	Perbandingan Hasil Penilaian Kepuasan Karyasiswa Program Pendidikan Tahun 2019 dan 2020.....	III-38
Tabel 3.16.	Perbandingan Hasil Penilaian Kepuasan Peserta Pelatihan Tahun 2019 dan 2020.....	III-38
Tabel 3.17.	Perbandingan Hasil Penilaian Kepuasan Pelayanan Jabatan Fungsional Perencana Tahun 2019 dan 2020	III-39
Tabel 3.18.	Capaian Kinerja Prioritas Nasional (PN) RKP 2020 hingga Triwulan III	III-41
Tabel 3.19.	Pengukuran Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional..	III-46
Tabel 3.20.	Pengukuran Indikator Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat.....	III-47
Tabel 3.21.	Perhitungan Indikator Persentase Jumlah K/L/D yang Menindaklanjuti Rencana Percepatan Pelaksanaan Pembangunan.....	III-52
Tabel 3.22.	Rekapitulasi Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L.....	III-56
Tabel 3.23.	Rekapitulasi Perhitungan Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L.....	III-58
Tabel 3.24.	Jenis Peraturan yang Telah Dihasilkan Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020 Berdampak Langsung pada Perencanaan Pembangunan Nasional	III-75
Tabel 3.25.	Pagu dan Realisasi Anggaran Program Kegiatan Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2019 – 2020.....	III-99
Tabel 3.26.	Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2020.....	III-103
Tabel 3.27.	Pagu dan Realisasi Anggaran Satker Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2019 – 2020	III-105
Tabel 3.28.	Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Dana Dekonsentrasi Tahun 2020	III-106

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Struktur Organisasi Eselon I Kementerian PPN/Bappenas	I-6
Gambar 1.2.	Perubahan Alur Kerja Kementerian PPN/Bappenas	I-7
Gambar 1.3.	Kekuatan SDM Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020.....	I-8
Gambar 2.1.	Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Renstra 2020-2024	I-3
Gambar 2.2.	Konsep Bridging I IKU 2015-2019 ke IKU 2020-2024	II-10
Gambar 2.3.	Mekanisme Pengukuran Keselarasan: Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergitas.....	II-11
Gambar 2.4.	Mekanisme Penghitungan Keselarasan Integrasi dan Sinkronisasi.....	II-11
Gambar 2.5.	Penanggung Jawab Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021	II-15
Gambar 2.6.	Pemetaan Program Prioritas yang Mendukung Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2021.....	II-16
Gambar 2.7.	Porsi Alokasi Anggaran Per Program Tahun Anggaran 2020.....	II-26
Gambar 2.8.	Perkembangan Alokasi Anggaran Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2018-2020.....	II-27
Gambar 2.9.	Perkembangan Alokasi Anggaran Satker Dekonsentrasi Tahun 2018-2020.....	II-29
Gambar 3.1.	Alur Kerja Kerangka Ekonomi Makro Gambar	III-28
Gambar 3.2.	Alur Penyusunan Kerangka Ekonomi Makro.....	III-28
Gambar 3.3.	Koordinasi Penetapan PDB Berdasarkan Lapangan Usaha.....	III-30
Gambar 3.4.	Keterkaitan KEM, RKP, dan RPJMN.....	III-32
Gambar 3.5.	Perkembangan Nilai Akuntabilitas Tahun 2015-2020	III-63
Gambar 3.6.	Nilai Komponen Akuntabilitas Kementerian PPN/Bappenas Tahun lama 2019-2020	III-62
Gambar 3.7.	Kementerian PPN/Bappenas Berperan Aktif dalam Proses Perencanaan dan Penetapan Sasaran Inflasi	III-66
Gambar 3.8.	Kementerian PPN/Bappenas Berperan Aktif dalam Pengendalian dan Monev Kebijakan Pengendalian Inflasi	III-67
Gambar 3.9.	Kementerian PPN/Bappenas Memberikan Pelayanan Prima (Cepat dan Berintegritas)	III-67

Gambar 3.10.	Capaian Program COREMAP-CTI WB Tahun 2020	III-85
Gambar 3.11.	Paket Program COREMAP-CTI WB yang dilaksanakan oleh 6 (enam) Mitra Pelaksana.....	III-86
Gambar 3.12	Capaian Program COREMAP-CTI ADB Tahun 2020	III-87
Gambar 3.13.	Capaian Program Blended Finance Tahun 2020.....	III-87
Gambar 3.14.	Capaian Program Blue Carbon Tahun 2020	III-88
Gambar 3.15.	Capaian Program Bioeconomic Tahun 2020	III-89
Gambar 3.16.	Tahapan Penilaian PPD Tahun 2020	III-93
Gambar 3.17.	Skema Penerapan Clearing House Proyek.....	III-98
Gambar 3.18.	Alur Penerapan Proses <i>Clearing House</i> Proyek pada RKP Tahun 2022	III-98
Gambar 3.19.	Fitur Baru dan Penguatan dalam RKP Tahun 2022.....	III-99
Gambar 3.20.	Perbandingan Pagu Anggaran Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2019 – 2020	III-100
Gambar 3.21.	Realisasi Anggaran Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2019 – 2020 ..	III-101
Gambar 3.22.	Realisasi Anggaran Kementerian PPN/Bappenas Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2019 dan 2020.....	III-105
Gambar 3.23.	Perbandingan Pagu Anggaran Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2019 – 2020	III-105

1

Pendahuluan



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN dan RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan menjalankan fungsi untuk melakukan perencanaan pembangunan nasional melalui sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan di tingkat pusat dan daerah serta memperkuat percepatan pencapaian target pembangunan nasional. Laporan Kinerja ini juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja dan pembenahan manajemen internal di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas, serta perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Pada tahun 2020, Kementerian PPN/Bappenas menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan nasional, yakni Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 dan serta Pemutakhiran; serta dokumen perencanaan internal berupa Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024. Pencapaian di atas dilakukan melalui peningkatan kualitas, kapasitas dan akuntabilitas kinerja serta keuangan secara konsisten dan berkelanjutan.

Namun demikian, sejak awal tahun 2020 hingga saat ini, hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia, telah terjangkit penyebaran pandemi Covid-19. Dampak Pandemi Covid-19 dirasakan Indonesia juga cukup besar termasuk menimbulkan disrupsi pada kehidupan manusia dan menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Secara tidak langsung berdampak pada tugas Kementerian PPN/Bappenas dalam merencanakan pembangunan nasional. Meskipun demikian, tantangan tersebut membuat Bappenas harus tetap menghasilkan kebijakan, program dan kegiatan yang berkualitas dan kredibel.

Laporan Kinerja ini merupakan pelaporan capaian atas pelaksanaan kinerja Kementerian PPN/Bappenas sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) yang telah disepakati dan ditetapkan pada tahun 2020 dimana masih menggunakan IKU 2015-2019. Namun demikian, pencapaian kinerja menggunakan metode *bridging* ke IKU 2020-2024. Hal ini disebabkan karena perubahan struktur organisasi melalui pelantikan Pejabat Tinggi Pratama dan Perencana di akhir tahun anggaran 2020.

1.2. KEDUDUKAN DAN PERAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

1.2.1. Tugas dan Fungsi Kementerian PPN/Bappenas

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas tahun 2020 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Kementerian PPN mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dalam Pasal 3 Kementerian PPN menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan sektoral, lintas sektor, dan lintas wilayah, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
- e. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

Selanjutnya, berdasarkan Perpres Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 20 Tahun 2016) mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Bappenas mempunyai fungsi:

- a. pengkajian, pengkoordinasian, dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan sektoral, lintas sektor, dan lintas wilayah, kerangka ekonomi makro nasional dan regional, rancang bangun sarana dan prasarana, kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan, serta pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan nasional;

- b. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dan penyiapan rancang bangun sarana dan prasarana;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional sebagai holistik integratif dalam penetapan program dan kegiatan kementerian/lembaga/daerah;
- d. pengkoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara rencana kerja pemerintah dan rancangan anggaran pendapatan belanja negara;
- e. penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara bersama-sama dengan Kementerian Keuangan;
- f. pengkoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan rencana pembangunan nasional;
- g. pemantauan dan evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional;
- h. pengkoordinasian, fasilitasi, dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan dalam dan luar negeri, serta pengalokasian dana untuk pembangunan bersama-sama instansi terkait;
- i. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Bappenas;
- j. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Bappenas;
- k. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Bappenas;
- l. pelaksanaan pengawasan atas pelaksanaan tugas di Bappenas.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, pada tahun 2020, Kementerian PPN/Bappenas melakukan penguatan peran perencanaan dan pembangunan nasional, agar secara efektif mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional. Merujuk RPJMN 2020-2024, Bappenas ingin menekankan pentingnya penataan arsitektur kelembagaan sebagai upaya untuk pencapaian pembangunan nasional secara efektif dengan berdasarkan prinsip *"Structure Follow Strategy"*. Penataan arsitektur kelembagaan mencakup pada 3 (tiga) aspek yang meliputi:

1. Kelembagaan yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses;
2. Mengarahkan perubahan tata kelola pemerintahan dalam mencapai tujuan pembangunan; dan
3. Mendorong efektivitas kelembagaan melalui ketepatan struktur organisasi dan ketepatan proses (tata laksana organisasi).

Sejalan dengan hal tersebut Kementerian PPN/Bappenas telah dan sedang melakukan transformasi untuk menjalankan peran strategis dalam perencanaan pembangunan nasional. Hal tersebut dilakukan melalui pengembangan kebijakan inovasi pembangunan, pengembangan kapasitas ASN rencana pembangunan, sinkronisasi kelembagaan dan regulasi, kebijakan strategis nasional dan mendorong kerja sama multi pihak (termasuk non pemerintah). Hal tersebut sesuai dengan Renstra Kementerian 2020-

2024 yang memiliki peran baru. Secara rinci peran dan fungsi baru Kementerian PPN/Bappenas tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1. Peran dan Fungsi Kementerian PPN/Bappenas

Perencanaan	Alokasi	Pengendalian	Enabler
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan ekonomi makro ▪ Penyusunan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan ▪ Melakukan koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran penyiapan rancang bangun sarana dan prasarana ▪ Penyusunan rencana pembangunan nasional secara tematik, holistik, integratif, dan spasial (THIS) dalam penetapan program dan kegiatan K/L/D ▪ Kesepakatan global 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengalokasikan pembiayaan berdasarkan prioritas nasional pada sektor dan proyek strategis nasional yang berkelanjutan ▪ Pengembangan model investasi publik dan portofolio pembiayaan pembangunan ▪ Melakukan kajian terkait koordinasi kelembagaan yang terlibat berikut sumber daya manusianya dan pembiayaannya ▪ Melakukan evaluasi capaian target pembangunan sebelumnya dan kajian untuk penentuan asumsi <i>baseline</i> kondisi terkini ▪ Mengalokasikan sumber daya dan berperan aktif dalam menyelesaikan isu global 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengendalian pembangunan yang menjamin tercapainya hasil pembangunan (<i>outcome</i>) ▪ Pendampingan dan penguatan terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait dengan pencapaian proyek strategis nasional ▪ Koordinasi intensif dengan K/L terkait, konsultasi publik dan penguatan peran Kemenko ▪ Koordinasi lintas pelaku pembangunan dengan K/L, pemerintah daerah, akademisi, dan kunjungan lapangan ▪ pelibatan peran serta para pelaku pembangunan beserta menjadi <i>vocal point</i> untuk koordinasi penanganan isu global tersebut 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan kebijakan inovasi pembangunan yang bersifat lintas sektor sesuai dengan proyek strategis nasional ▪ Pengkajian dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan dan kebijakan lainnya. ▪ Penguatan kapasitas perencanaan di pusat dan di daerah dalam menciptakan mekanisme pendanaan yang inovatif dan kreatif ▪ Sinkronisasi kelembagaan dan regulasi terkait investasi publik yang memadai ▪ Sinkronisasi dan sinergitas kebijakan strategis nasional, serta kegiatan lintas Kemenko ▪ Meningkatkan peran serta kemitraan non pemerintah serta kegiatan lintas Kemenko ▪ Penguatan peran Kementerian PPN/Bappenas sebagai <i>think-tank</i> untuk menyusun perencanaan yang lebih inovatif dan visioner
Pelaksanaan dari peran Perencanaan dan Alokasi dilakukan melalui kapasitas Kementerian PPN/Bappenas sebagai Pengambil Keputusan, Koordinator, <i>Think-tank</i> , dan Administrator		Pelaksanaan dari peran Pengendalian dilakukan melalui kapasitas Kementerian PPN/Bappenas sebagai Pengambil Keputusan, Koordinator, dan <i>Think-tank</i>	Pelaksanaan dari peran <i>Enabler</i> dilakukan melalui kapasitas Kementerian PPN/Bappenas sebagai <i>Think-tank</i>

Sumber: Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024

Merujuk pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024, pada tahun 2020 ini Bappenas mulai dengan kebiasaan yang baru dan semangat kerja baru pula. Bappenas sedang menjalankan penguatan peran sebagai *Clearing House* untuk lebih mengefektifkan Perencanaan, Pengalokasian, Pengendalian, dan *Enabler* dalam pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Presiden RI.

Peran *Clearing House* ini Bappenas tetap diorientasikan untuk semakin mengefektifkan pelaksanaan UU 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan PP 17/2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (SP4N), terutama dalam memastikan proyek-proyek prioritas yang telah ditetapkan dalam koridor Prioritas Nasional (PN) *terdelivered*. Dengan demikian berarti Bappenas mengkondisikan perencanaan yang semakin berkualitas.

Untuk memastikan perencanaan yang semakin berkualitas dan memperkuat pendekatan Tematik, Holistik, Integrasi, dan Spasial (THIS), Bappenas terus melakukan perbaikan dalam proses perencanaan untuk menjalankan peran *Clearing House*, seperti:

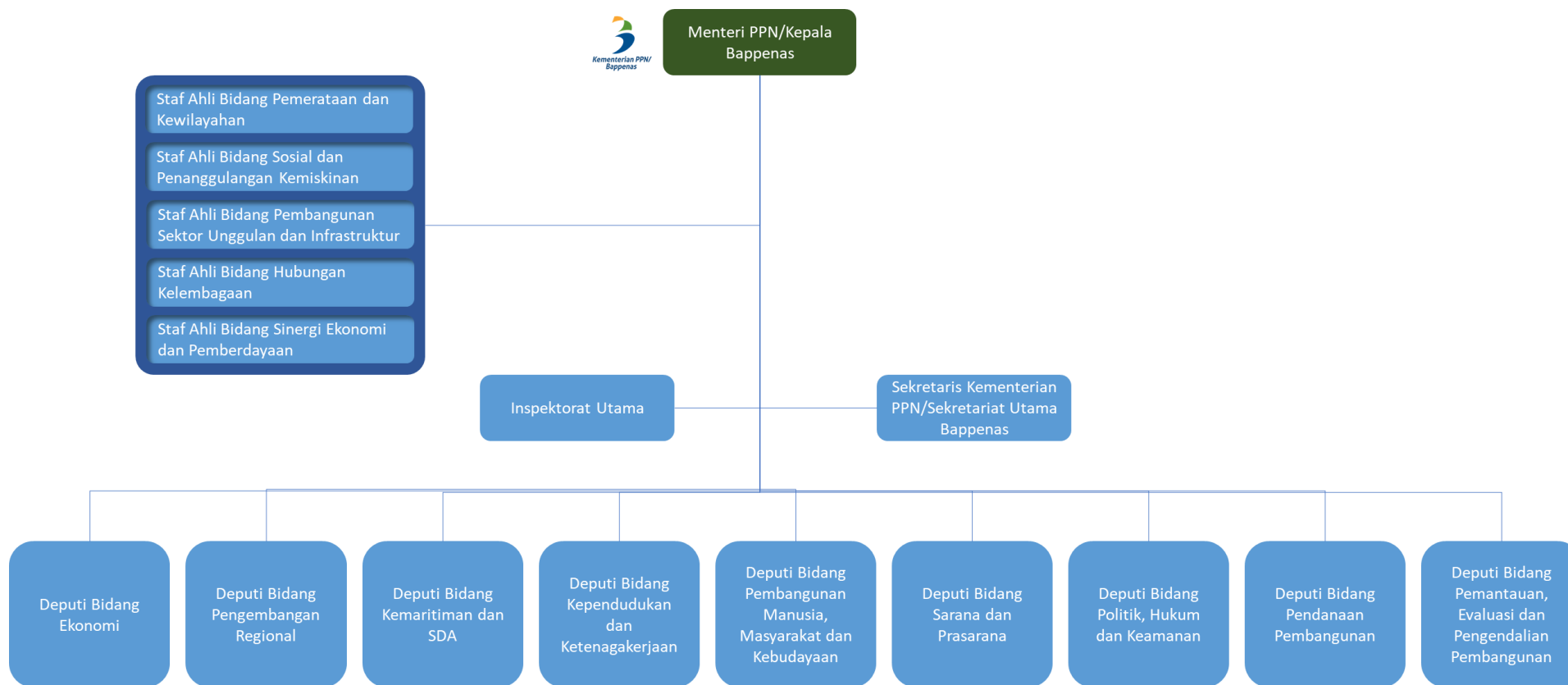
1. penetapan proyek prioritas yang paling strategis dan memerlukan harmonisasi lintas proyek K/L untuk dibahas dan dikawal oleh Bappenas untuk memastikan pencapaian sasaran/target PN;
2. perbaikan mekanisme dan *output* tiap tahapan proses perencanaan terutama proses bilateral, rakortek, multilateral, trilateral, musrenbangprov, multilateral/multipihak, musrenbangnas, penelaahan Renja dan RKA K/L;
3. penambahan aktivitas perencanaan diantaranya kunjungan kerja di 34 provinsi pada awal perencanaan, rakorgub, hingga tahapan trilateral kinerja Renja K/L.

Penguatan peran Kementerian PPN/Bappenas tersebut tentunya menjadi modal bagi perbaikan kinerja organisasi selanjutnya, sebagaimana *quick wins* Reformasi Birokrasinya (RB) Kementerian PPN/Bappenas salah satunya adalah Revitalisasi Pelaksanaan PP 17 tahun 2017.

1.2.2. Struktur Organisasi Kementerian PPN/Bappenas

Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas, Menteri PPN/Kepala Bappenas dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibantu oleh Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas, Inspektur Utama, 9 (sembilan) Deputi, dan 5 (lima) Staf Ahli. Selain itu, terdapat 5 (lima) unit kerja Biro, 2 (dua) unit kerja Inspektorat, dan 42 (empat puluh dua) unit kerja Direktorat. Disamping itu, terdapat 3 (tiga) pusat, yaitu (1) Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren); (2) Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan (Pusdatinrenbang); dan (3) Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja (PAKK). Namun demikian, struktur organisasi tersebut baru diterapkan melalui pelantikan pejabat terkait pada 18 September 2020 (secara efektif). Struktur organisasi Kementerian PPN/Bappenas dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Eselon I Kementerian PPN/Bappenas



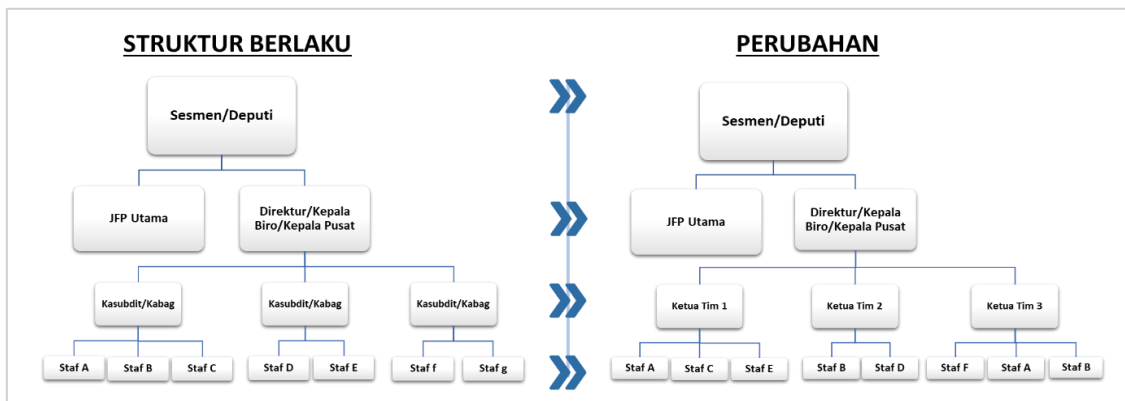
Keterangan: setiap UKE I memiliki beberapa UKE II

Sumber : Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 9 Tahun 2019

Menindaklanjuti arahan Presiden RI untuk melakukan penyederhanaan birokrasi menjadi 2 (dua) level eselon guna menciptakan birokrasi yang lebih ramping dan efisien, sehingga birokrasi berjalan lebih dinamis, *agile*, dan profesional, tindak lanjut arahan tersebut dengan melakukan pengalihan Jabatan Administrasi (abatan struktural eselon III, IV, dan V) menjadi Jabatan Fungsional yang lebih menghargai keahlian dan kompetensi. Dan arahan Wakil Presiden RI pada Rapat Koordinasi Penyederhanaan Birokrasi tanggal 11 Agustus 2020, bahwa birokrasi harus mampu bekerja secara efektif dan efisien sekaligus proaktif dalam menghadapi permasalahan yang semakin kompleks dan dapat bergerak secara dinamis apabila memiliki struktur yang proporsional sesuai dengan kebutuhan yang ada.

Hal tersebut berimplikasi pada pengalihan jabatan struktural tersebut menjadi jabatan fungsional. Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian PPN/Bappenas menerapkan mekanisme kerja *Integrated Digital Workspace (IDW)* dan *Smart Office*. Penerapan mekanisme ini diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas kinerja pegawai di Kementerian PPN/Bappenas. Inisiatif ini untuk mendukung mekanisme kerja sesudah adanya penyederhanaan birokrasi. Kemudian, Bappenas melakukan perubahan Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas dan telah dilakukan pelantikan terhadap beberapa pejabat terkait pada 23 Desember 2020. Adapun skema perubahan alut kerja dimaksud dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 1.2. Perubahan Alur Kerja Kementerian PPN/Bappenas



Sumber: Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024

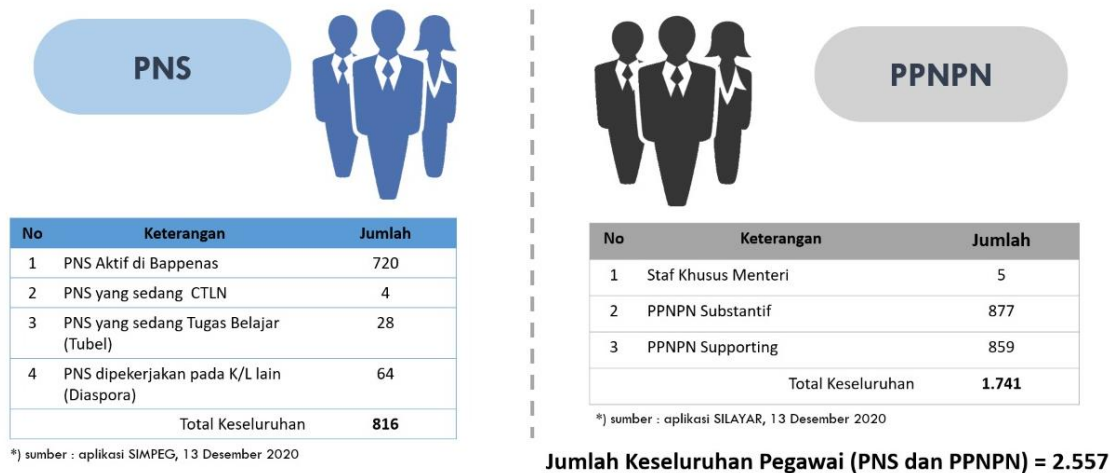
Penataan dimaksud guna penguatan fungsi, penataan struktur organisasi termasuk kebijakan penyederhanaan birokrasi. Dengan adanya kebijakan penyederhanaan birokrasi dan semakin berkembangnya penugasan-penugasan strategis Kementerian PPN/Bappenas maka ke depannya struktur organisasi akan mengarah kepada struktur organisasi yang semakin fungsional dan berbasis keahlian. Peran ini akan dilakukan secara terkoordinir baik oleh para Pejabat Tinggi Madya dan Pratama serta secara keahlian dilakukan oleh para Jabatan Fungsional Perencana dan Jabatan Fungsional Tertentu lainnya sesuai bidangnya.

Pembagian peran tersebut dalam rangka melakukan arah kebijakan dan strategi Kementerian PPN/Bappenas adalah (1) Pejabat Madya dan Pratama akan berperan sebagai pemberi arahan strategis dalam proses penyusunan perencanaan dan pembangunan serta peran manajerial; (2) Staf Ahli akan berperan sebagai *quality assurance* dan supervisi pelaksanaan tugas-tugas strategis sesuai bidangnya dan penugasan khusus; dan (3) Jabatan Fungsional Perencana (JFP) dan Jabatan Fungsional Tertentu lainnya akan menjadi *think-tank* berdasarkan keahlian bidangnya.

1.3. SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

Kementerian PPN/Bappenas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk menghasilkan rencana pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis dan kredibel perlu didukung oleh sumber daya manusia yang andal. Untuk itu, diperlukan sumber daya manusia yang memahami proses bisnis serta didukung oleh kuantitas, kualitas dan kompetensi.

Gambar 1.2. Kekuatan SDM Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020



Sumber : Biro SDM Kementerian PPN/Bappenas, Desember 2020

Sampai dengan akhir tahun 2020, jumlah pegawai ASN Kementerian PPN/Bappenas sebanyak 2.557 orang terdiri atas pegawai PNS sebanyak 816 orang (31,91%) dan pegawai PPNP sebanyak 1.741 orang (68,09%). Namun demikian, jumlah pegawai PNS yang aktif di Kementerian PPN/Bappenas hanya 720 orang (28,16%) sisanya 28 orang PNS sedang Tugas Belajar dan 64 orang PNS dipekerjakan pada K/L lain. Sementara itu, terdapat tambahan hasil CPNS 2019 sebanyak 103 orang atau masih di bawah target kebutuhan PNS sebesar 287 orang (Data Biro SDM, 2020). Selanjutnya untuk mendapatkan rencana kebutuhan SDM yang tepat baik jumlah maupun kompetensinya, saat ini sedang disusun Analisis jabatan dan Analisis Beban kerja, untuk selanjutnya menjadi acuan dalam pengisian ASN PNS maupun PPNP.

Seiring dengan penambahan dan penguatan peran Kementerian PPN/Bappenas dalam revitalisasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional dibutuhkan sumber daya untuk mencapai tantangan tersebut diantaranya dilakukan dengan penambahan SDM dan pengembangan kompetensi, serta perbaikan tata kelola kegiatan dan anggaran.

Selain itu, kejadian wabah pandemik Covid-19 sejak awal tahun 2020 mendesak Kementerian PPN/Bappenas mengambil langkah preventif untuk memutus rantai penularan Covid-19. Salah satunya adalah dengan menerapkan kerja dari rumah atau *Work from Home* (WFH). Hal ini mengakibatkan penyesuaian sistem kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam upaya pencegahan dan meminimalisasi penyebaran Covid-19 di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas.

Penyesuaian sistem kerja tersebut tidak membuat ASN Kementerian PPN/Bappenas patah arang dalam menjalankan pelayanan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional. Pada masa adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman COVID-19, Kementerian PPN/Bappenas mempersiapkan sarana dan prasarana mitigasi serta penyesuaian sistem kerja bagi pegawai. Penyesuaian sistem kerja pegawai dalam transisi menuju tatanan normal baru di Kementerian PPN/Bappenas tetap dilaksanakan melalui mekanisme *Integrated Digital Workspace dan Smart Office* sebagaimana telah dijalankan sejak Desember 2019. Implementasi *Integrated Digital Workspace dan Smart Office* (IDW dan SO) tersebut diintegrasikan dengan sistem kerja yang telah diatur oleh Kementerian PPN/Bappenas serta penerapan protokol kesehatan dan keamanan selama bekerja.

Sistem kerja IDW-SO ini merupakan terobosan inovasi Kementerian PPN/Bappenas yang dirancang untuk memungkinkan ASN Kementerian PPN/Bappenas berperan aktif sebagai *clearing house* program, juga memperkuat kerja sama di antara para perencana, serta sebagai sarana *knowledge sharing* dan penguatan metode analisis perencanaan pembangunan, sehingga produk perencanaan pembangunan semakin berkualitas. IDW-SO tidak merubah kultur kerja menjadi lebih fleksibel waktu dan tempat namun target tercapai. Implementasi sistem IDW-SO ini mendapat kunjungan Presiden RI pada 16 Januari 2020. Presiden meninjau langsung bagaimana sistem IDW diimplementasikan, juga berbagai fungsi yang dapat digunakan untuk menunjang produktivitas dan kinerja ASN Kementerian PPN/Bappenas dalam pelaksanaan tugas di bidang penganggaran, perencanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pembangunan.

Penyelenggaraan IDW-SO yang bertujuan untuk peningkatan efektifitas pegawai bekerja dari rumah akibat dampak wabah Covid-19. Kedepan, penyelenggaraan sistem IDW - SO terus ditingkatkan. Adanya kondisi restrukturisasi yang di mulai September 2020, sistem IDW justru membantu meningkatkan produktivitas dan kualitas kinerja pegawai di Kementerian PPN/Bappenas karena struktur IDW telah mendukung skema penugasan sesuai arahan penyederhanaan birokrasi.

1.4. POTENSI DAN PERMASALAHAN STRATEGIS

1.4.1. Potensi Strategis

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas memiliki potensi strategis, antara lain:

1. **Penguatan peran Kementerian PPN/Bappenas sebagai *clearing house* perencanaan dan pembangunan prioritas nasional.** Sesuai amanat Presiden RI dalam Sidang Kabinet Paripurna RPJMN 2020-2024 untuk memperkuat peran Kementerian PPN/Bappenas sebagai *clearing house* yang memastikan: (1) konsistensi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dalam RKP 2021; (2) seluruh rencana pembangunan prioritas nasional dijalankan oleh K/L maupun di daerah sesuai dengan RPJMN 2020-2024 dan RKP 2020, termasuk kegiatan *Major Project*, dan (3) pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan RKP 2020. Peran *clearing house* tersebut termasuk memastikan sasaran pokok serta prioritas nasional sampai level proyek prioritas terintegrasi dengan rencana strategis setiap kementerian sesuai kewenangan Bappenas dalam amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.
2. **Kementerian PPN/Bappenas sebagai penyeimbang dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional serta pelaksanaan pembangunan nasional.** Hal ini dimungkinkan dengan adanya fungsi pengendalian pembangunan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.
3. **Penyelenggaraan penguatan data dan informasi perencanaan pembangunan nasional.** Kementerian PPN/Bappenas memiliki peran sebagai Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat yang bertujuan untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Hal ini perlu didukung dengan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, baik di Pusat maupun Daerah, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan.
4. **Kompetensi dan kemampuan pegawai Kementerian PPN/Bappenas yang telah cukup memadai** dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna menghasilkan rencana pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis dan kredibel.
5. **Penerapan mekanisme kerja melalui *Integrated Digital Workspace (IDW)* dan *Smart Office (SO)*.** Kementerian PPN/Bappenas berupaya untuk meningkatkan kinerja pegawai yang lebih transparan dan terukur melalui sistem teknologi informasi sehingga pegawai lebih produktif menjalankan WFH (*Work from Home*) di masa pandemi Covid-19.

1.4.2. Permasalahan Strategis

Kementerian PPN/Bappenas dalam menjalankan tugas dan fungsinya, masih dihadapkan pada berbagai permasalahan antara lain:

1. **Belum optimalnya koordinasi antar sektor untuk melaksanakan perencanaan pembangunan yang tematik, holistik, terintegrasi dan spasial (THIS).** Hal ini menyebabkan sasaran dan target Prioritas Nasional belum sepenuhnya tercapai.
2. **Adanya peran dan kewenangan besar dari lembaga legislatif dalam mengarahkan alokasi anggaran** yang berpotensi mengurangi keselarasan antara perencanaan dan penganggaran.
3. **Belum terintegrasinya seluruh sistem data dan informasi perencanaan pembangunan di masing-masing K/L dan daerah.** Hal ini yang ditunjukkan oleh belum optimalnya koordinasi pelaksanaan Satu Data Indonesia di tingkat pusat dan tingkat daerah.
4. **Masih lemahnya pengelolaan SDM** yang ditunjukkan oleh (i) belum tersedia analisis beban kerja sehingga perencanaan kebutuhan sumber daya manusia belum didukung oleh data yang memadai; (ii) belum diterapkannya hasil analisis potensi ASN sehingga penempatan sumber daya manusia masih belum sepenuhnya sesuai latar belakang pendidikan dan keahlian; dan (iii) belum terpenuhinya jumlah ASN yang dibutuhkan untuk mendukung kinerja Kementerian PPN/Bappenas.
5. **Belum optimalnya pengelolaan *Integrated Digital Workspace (IDW)* dan *Smart Office (SO)*** masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas.

2

Perencanaan Kinerja



BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS 2020-2024

Kualitas rencana pembangunan nasional dicerminkan dalam bentuk integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah, serta adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Peningkatan kualitas tersebut, harus didukung oleh penguatan kapasitas Kementerian PPN/Bappenas. Dalam rangka mewujudkan Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, maka Visi Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024 adalah:

“Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas dan kredibel untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Sejalan dengan itu, pengertian kata berkualitas, sinergis dan kredibel terkait dengan pernyataan visi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Berkualitas : 1) perencanaan yang dihasilkan menjadi acuan/pedoman bagi Kementerian/Lembaga/Daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan dan melaksanakan program dan kegiatannya masing-masing;

2) produk perencanaan dan penganggaran yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara selaras antar sektor, antara pusat dan daerah, dan antardaerah; dan

3) kelembagaan menerapkan prinsip-prinsip *good and clean governance*.

Kredibel : perencanaan yang berdasarkan pertimbangan atas pengetahuan, informasi, dan data yang terkini (*evidence based*) dengan mekanisme pelaksanaan (*delivery mechanism*) secara partisipatif dan berorientasi ke depan.

Dalam rangka mencapai visinya tersebut, dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan perencanaan yang mampu mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian kemajuan dan kesejahteraan bangsa.
2. Memperkuat kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien.

Selanjutnya berdasarkan visi dan misi tersebut ditetapkan tujuan Kementerian PPN/Bappenas sebagai berikut:

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia.
2. Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
3. Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien.

Untuk mendukung pencapaian tujuan telah ditetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan/dicapai oleh Kementerian PPN/Bappenas yaitu:

1. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional.
2. Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional.
3. Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner.
4. Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM.

Untuk mengukur pencapaian sasaran strategis tersebut, telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta targetnya yang dijabarkan pertahun. Penetapan IKU tersebut menggunakan kriteria SMART-C yaitu *Specific* (spesifik), *Measurable* (dapat diukur), *Agreeable* (dapat disetujui), *Realistic* (realistis), dapat dicapai namun menantang, *Time-bounded* (memiliki batas waktu pencapaian), dan *Countinously improved* (dapat disesuaikan dengan perkembangan strategi oganisasi).

Seluruh Unit Kerja di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas terlibat dalam pencapaian outcome IKU dimaksud, namun pengukuran sasaran terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan professional dengan indikator indeks RB dinilai oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Penetapan target kinerja tahun 2020 berdasarkan Renstra 2020-2024 dengan mempertimbangkan capaian tahun 2019 serta kesepakatan seluruh pimpinan Unit Kerja di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas.

Mengingat penetapan Renstra Kementerian PPN/Bappenas tahun 2020-2024 serta adanya pelantikan beberapa Pimpinan Tinggi Pratama sesuai SOTK baru menjelang akhir tahun 2020, maka telah ditetapkan melalui rapat pimpinan bahwa pengukuran capaian IKU 2020 berdasarkan PK 2020 dengan menggunakan IKU 2015-2019 yang di-*bridging* ke IKU 2020-2024, artinya seluruh pengukuran IKU 2020 menggunakan kamus IKU 2015-2019 tetapi penyajiannya dikonversi ke IKU 2020-2024.

Pada tahun 2020 ini merupakan tahun transisi/transformasi kelembagaan di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas. Hal ini dikarenakan adanya perubahan antara IKU 2015-2019 dengan IKU 2020-2024. Secara substansi IKU tersebut masih berkaitan namun lebih ditingkatkan supaya terwujud IKU yang SMART dan dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan nasional serta menjamin tercapainya sasaran strategis agar lebih optimal.

Pada tahun 2020 terdapat perubahan/penambahan sasaran dan IKU yang tujuannya untuk mempertajam kinerja Kementerian PPN/Bappenas, Perubahan dimaksud sebagai berikut:

- Perubahan sasaran strategis dari “Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas, sinergi, dan kredibel” dengan 3 (tiga) IKU, yakni: IKU 1 “Persentase (%) keselarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana kerja Kementerian/Lembaga/Daerah; IKU 2 “Rancangan Perpres RKP”; dan IKU 3 “Persentase (%) rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti K/L” menjadi sasaran strategis “Terwujudnya integrase, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional” dengan 5 (lima) IKU, yaitu: IKU 1 “Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional”; IKU 2 “Persentase Rencana yang Memenuhi Standar Kompetensi”; IKU 3 “Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional”; IKU 4 “Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L”; dan IKU 5 “Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L”.
- Perubahan sasaran strategis dari “Manajemen Tata Kelola Pemerintah di Kementerian PPN/Bappenas yang baik dan bersih” dengan 1 (satu) IKU “Tingkat Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kementerian PPN/Bappenas” menjadi sasaran strategis “Terwujudnya Kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM” dengan 3 (tiga) IKU, yakni IKU 1 “Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas”; IKU 2 “Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional”; dan IKU 3 “Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional”.

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.1. Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Renstra 2020-2024

Visi Indonesia	Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong									
Visi Bappenas	Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas dan kredibel untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong									
Misi Bappenas	Perencanaan yang mampu mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian kemajuan dan kesejahteraan bangsa						Menguatkan kapasitas kelembagaan perencana pembangunan yang efektif dan efisien.			
Tujuan	Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia.			Mewujudkan daya tanggap dan model inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan			Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien.			
Sasaran	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional			Terwujudnya Efektivitas Pengendalian Pembangunan Nasional		Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner			Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM	
Indikator Sasaran	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional	Persentase Perencana yang Memenuhi Standar Kompetensi	Kinerja Proses Pengendalian Pembangunan Nasional	Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang Dijalankan Oleh K/L	Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang Dijalankan oleh K/L	Indeks RB	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional	Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional		

Sumber : Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024

Sementara itu, rincian IKU Kementerian PPN/Bappenas tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) level Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020

Tujuan Bappenas	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Unit Penanggungjawab
Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia	1 SS-1: Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional	IKU 1: Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional. a. Integrasi Perencanaan Pembangunan Pusat b. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pusat c. Sinergi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah	Semua Kedeputan, kecuali Staf Ahli Menteri, Kedeputan Pendanaan Pembangunan dan Kedeputan PEPP
		IKU 2: Persentase Perencana yang Memenuhi Standar Kompetensi	Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas
Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan	3 SS-3: Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner	IKU 3: Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional a. Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat b. Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah	Kedeputan PEPP
		IKU 4: Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L	Semua Kedeputan dan Staf Ahli Menteri
Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien	4 SS-4: Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM	IKU 5: Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L	Semua Kedeputan dan Staf Ahli Menteri
		IKU 6: Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas	Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas, termasuk Inspektorat Utama
		IKU 7: Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder</i>) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional	Seluruh Unit Kerja Kementerian PPN/Bappenas
		IKU 8: Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional	Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas

Sumber: Renstra Kementerian PPN/Bappenas (diolah, 2020)

2.2. PERAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS DALAM PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

Proses penyusunan RKP 2021, Kementerian PPN/Bappenas menggunakan pendekatan penyusunan yang *money follows program* berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Artinya bahwa perencanaan pembangunan nasional memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional/program prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan. Sedangkan kebijakan *money follows program* yang memastikan bahwa anggaran dialokasikan berdasarkan program yang benar-benar bermanfaat kepada rakyat, bukan sekedar untuk pembiayaan tugas fungsi K/L yang bersangkutan. Untuk menghasilkan dokumen perencanaan tersebut Kementerian PPN/Bappenas menggunakan peran dan fungsi sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab 1.

Dalam RKP 2021, pemerintah mencanangkan 7 Prioritas Nasional dan 39 Program Prioritas serta beberapa *Major Project* (Proyek Prioritas Strategis) yang selanjutnya dalam program prioritas, kegiatan prioritas dan proyek prioritas nasional yang didukung oleh seluruh Kementerian/Lembaga yang terkait. Berkaitan dengan hal tersebut, Kementerian PPN/Bappenas menjadi lembaga integrator yang mampu mengintegrasikan program-program pembangunan yang menjadi prioritas nasional berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Selain itu, Bappenas punya peran pengendalian dan evaluasi pembangunan RKP 2020 terdiri atas 5 Prioritas Nasional dan 25 Program Prioritas. Oleh karena itu, Kementerian PPN/Bappenas mengambil peran *clearing house* program pembangunan sesuai arahan Presiden, penugasannya untuk memastikan:

- Seluruh rencana pembangunan (K/L dan instansi lainnya) sesuai dengan RPJMN/RKP dengan mengoordinasikan dan mensinergikan program pembangunan K/L, BUMN, Daerah dan lainnya.
- Memastikan rencana pembangunan konsisten dengan penganggarnya dengan bersama Kemenkeu mengalokasikan anggaran sesuai dengan RKP.
- Mengendalikan pelaksanaan rencana pembangunan dengan mengintegrasikan sistem informasi dan data perencanaan dan penganggaran untuk mengendalikan prioritas.

Berkaitan dengan Proyek Prioritas Strategis (*Major Projects*) dalam RPJMN 2020-2024 dimana telah menjadi fokus dalam penyusunan perencanaan dan pendanaan RKP 2021, maka peran *clearing house* program pembangunan Kementerian PPN/Bappenas hadir untuk:

- Memastikan tindak lanjut prioritas hasil pembahasan Menteri dan Gubernur.
- Memastikan kesiapan Pemerintah Daerah tentang lahan, perijinan, dan lainnya.
- Mendorong sinergi pendanaan melalui K/L, DAK, BUMN dan masyarakat.
- Memperkuat pengendalian dan evaluasi (*safeguarding*) untuk menjamin manfaat nyata dan langsung bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah.

Hal tersebut di atas telah dibuktikan Kementerian PPN/Bappenas salah satunya dengan pelaksanaan kegiatan kunjungan kerja bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas di tahun 2020 di 6 (enam) Provinsi. Kunjungan kerja tersebut terobosan baru yang dilakukan guna mewujudkan penguatan peran *enabler* dan *clearing house* Kementerian PPN/Bappenas dalam pengendalian pembangunan RKP 2020 sekaligus persiapan pelaksanaan pembangunan RKP 2021

Selain penguatan peran baru Bappenas dalam hal perencanaan, pengalokasian, pengendalian, dan *enabler* dan implementasi *clearing house*, Bappenas juga mempunyai peran dalam hal penguatan sinergi perencanaan pembangunan pusat dan daerah. Hal tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan pertemuan antara Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Gubernur sebagai salah satu *milestone* RKP 2021 untuk membahas proyek prioritas nasional dan *major project* yang akan menjadi fokus pembangunan dan berfungsi sebagai ajang sinergi perencanaan pusat dan daerah dan selanjutnya dilakukan tindak lanjut atas pertemuan tersebut

Kondisi di atas merupakan salah satu tujuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional untuk mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan dan menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. Hal ini sejalan dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Kemudian, dalam upaya mendukung keberhasilan pencapaian sasaran dan target pembangunan nasional, penyelarasan perencanaan pembangunan menjadi kunci bagi sinergi pembangunan antara pusat dan daerah. Dengan pertimbangan tersebut, Kementerian PPN/Bappenas bersama dengan Kementerian Dalam Negeri menyusun pedoman dalam rangka Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Hal ini diwujudkan dalam Surat Edaran Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri dimana Kementerian PPN/Bappenas menjadi inisiator.

Kementerian PPN/Bappenas telah menyusun petunjuk pelaksanaan penyelarasan Perencanaan Jangka Menengah Daerah terhadap Perencanaan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 bertujuan untuk: (1) Menciptakan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di tingkat pusat dan daerah; (2) Mewujudkan RPJMD yang harmonis dengan RPJMN 2020-2024; (3) Menjamin sinkronisasi kebijakan-kebijakan di dalam RPJMD dengan RPJMN 2020-2024; dan (4) Menjamin hadirnya dukungan perencanaan daerah terhadap sasaran, program dan target pembangunan nasional. Upaya penyelarasan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- **Penyelarasan Target Indikator Makro**

Penyelarasan ini dimaksudkan untuk menjamin sinergi dukungan pemerintah daerah dalam pencapaian Target Indikator Makro nasional. Hal ini bertujuan untuk mendorong daerah merumuskan dan menyelaraskan pencapaian target yang mendukung pencapaian target nasional.

- **Penyelarasan Program Prioritas**

Penyelarasan ini dimaksudkan untuk menjamin sinergi program prioritas pemerintah daerah yang selaras dengan program prioritas nasional. Hal ini bertujuan untuk mendorong daerah merumuskan dan menyelaraskan program perangkat daerah dengan indikator kinerja program yang selaras dan/atau mendukung program prioritas nasional.

2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

. Perjanjian Kinerja (PK) merupakan pernyataan komitmen pimpinan untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020 dilaksanakan merujuk Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Salah satu tujuan Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara pemberi dengan penerima amanah. Perjanjian Kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta sebagai evaluasi kinerja aparatur.

Perjanjian kinerja tingkat kementerian tahun 2020 telah disusun dan ditandatangani oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas. Kinerja inilah yang selanjutnya dijabarkan (*cascading*) menjadi kinerja seluruh unit kerja dan pegawai sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kinerja pada level Kementerian PANRB berisi indikator Kinerja Utama (IKU) yang mencakup sasaran, indikator kinerja, dan target sebagai berikut:

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Menteri PPN/Kepala Bappenas Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1. Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel	1.1. Persentase (%) keselarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana kerja Kementerian/Lembaga/Daerah	100%
	1.2. Rancangan Perpres RKP 2020	1 dokumen
	1.3. Persentase (%) rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti K/L	100%
2. Manajemen tata kelola pemerintah di Kementerian PPN/Bappenas yang baik dan bersih	2.1. Tingkat kualitas tata kelola pemerintahan Kementerian PPN/Bappenas	Baik

Sumber: Perjanjian Kinerja Menteri PPN/Bappenas Tahun 2020 (diolah, 2020)

Perjanjian Kinerja Menteri PPN/Kepala Bappenas ditandatangani pada bulan Januari 2020 yang kemudian diikuti oleh seluruh pejabat struktural yang mencakup Eselon I, II, III dan IV yang isinya merupakan penjabaran (*cascading*) dari IKU Kementerian PPN/Bappenas.

Perlu diketahui bahwa IKU 2020 tersebut masih menggunakan IKU 2015-2019 sampai akhir anggaran tahun 2020 namun pelaporan kinerja di-*bridging* ke IKU 2020-2024. Dokumen Perjanjian Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020 disajikan dalam **Lampiran-1**.

Sebagai bentuk akuntabilitas, IKU Kementerian PPN/Bappenas tahun 2020 telah diturunkan menjadi indikator kinerja di tingkat Unit Kerja Eselon I dan II sesuai bidangnya, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2 Pemetaan *Cascading* IKU Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020

Sasaran Strategis	Sasaran Program	Nb	Indikator Kinerja Utama	Target	IKU UKE I/II	Target						
Perencanaan Pembangunan Nasional yang Berkualitas, Sinergis, dan Kredibel	Perencanaan Pembangunan Nasional yang Berkualitas, Sinergis, dan Kredibel	1.	Prosentase (%) keselarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana kerja Kementerian/ Lembaga/Daerah	100%	Prosentase (%) keselarasan muatan RKP dengan RPJMN lingkup...	100%						
					% keselarasan muatan Renja K/L dengan RKP lingkup...	100%						
					% keselarasan muatan RKA K/L dengan RKP lingkup...	100%						
					% keselarasan muatan RKP Provinsi dengan RKP (Khusus Dep Regional/ Dit PWK)	80%						
Manajemen Tata Kelola Pemerintahan Kemen. PPN/Bappenas yang Baik dan Bersih	Tersedianya Pelayanan dan Dukungan Proses Perencanaan Pembangunan Nasional yang Baik dan Bersih	2.	Rancangan Perpres RKP 2019	1 Dokumen	Rancangan Perpres RKP Tahun 2019 lingkup bidang...	1 Dok						
					3.	Prosentase (%) rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti K/L	100%	Prosentase (%) rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti K/L	100%			
								4.	Tingkat kualitas tata kelola pemerintahan Kementerian PPN/Bappenas	Baik	Skor RB K/L	A
											Tingkat kepuasan pelayanan internal dan pelayanan publik	Baik
Tersedianya Sarpras Aparatur Pelaks Tusi Kemen PPN/Bappenas	Terlaksananya Pengawasan Akuntabilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kemen PPN/ Bappenas	4.	Tingkat kualitas tata kelola pemerintahan Kementerian PPN/Bappenas	Baik	Skor evaluasi AKIP	A						
					Opini BPK	WTP						
					% penyelesaian rumusan Peraturan Perundangan lingkup Perencanaan pembangunan nasional	100%						
					% tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang sesuai dengan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	100%						
					% Penyelesaian Program kerja Pengawasan Tahunan (melalui peran Assurance dan Advisory) di Kementerian PPN/Bappenas	100%						
					% Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dan Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti oleh Unit Kerja di Kementerian PPN/Bappenas	100%						
					Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Kementerian PPN/Bappenas	Level 3						
Tingkat Persepsi Stakeholders Inspektorat Utama atas Pemberian Nilai Tambah dalam Pencapaian Tujuan Kemen PPN/Bappenas	Baik											

Sumber: Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015-2019 (diolah, 2020)

2.4. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2020

Sejak tahun 2019, Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan penyempurnaan manajemen kinerja internal agar dapat memberikan pelayanan di bidang perencanaan secara optimal melalui penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU) lembaga. Penyempurnaan tersebut diharapkan dapat mencerminkan kinerja yang lebih akuntabel dan sebagai upaya terobosan yang dilakukan dalam mengkoordinasikan dan memastikan pencapaian sasaran perencanaan pembangunan nasional khususnya pada Prioritas Nasional-Proyek Prioritas-Kegiatan Prioritas (PN-PP-KP) dan bidang yang dijalankan oleh Kementerian/ Lembaga/Daerah. Penyempurnaan ini didasari atas kondisi bahwa: 1) IKU belum mencerminkan kinerja konkrit Kementerian PPN/Bappenas, sehingga tugas/output yang

dihasilkan belum/tidak dapat dijelaskan kinerja capaiannya; 2) kinerja sulit untuk diukur; serta 3) belum adanya *cascading* indikator kinerja organisasi ke indikator kinerja individu.

Mengingat IKU tahun 2020 sebagian masih menggunakan IKU Tahun 2015-2019, namun secara substansi pengukuran kinerjanya telah diarahkan atau dilakukan penajaman terhadap IKU periode 2020 – 2024. Adapun pemetaan IKU tahun 2020 menuju rancangan IKU Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3. Pemetaan IKU Perjanjian Kinerja Menteri PPN/Kepala Bappenas Tahun 2020-2024

Tujuan Bappenas	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama (IKU)
Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia	1	SS-1: Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional. a. Integrasi Perencanaan Pembangunan Pusat b. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pusat c. Sinergi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah
			Persentase Perencana yang Memenuhi Standar Kompetensi
	2	SS-2: Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional	Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional a. Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat b. Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah
Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan	3	SS-3: Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner	Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L
			Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L
Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien	4	SS-4: Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM	a. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas
			b. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder</i>) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional
			c. Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional

Sumber: Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024 (diolah, 2020)

Berdasarkan pemetaan IKU 2015-2019 ke IKU 2020-2024 secara detail dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.2. Konsep *Bridging* I IKU 2015-2019 ke IKU 2020-2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2015-2019			INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2020-2024							
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET 2015-2019	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET 2020	TARGET 2021	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	
SS-1: Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel	1. Persentase (%) keselarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana kerja Kementerian/Lembaga/Daerah	100%	Masuk IKU UKE 1 dan UKE 2	SS-1: Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional.					
	2. Rancangan Perpres RKP	1 dok			a. Integrasi Perencanaan Pembangunan Pusat	75	80	85	90	95
	3. Persentase (%) rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti K/L	100%			b. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pusat dan Daerah					
SS-2: Manajemen tata kelola pemerintah di Kementerian PPN/Bappenas yang baik dan bersih	Tingkat kualitas tata kelola pemerintahan Kementerian PPN/Bappenas	Baik		SS-2: Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional	Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional					
				SS-3: Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner	a. Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat	80-83,9%	84-87,9%	88-91,9%	92-95,9%	96-100%
				SS-4: Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM	b. Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah					
					3.1. Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L	85-87,9%	88-90,9%	91-93,9%	94-96,9%	97-100%
					3.2. Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L	75-79,9%	80-84,9%	85-89,9%	90-94,9%	95-100%
				a. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas	83,00	86,00	90,00	90,50	91,00	
				b. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional	85	88	90	92	95	
				c. Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional	85%	88%	90%	92%	95%	

Sumber: Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024 (diolah, 2020)

Dari pemetaan tersebut dapat dijelaskan *bridging* dari IKU 2015-2019 ke IKU 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Indikator kinerja Menteri PPN/Kepala Bappenas yang pertama, yaitu Prosentase (%) keselarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana kerja Kementerian/Lembaga/Daerah yang diterjemahkan dalam indikator kinerja di level UKE I diubah menjadi **Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional** dan diukur melalui 3 (tiga) penilaian, yaitu integrasi, sinkronisasi dan sinergi.

Indeks perencanaan pembangunan nasional ini bertujuan untuk mengukur tingkat keterpaduan (integrasi, sinkronisasi, dan sinergi) perencanaan pembangunan nasional, termasuk konsistensi antara perencanaan dan penganggaran dalam lingkup pencapaian sasaran/target PN dan Bidang Pembangunan Nasional. Manfaat dari indeks perencanaan pembangunan nasional adalah dapat mengetahui tingkat kualitas perencanaan pembangunan nasional dan pengendalian pelaksanaannya.

IKU 1.1 merupakan IKU yang dirancang untuk menunjukkan ukuran terhadap kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersifat inisiatif strategis/prakarsa dalam rangka koordinasi, sinkronisasi dan percepatan pelaksanaan rencana pembangunan.

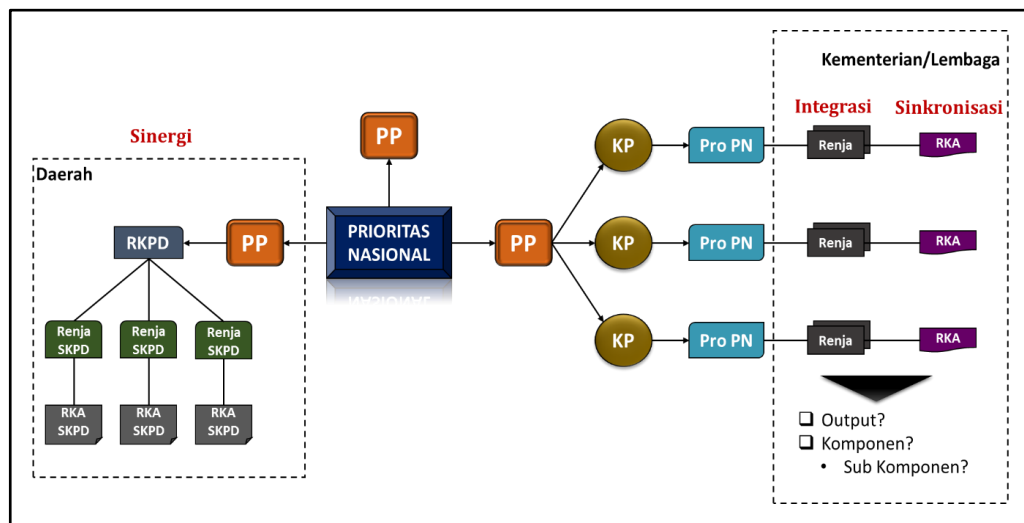
Indeks ini akan berimplikasi pada menguatnya peran Kementerian PPN/Bappenas, melalui:

- a. Pengukuran kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan nasional (tiap PN).
- b. Pengukuran kualitas perencanaan K/L dan Daerah dengan kategori: sangat baik, baik, cukup, dan kurang.
- c. Penyusunan indeks yang akan menjadi bagian dari penilaian Indeks Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB.

d. Penyusunan *cascading* IKU sebagai alat ukur kinerja individu/tiap pegawai Kementerian PPN/Bappenas.

Untuk mengukur integrasi dan sinkronisasi, dilakukan pemetaan dari PN ke PP, kemudian ke KP, Pro-PN dan Renja dan RKA K/L. Sedangkan sinergitas dapat dilihat dari PN-PP-RKPD-Renja SKPD-RKA SKPD. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

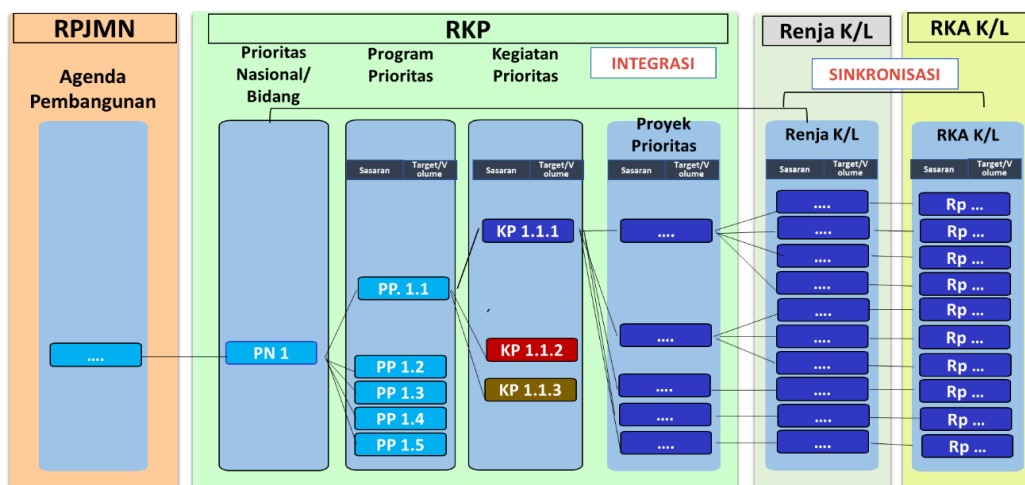
Gambar 2.3. Mekanisme Pengukuran Keselarasan: Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergitas



Sumber: Renstra Kementerian PPN/Bappenas, 2020

Untuk lebih detail pemetaan proses integrasi dan sinkronisasi, dan Mekanisme Kerja dan Peranan PJ PN/PP/KP/Bidang dalam Perencanaan dan Pengendalian sebagaimana terlampir pada gambar berikut.

Gambar 2.4. Mekanisme Penghitungan Keselarasan Integrasi dan Sinkronisasi



Sumber: Renstra Kementerian PPN/Bappenas, 2020

Dengan adanya *bridging* IKU 2015-2019 ke IKU 2020-2024, proses *cascading* dan mekanisme kerja Unit Kerja di Kementerian PPN/Bappenas pun berubah menggunakan koridor PN/PP/KP. *Cascading* dan mekanisme tersebut meliputi perencanaan dan pengendalian yang melibatkan koordinasi dan peranan tiap Penanggung Jawab (PJ) PN, PP, dan KP yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4. Mekanisme Kerja dan Peranan PJ PN/PP/KP dalam Perencanaan dan Pengendalian

Penanggung Jawab	Perencanaan RKP 2021	Pengendalian RKP 2020
PJ PN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merumuskan sasaran, indikator dan target PN 2. Menentukan PP 3. Menentukan KP bersama dengan penanggung jawab PP 4. Mengendalikan penanggung jawab PP di dalam melaksanakan proses integrasi dan sinkronisasi di level PP 5. Menghitung indeks perencanaan PN masing-masing yang berasal dari penanggung jawab PP (integrasi, sinkronisasi) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengukur realisasi sasaran/ target PN masing-masing 2. Menyusun laporan kinerja PN dengan: <ol style="list-style-type: none"> a. Menganalisa realisasi PN berdasarkan laporan realisasi PP (penjelasan tentang realisasi PN) b. Membandingkan capaian realisasi dengan capaian tahun sebelumnya c. Membandingkan capaian realisasi dengan sasaran target RPJMN 2020 – 2024
PJ PP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merumuskan sasaran, indikator dan target PP bersama penanggung jawab PN 2. Menentukan KP bersama penanggung jawab PN 3. Mengendalikan penanggung jawab KP di dalam melaksanakan proses integrasi dan sinkronisasi di level KP 4. Menghitung indeks perencanaan PP masing-masing yang berasal dari penanggung jawab KP (integrasi, sinkronisasi) 5. Melaporkan hasil perhitungan indeks perencanaan PP kepada penanggung jawab PN 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengukur realisasi sasaran/target PP masing-masing 2. Menyusun laporan kinerja PP dengan: <ol style="list-style-type: none"> a. Menganalisa realisasi PP berdasarkan laporan realisasi KP (penjelasan tentang realisasi PP) b. Membandingkan capaian realisasi dengan capaian tahun sebelumnya c. Membandingkan capaian realisasi dengan sasaran target RPJMN 2020 – 2024 3. Menyampaikan laporan kinerja PP kepada penanggung jawab PN

Penanggung Jawab	Perencanaan RKP 2021	Pengendalian RKP 2020
PJ KP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjalankan sasaran, indikator dan target KP 2. Mengendalikan pelaksanaan KP di dalam proses integrasi dan sinkronisasi 3. Menghitung indeks perencanaan KP masing-masing (integrasi, sinkronisasi) 4. Melaporkan hasil perhitungan indeks perencanaan KP kepada penanggung jawab PP 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun laporan kinerja KP dengan: <ol style="list-style-type: none"> a. Menganalisa realisasi KP (penjelasan tentang realisasi KP) b. Membandingkan capaian realisasi dengan capaian tahun sebelumnya c. Membandingkan capaian realisasi dengan sasaran target RPJMN 2020 – 2024 2. Menyampaikan laporan kinerja KP kepada PJ PP

Sumber: Biro Renortala, 2020

2. Indikator kinerja ke-2, Rancangan Perpres RKP tidak akan digunakan lagi, dan akan menjadi output di tingkat Unit Kerja Eselon II serta bagian dari **Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional**.
3. Selain itu, untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional pada Sasaran Strategis ke-2 ditentukan oleh kualitas SDM Perencana. Oleh karena itu, IKU 2020-2024 dimasukan IKU baru, yaitu **Persentase Perencana yang Memenuhi Standar Kompetensi** yang diampu oleh Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana Bappenas.
4. Selanjutnya indikator ke-3, Prosentase (%) rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti K/L diubah menjadi 2 (dua) Sasaran Strategis dan 3 (tiga) IKU, yakni:
 - a. Sasaran Strategis ke-2:

IKU: Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional.

merupakan hasil evaluasi atas pencapaian Kementerian PPN/Bappenas dalam mengawal pelaksanaan kinerja RKP tahun berjalan (RKP Tahun 2020) dengan proses pemantauan, evaluasi, serta rekomendasi perbaikan. Melalui kegiatan tersebut, Kementerian PPN/Bappenas akan melakukan pengendalian atas K/L pelaksana dalam pencapaian sasaran/indikator/target yang telah ditetapkan dalam RKP tahun berjalan. Kementerian PPN/Bappenas tidak hanya melakukan pengendalian tersebut kepada K/L mitranya saja, namun menyeluruh kepada K/L pelaksana lain menggunakan koridor PN.

b. Sasaran Strategis ke-3:

IKU: Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L; dan

IKU: Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L.

Kedua IKU tersebut adalah merupakan IKU baru yang digunakan untuk mewujudkan peran dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas sebagai peran Alokasi dan peran Enabler. Pelaksanaan dari peran Alokasi dilakukan melalui kapasitas Kementerian PPN/Bappenas sebagai Pengambil Keputusan, Koordinator, *Think-tank*, dan Administrator. Sedangkan pelaksanaan dari peran Enabler dilakukan melalui kapasitas Kementerian PPN/Bappenas sebagai *Think-tank*.

5. IKU terakhir adalah Tingkat Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kementerian PPN/Bappenas pada Sasaran Strategis ke-2: Manajemen Tata Kelola Pemerintah di Kementerian PPN/Bappenas yang baik dan bersih diubah menjadi lebih rinci, yakni Sasaran Strategis ke-4: Terwujudnya Kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang Bersih, Akuntabel, dan Professional dan didukung oleh Kapabilitas SDM dengan 3 (tiga) IKU, yaitu: (a) **Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas**; (b) **Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional**; dan (c) **Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional**.

Sebagian besar IKU ini berfokus pada indeks dan nilai kinerja yang akan dievaluasi, salah satunya oleh Kementerian Keuangan (Nilai Kinerja Anggaran), KemenPAN dan RB (Nilai Kinerja RB) dan BPK (Opini BPK), serta penilaian pemangku kepentingan terhadap pelayanan dan proses perencanaan pembangunan nasional.

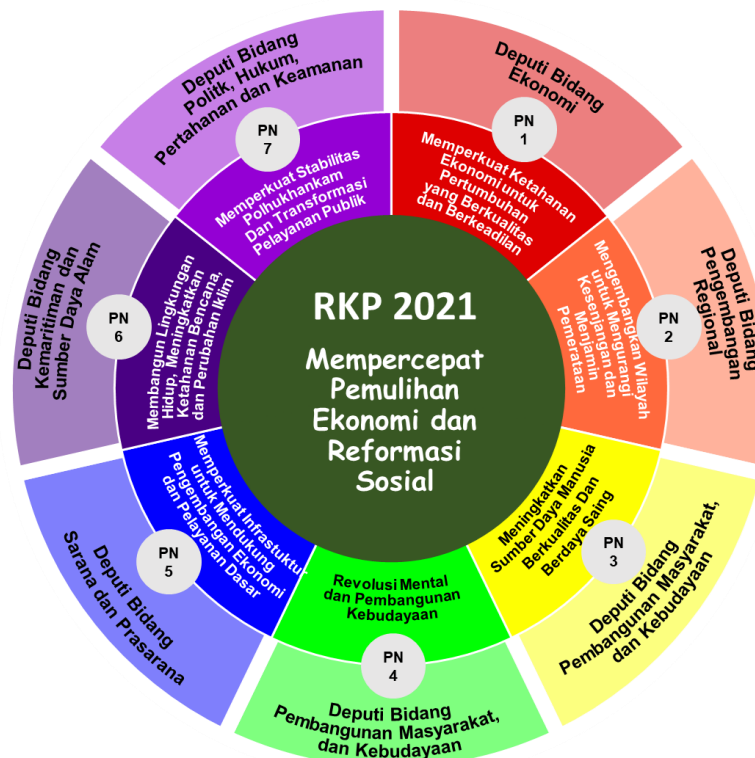
Mengingat pada tahun 2020 ini merupakan masa transisi struktur organisasi mengacu Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas dimana de facto pelantikan dilaksanakan tanggal 18 September 2020 sehingga ada perubahan organisasi di UKE II serta Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 11 Tahun 2020 tentang Renstra Kementerian PPN/Kepala Bappenas Tahun 2020-2024 ditetapkan pada tanggal 23 Oktober 2020. Namun, kegiatan dan anggaran masih menggunakan nomenklatur struktur organisasi yang lama.

Dengan demikian, dasar pengukuran capaian kinerja tahun 2020 menggunakan metoda *bridging*, yaitu menggunakan IKU 2020-2024 (IKU baru) tetapi isinya menstrukturkan variabel IKU lama (IKU 2015-2019) kedalam IKU baru sehingga formula pengukuran masih menggunakan formula IKU lama yang disesuaikan dengan target IKU baru.

Pemetaan *bridging* IKU 2015-2019 ke dalam IKU 2020-2024 terdapat perbedaan dan penajaman dalam mekanisme perhitungan, pengukuran serta pendekatan dengan menggunakan koridor PN/PP/KP, terutama pada IKU Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyajian pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional ini berbasis Prioritas Nasional (PN) RKP 2021. Maksudnya adalah setiap PN RKP 2021 terdapat Penanggung Jawab oleh Deputi terkait. Capaian kinerja Unit

Kerja, khususnya capaian IKU UKE I/uke II terkait keselarasan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional adalah capaian kinerja keselarasan PN RKP 2021 dan pendukungnya. Berikut gambaran Deputi penanggung jawab dalam PN RKP 2021.

Gambar 2.5. Penanggung Jawab Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021



Sumber: Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP. 17/M.PPN/HK/02/2020 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021, (diolah, 2020)

Dalam penyusunan RKP 2021, terdapat 3 (tiga) Kedeputusan yang tidak secara langsung menjadi penanggung jawab penyusunan Prioritas Nasional (PN), yaitu:

- Kedeputusan Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan menjadi wakil penanggung jawab (pendukung) PN 3;
- Kedeputusan Bidang Pendanaan Pembangunan bertugas memastikan alokasi pendanaan pembangunan (PN, PP, KP, ProP) dan alokasi anggaran K/L.
- Kedeputusan Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan menjadi ketua tim penyusunan RKP 2021 sekaligus bertugas melakukan evaluasi terhadap capaian RKP 2020 sebagai dasar perencanaan Rancangan RKP 2022.

Sedangkan untuk gambaran Program Prioritas (PP) yang mendukung Prioritas Nasional (PN) yang menjadi tanggung jawab unit kerja Kedeputusan dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.6. Pemetaan Program Prioritas yang Mendukung Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2021



Sumber: RKP 2021 (diolah, 2020)

Secara keseluruhan penilaian capaian kinerja keselarasan berdasarkan hasil pengukuran diketahui bahwa dari semua indikator dalam PN, PP, KP, dan ProP telah terpetakan berdasarkan RKP 2021. Sedangkan untuk output kegiatan K/L dalam Renja K/L dan RKA K/L dipetakan berdasarkan data pada aplikasi KRISNA RKP 2021. Semua output K/L yang telah tercatat pada aplikasi KRISNA tersebut akan dianggarkan pelaksanaannya pada tahun 2021.

Adapun Kamus indikator kinerja Tahun 2020 yang secara substantif telah disesuaikan menggunakan koridor PN/PP/KP tersebut.

Tabel 2.5. Kamus Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020

Sasaran Strategis (SS) 2020-2024	IKU 2020-2024	Kamus
SS-1: Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional	IKU 1: Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Formula pengukuran: Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional = Pembobotan nilai [(Nilai Integrasi Perencanaan Pembangunan Pusat X 0,40) + (Nilai Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pusat X 0,40) + (Nilai Sinergi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah X 0,20)] ▪ Tipe perhitungan: kumulatif ▪ Sumber data: Dokumen RPJPN 2005-2025, RPJMN 2020-2024, RKP 2021 Pemutakhiran, Renstra K/L 2020-2024, Renja K/L 2021, RKA K/L 2021, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi 2021
	a. Integrasi Perencanaan Pembangunan Pusat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Formula pengukuran: Nilai Integrasi Perencanaan Pembangunan Pusat = (% Keselarasan Muatan RPJMN 2020-2024 dengan Muatan RPJPN 2005-2025 X 0,20) + (% Keselarasan Muatan Renstra K/L 2020-2024 dengan Muatan RPJMN 2020-2024 X 0,25) + (% Keselarasan Muatan RKP 2021 dengan Muatan RPJMN 2020-2024 X 0,20) + (% Keselarasan Muatan Rencana Kerja K/L 2021 dengan Muatan RKP 2021 X 0,35) ▪ Tipe perhitungan: kumulatif ▪ Sumber data: Dokumen RPJPN 2005-2025, RPJMN 2020-2024, RKP 2021 Pemutakhiran, Renstra K/L 2020-2024, Renja K/L 2021

Sasaran Strategis (SS) 2020-2024	IKU 2020-2024	Kamus
		<p>Persentase (%) Keselarasan Muatan RPJMN 2020-2024 dengan Muatan RPJPN 2005-2025</p> <ul style="list-style-type: none"> Formulasi pengukuran $\% \text{ Keselarasan Muatan RPJMN 2020-2024 dengan Muatan RPJPN 2005-2025} = \frac{\text{Jumlah Sasaran dalam tiap Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024 yang selaras Dengan Sasaran RPJPN 2005-2025}}{\text{Jumlah Total Sasaran dalam tiap Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024}} \times 100\%$ Tipe perhitungan: kumulatif Sumber data: Sasaran RPJPN 2005-2025 dan Sasaran tiap Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024 <hr/> <p>Persentase (%) Keselarasan Muatan Renstra K/L 2020-2024 dengan Muatan RPJMN 2020-2024</p> <ul style="list-style-type: none"> Formulasi pengukuran $\% \text{ Keselarasan Muatan Renstra K/L 2020-2024 dengan Muatan RPJMN 2020-2024} = \frac{\text{Jumlah Sasaran/Indikator Renstra K/L 2020-2024 yang selaras dengan Sasaran tiap Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024}}{\text{Jumlah Total Sasaran/Indikator Renstra K/L 2020-2024}} \times 100\%$ Tipe perhitungan: kumulatif Sumber data: Sasaran tiap Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024 dan Sasaran/Indikator Renstra K/L 2020-2024

Sasaran Strategis (SS) 2020-2024	IKU 2020-2024	Kamus
		<p>Persentase (%) Keselarasan Muatan RKP 2021 dengan Muatan RPJMN 2020-2024</p> <ul style="list-style-type: none"> Formula pengukuran $\% \text{ Keselarasan Muatan RKP 2021 dengan Muatan RPJMN 2020-2024} = \frac{\text{Jumlah muatan PP (Program Prioritas) dalam RKP yang selaras dengan RPJMN lingkup bidangnya}}{\text{Jumlah total muatan PP di bawah PN yang diampu}} \times 100\%$ Tipe perhitungan: kumulatif Sumber data: Indikator dan target PP-KP-ProP dalam PN RKP 2021 Pemutakhiran dan Indikator dan target PP-KP-ProP dalam Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024
		<p>Persentase (%) Keselarasan Muatan Rencana Kerja K/L 2021 dengan Muatan RKP 2021</p> <ul style="list-style-type: none"> Formula pengukuran $\% \text{ Keselarasan Muatan Rencana Kerja K/L 2021 dengan Muatan RKP 2021} = \frac{\text{Jumlah muatan Renja K/L yang selaras dengan output K/L dlm RKP (penterjemahan sasaran PP/KP)}}{\text{Jumlah total muatan output RKP di bawah PN yang diampu}} \times 100\%$ Tipe perhitungan: kumulatif Sumber data: Kegiatan dan RO Renja K/L 2021 dan Indikator dan target PP-KP-ProP dalam PN RKP 2021 Pemutakhiran
	<p>b. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pusat</p>	<ul style="list-style-type: none"> Formula pengukuran: Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pusat diukur melalui Persentase (%) Keselarasan Muatan RKA K/L 2021 dengan Muatan RKP 2021 $\text{Nilai Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pusat} = (\% \text{ Keselarasan Muatan RKA K/L 2021 dengan Muatan RKP 2021} \times 1,00)$

Sasaran Strategis (SS) 2020-2024	IKU 2020-2024	Kamus
		<p>% Keselarasan Muatan RKA K/L 2021 dengan Muatan RKP 2021 = $\frac{\text{Jumlah muatan Renja K/L yang dianggarkan dalam RKA- K/L dan selaras/sesuai dengan bidang RKP (Program Prioritas)}}{\text{Jumlah PP RKP yang di bawah PN yang diampu}} \times 100\%$</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tipe perhitungan: kumulatif ▪ Sumber data: RO-Target RO dan ALokasi RO RKA K/L 2021 dan RKP 2021 Pemutakhiran
	c. Sinergi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Formula pengukuran: Sinergi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah diukur melalui Pengukuran melalui perhitungan keselarasan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sinergi Sasaran/Target Pembangunan Makro Nasional (RPJMN) terhadap Sasaran/Target Pembangunan Makro Provinsi (RPJMD) ▪ Sinergi Sasaran/Target Pembangunan Makro Nasional (RKP) terhadap Sasaran/Target Pembangunan Makro Daerah (RKPD Provinsi) <p>Sinergi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah = $\text{Pembobotan Nilai } [(\% \text{ Keselarasan Muatan RPJMD Provinsi dengan RPJMN } \times 0,50) + (\% \text{ Keselarasan Muatan RKPD Provinsi dengan RKP } \times 0,50)]$</p> <p>% Keselarasan Muatan RKPD Provinsi dengan RKP = <math display="block">\frac{\text{Jumlah Provinsi Mengusulkan Kegiatan Mendukung PP ke-<i>n</i> dalam PN ke-<i>n</i>}}{\text{Jumlah Provinsi Lokus Prioritas PP ke-<i>n</i> dalam PN ke-<i>n</i>}} \times 100\%</math></p> <p>% Keselarasan Muatan RPJMD Provinsi dengan RPJMN = <math display="block">\frac{\text{Jumlah Provinsi Mengusulkan Kegiatan Mendukung PP ke-<i>n</i> dalam Agenda Pembangunan ke-<i>n</i>}}{\text{Jumlah Provinsi Lokus Prioritas PP ke-<i>n</i> dalam Agenda Pembangunan ke-<i>n</i>}} \times 100\%</math></p>

Sasaran Strategis (SS) 2020-2024	IKU 2020-2024	Kamus
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tipe perhitungan: kumulatif ▪ Sumber data: aplikasi e-Musrenbang dan RKP 2021 Pemutakhiran
	IKU 2: Persentase Perencana yang Memenuhi Standar Kompetensi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Formula pengukuran: Rata-rata (jumlah JFP yang memenuhi standar kompetensi + jumlah karyasiswa yang lulus program pendidikan + jumlah peserta terlatih + tingkat Kepuasan pelayanan penyelenggaraan Diklat dan JFP) ▪ Tipe perhitungan: kumulatif ▪ Sumber data: hasil pengukuran yang dilakukan oleh Unit Kerja Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren)
SS-2: Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional	IKU 3: Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Formula pengukuran: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Capaian Kinerja PN RKP 2020 $KPNi = (0,5 \times KSPNi) + (0,5 \times KOPNi)$ <p>dimana:</p> <p>KPNi adalah rata-rata kinerja PN ke-i; KSPNi adalah kinerja berdasarkan capaian sasaran PN ke-i; KOPNi adalah kinerja berdasarkan dukungan output K/L PN ke-i.</p> ▪ Capaian Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional Diukur dari: Rata-rata Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat dan Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah ▪ Tipe perhitungan: kumulatif ▪ Sumber data: Laporan Evaluasi Kinerja PN RKP 2020 oleh Kedeputusan Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan

Sasaran Strategis (SS) 2020-2024	IKU 2020-2024	Kamus
	a. Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Formula pengukuran: $\% \text{ Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat} = \frac{\text{Jumlah Rekomendasi dalam mendukung capaian PN RKP yang Ditindaklanjuti K/L}}{\text{Jumlah Total Rekomendasi yang dihasilkan untuk pengendalian capaian PN RKP}} \times 100\%$ ▪ Tipe perhitungan: kumulatif ▪ Sumber data: hasil pengukuran yang dilakukan oleh Kedeputusan Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
	b. Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Formula pengukuran: Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah dicapai melalui jumlah K/L/D yang menindaklanjuti rencana percepatan pelaksanaan pembangunan. $\% \text{ Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah} = \frac{\text{Jumlah Realisasi K/L/D Pelaksana Penugasan Rencana Percepatan Pelaksanaan Pembangunan}}{\text{Jumlah K/L/D Pelaksana Penugasan Rencana Percepatan Pelaksanaan Pembangunan}} \times 100\%$ ▪ Tipe perhitungan: kumulatif ▪ Sumber data: hasil pengukuran yang dilakukan oleh Kedeputusan Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan dan hasil pengukuran dari Kedeputusan Pengembangan Regional.
SS-3: Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner	IKU 4: Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Formula pengukuran: $\% \text{ Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L} = \frac{\text{Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L}}{\text{Jumlah Total rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan yang dihasilkan Bappenas utk dijalankan K/L}} \times 100\%$

Sasaran Strategis (SS) 2020-2024	IKU 2020-2024	Kamus
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tipe perhitungan: kumulatif ▪ Sumber data: Laporan Kinerja UKE I (hasil pengukuran kajian/kebijakan yang dilakukan oleh Unit Kerja Kedeputian)
	<p>IKU 5: Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Formula pengukuran: $\% \text{ Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan inovasi pembangunan yang dijalankan K/L}}{\text{Jumlah Total rekomendasi inovasi pembangunan yang dihasilkan Bappenas untuk dijalankan K/L}} \times 100\%$ ▪ Tipe perhitungan: kumulatif ▪ Sumber data: hasil pengukuran kajian/kebijakan/kegiatan inovatif yang dilakukan oleh Unit Kerja Kedeputian
<p>SS-4: Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM</p>	<p>IKU 6: Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hasil pengukuran dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi <p>Masing-masing dari penilaian ini dibobot secara merata sehingga didapat nilai dan dikategorikan berdasarkan nilai yang diperoleh. (Baik Sekali = 91 - 100%; Baik = 81 - 90%; Cukup baik = 71 - 80%; Kurang baik = < 70%).</p>
	<p>IKU 7: Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Formula pengukuran: metode survei kepuasan pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) melalui pengisian kuesioner ▪ Tipe perhitungan: kumulatif ▪ Sumber data: Laporan Kinerja UKE I (hasil survei kepuasan pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) di bidang perencanaan pembangunan nasional di unit kerja Kementerian PPN/Bappenas)
	<p>IKU 8: Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Formula pengukuran: melakukan telaah aplikasi yang dimiliki oleh Kementerian PPN/Bappenas dalam mendukung proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional. Kemudian diformulasi dalam rumus:

Sasaran Strategis (SS) 2020-2024	IKU 2020-2024	Kamus
		<p>% Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional = $\frac{\text{Jumlah aplikasi data dan informasi yang saling/berpotensi berintegrasi}}{\text{Jumlah total aplikasi data dan informasi yang dimiliki oleh Kementerian PPN/Bappenas harus diintegrasikan}}$ X 100%</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tipe perhitungan: non kumulatif ▪ Sumber data: hasil pengukuran yang dilakukan oleh Unit Kerja Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan

Sumber: Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024 (diolah, 2020)

2.5. ALOKASI ANGGARAN

2.5.1. Alokasi Anggaran Tahun 2020

Untuk mencapai sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2020, pembiayaan pelaksanaan kegiatan Kementerian PPN/Bappenas dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020.

Kementerian PPN/Bappenas pada tahun 2020 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 1.797.574.025.000,- yang terdiri dari dana Rupiah Murni (RM) sebesar Rp. 1.618.149.102.000,-, Pinjaman Luar Negeri (PLN) sebesar Rp. 141.024.923.000,- dan Hibah Luar Negeri (HLN) sebesar Rp. 38.400.000.000,-. Namun pada bulan April terdapat kebijakan Kementerian Keuangan perihal pemotongan anggaran dalam rangka penanggulangan pademik covid-19, sehingga Kementerian PPN/Bappenas mengalami pemotongan anggaran menjadi sebesar Rp. 1.206.521.004.000,- yang terdiri dari dana Rupiah Murni (RM) sebesar Rp. 998.035.305.000,-, Pinjaman Luar Negeri (PLN) sebesar Rp. 147.818.412.000,- dan Hibah Luar Negeri (HLN) sebesar Rp. 60.667.287.000,-. Secara rinci perubahan alokasi anggaran tahun 2020, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6. Alokasi Anggaran dan Perubahannya Tahun 2020

NO	PROGRAM	PAGU		SELISIH
		SEBELUM	SESUDAH	
1	Program Perencanaan Pembangunan Nasional	907.887.289.000	637.185.373.000	270.701.916.000
2	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	878.986.736.000	562.659.605.000	316.327.131.000
3	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur	10.700.000.000	6.676.026.000	4.023.974.000
JUMLAH		1.797.574.025.000	1.206.521.004.000	591.053.021.000

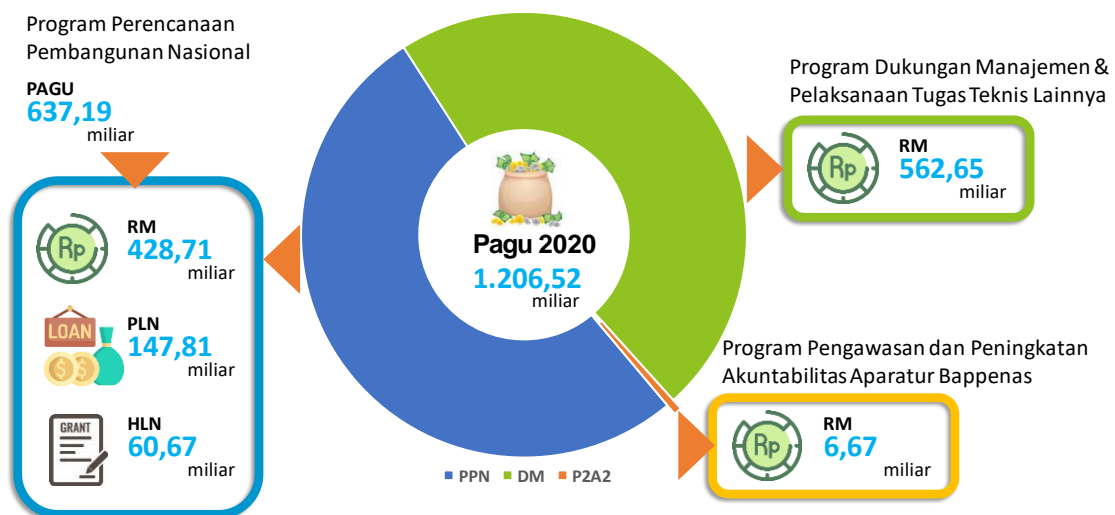
Anggaran tersebut dialokasikan ke dalam 3 (tiga) Program, seperti yang terlihat pada tabel 2.9 dan gambar 2.6.

Tabel 2.7. Program dan Anggaran Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020

NO	PROGRAM	PAGU RM	PAGU PLN	PAGU HLN	JUMLAH
1	Program Perencanaan Pembangunan Nasional	428.699.674.000	147.818.412.000	60.667.287.000	637.185.373.000
2	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	562.659.605.000	-	-	562.659.605.000
3	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur	6.676.026.000	-	-	6.676.026.000
JUMLAH		998.035.305.000	147.818.412.000	60.667.287.000	1.206.521.004.000

Sumber: Biro Renortala (diolah, 2021)

Gambar 2.7. Porsi Alokasi Anggaran Per Program Tahun Anggaran 2020



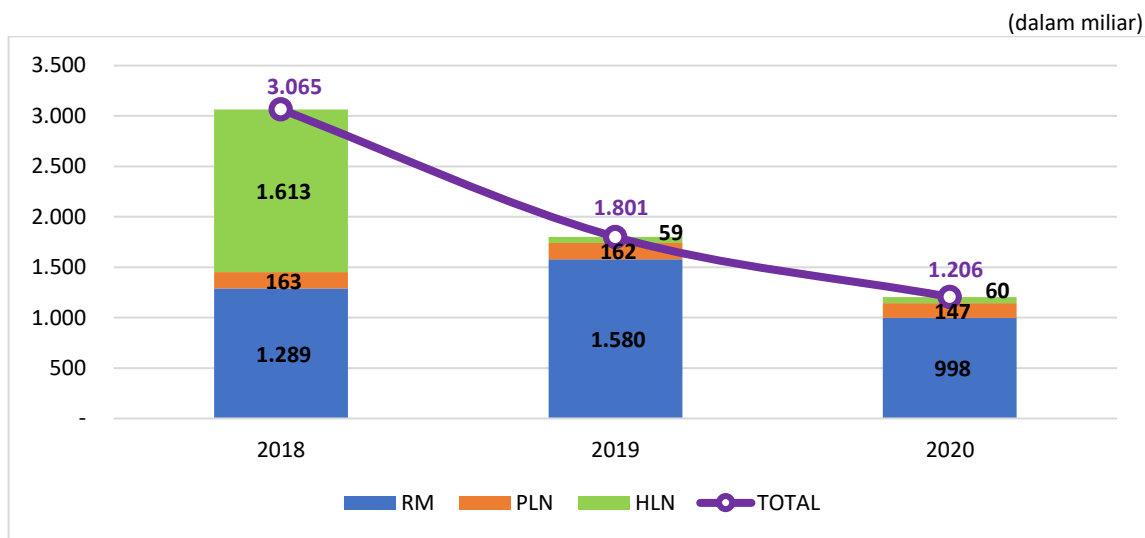
Sumber: Biro Renortala (diolah, 2021)

Anggaran pada tahun 2020 tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan yang bersifat strategis, money follows program dan lintas bidang/sector serta difokuskan pada penyiapan perumusan kebijakan perencanaan, antara lain melalui kegiatan kajian, koordinasi, pemantauan dan evaluasi. Secara keseluruhan, alokasi anggaran tahun 2020 meningkat signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Kenaikan anggaran ini sejalan dengan meningkatnya peran Kementerian PPN/Bappenas dalam menjalankan pertambahan lingkup tugas baru, diantaranya seperti: Kajian Strategis Pemindahan Ibu Kota Negara, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), Pembangunan Rendah Karbon, Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), dan Indonesia Development Forum (IDF).

2.5.2. Perbandingan Alokasi anggaran Tahun 2019-2020

Alokasi anggaran Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020 lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, dikarenakan pada bulan April tahun 2020 adanya kebijakan Kementerian Keuangan perihal pemotongan anggaran dalam rangka penanggulangan pademik covid-19. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.8. Perkembangan Alokasi Anggaran Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2018-2020



Sumber: Biro Renortala (diolah, 2021)

SATKER DEKONSENTRASI

Satker ini terdiri dari 31 Provinsi dan dikelola oleh 31 PPK. Menurut PP No 7 Tahun 2008 Pasal 1, Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.

Penyelenggaraan Dekonsentrasi bertujuan untuk (1) memperkuat koordinasi perencanaan pusat dan daerah dalam rangka pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional dan (2) memperkuat koordinasi perencanaan prioritas pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka peningkatan kualitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional serta fungsi yang mencakup antara lain perumusan dan penetapan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan pembangunan nasional.

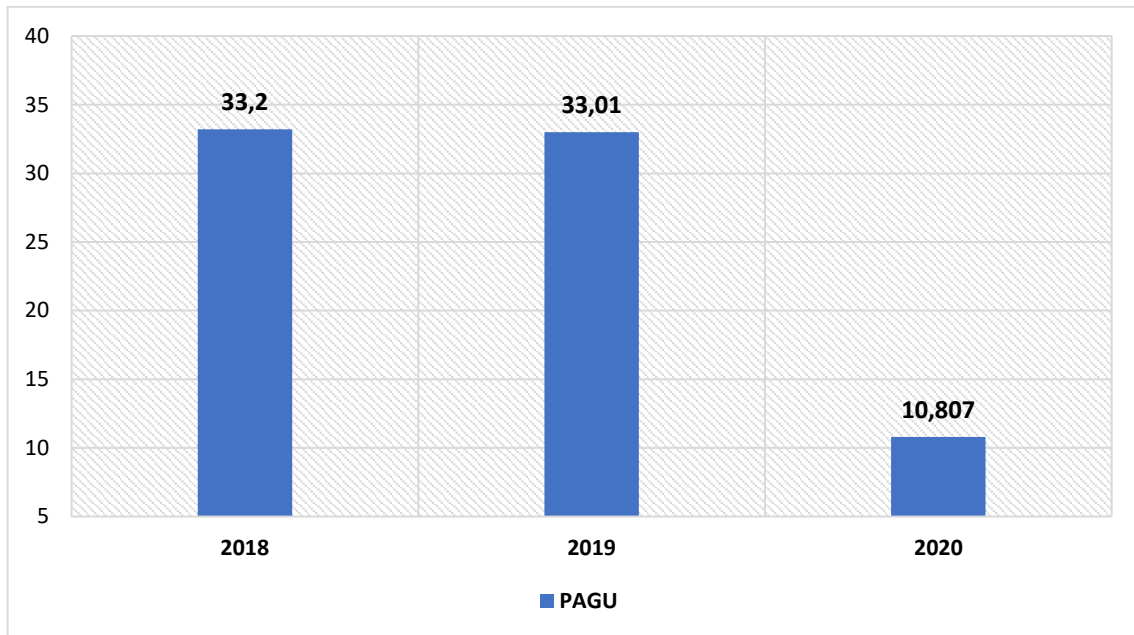
Tabel 2.8. Alokasi Anggaran Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020

NO	SATKER	PAGU ANGGARAN
1	Provinsi Jawa Tengah	572.216.000
2	Provinsi DIY	271.924.000
3	Provinsi Jawa Timur	235.822.000
4	Provinsi Aceh	261.320.000
5	Provinsi Sumatera Utara	103.704.000
6	Provinsi Sumatera Barat	385.727.000
7	Provinsi Riau	290.934.000
8	Provinsi Jambi	239.700.000
9	Provinsi Sumatera Selatan	383.051.000
10	Provinsi Lampung	555.717.000
11	Provinsi Kalimantan Barat	278.522.000
12	Provinsi Kalimantan Tengah	248.740.000
13	Provinsi Kalimantan Selatan	355.794.000
14	Provinsi Kalimantan Timur	383.103.000
15	Provinsi Sulawesi Utara	600.776.000
16	Provinsi Sulawesi Tengah	292.896.000
17	Provinsi Sulawesi Selatan	106.088.000
18	Provinsi Sulawesi Tenggara	261.903.000
19	Provinsi Maluku	683.884.000
20	Provinsi Bali	395.145.000
21	Provinsi NTB	425.577.000
22	Provinsi NTT	328.320.000
23	Provinsi Bengkulu	466.219.000
24	Provinsi Maluku Utara	361.123.000
25	Provinsi Banten	226.395.000
26	Provinsi Bangka Belitung	249.113.000
27	Provinsi Gorontalo	604.624.000
28	Provinsi Kepulauan Riau	243.999.000
29	Provinsi Papua Barat	260.448.000
30	Provinsi Sulawesi Barat	277.340.000
31	Provinsi Kalimantan Utara	457.146.000
JUMLAH		10.807.270.000

Sumber: Biro Renortala (diolah, 2021)

Gambar 2.9. Perkembangan Alokasi Anggaran Satker Dekonsentrasi Tahun 2018-2020

(dalam miliar)



Sumber: Biro Renortala (diolah, 2021)

3

Akuntabilitas Kinerja



BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pengukuran capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian PPN/Bappenas tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target setiap indikator sasaran dalam perjanjian kinerja Menteri PPN/Kepala Bappenas dengan realisasinya.

Pada tahun 2020 Kementerian PPN/Bappenas telah menyusun dokumen RPJMN 2020-2024, Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021. Tahun 2020 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan RPJMN 2020-2024. Selain itu, pada bulan September tahun 2020 terdapat penetapan restrukturisasi organisasi kelembagaan sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 9 Tahun 2019. Sehingga pada tahun 2020 dapat dikatakan sebagai masa transisi dikarenakan pengukuran capaiannya masih berdasarkan Perjanjian Kinerja 2020 IKU 2015-2019 di-*bridging* ke IKU 2020-2024 berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) 2020.

Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020 ini menggunakan elaborasi PK 2020 (IKU 2015-2019) di-*bridging* ke IKU 2020-2024. Hal ini dikarenakan PK 2020 masih menggunakan struktur, nomenklatur dan anggaran berdasarkan IKU 2015-2019. Namun, capaian kinerja harus mencerminkan capaian target IKU 2020-2024 sesuai dengan Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024. Adapun capaian IKU PK 2020 yang di-*bridging* ke IKU 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1. Capaian Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020
(*Bridging* IKU PK 2020 ke IKU 2020-2024)

Sasaran Strategis (SS) 2020-2024	IKU Perjanjian Kinerja 2020		IKU Renstra 2020-2024	Capaian 2020	
	IKU PK 2020	Penjelasan Bridging		Target	Realisasi
SS-1: Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional	IKU 1: Persentase (%) Keselarasan Rencana Pembangunan Nasional dengan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga/Daerah	IKU 1 PK 2020 mengalami penajaman menjadi IKU 1 Renstra 2020-2024	IKU 1: Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional. a. Integrasi Perencanaan Pembangunan Pusat b. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pusat c. Sinergi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah	75	93,55

Sasaran Strategis (SS) 2020-2024	IKU Perjanjian Kinerja 2020		IKU Renstra 2020-2024	Capaian 2020	
	IKU PK 2020	Penjelasan Bridging		Target	Realisasi
			IKU 2: Persentase Perencana yang Memenuhi Standar Kompetensi	85%	99,19%
	IKU 2: Rancangan Peraturan Presiden RKP 2020	IKU 2 PK 2020 tetap dimunculkan dalam Laporan Kinerja 2020		1 dokumen	1 dokumen
SS-2: Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional	IKU 3: Persentase (%) Rekomendasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Rencana Pembangunan Nasional yang ditindaklanjuti K/L	IKU 3 PK 2020 mengalami penajaman menjadi IKU 3, 4, 5 di dalam IKU Renstra 2020-2024	IKU 3: Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional a. Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat b. Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah	80-83,9%	100%
SS-3: Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner			IKU 4: Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L	85-87,9%	100%
			IKU 5: Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L	75-79,9%	100%
SS-4: Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM	IKU 4: Tingkat Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kementerian PPN/Bappenas	IKU 4 PK 2020 mengalami penajaman menjadi IKU 2, 6, 7 di dalam IKU Renstra 2020-2024	IKU 6: Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/ Bappenas	83,00	83,93 *) Angka sementara
			IKU 7: Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder</i>) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional	85	91,17
			IKU 8: Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional	85%	88,89%

Sumber: Hasil Analisa Bappenas, 2020

Keterangan: *) Masih menunggu hasil penilaian Indeks RB dari Kementerian PAN dan RB.

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, kinerja Kementerian PPN/Bappenas tahun 2020 dapat dikatakan “berhasil” karena rata-rata capaiannya sudah sesuai dengan target. Keberhasilan capaian kinerja Kementerian PPN/Bappenas juga sudah sesuai dengan tujuan, sasaran strategis, serta indikator kinerja yang telah ditetapkan. Meskipun secara keseluruhan capaian kinerja Kementerian PPN/Bappenas telah mencapai target, namun masih terdapat beberapa indikator kinerja yang

capaiannya masih perlu ditingkatkan. **Capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 100%** yang dihitung dari rata-rata capaian dari seluruh sasaran kinerja.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014, untuk mengetahui adanya peningkatan capaian kinerja IKU di tahun 2020 perlu disandingkan capaian kinerja IKU tahun 2020 dengan capaian kinerja IKU tahun sebelumnya. Adapun perbandingan capaian kinerja IKU tahun 2019 dengan IKU tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2. Perbandingan Capaian Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2019 dan Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	2019		2020	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel	Persentase (%) Keselarasan Rencana Pembangunan Nasional dengan Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga/Daerah	100%	100%	100%	93,55%
		Rancangan Peraturan Presiden RKP 2020	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
		Persentase (%) Rekomendasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Rencana Pembangunan Nasional yang ditindaklanjuti K/L	100%	90,35%	100%	100%
2	Manajemen Tata Kelola Pemerintah di Kementerian PPN/Bappenas yang baik dan bersih	Tingkat Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kementerian PPN/Bappenas	Baik	Baik	Baik	Baik

Sumber: Perjanjian Kinerja Menteri PPN/Bappenas dan Laporan Kinerja UKE I, 2020

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja IKU dalam Perjanjian Kinerja 2020 telah tercapai dengan baik serta sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Namun pada IKU Persentase (%) Keselarasan Rencana Pembangunan Nasional dengan Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga/Daerah yang belum terpenuhi sesuai target IKU Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

Belum tercapainya target tersebut dikarenakan adanya kendala-kendala yang dihadapi diantaranya seperti:

1. Terjadinya wabah pandemik Covid-19 yang dampaknya menghambat pembangunan di berbagai sektor pembangunan nasional dan mengakibatkan terkontraksi capaian indikator pembangunan makro.
2. Ketidakselarasan sinergitas perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah disebabkan: (a) adanya muatan RKPD 2020 tidak sesuai dengan PP-KP-ProP RKP 2020;

dan (b) adanya muatan RPJMD 2020 tidak sesuai dengan PP-KP-ProP RPJMN 2020-2024. Akhirnya berakibat tidak langsung pada capaian pembangunan tahun 2020.

3. Ketidakselarasan nomenklatur dan anggaran: (1) muatan Rencana Kerja K/L 2021 dengan muatan RKP 2021; dan (2) muatan RKA K/L dengan muatan RKP 2021. Keselarasan tidak dapat maksimal dengan adanya kebijakan penanganan pandemi dan *refocusing* anggaran K/L.
4. Belum optimalnya peran pemantauan dan pengendalian oleh penanggung jawab Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas terhadap pelaksanaan Output Kegiatan K/L yang mendukung tercapainya sasaran/target Prioritas Nasional RKP 2020.

Upaya peningkatan yang akan dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas kedepan guna tercapai kinerja IKU sesuai target sehingga terwujudnya kualitas dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang berkualitas dan kredibel diantaranya sebagai berikut:

1. Meningkatkan soliditas dan koordinasi internal unit kerja di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas.
2. Meningkatkan hubungan dan koordinasi yang lebih baik dengan Mitra K/L dan daerah.
3. Memperkuat peran penyelenggaraan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di pusat dan daerah.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Menteri PPN/Kepala Bappenas tahun 2020, terdapat 4 (empat) sasaran strategis dan 8 (delapan) IKU yang selanjutnya akan dilakukan pengukuran menggunakan *bridging* IKU 2020-2024 melalui koridor Prioritas Nasional (PN). Selanjutnya, sistematika pembahasan capaian kinerja akan diuraikan sebagai berikut:



Terwujudnya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Nasional

Berdasarkan Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024, pencapaian sasaran strategis merupakan wujud dari penguatan peran *enabler* Kementerian PPN/Bappenas dalam upaya percepatan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di pusat maupun daerah. Secara umum, **Sasaran Strategis (SS) ke-1 ini tercapai dengan BAIK**. Capaian sasaran tersebut diukur berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu: (i) Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional; dan (ii) Persentase Perencana yang Memenuhi Standar Kompetensi. Kedua IKU tersebut telah dilaksanakan oleh Kementerian PPN/Bappenas sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020 di dalam IKU 1 dan sesuai dengan *bridging* IKU 1 Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024. Adapun penjelasan singkat terkait capaian kinerja IKU sebagai berikut.

IKU 1: Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional



Secara keseluruhan, capaian kinerja IKU “Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional” telah dilaksanakan sesuai Perjanjian Kinerja tahun 2020 dan bridging IKU 2020-2024 yang dikonversi dari satuan persen ke satuan nilai sehingga mendapat nilai capaian kinerja IKU sebesar **93,55** dari **75**.

Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional ini diukur melalui 3 (tiga) indikator penilaian dari: (1) aspek Integrasi Perencanaan Pembangunan Pusat; (2) Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pusat; dan (3) Sinergi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah. Capaian kinerja Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional ini ditujukan untuk mendukung terwujudnya kualitas dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 yang berkualitas dan kredibel. Adapun cara pengukuran ketiga aspek tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.3. Capaian Kinerja
Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020**

No.	Indikator Penilaian	Nilai	Bobot	Indeks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Integrasi Perencanaan Pembangunan Pusat	99,85	0,40	39,94
2	Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pusat	99,29	0,40	39,72
3	Sinergi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah	69,48	0,20	13,90
Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional				93,55

Sumber: Laporan Kinerja UKE I (diolah, 2020) dan Hasil Analisa Bappenas (diolah, 2020)

Keterangan:

1. Komponen Nilai kolom 3 secara rinci detail dapat dilihat pada Tabel 3.4.
2. Kolom 5 = (Kolom 3 x Kolom 4)

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa indikator integrasi dan sinkronisasi belum mencapai nilai 100. Hal ini dikarenakan ketidakselarasan nomenklatur dan anggaran Renja K/L 2021 dan RKA K/L 2021 terhadap RKP 2021 akibat adanya kebijakan penanganan pandemi Covid-19 dan refocusing anggaran K/L.

Selain itu capaian kinerja indikator sinergi perencanaan pembangunan pusat dan daerah masih belum mencapai target 100. Belum sinergi perencanaan pusat dan daerah ini terjadi dikarenakan belum terwujudnya keselarasan muatan RPJMN terhadap muatan

RPJMD dan keselarasan muatan RKP dan RKPD Provinsi, serta beberapa penyebab lainnya, antara lain:

1. Belum optimalnya pendampingan maupun bimbingan teknis dalam penyusunan RPJMD maupun RKPD Provinsi.
2. Belum optimalnya peran Kementerian PPN/Bappenas dalam Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri.
3. Pemerintah Provinsi tidak mengusulkan Proyek Prioritas (ProP) dalam Prioritas Nasional yang menjadi kewenangan pembangunan daerah di aplikasi e-Musrenbang.

Upaya peningkatan pencapaian kinerja Sinergi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas melalui Kedeputian Bidang Pengembangan Regional akan melakukan diantaranya menerbitkan Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri. Pada pertengahan tahun 2020, Kementerian PPN/Bappenas berinisiasi menyusun regulasi tentang Penyelarasan RPJMD dengan RPJMN 2020-2024 dalam bentuk Surat Edaran Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri yang ditandatangani bersama pada bulan Januari 2021. Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung keselarasan antara pembangunan daerah dengan pembangunan Nasional dan guna menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD dan pedoman dalam perubahan RPJMD yang perodesasinya di bawah Tahun 2024.

Berkaitan dengan upaya perbaikan keselarasan RKPD Provinsi terhadap RKP, Kementerian PPN/Bappenas akan meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, melalui Kedeputian Bidang Pengembangan Regional, utamanya Desk Pembahasan dalam Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan untuk penyusunan RKP 2022. Hal ini akan ditindaklanjuti pada penyusunan RKP tahun 2022.

Apabila dilihat secara keseluruhan penilaian capaian kinerja keselarasan berdasarkan hasil pengukuran diketahui bahwa dari semua indikator dalam PN, PP, KP, dan ProP telah terpetakan berdasarkan RKP 2021. Sedangkan untuk output kegiatan K/L dalam Renja K/L dan RKA K/L dipetakan berdasarkan data pada aplikasi KRISNA RKP 2021. Semua output K/L yang telah tercatat pada aplikasi KRISNA tersebut akan dianggarkan pelaksanaannya pada tahun 2021.

Guna terwujudnya kualitas dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 yang berkualitas dan kredibel perlu didukung pula keselarasan dokumen perencanaan pembangunan nasional mulai dari RPJPN, RPJMN, RKP hingga RKA K/L. Untuk mengetahui capaian keselarasan dokumen perencanaan nasional dimaksud dapat dilihat pada rincian capaian kinerja Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional. Berdasarkan Tabel 3.3, capaian kinerja secara detail terkait capaian kinerja IKU Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.4. Rincian Detail Capaian Kinerja Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020

NO	IKU PK Menteri 2020	Bridging Pengukuran IKU 2020-2024	IKU 2020	Capaian Keselarasan per Prioritas Nasional (PN) RKP 2021							Rata- rata Capaian PN	Bobot	Nilai Capaian PN	Nilai Capaian per Komponen
				PN 1	PN 2	PN 3	PN 4	PN 5	PN 6	PN 7				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
IKU 1	Persentase % Keselarasan Rencana Pembangunan Nasional dengan Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga/ Daerah	Integrasi Perencanaan Pembangunan Pusat	Persentase (%) Keselarasan Muatan RPJMN 2020-2024 dengan Muatan RPJPN 2005- 2025	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0,20	20	99,85
			Persentase (%) Keselarasan Muatan Renstra K/L 2020-2024 dengan Muatan RPJMN 2020- 2024	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0,25	25	
			Persentase (%) Keselarasan Muatan RKP 2021 dengan Muatan RPJMN 2020- 2024	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0,20	20	
			Persentase (%) Keselarasan Muatan Rencana Kerja K/L 2021 dengan Muatan RKP 2021	100%	100%	100%	100%	100%	97%	100%	99,57%	0,35	34,85	

NO	IKU PK Menteri 2020	Bridging Pengukuran IKU 2020-2024	IKU 2020	Capaian Keselarasan per Prioritas Nasional (PN) RKP 2021							Rata- rata Capaian PN	Bobot	Nilai Capaian PN	Nilai Capaian per Komponen
				PN 1	PN 2	PN 3	PN 4	PN 5	PN 6	PN 7				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Sinkronisasi Perencanaan dan Penggangan Pembangunan Pusat	Persentase (%) Keselarasan Muatan RKA K/L 2021 dengan Muatan RKP 2021	100%	100%	100%	100%	100%	95%	100%	99,29%	1,00	99,29	99,29
		Sinergi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah	Persentase (%) Keselarasan Muatan RPJMD dengan Muatan RPJMN 2020- 2024	-	67,16%	-	-	-	-	-	67,16%	0,50	33,58	69,48
			Persentase (%) Keselarasan Muatan RKPD Provinsi 2021 dengan Muatan RKP 2021	-	71,79%	-	-	-	-	-	71,79%	0,50	35,90	

Sumber: Rekapitulasi Laporan Kinerja UKE I (diolah, 2020)

Keterangan:

1. Kolom 12 berasal dari rata-rata Kolom 5+6+7+8+9+10+11
2. Kolom 14 berasal dari (Kolom 12 x Kolom 13)
3. Kolom 15 berasal dari penjumlahan Kolom 14 dalam lingkup yang sama di Kolom 3
4. tanda "-" maksudnya hasil capaian kinerja Sinergi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah hanya diukur pada PN 2 "Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan" yang diampu oleh Kedeputian Bidang Pengembangan Regional

Tabel di atas merupakan rekapitulasi untuk mengukur elaborasi IKU PK 2020 di-*bridging* ke IKU 2020-2024 “Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional” yang menunjukkan keselarasan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional mulai dari RPJPN, RPJMN, Renstra K/L, RKP hingga RPJMD/RKPD pada masing-masing penanggungjawab PN RKP 2021 guna terwujudnya kualitas dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 yang berkualitas dan kredibel. Berikut penjelasan singkat ketiga indikator penilaian pada tabel di atas:

A. INTEGRASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PUSAT

1) Persentase (%) Keselarasan Muatan RPJMN 2020-2024 dengan Muatan RPJPN 2005-2025

Sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2007, penyusunan RPJMN disusun sesuai dengan RPJP Nasional dengan tujuan untuk mengukur sinkronisasi dan konsistensi perencanaan pembangunan nasional antar waktu (5 tahunan). Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka dibutuhkan indikator yang harus dicapai yaitu keselarasan muatan RPJMN 2020-2024 dengan RPJPN 2005-2025. Indikator keselarasan antara RPJMN dan RPJPN menjadi penting karena dapat memberi gambaran kegiatan-kegiatan jangka menengah berjalan secara berkelanjutan/konsistensi untuk mendukung percepatan rencana jangka Panjang.



Berdasarkan Perjajinan Kinerja dan kamus Indikator 2020, muatan RPJPN dengan RPJMN dikatakan selaras jika arah kebijakan/sasaran pokok RPJMN 2020-2024 secara substansi sesuai dengan sasaran di RPJPN 2005-2025. Secara keseluruhan, **Keselarasan Muatan RPJMN 2020-2024 dengan Muatan RPJPN 2005-2025 telah tercapai 100%**, sehingga dapat diartikan bahwa seluruh sasaran dan arah kebijakan RPJMN 2020-2024 telah terpetakan langsung/relevan dengan sasaran dan arah kebijakan RPJPN 2005-2025.

Capaian keselarasan tersebut dapat dicapai melalui proses iterasi dengan cara memetakan program prioritas, kegiatan prioritas, beserta sasaran dan indikatornya memiliki keselarasan antara RKP 2021 yang merupakan pelaksanaan tahun pertama RPJMN 2020-2024. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dari waktu ke waktu dengan harapan setiap periode pembangunan baik jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek dapat menyelesaikan permasalahan fundamental pembangunan di Indonesia sehingga dapat menjadi negara berpenghasilan tinggi sebagaimana cita-cita yang dimuat di dalam Visi 2045 dan konteks tujuan pembangunan jangka panjang tahun 2005-2025.

Berikut ini disajikan secara rinci hasil rekapitulasi keselarasan muatan RPJMN 2020-2024 dengan muatan RPJPN 2005-2025 dari seluruh Penanggung Jawab Prioritas Nasional guna terwujudnya kualitas dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 yang berkualitas dan kredibel, pengukuran keselarasan IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5. Rekapitulasi (%) Keselarasan Muatan RPJMN 2020-2024 dengan Muatan RPJPN 2005-2025

Prioritas Nasional RKP 2021	Jumlah Muatan RPJMN 2020-2024 yang selaras dengan Muatan RPJPN 2005-2025	Jumlah Total Muatan RPJMN 2020-2024	Nilai Keselarasan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)=(2/3)*100%
PN 1	2	2	100%
PN 2	1	1	100%
PN 3	6	6	100%
PN 4	6	6	100%
PN 5	5	5	100%
PN 6	3	3	100%
PN 7	5	5	100%
TOTAL			
Persentase (%) Keselarasan Muatan RPJMN 2020-2024 dengan Muatan RPJPN 2005-2025			100%

Sumber: Laporan Kinerja UKE I, RPJPN 2005-2025, dan RPJMN 2020-2024 (diolah, 2020)

Keterangan:

Kolom 1: Struktur PN RKP 2020-2024 sama dengan struktur Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024

Kolom 2: Jumlah Muatan RPJMN 2020-2024 yang selaras dengan Muatan RPJPN 2005-2025 adalah: **jumlah sasaran setiap Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024** yang sesuai/terpetakan langsung/relevan dengan **Sasaran RPJPN 2005-2025**

Kolom 3: Jumlah Total Muatan RPJMN 2020-2024 adalah jumlah total sasaran setiap Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa keselarasan tersebut telah mengalami pencapaian yang optimal. Hal ini disebabkan oleh komitmen dari seluruh unit kerja Kementerian PPN/Bappenas untuk menjaga kesinambungan pembangunan nasional dari masa ke masa, sehingga permasalahan pembangunan nasional dapat secara diatasi.

Sebagai contoh keselarasan Keselarasan Muatan RPJMN 2020-2024 dengan Muatan RPJPN 2005-2025 adalah terkait "Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah Indonesia" terpetakan langsung/relevan ke dalam sasaran RPJMN 2020-2024 terkait "Meningkatkan produktivitas lahan dan memperkuat nilai tambah pertanian; Mendorong sektor jasa dengan nilai tambah yang tinggi didorong oleh inovasi dan teknologi; Melanjutkan

pembangunan infrastruktur terutama konektivitas dan energi untuk mendukung ekspansi ekonomi dan pertumbuhan inklusif; dan Peningkatan nilai tambah pertambangan yang mendukung pengembangan industri hilir".

Contoh hasil pengukuran keselarasan tersebut lainnya dapat dilihat **secara lengkap pada Laporan Kinerja UKE I Kedeputian.**

2) Persentase (%) Keselarasan Muatan Renstra K/L 2020-2024 dengan Muatan RPJMN 2020-2024

Sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, Kementerian/Lembaga harus menyusun Renstra yang berpedoman dan selaras dengan RPJMN. Penyelarasan antara RPJMN dengan Renstra K/L menjadi sangat penting untuk menjamin tercapainya sasaran pembangunan dalam RPJMN.



Berdasarkan Perjanjian Kinerja dan Kamus Indikator 2020, muatan substansi dalam Renstra K/L 2020-2024 telah selaras dengan RPJMN 2020-2024. Dengan demikian secara keseluruhan, **Keselarasan Muatan Renstra K/L 2020-2024 dengan Muatan RPJMN 2020-2024 telah tercapai 100%**. Hal ini dapat diartikan bahwa seluruh sasaran RPJMN 2020-2024 telah terpetakan langsung/relevan dengan indikator Renstra K/L 2020-2024 atau dapat diartikan bahwa seluruh Renstra K/L telah sesuai dengan sasaran dan arah kebijakan RPJMN 2020-2024.

Keselarasan dalam pencapaian tersebut diperlukan adanya aspek integrasi yang ditujukan untuk mengukur keterpaduan perencanaan pembangunan dalam antar dokumen perencanaan dan merupakan koordinasi perencanaan di tingkat K/L pusat, salah satunya dilihat dari keselarasan muatan RPJMN/Renja K/L dengan Renstra K/L (diukur hanya untuk 1 tahun pertama). Dikarenakan tahun 2020 adalah tahun pertama penyusunan rencana jangka menengah, sehingga indikator ini perlu dilihat keselarasannya.

Pandemi COVID-19 di tahun 2020 menjadi tantangan besar yang mempengaruhi keselarasan indikator tersebut. Mayoritas dari K/L mitra PN 1 melakukan penyesuaian Renstranya pada tahun 2020 dan berencana akan melakukan lagi penyesuaian di tahun 2021 untuk dapat mengakomodir goncangan yang terjadi akibat pandemi. Oleh karena itu, penelaahan keselarasan dilakukan terhadap dokumen Renstra K/L baseline, yaitu Renstra K/L sebelum memasukkan dampak pandemi dengan pertimbangan bahwa dokumen RPJMN 2020-2024 juga tidak direvisi dan tidak menggambarkan kondisi setelah adanya pandemi COVID-19.

Keselarasannya mengalami konsistensi capaian dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa kondisi sebagai berikut:

1. Koordinasi yang semakin intensif dengan mitra K/L;
2. Komitmen bersama terhadap arahan Presiden RI yang dituangkan di dalam agenda pembangunan 2020-2024.

Ke depan, Kementerian PPN/Bappenas akan terus berupaya menyelaraskan Renstra K/L dengan RPJMN 2020-2024 melalui pemanfaatan teknologi supaya tidak ada *barrier* dalam hal koordinasi dan komunikasi. Keselarasan tersebut harus terus dijaga terutama dalam mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pasca pandemi COVID-19, serta mengawal K/L/D mitra untuk bersama-sama mewujudkan tercapainya pembangunan nasional yang telah direncanakan.

Berikut ini disajikan secara singkat hasil rekapitulasi keselarasan muatan RPJMN 2020-2024 dengan muatan RPJPN 2005-2025 dari seluruh Penanggung Jawab Prioritas, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.6. Rekapitulasi (%) Keselarasan Muatan Renstra K/L 2020-2024 dengan Muatan RPJMN 2020-2024

Koridor PN RKP 2021	Jumlah Muatan Renstra Mitra K/L 2020-2024 yang selaras dengan Muatan RPJMN 2020-2024 (K/L)	Jumlah Total Muatan Renstra Mitra K/L 2020-2024 (K/L)	Nilai Keselarasan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)=(2/3)*100%
PN 1	10	10	100%
PN 2	9	9	100%
PN 3	20	20	100%
PN 4	14	14	100%
PN 5	7	7	100%
PN 6	7	7	100%
PN 7	31	31	100%
TOTAL			
Persentase (%) Keselarasan Muatan Renstra K/L 2020-2024 dengan Muatan RPJMN 2020-2024			100%

Sumber: Daftar Mitra K/L (diolah, 2021) dan Laporan Kinerja UKE I, 2020

Keterangan:

Kolom 1: Struktur PN RKP 2020-2024 sama dengan struktur Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024

Kolom 2: Jumlah Muatan Renstra Mitra K/L 2020-2024 yang selaras dengan Muatan RPJMN 2020-2024 adalah **jumlah Renstra Mitra K/L 2020-2024** dilihat dari indikator dan target yang sesuai/terpetakan langsung/relevan dengan **sasaran tiap Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024**

Kolom 3: Jumlah Total Muatan Renstra Mitra K/L 2020-2024 adalah Jumlah Total Indikator Renstra Mitra K/L 2020-2024

Sebagai contoh keselarasan tabel di atas, adalah sasaran RPJMN 2020-2024 terkait “Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian” telah terpetakan langsung/relevan kedalam Renstra Kementerian Keuangan 2020-2024 dalam indikator kinerja seperti: Rasio perpajakan terhadap PDB; Rasio perpajakan terhadap PDB; dan Persentase penyelesaian proyek strategis TIK.

Contoh hasil pengukuran keselarasan tersebut lainnya dapat dilihat **secara lengkap pada Laporan Kinerja UKE I Kedeputian.**

3) Persentase (%) Keselarasan Muatan RKP 2021 dengan Muatan RPJMN 2020-2024

Sesuai kamus indikator pengukuran aspek integrasi keselarasan RPJMN dan RKP perlu di ukur untuk setiap PN nya. Sedangkan capaian level PP, KP hingga ProP telah diukur pada tingkat UKE I dan UKE II.

Indikator persentase keselarasan muatan antara RKP 2021 dengan RPJMN 2020-2024 digunakan untuk mengukur keselarasan muatan antara RKP 2021 yang telah disusun dengan muatan RPJMN 2020-2024. Dalam hal ini capaian kinerja organisasi diukur dengan melihat keselarasan muatan (prioritas nasional, program sasaran dengan prioritas nasional dalam RPJMN 2020-2024. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan cara menyandingkan dan menganalisa muatan dokumen RKP 2021 dengan RPJMN 2020-2024



Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional. RPJMN harus selaras dengan RPJP.

Secara keseluruhan, **keselarasan muatan RKP 2021 dengan Muatan RPJMN 2020-2024 mencapai 100%**. Hal ini dapat diartikan bahwa seluruh muatan dalam Sasaran dan Arah Kebijakan Agenda 1 RPJMN 2020-2024 telah terpetakan langsung/relevan ke dalam muatan seluruh koridor Prioritas Nasional (PN) 1 RKP 2021 level PN-PP-KP-ProP termasuk *Major Project*. Perlu diketahui bahwa penyusunan setiap level Program Prioritas (PP)/Kegiatan Prioritas (KP)/Proyek Prioritas (ProP)/Proyek dalam RKP 2021 telah sama strukturnya dengan level PP/KP/ProP/Proyek dalam RPJMN 2020-2024. Hal tersebut dapat dilihat pada Lampiran Matrik Pembangunan dan *Major Project* pada masing-masing Peraturan Presiden tentang Pemutahiran RKP 2021 dan RPJMN 2020-2024

Selanjutnya, sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Perjanjian Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020, maka terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional dapat dibuktikan dari indikator persentase (%) keselarasan muatan RKP Tahun 2021 dengan RPJMN 2020-2024.

Indikator kinerja ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat kesesuaian antara RKP 2021 dengan RPJMN 2020-2024. Untuk memastikan keselarasan antara RKP 2021 dan RPJMN 2020-2024 dilakukan reviu secara bersama-sama untuk memastikan bahwa sasaran dan program yang dicanangkan dalam RPJMN benar-benar dioperasionalkan di kementerian dan lembaga.

Capaian keselarasan RKP 2021 dengan RPJMN 2020-2024 sama dengan tahun sebelumnya yaitu 100%. Artinya didalam penyusunan RKP 2021, baik dalam koridor PN, PP, KP, ProP selalu mengacu kepada RPJMN 2020-2024 sebagai panduan penyusunan perencanaan.

Keselarasan RKP 2021 dan RPJMN 2020-2024 (Prioritas Nasional) mengalami konsistensi capaian. Hal ini disebabkan oleh:

1. Koordinasi yang baik dan rutin dengan mitra K/L
2. Penyelarasan RKP 2021 dan RPJMN 2020-2024

Rencana perbaikan dalam mempertahankan/meningkatkan hasil capaian keselarasan RKP dan RPJMN dalam koridor PN/PP/KP adalah:

1. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan mitra K/L dan sektor terkait dalam penyelarasan RKP 2021 dan RPJMN 2020-2024
2. Menggunakan teknologi dan informasi secara intensif dan efisien dalam koordinasi dengan mitra K/L

Hasil pengukuran indikator kinerja ini berdasarkan pengukuran keselarasan muatan RKP 2021 dengan muatan RPJMN 2020-2024 di level Prioritas Nasional (PN) dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.7. Rekapitulasi Persentase (%) Keselarasan Muatan RKP 2021 dengan Muatan RPJMN 2020-2024

Koridor PN RKP 2021	Jumlah Muatan RKP 2021 yang selaras dengan Muatan RPJMN 2020-2024	Jumlah Total Muatan RKP 2021	Nilai Keselarasan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)=(2/3)*100%
PN 1	2	2	100%
PN 2	2	2	100%
PN 3	6	6	100%
PN 4	6	6	100%
PN 5	5	5	100%
PN 6	3	3	100%
PN 7	5	5	100%
TOTAL			
Persentase (%) Keselarasan Muatan RKP 2021 dengan Muatan RPJMN 2020-2024			100%

Sumber: RPJMN 2020-2024, RKP 2021, Laporan Kinerja UKE I (diolah, 2020)

Keterangan:

Kolom 2: Jumlah Muatan RKP 2021 yang selaras dengan Muatan RPJMN 2020-2024 adalah: **Jumlah Sasaran di level PN RKP 2021** yang sesuai/terpetakan langsung/relevan dengan **Sasaran di level Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024**

Kolom 3: Jumlah Total Muatan RKP 2021 adalah Jumlah Sasaran di level PN RKP 2021

Sebagai contoh, keselarasan sasaran di level PN 7 RKP 2021 "Terwujudnya Demokrasi yang Terkonsolidasi, Terpeliharanya Kebebasan, Menguatnya Kapasitas Lembaga-Lembaga Demokrasi dan Terjaganya Kesetaraan Warga Negara Secara Optimal" relevan dengan sasaran Agenda Pembangunan 7 RPJMN 2020-2024 "Menguatnya Stabilitas Polhukhankam dan Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik, melalui Konsolidasi Demokrasi". Contoh lainnya, keselarasan sasaran di level PN 5 RKP 2021 "Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar" sesuai/terpetakan dengan sasaran Agenda Pembangunan 5 RPJMN 2020-2024 "Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar".

Contoh berikutnya di level KP, Agenda Pembangunan Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan dengan Sasaran Pembangunan "Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian" yang tertuang dalam dokumen RPJMN 2020-2024 telah terpetakan dalam dokumen RKP 2021 melalui Kegiatan Prioritas (KP) Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi Perkembangan Ekonomi, Terutama Pangan, Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital dengan Sasaran Kegiatan Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan ekonomi, terutama pangan, kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital.

Dari segi keselarasan *Major Project* RKP 2021 dengan *Major Project* RPJMN 2020-2024, *Major Project* 10 Destinasi Pariwisata Prioritas dalam RPJMN 2020-2024 dengan indikasi target Percepatan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan investasi di Labuan bajo telah terpetakan langsung ke dalam *Major Project* 10 Destinasi Pariwisata Prioritas RKP 2021 akan dilaksanakan dengan proyek: (1) Amenitas, dan Aksesibilitas yang dikembangkan di Kawasan Otoritatif Badan Otorita Labuan Bajo Flores; (2) Penataan Kawasan Destinasi Wisata Labuan Bajo; (3) SDM dan Industri Pariwisata yang memperoleh Fasilitas Pengembangan Kompetensi dari Badan Otorita Labuan Bajo Flores; (4) Potensial investor yang difasilitasi Badan Otorita Labuan Bajo Flores; (5) Pengamanan Pantai Loh Buaya di Pulau Rinca yang dibangun; (7) Bandara Labuan Bajo; dst.

Contoh hasil pengukuran keselarasan tersebut lainnya dapat dilihat pada **dilihat secara lengkap pada Laporan Kinerja UKE I Kedeputan untuk capaian keselarasan muatan RKP 2021 dengan muatan RPJMN 2020-2024 di level PP, KP, dan ProP.**

4) Persentase (%) Keselarasan Muatan Rencana Kerja K/L 2021 dengan Muatan RKP 2021

Realisasi pencapaian indikator kinerja persentase keselarasan muatan Renja K/L 2021 dengan RKP 2021 dilakukan dengan cara menyandingkan dan menganalisa sasaran atau target RKP 2021 dengan target pada Renja seluruh K/L yang berbasis PN-PP-KP.



Secara keseluruhan, **keselarasan muatan Renja K/L 2021 dengan RKP 2021 dapat tercapai 99,57%**. Hal ini dapat diartikan bahwa seluruh K/L telah menyusun kegiatan dalam Renja K/L 2021 sesuai/relevan dengan Prioritas Nasional (PN) 1 RKP 2021 level PN-PP-KP-ProP.

Pada bagian ini akan dilihat keselarasan antara dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 dengan dokumen Rencana Kerja (Renja K/L) 2021 yang nantinya diharapkan dapat menunjang tercapainya Agenda Pembangunan. Rencana kerja yang akan digunakan oleh Kementerian/Lembaga sebagai acuan melakukan kegiatan harus sesuai dan selaras dengan RKP tahun 2020, sehingga nantinya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga tidak keluar dari prioritas tujuan yang sudah ditentukan sehingga dapat mencapai Agenda Pembangunan dalam RPJMN. Indikator ini dikatakan selaras apabila kegiatan yang ada pada Rencana Kerja K/L secara substansi selaras dan dapat mendukung ketercapaian indikator yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2021.

Belum optimalnya keselarasan tersebut disebabkan oleh:

1. Belum optimalnya pendampingan dalam penyusunan Renja K/L 2021 melalui Bilateral Meeting dan Trilateral Meeting agar selaras dengan RKP 2021; dan
2. Belum optimalnya komunikasi dan koordinasi yang baik dengan mitra K/L.

Rencana perbaikan dalam mempertahankan/meningkatkan hasil capaian keselarasan Renja dan RKP (Prioritas Nasional) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan mitra K/L dan sektor terkait dalam penyelarasan Renja K/L 2021 dan RKP 2021; dan
2. Menggunakan teknologi dan informasi dengan mitra K/L secara intensif dan efisien.

Berdasarkan masing-masing koridor PN RKP 2021 tersebut, maka hasil pengukuran indikator kinerja ini dapat dilihat secara singkat sebagai berikut:

Tabel 3.8. Rekapitulasi Persentase (%) Keselarasan Muatan Renja K/L 2021 dengan Muatan RKP 2021

Koridor PN RKP 2021	Jumlah Muatan Renja Mitra K/L 2021 yang selaras dengan Muatan RKP 2021	Jumlah Total Muatan Renja Mitra K/L 2021	Nilai Keselarasan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)=(2/3)*100%
PN 1	10	10	100%
PN 2	9	9	100%
PN 3	20	20	100%
PN 4	14	14	100%
PN 5	7	7	100%
PN 6	6	7	97%
PN 7	31	31	100%
TOTAL			
Persentase (%) Keselarasan Muatan Renja K/L 2021 dengan Muatan RKP 2021			99,57%

Sumber: Daftar Mitra K/L (diolah, 2021) dan Laporan Kinerja UKE I, 2020

Keterangan:

Kolom 2: Jumlah Muatan Renja Mitra K/L 2021 yang selaras dengan Muatan Mitra RKP 2021 adalah **jumlah Renja K/L 2021 dilihat dari Kegiatan-RO** yang sesuai/terpetakan langsung/relevan dengan **Indikator dan target PN-PP-KP-ProP RKP 2021**

Kolom 3: Jumlah Total Muatan Renja K/L 2021 adalah jumlah total Renja Mitra K/L 2021

Sebagai contoh keselarasan tabel di atas, Kegiatan Prioritas (KP) Penanggulangan Bencana dengan sasaran kegiatan meningkatnya sistem dan respon peringatan dini yang didukung oleh upaya kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana serta peningkatan kapasitas dan koordinasi kelembagaan dalam penanggulangan bencana di RKP 2021 selaras dengan kegiatan dalam Renka Kementerian Keuangan 2021 yaitu Kajian Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan. Output kajian tersebut adalah berupa Kajian Kolaborasi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Strategi Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana. Capaian ini diakomodir melalui forum *Trilateral Meeting* yang melibatkan Direktorat Keuangan Negara dan Analisis Moneter, BKF dan DJA Kementerian Keuangan sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia. Dalam forum *Trilateral Meeting*, ketiga pihak melakukan sinkronisasi dan harmonisasi antara RKP dan usulan K/L yang hasilnya dituangkan di dalam dokumen kesepakatan *Trilateral Meeting* dan menjadi bahan penyusunan Renja K/L.

Penyelenggaraan *Trilateral Meeting* disesuaikan dengan periodisasi perhitungan ketersediaan pagu anggaran sehingga proses penyesuaian Renja K/L dan RKP minimal dilakukan dua kali yaitu pada saat pagu indikatif dan pagu anggaran. Hasil penyusunan Renja K/L berdasarkan pagu anggaran menjadi bagian dari Nota

Keuangan yang disampaikan Presiden RI kepada DPR RI. Contoh hasil pengukuran keselarasan tersebut lainnya dapat dilihat pada lampiran atau dapat dilihat secara lengkap pada Laporan Kinerja UKE I Kedeputan.

B. SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN PUSAT

1) Persentase (%) Keselarasan Muatan RKA K/L 2021 dengan Muatan RKP 2021

Realisasi pencapaian indikator kinerja persentase keselarasan muatan RKA K/L 2021 dengan RKP 2021 dilakukan dengan cara menyandingkan dan menganalisa sasaran RKP 2021 dengan RKA seluruh K/L. K/L menyusun RKA K/L dengan mengacu Renja K/L yang telah diinput di dalam Sistem Informasi Krisna dan telah disetujui oleh Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan.



Secara keseluruhan, **Keselarasan Muatan RKA K/L 2021 dengan Muatan RKP 2021 telah mencapai 100%**. Hal ini dapat diartikan bahwa seluruh Prioritas Nasional (PN) RKP 2021 telah dianggarkan oleh seluruh K/L sesuai/relevan dengan kegiatan di masing-masing K/L pada Tahun Anggaran 2021.

Indikator terakhir yang diukur untuk memastikan terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional tahun 2021 adalah memastikan capaian kinerja pengalokasian diukur dari muatan keselarasan antara RKA K/L 2021 dengan RKP 2021. Keselarasan ini diperlukan untuk memastikan bahwa Prioritas Nasional (PN) yang sudah digariskan di dalam RKP 2021 mendapat alokasi anggaran yang sesuai, supaya dapat diimplementasikan K/L mitra kerja untuk mencapai target pembangunan nasional yang sudah ditetapkan.

Capaian kinerja keselarasan tersebut belum optimal dikarenakan beberapa kondisi yang belum optimal dalam hal:

1. Komitmen K/L mitra sektor terhadap amanat PP Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Sistem Perencanaan Penganggaran Pembangunan Nasional.
2. Persepsi yang sama terhadap urgensi Prioritas Nasional (PN) yang merupakan arahan Presiden RI sebagaimana dicantumkan dalam RKP 2021.
3. Adanya sistem KRISNA yang terus dikembangkan guna keselarasan RKP dan RKA K/L mitra sektor.
4. Digitalisasi cara kerja yang terjadi di tahun 2020 telah memudahkan koordinasi antara Kementerian PPN/Bappenas dengan mitra kerja, sehingga proses iterasi penyesuaian dapat dilakukan dari mana saja dan kapan saja.

Ke depan, konsistensi ini akan terus dijaga dengan cara:

1. Perkuatan koordinasi antara sektor dengan semua mitra K/L/D.
2. Pengembangan kompetensi penelaah Renja K/L dan RKA K/L lingkup bidang.
3. Optimalisasi sistem informasi dan teknologi untuk menghilangkan barrier dalam melakukan koordinasi.

Hasil pengukuran indikator kinerja ini dapat dilihat secara singkat sebagai berikut.

Tabel 3.9. Rekapitulasi Persentase (%) Keselarasan Muatan RKA K/L 2021 dengan Muatan RKP 2021

Koridor PN RKP 2021	Jumlah Muatan RKA Mitra K/L 2021 yang selaras dengan Muatan RKP 2021	Jumlah Total Muatan RKA Mitra K/L 2021	Nilai Keselarasan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)=(2/3)*100%
PN 1	10	10	100%
PN 2	9	9	100%
PN 3	20	20	100%
PN 4	14	14	100%
PN 5	7	7	100%
PN 6	5	7	95%
PN 7	31	31	100%
TOTAL			
Persentase (%) Keselarasan Muatan RKA K/L 2021 dengan Muatan RKP 2021			99,29%

Sumber: Hasil Analisa Bappenas, 2020

Keterangan:

Kolom 2: Jumlah Muatan RKA K/L 2021 yang selaras dengan Muatan RKP 2021 adalah **Jumlah RKA Mitra K/L 2021 dilihat dari Kegiatan-RO-Alokasi** yang sesuai/terpetakan langsung/relevan dengan **indikator dan target-alokasi PN-PP-KP-ProP tiap PN RKP 2021**

Kolom 3: Jumlah Total Muatan RKA K/L 2021 adalah jumlah total RKA Mitra K/L 2021 dilihat dari Kegiatan-RO-Alokasi

Sebagai contoh keselarasan tabel di atas, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah mengalokasikan anggaran ke dalam RKA K/L 2021 melalui RO Rekomendasi Kebijakan telah terpetakan langsung/relevan dengan RKP 2021 level Kegiatan Prioritas (KP) Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi, termasuk Reformasi Ketenagakerjaan.

Contoh hasil pengukuran keselarasan tersebut lainnya dapat dilihat **secara lengkap pada Laporan Kinerja UKE I Kedeputan.**

C. SINERGI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PUSAT DAN DAERAH

Berdasarkan PP No. 8/2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Pada Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Lebih lanjut dinyatakan perlunya Daerah mengidentifikasi kebijakan nasional yang berdampak pada daerah merupakan upaya daerah dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan program prioritas nasional dalam pembangunan daerah (Pasal 34 Ayat 1). Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dihasilkan harus mengacu dan selaras dengan perencanaan pembangunan pusat. Kementerian PPN/Bappenas dalam hal ini mengukur ketercapaian sinergi perencanaan pembangunan pusat dan daerah.



Secara keseluruhan **capaian kinerja sinergi perencanaan pembangunan pusat dan daerah berhasil tercapai sebesar 69,48%**. Penilaian sinergi ini diukur melalui rata-rata 2 (dua) indikator, yaitu: (1) **Persentase Keselarasan Muatan RPJMD dengan Muatan RPJMN 2020-2024 sebesar 67,16%**; dan (2) **Persentase Keselarasan Muatan RKPD Provinsi 2021 dengan Muatan RKP 2021 sebesar 71,79%**.

Indikator ini bertujuan untuk melihat keselarasan perencanaan pusat dan daerah. Hal ini penting karena pada dasarnya hampir seluruh urusan pembangunan merupakan urusan konkuren yaitu urusan yang dikerjakan bersama antara pusat dan daerah. Keberhasilan dan keberlanjutan suatu program/kegiatan akan ditentukan dari dukungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Capaian kinerja sinergi perencanaan pembangunan pusat dan daerah ini merupakan indikator kinerja yang dilakukan oleh unit kerja Kedeputusan Bidang Pengembangan Regional.

Berikut penjelasan pencapaian kinerja sinergi perencanaan pembangunan pusat dan daerah.

1) **Persentase (%) Keselarasan Muatan RPJMD dengan Muatan RPJMN 2020-2024**

Keselarasan RPJMD dengan RPJMN diperlukan agar prioritas nasional dapat dilaksanakan dengan berkesinambungan dan didukung secara sinergis baik oleh pusat maupun daerah. RPJMD Provinsi dan RPJMN diselaraskan antara lain melalui forum Konsultasi Regional RPJMN dan Musrenbang RPJMN. Pemerintah daerah menyampaikan usulan kegiatan, antara lain melalui Surat kepala Daerah, Konsultasi Regional RPJMN, dan Rapat Terbatas Setkab.

Indikator ini hanya dikontribusikan dari Kedeputusan Bidang Pengembangan Regional, khususnya Direktorat Pengembangan Wilayah dan Kawasan. Direktorat Pengembangan Wilayah dan Kawasan mengoordinasikan dan menganalisis kebutuhan dan keselarasan usulan daerah tersebut dengan Prioritas Nasional dalam RPJMN 2020-2024 untuk dapat diakomodir dalam RPJMN 2020-2024. Berdasarkan usulan daerah yang dinilai mendukung

RPJMN 2020-2024, **keselarasan RPJMD Provinsi dan RPJMN yaitu sebesar 67,16%**. Capaian ini lebih rendah dari target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan belum ada mekanisme yang jelas dalam pengusulan kegiatan daerah yang mendukung RPJMN 2020-2024. Selain itu, target yang ditetapkan terlalu tinggi, karena tidak semua daerah menyusun RPJMD baru dikarenakan masih dalam periode pemerintahan, sehingga daerah tersebut tidak menyampaikan usulan kegiatan daerahnya. Untuk itu, perlu adanya sinkronisasi periode RPJMN dengan RPJMD. Contoh hasil pengukuran keselarasan tersebut lainnya dapat dilihat pada lampiran atau dapat dilihat secara lengkap pada Laporan Kinerja UKE I Kedeputan Pengembangan Regional.

2) Persentase (%) Keselarasan Muatan RKPD Provinsi 2021 dengan Muatan RKP 2021

Sebagai bagian dari proses penyelenggaraan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan berbagai forum perencanaan, antara lain Rapat Koordinasi Gubernur (Rakorgub), Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan/Rakortek Renbang (bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri), dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) yang ditujukan untuk membahas dan menyempurnakan rancangan awal dokumen perencanaan melalui sinkronisasi rencana kerja kementerian/lembaga di pusat dengan usulan kegiatan dan pendanaan dari daerah.

Keselarasan antara RKPD Provinsi 2021 dengan RKP 2021 dihitung dengan membandingkan usulan pemerintah provinsi untuk seluruh PN dalam RKP 2021 yang disampaikan dalam forum Musrenbangnas melalui aplikasi Krisna-Selaras, dengan usulan pemerintah provinsi yang disepakati dan tidak/belum dibahas oleh K/L dalam Musrenbangnas. Usulan yang tidak/belum dibahas dimasukkan dalam perhitungan, dikarenakan tidak ada waktu untuk pembahasan, atau merupakan kewenangan daerah sehingga seharusnya diusulkan untuk dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).

Berdasarkan capaian kinerja Kedeputan Bidang Pengembangan Regional, persentase keselarasan muatan RKPD Provinsi dengan RKP yaitu **sebesar 71,79%**, belum mencapai target PK 2020 sebesar 100%. Target PK tahun 2020 yang ditetapkan terlalu tinggi, karena tidak semua prioritas nasional merupakan prioritas daerah. Setiap daerah memiliki potensi dan isu strategis daerah yang mungkin berbeda dengan isu nasional atau daerah lainnya. Contoh hasil pengukuran keselarasan tersebut lainnya dapat dilihat pada lampiran atau dapat dilihat secara lengkap pada Laporan Kinerja UKE I Kedeputan Pengembangan Regional.

Capaian persentase keselarasan yang tidak terlalu tinggi dikarenakan antara lain: (i) usulan pemerintah provinsi dibatasi maksimal 20 usulan dalam Krisna-Selaras, untuk kemudian dibahas dalam Musrenbangnas; dan (ii) usulan pemerintah provinsi dinilai pusat belum sesuai dengan PN dan kebutuhan daerah. Dengan struktur Kementerian PPN/Bappenas, terutama pada Kedeputan Bidang Pengembangan Regional yang baru, ke depan, masing-masing Direktorat, khususnya Direktorat Regional I, II, dan III akan melakukan

analisis sebagai standpoint, dan dapat memberikan arahan/usulan kepada Direktorat Sektor Bappenas dan Pemerintah Daerah terkait Program/Kegiatan Prioritas Daerah yang selaras dengan Program/Kegiatan Prioritas Nasional.

Sementara itu, Direktorat Tata Ruang dan Penanganan Bencana ke depannya akan memperkuat analisis makro wilayah dan koordinasi dengan Direktorat terkait di Bappenas dan pemerintah daerah dalam perumusan target lima sasaran utama pembangunan (pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, Rasio Gini, dan IPM), sehingga dapat meningkatkan keselarasan Sasaran Utama Pembangunan di tingkat pusat dan daerah.

D. CAPAIAN KINERJA PENYUSUNAN “RANCANGAN PERPRES RKP 2021” MERUPAKAN IKU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 YANG BERDASARKAN IKU RENSTRA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN 2015-2019

Capaian kinerja penyusunan Rancangan Perpres RKP merupakan amanat Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan rancangan Rencana Kerja Pemerintah berdasarkan hasil koordinasi dan Pertemuan Tiga Pihak, untuk digunakan sebagai bahan Pembicaraan Pendahuluan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara oleh Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Namun demikian, pada tahun 2020 Kementerian PPN/Bappenas telah menyusun Pemutakhiran RKP 2021 hingga terbit Peraturan Presiden.



Capaian kinerja IKU “Rancangan Peraturan Presiden RKP 2021” telah dilaksanakan pada tahun 2020 oleh Kementerian PPN/Bappenas **hingga tercapai 100%**. Hal ini dibuktikan oleh terbitnya Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 Tentang RKP Tahun 2021 dan sebagaimana telah diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran RKP Tahun 2021.

IKU Rancangan Perpres RKP 2021 tidak masuk dalam IKU Perjanjian Kinerja (PK) Menteri PPN/Kepala Bappenas Tahun 2020-2024 melainkan masuk pada IKU level UKE I dan UKE II. Namun demikian, dalam PK Menteri PPN/Kepala Bappenas Tahun 2020 masih menggunakan IKU 2015-2019. Dengan demikian capaian kinerja Rancangan Perpres RKP 2021 akan dijelaskan capaian kinerjanya. Berikut uraian singkat capaian kinerja IKU Rancangan Perpres RKP 2021.

Sesuai mandat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, Pemerintah perlu menyusun RKP. RKP memuat arah kebijakan nasional satu tahun yang merupakan komitmen

Pemerintah untuk memberikan kepastian kebijakan, kerangka kelembagaan, kerangka regulasi, serta kerangka evaluasi dan pengendalian dalam melaksanakan pembangunan nasional yang berkesinambungan.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 disusun dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan jangka menengah RPJMN 2020-2024, hasil evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran tahun 2019, serta kebijakan pembangunan tahun 2020.

Dengan terjadinya pandemi global COVID-19 yang berdampak terhadap ketidakpastian perekonomian dunia dan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2020, maka tema pembangunan RKP Tahun 2021 diarahkan kepada proses pembangunan untuk pemulihan yang terdampak pandemi COVID-19. Tema pembangunan RKP Tahun 2021 adalah "Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial".

Sasaran pembangunan tahun 2021 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro ekonomi khususnya perekonomian nasional yang terdampak pandemi COVID-19, pembangunan manusia dan masyarakat, pemerataan, dan kualitas lingkungan hidup.

Mengacu pada tema dan sasaran pembangunan tahun 2021, maka arah kebijakan dan strategi pembangunan yang akan ditempuh pada tahun 2021 adalah percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dengan menitikberatkan pelaksanaan pembangunan pada pemulihan industri dan perdagangan, pariwisata, dan investasi; reformasi sistem kesehatan nasional melalui penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), health security, dan sumber daya sektor kesehatan; reformasi sistem perlindungan sosial melalui peningkatan akurasi penyaluran dan integrasi berbagai program bantuan dan jaminan sosial; serta reformasi sistem ketahanan bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan di masa prabencana dan penguatan sistem operasi tanggap darurat, baik bencana alam maupun bencana nonalam.

Untuk menghasilkan dokumen perencanaan RKP 2021 sesuai dengan tema, sasaran dan arah kebijakan tersebut, Kementerian PPN/Bappenas memberikan penugasan bagi Deputi Bidang PEPP salah satunya adalah sebagai Koordinator Penyusunan RKP 2021 dengan para Deputi Penanggung Jawab Bab/Subbab/PN pada dokumen RKP 2021. Sementara itu, Direktur PEPPS ditugaskan sebagai Ketua Pelaksana Tim Penyusun Substansi RKP 2021 yang melakukan koordinasi dengan para Direktur Penanggung Jawab/Penulis Bab/Subbab/PN.

Dalam rangka persiapan pelaksanaan penyusunan RKP 2021, terlebih dahulu dibentuk Tim Penyusun RKP 2021 yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor Kep.17/M.PPN.HK/02/2020 tentang Pembentukan Tim Penyusun RKP Tahun 2021.

Selanjutnya, Proses penyusunan RKP Tahun 2021 dibagi ke dalam empat tahapan besar, yaitu:

- Tahap Rancangan Awal RKP dimulai dari penentuan Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan sampai dengan Penyelenggaraan Rakorbangpus.
- Tahapan Rancangan RKP dimulai dari Musrenbang Provinsi, Musrenbang Nasional, sampai dengan penetapan Permen Rancangan RKP.
- Tahapan Perpres RKP dimulai dari pertemuan pendahuluan dengan DPR sampai dengan Penetapan Perpres RKP.
- Tahapan Pemutakhiran RKP yang untuk pertama kalinya diinisiasi ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Hal ini, selanjutnya ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Daftar Proyek Prioritas.

Terdapat beberapa output pada penyusunan RKP 2021 di antaranya adalah (1) dokumen Rancangan Awal RKP 2021; (2) dokumen Rancangan RKP 2021; (3) dokumen Rancangan Akhir RKP 2021; (4) dokumen Pemutakhiran RKP 2021; (5) laporan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan dalam Rangka Penyusunan RKP 2021 yang meliputi (i) Laporan Pelaksanaan Kick Off RKP 2021, (ii) Laporan Pelaksanaan Rapat Koordinasi Gubernur Tahun 2020, dan (iii) Laporan Pelaksanaan Rakorbangpus Tahun 2020; serta (6) laporan evaluasi penyusunan RKP 2021.

a. Dokumen Rancangan Awal RKP 2021

Penyusunan dokumen Rancangan Awal (Ranwal) RKP 2021 dilaksanakan sejak Januari hingga Maret 2020. Tahapan penyusunan Ranwal RKP 2021 dimulai dengan penentuan Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan, yang kemudian diikuti dengan Kick Off Penyusunan RKP 2021, Rapat Koordinasi dengan Gubernur (Rakorgub), dan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek). Seluruh hasil pembahasan dalam setiap kegiatan tersebut dituangkan ke dalam Dokumen Rancangan Awal RKP 2021. Sebagai salah satu bentuk respon Pemerintah terhadap kondisi pandemi Covid-19, dilakukan penyesuaian terhadap outline yaitu penambahan Subbab 2.2 Antisipasi Pemulihan Pembangunan Nasional Pascapandemi COVID-19. Selain itu, berbeda dengan RKP 2020, perubahan mendasar pada Ranwal RKP 2021 yaitu tidak terdapat Bab Pembangunan Bidang.

b. Dokumen Rancangan RKP (Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5/2020 tentang Rancangan RKP 2021)

Setelah penyusunan dokumen Ranwal RKP 2021 selesai dilaksanakan, selanjutnya dilaksanakan penyusunan dokumen Rancangan RKP 2021 yang disahkan melalui Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5/2020 tentang Rancangan Awal RKP 2021, yang terdiri dari 3 Lampiran yaitu Lampiran I Narasi, Lampiran II Matriks Pembangunan, dan Lampiran III Matriks Major Project. Untuk Matriks Pembangunan dan

Matriks Major Project diolah berdasarkan Lampiran B Pagu Indikatif. Secara garis besar, dokumen narasi Rancangan RKP 2021 dengan dokumen narasi Ranwal RKP 2021 tidak mengalami perubahan. Hal ini disebabkan oleh mundurnya timeline penyusunan Ranwal RKP 2021 dalam penentuan tema yang hamper bersamaan dengan timeline penyusunan Rancangan RKP 2021.

c. Dokumen Rancangan Akhir RKP (Peraturan Presiden Nomor 86/2020 tentang RKP 2021)

Berdasarkan Permen PPN/Kepala Bappenas No. 5/2018 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah, setelah Permen tentang Rancangan RKP 2021 ditetapkan selanjutnya dilakukan penyusunan dokumen Rancangan Akhir RKP 2021. Penyusunan Rancangan Akhir RKP 2021 ini didasarkan pada hasil Pembicaraan Pendahuluan Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat, hingga ditetapkan melalui Perpres No. 86/2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021. Dokumen Rancangan Akhir RKP 2021 ini terdiri dari 3 Lampiran yaitu (i) Narasi RKP 2021 yang tercantum dalam Lampiran I; (ii) Matriks Pembangunan yang memuat Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas dengan penjabaran sasaran, indikator, target, serta alokasi pendanaannya, yang tercantum dalam Lampiran II; serta (iii) Matriks Proyek Prioritas Strategis/Major Project yang memuat Proyek Prioritas Strategis/Major Project pada Prioritas Nasional beserta alokasi pendanaannya, tercantum dalam Lampiran III.

d. Dokumen Pemutakhiran RKP (Peraturan Presiden Nomor 122/2020 tentang Pemutakhiran RKP 2021)

Selanjutnya, dokumen RKP tahun 2021 yang telah ditetapkan melalui Perpres No. 86/2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021, selanjutnya dimutakhirkan dengan mengacu pada UU No. 9/2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, hasil trilateral meeting, dan hasil penelaahan RKA K/L. Berbeda dengan pemutakhiran RKP pada tahun-tahun sebelumnya yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas, untuk pertama kalinya Pemutakhiran RKP 2021 ditetapkan melalui Peraturan Presiden yaitu Perpres No. 122/2020 tentang Pemutakhiran RKP 2021. Dokumen Pemutakhiran RKP 2021 memuat pemutakhiran narasi dokumen RKP, matriks pembangunan, dan matriks major project, yang dilakukan secara utuh (bukan matriks substansi semula-menjadi). Dokumen Pemutakhiran RKP 2021 ini terdiri dari 3 Lampiran yaitu (i) Narasi RKP 2021 yang tercantum dalam Lampiran I; (ii) Matriks Pembangunan yang memuat Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas dengan penjabaran sasaran, indikator, target, serta alokasi pendanaannya, yang tercantum dalam Lampiran II; serta (iii) Matriks Proyek Prioritas Strategis/Major Project yang memuat Proyek Prioritas Strategis/Major Project pada Prioritas Nasional beserta alokasi pendanaannya, tercantum dalam Lampiran.

e. Laporan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan dalam Rangka Penyusunan RKP 2021, meliputi (i) Laporan Pelaksanaan Kick Off Penyusunan RKP 2021; (ii) Laporan Pelaksanaan Rapat Koordinasi Gubernur Tahun 2020; dan (iii) Laporan Pelaksanaan Rakorbangpus Tahun 2020.

Sebagai bentuk inovasi “New Features” dari penyusunan RKP, dalam hal pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan adalah pelaksanaan Rapat Koordinasi dengan Gubernur (Rakorgub) Tahun 2020, yang sebelumnya diawali dengan pertemuan Kick Off Penyusunan RKP 2021.

Laporan Pelaksanaan Kick Off Penyusunan RKP 2021, memuat penjelasan tujuan utama dari pertemuan Kick Off Penyusunan RKP 2021 ini adalah untuk memperkuat sinergi dan meningkatkan kualitas dokumen RKP. Pemahaman mengenai RPJMN 2020-2024 menjadi penting bagi seluruh pemangku kepentingan sehingga perlu disampaikan dalam Kick Off Penyusunan RKP 2021 ini. Sebagai inti acara disampaikan tema, sasaran, arah kebijakan, prioritas pembangunan, serta agenda RKP 2021. Penyampaian tema pembangunan yang telah disepakati antara Menteri PPN/Kepala Bappenas bersama Menteri Keuangan. Selain itu, ditambahkan pula sesi khusus persiapan pelaksanaan koordinasi selanjutnya yaitu Rapat Koordinasi Gubernur 2020.

Laporan Pelaksanaan Rapat Koordinasi Gubernur (Rakorgub) Tahun 2020, memuat penjelasan inovasi baru yang tidak saja sebagai bentuk upaya meningkatkan efektivitas sinergi perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, namun juga sebagai upaya akselerasi pembangunan nasional menyongsong tahun emas kemerdekaan pada tahun 2045 mendatang. Secara spesifik, tujuan pelaksanaan Rakorgub adalah untuk memastikan kesiapan pelaksanaan Major Project dan proyek lainnya dalam RPJMN 2020-2024 yang akan dilaksanakan di daerah pada tahun 2021. Oleh karena itu tema yang diangkat dalam Rakorgub adalah “Memperkokoh Sinergi Pusat-Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Major Project RPJMN 2020-2024”. Walaupun dilaksanakan di awal masa pandemi COVID-19, namun pelaksanaan rapat berhasil dilaksanakan secara fisik, dengan kehadiran fisik yang sangat baik, yaitu sebanyak 27 Gubernur, 5 Wakil Gubernur (Provinsi Jawa Timur, Provinsi Maluku Utara, Kalimantan Barat, Banten, dan Sumatera Selatan), serta 2 Sekretaris Daerah (Provinsi Papua dan Provinsi Kepulauan Riau). Secara substansial, tujuan pelaksanaan Rakorgub 2020 telah terlaksana dan tercapai dengan baik, hal ini ditandai dengan penyampaian usulan proyek dari daerah yang sudah sesuai dengan kriteria dan disertai dengan rencana dukungan dan komitmen daerah.

Laporan Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) Tahun 2020, yang memuat penjelasan bentuk koordinasi pembangunan di tingkat pusat dan terkait penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2021. Hal-hal yang disampaikan pada Rakorbangpus adalah (1) Substansi dokumen Rancangan Awal RKP 2021 yang berisi tentang tema, sasaran, arah kebijakan, prioritas pembangunan, pokok-

pokok kebijakan; dan (2) kebijakan fiskal, pagu indikatif, dan kebijakan pengelolaan anggaran tahun 2021. Agenda pokok Rakorbangpus 2020 adalah (1) sesi pembukaan dengan pemaparan arahan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Rancangan Awal RKP 2021 sekaligus membuka acara Rakorbangpus 2020, dan arahan Menteri Keuangan tentang Kebijakan Fiskal Tahun 2021 (diwakili oleh Wakil Menteri Keuangan); serta (2) sesi diskusi panel dengan lima panelis dilanjutkan dengan tanya jawab yang dipandu oleh Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan Kementerian PPN/Bappenas.

f. Laporan Evaluasi Penyusunan RKP 2021

Laporan ini memuat penjelasan terkait proses pelaksanaan penyusunan RKP 2021 mulai dari persiapan, pelaksanaan, kendala yang dihadapi, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan, dan rekomendasi/saran perbaikan untuk pelaksanaan penyusunan RKP tahun mendatang. Hal besar yang dapat diambil dari proses penyusunan RKP 2021 adalah terjadinya pandemi COVID-19 yang turut mempengaruhi mekanisme kinerja dan ketepatan waktu pelaksanaan setiap kegiatan. Namun demikian, Tim Penyusun tetap adaptif dan menjaga kualitas dokumen RKP 2021 melalui kegiatan quality assurance (QA) sesuai dengan pendekatan Tematik Holistik Integratif Spasial (THIS).

Ruang lingkup QA penyusunan RKP 2021 yaitu (1) menelaah ketepatan hierarki sasaran dan indikator sasaran kinerja yang tercantum pada tiap level: impact/ultimate outcome, outcome, dan output (Prioritas Nasional–Program Prioritas–Kegiatan Prioritas–Proyek Prioritas); (2) memastikan ketersediaan dan kesesuaian informasi kementerian/lembaga (K/L) pelaksana/penanggung jawab (PJ) pada setiap level sasaran PN-PP-KP-ProP; serta (3) menjaga keselarasan tata bahasa dan penulisan narasi RKP termasuk koherensi antarbab.

Berkenaan dengan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas sebagai Kementerian/Lembaga yang memiliki *core business* dalam perencanaan pembangunan nasional berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan RKP, Kementerian PPN/Bappenas diberi mandat untuk melakukan perhitungan proyeksi Kerangka Ekonomi Makro (KEM) pada proses penyusunan perencanaan pembangunan nasional. Misalnya pada RKP 2021, Kementerian PPN/Bappenas telah menyusun KEM sejak bulan Desember 2019 dan ditetapkan pada Februari 2020 melalui Sidang Kabinet Paripurna.

Dalam penyusunan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) RKP 2021, terdapat proses dan tahapan yang diampu oleh Kedeputusan Ekonomi dapat dilihat pada Gambar berikut:

Gambar 3.1. Alur Kerja Kerangka Ekonomi Makro



Sumber: Tim Penyusunan RKP 2021

Sementara itu, untuk alur Penyusunan Kerangka Ekonomi Makro dalam rangka penyusunan RKP 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Gambar 3.2. Alur Penyusunan Kerangka Ekonomi Makro



Sumber: Tim Penyusunan RKP 2021

Proses tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:


1. Proses penyusunan KEM RKP 2021 telah dilakukan sejak akhir tahun 2019, tepatnya sejak bulan November. Pada bulan ini, tim KEM yang anggotanya bersifat lintas direktorat dan kedeputan melakukan exercise pertama terhadap KEM RKP 2021. Exercise pertama ini dilakukan dengan memfokuskan pada evaluasi kondisi ekonomi terkini dan outlook untuk tahun 2020 dan perkiraan tahun 2021. Exercise terus dilakukan dan diupdate setiap triwulan, disesuaikan dengan publikasi resmi pertumbuhan ekonomi atau jika ada perkembangan ekonomi lain yang perlu direspon dengan cepat.
2. Pada bulan yang sama, koordinasi dengan kementerian lain, dilakukan melalui mekanisme rapat interdep asumsi makro yang dilakukan setelah publikasi resmi pertumbuhan ekonomi triwulan III tahun 2019. Tim asumsi makro melibatkan:
 - Kementerian PPN/Bappenas (Deputi Bidang Ekonomi dan PMK)
 - Kementerian Keuangan (BKF, DJA, DJPPR)
 - Bank Indonesia
 - Kemenko Bidang Perekonomian
 - Kementerian ESDM
 - SKK Migas

Rapat tim asumsi makro membahas dan menyepakati asumsi makro (pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, tingkat suku bunga SPN, harga minyak dunia, dan lifting migas) untuk tahun 2019-2023.

Rapat tim asumsi makro terus dilakukan setiap triwulan, selepas publikasi resmi pertumbuhan ekonomi. Sebagai catatan, meski penyusunan KEM RKP selesai pada pertengahan tahun, tetapi berbagai indikator ekonomi yang dimuat dalam APBN atau Nota Keuangan juga melalui mekanisme rapat tim asumsi makro, dimana angka yang digunakan merupakan kesepakatan bersama, termasuk Kementerian PPN/Bappenas.

3. Setelah asumsi makro disepakati, koordinasi penyusunan KEM diikuti oleh rapat koordinasi teknis untuk membreakdown lebih detail asumsi makro dan arah kebijakan keseluruhan. Rapat koordinasi teknis bisa dilakukan sewaktu waktu sesuai kebutuhan, bahkan dalam beberapa waktu mendahului rapat interdep asumsi makro.
4. Setelah KEM disepakati lintas kementerian, termasuk sasaran PDB sisi lapangan usaha, koordinasi penyusunan KEM dilakukan di dalam internal Bappenas. Sasaran PDB lapangan usaha didiskusikan bersama direktorat sektor dan mitra KL terkait, seperti gambar berikut:

Gambar 3.3. Koordinasi Penetapan PDB Berdasarkan Lapangan Usaha

	Pertanian	<input type="checkbox"/> Direktorat Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Pertanian.
	Pertambangan	<input type="checkbox"/> Direktorat Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian ESDM
	Industri	<input type="checkbox"/> Direktorat Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Perindustrian
	Listrik	<input type="checkbox"/> Direktorat ETI dan Kementerian ESDM
	Perdagangan	<input type="checkbox"/> Direktorat Perdagangan Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional dan Kementerian Perdagangan
	Konstruksi	<input type="checkbox"/> Direktorat Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Pertanian.
	Infokom	<input type="checkbox"/> Direktorat Energi, Teknologi, dan Informasi dan Kementerian Komunikasi dan Informasi
	Jasa Keuangan	<input type="checkbox"/> Direktorat dengan Direktorat Jasa Keuangan dan BUMN dan Otoritas Jasa Keuangan
	Transportasi	<input type="checkbox"/> Direktorat Transportasi dan Kementerian Pekerjaan Umum

Sumber: Tim Penyusunan RKP 2021 (diolah, 2020)

5. Hasil KEM disampaikan kepada Kedepatian PMK untuk dijadikan dasar dalam perhitungan sasaran kemiskinan dan rasio gini. Untuk perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Direktorat PMAS menghitung pengeluaran per kapita disesuaikan dengan berdasarkan sasaran pertumbuhan ekonomi. Hasil perhitungan pengeluaran per kapita disesuaikan disampaikan ke Kedepatian SDM untuk menghitung sasaran IPM.
6. Tim KEM menghitung sasaran pertumbuhan wilayah (pulau dan provinsi) untuk dijadikan acuan oleh Kedepatian Regional dalam merumuskan sasaran dan arah pengembangan wilayah.
7. Koordinasi juga dilakukan terkait target makro pembangunan lainnya, yakni sasaran pertumbuhan ekspor non migas dan PMA/PMDN. Untuk sasaran pertumbuhan ekspor non migas, rapat koodinasi dilakukan dengan Kementerian Perdagangan, direktorat PIKEI Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia. Untuk sasaran PMA/PMDN, rapat koodinasi dilakukan dengan BKPM, direktorat PIKEI Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia.
8. Proses koordinasi terus dilakukan sepanjang tahun, terutama jika ada data ekonomi terbaru.
9. Tim KEM juga kerap mengadakan berbagai diskusi dengan ekonom swasta, akademisi, atau lembaga internasional untuk berbagai pandangan tentang kondisi ekonomi terkini dan outlook ke depan.

Tantangan dan permasalahan yang dihadapi saat menyusun KEM di antaranya:

1. Penyusunan KEM dilakukan pra-pandemi COVID-19, sehingga belum mempertimbangkan dampak persebaran COVID-19 terhadap sasaran makro nasional. Sasaran ekonomi terkoreksi cukup tajam pada tahun 2020 dan berpengaruh pada tahun 2021.
2. Strategi dan kebijakan nasional yang telah disusun dalam RKP 2020 perlu disesuaikan dengan memperhatikan dampak dari pandemi COVID-19, seperti menurunnya aktivitas masyarakat dan dunia usaha secara signifikan.
3. Penyusunan KEM dilakukan dua tahun sebelumnya, sementara dinamika perekonomian dapat terjadi sangat cepat. Sebagai perbandingan, lembaga internasional IMF dapat merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun berikutnya 4 kali dalam setahun, bahkan lebih akibat tingginya ketidakpastian.
4. Perbedaan asumsi dan model ekonomi yang digunakan antar kementerian/lembaga.
5. Perbedaan pendekatan yang digunakan tim KEM yang bersifat makro dengan direktorat sektor yang sangat mikro.

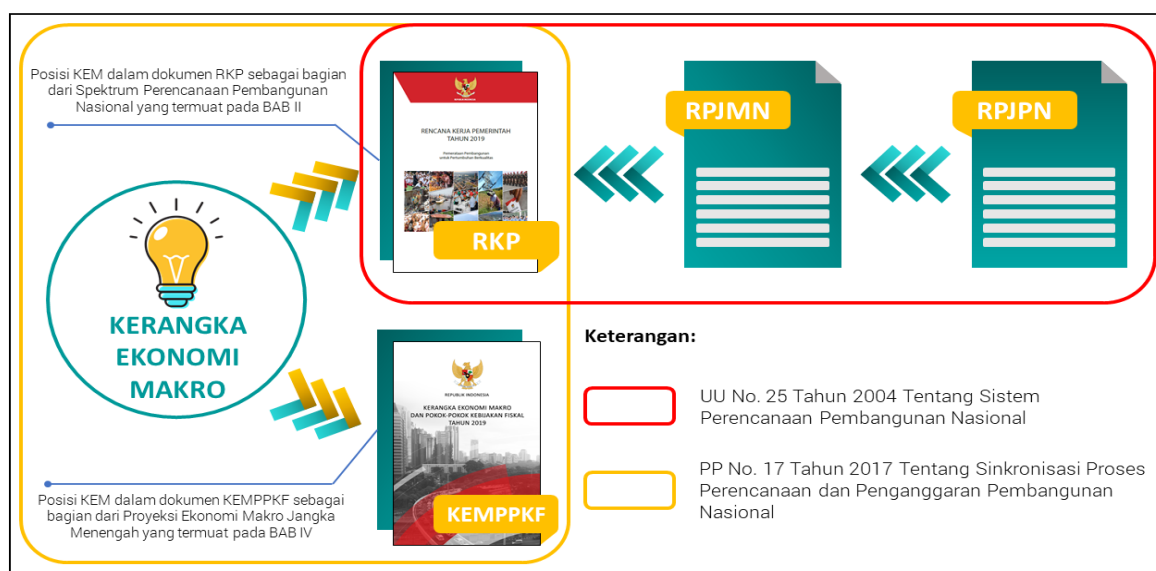
Adapun upaya pengendalian yang dilakukan untuk mengatasi risiko dari tantangan yang dihadapi pada saat penyusunan KEM RKP 2021, adalah:

1. Melakukan *exercise* KEM secara berkala untuk menyesuaikan sasaran ekonomi dengan situasi dan kondisi domestik terkini. Sebagai contoh, pemberlakuan kebijakan PSBB ketat sepanjang bulan Maret – Juni 2020 menyebabkan terjadinya penurunan mobilitas masyarakat secara drastis sehingga pertumbuhan ekonomi triwulan II 2020 berkontraksi dalam, kondisi ini harus menjadi pertimbangan dalam *exercise* KEM karena akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan tahun 2020.
2. Penguatan *capacity building* staf di Kedeputan Bidang Ekonomi untuk memahami alat analisis untuk melakukan proyeksi dan basis data yang digunakan. Selama 2020, banyak sekali pelatihan yang dilakukan, diantaranya: training mingguan penggunaan Oxford Economics, training Model Input-Output, dan ekonometrik.
3. Perbedaan pendekatan yang bersifat makro dengan mikro coba diatasi dengan melengkapi kajian-kajian yang sifatnya makro dengan kajian yang lebih mikro. Hasil kajian tersebut digunakan untuk memperlancar komunikasi dengan direktorat sektor. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional,
4. Meningkatkan koordinasi dengan K/L/D. Pergeseran fokus strategi dan kebijakan nasional, salah satunya yaitu penyaluran stimulus terhadap kelompok masyarakat dan industri yang terkena dampak COVID-19 melalui program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional).

Keterkaitan KEM, RKP, dan RPJMN

Sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Sedangkan RPJMN merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Dari uraian tersebut dapat ditarik benang merah bahwa Kerangka Ekonomi Makro merupakan bagian dari RKP dan RPJMN. Maka dari itu, penyusunan Kerangka Ekonomi Makro diperlukan untuk menjadi panduan bagi pencapaian sasaran RKP dalam rangka mengejar target yang sudah tertuang dalam RPJMN. Keterkaitan antara KEM, RKP dan RPJMN dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3.4. Keterkaitan KEM, RKP, dan RPJMN



Sumber: Laporan Kinerja UKE I Kedeputan Bidang Ekonomi Tahun 2020

Secara umum, KEM RKP menjadi payung bagi proses perencanaan pembangunan secara keseluruhan. KEM memberikan gambaran secara utuh kondisi perekonomian yang dihadapi ke depan, yang kemudian dijadikan acuan dalam penyusunan prioritas atau program di bawahnya. Perhitungan KEM juga menentukan besarnya ketersediaan anggaran (*resource envelope*) untuk dibagikan ke dalam prioritas dan program kementerian/lembaga.

IKU 2: Persentase Perencana yang Memenuhi Standar Kompetensi



Secara keseluruhan, capaian kinerja IKU “Persentase Perencana yang Memenuhi Standar Kompetensi” telah dilaksanakan sesuai *bridging* IKU dalam Perjanjian Kinerja tahun 2020 dan hasilnya **tercapai 99,19% melebihi target 85%**. Penanggung jawab pelaksanaan indikator tersebut adalah di unit kerja Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas yang dilaksanakan oleh Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana Bappenas

(Pusbindiklatren). Pusbindiklatren mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan pembinaan Jabatan Fungsional Perencana, dan program pendidikan dan pelatihan kepada Kementerian PPN/Bappenas serta institusi pusat dan daerah di bidang perencanaan pembangunan nasional.

IKU Capaian Persentase Perencana yang Memenuhi Standar Kompetensi diukur dari pencapaian indikator: (1) Persentase jumlah JFP yang memenuhi standar kompetensi; (2) Persentase jumlah karyasiswa yang lulus program pendidikan; (3) Persentase jumlah peserta terlatih; dan (4) Persentase tingkat Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Diklat dan JFP. Rekapitulasi pengukuran IKU Persentase Perencana yang Memenuhi Standar Kompetensi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.10. Pengukuran Persentase Perencanaan yang Memenuhi Standar Kompetensi

No.	Indikator Penilaian	Nilai (%)	Capaian (%)
1	Persentase jumlah JFP yang memenuhi standar kompetensi	109,00	100,00
2	Persentase jumlah karyasiswa yang lulus program pendidikan	134,00	100,00
3	Persentase jumlah peserta terlatih	107,00	100,00
4	Persentase tingkat Kepuasan pelayanan penyelenggaraan Diklat dan JFP	96,77	96,77
Persentase Perencanaan yang Memenuhi Standar Kompetensi			99,19

Sumber: Hasil Analisis Bappenas, 2020

Berikut penjelasan dari pelaksanaan IKU tersebut.

1) Persentase jumlah JFP yang memenuhi standar kompetensi

Hasil pengukuran indikator ini telah berhasil memenuhi target sehingga **tercapai 100%**. Selaras dengan tugas dan fungsi (tusi) Pusbindiklatren sebagai instansi Pembina Pejabat Fungsional Perencana tingkat Nasional, Pusbindiklatren berkewajiban membina

perencana di pusat maupun di daerah. Perencana yang dibina adalah Pejabat Fungsional Perencana dan calon pejabat fungsional yang mengikuti Pelatihan Fungsional Perencana dan telah lulus uji kompetensi.

Pada tahun 2020, jumlah Pejabat Fungsional Perencana yang memenuhi standar kompetensi ditargetkan sebanyak 450 orang dan terealisasi 559 orang (124,22 persen) yang telah mengikuti pelatihan dan lulus uji kompetensi. Realisasi peserta Pelatihan Fungsional Perencana melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena kegiatan pelatihan diselenggarakan berbasis daring atau online.

Secara umum, terjadi peningkatan jumlah peserta Pelatihan Fungsional Perencana yang memenuhi standar kompetensi dengan rincian sebagai berikut: (1) jenjang ahli pertama (target 200 orang, realisasi 200 orang); (2) jenjang ahli muda (target 200 orang, realisasi 240 orang); (3) jenjang ahli madya (target 100 orang, realisasi 99 orang); dan (4) jenjang ahli utama (target 10 orang, realisasi 20 orang). Perbandingan target dan realisasi kelulusan perencana dalam Pelatihan Fungsional Perencana sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 3.11. Perbandingan Tingkat Kelulusan Peserta Pelatihan Fungsional Perencana Tahun 2019 dan 2020

Program	2019			2020		
	Rencana (orang)	Realisasi (orang)	Persentase (persen)	Rencana (orang)	Realisasi (orang)	Persentase (persen)
Kelulusan Pelatihan Fungsional Perencana	530	423	80	510	559	109
Ahli Pertama	220	118	54	200	200	100
Ahli Muda	200	221	111	200	240	120
Ahli Madya	100	72	72	100	99	99
Ahli Utama	10	12	120	10	20	200

Sumber: Laporan Kinerja Pusbindiklatren, 2021

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian pada tahun 2020 terdapat peningkatan capaian jumlah JFP jika dibandingkan tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun tahun 2020 terjadi wabah pandemik Covid-19, minat JFP di pusat maupun di daerah untuk mengikuti pelatihan masih tinggi melalui media daring. Dengan demikian, peningkatan jumlah JFP yang lulus Pelatihan Fungsional Perencana diharapkan dapat meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan nasional, utamanya keselarasan dalam hal perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional.

2) Persentase jumlah karyasiswa yang lulus program pendidikan

Secara umum, indikator persentase jumlah karyasiswa yang lulus program pendidikan telah **tercapai 100%**. Upaya mewujudkan ASN perencana yang berkualitas dilakukan melalui peningkatan kompetensi bagi aparatur yang dimaksudkan untuk meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan multidisiplin. Dengan mempertimbangkan jumlah kebutuhan ASN perencana yang berkualitas, pada tahun 2020, Kementerian PPN/Bappenas merencanakan kelulusan karyasiswa program pendidikan sebanyak 250 orang.

Jumlah karyasiswa yang lulus program pendidikan dalam program pendidikan adalah karyasiswa yang lulus pendidikan gelar S-2 maupun S-3 pada tahun 2020, telah menyelesaikan studinya, dan secara resmi telah dikembalikan ke instansi asal karyasiswa tersebut.

Realisasi target program pendidikan dapat dicapai, meskipun pada tahun 2020 terdapat outbreak pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) yang mengharuskan semua program pendidikan dilakuka secara daring. Selain masalah pandemic Covid-19, kebijakan Surat Edaran Direktorat Jendertal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. B/323/B.BI/SE/2019 tertanggal 31 Mei 2019 perihal Publikasi Karya Ilmiah Program Pascasarjana, Program Magister, dan Program Doktorat juga menjadi salah satu tantangan bagi karyasiswa untuk lulus tepat waktu.

Untuk merespons perkembangan perkuliahan yang terkendala akibat merebaknya Covid-19, Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan perbaikan dalam pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan. Beberapa perbaikan program pendidikan, yaitu (1) penyusunan ketentuan yang terkait dengan pembiayaan, pemberian paket data, dan komunikasi bagi karyasiswa program S-2/S-3 dalam negeri (serta linkage/luar negeri yang masih melakukan kuliah dari Indonesia) yang menjalankan perkuliahan secara daring; (2) mengalokasikan anggaran bagi karyasiswa linkage untuk menjalani tes swab sebelum karyasiswa tersebut berangkat ke luar negeri; (3) mengatur ketentuan tentang kepulangan karyasiswa dari luar negeri (karyasiswa linkage/reguler luar negeri) disesuaikan dengan protokol kesehatan Covid-19; (4) bersama-sama dengan *Japan International Cooperation Agency* (JICA), Kementerian PPN/Bappenas juga mengatur karantina mandiri bagi karyasiswa linkage yang tiba di Jepang; serta (5) pemberian *self-quarantine allowance* untuk karyasiswa linkage/luar negeri sesuai kebijakan negara tujuan. Sebagai bentuk antisipasi Covid-19 terhadap pelaksana program pendidikan, pada tahun 2020,

Kementerian PPN/Bappenas juga memberi kesempatan kepada program studi untuk mengajukan perpanjangan durasi studi selama satu semester jika memang hal tersebut sangat mendesak dilakukan. Perbandingan jumlah peserta program pendidikan yang lulus pada tahun 2020 dan tahun 2019 disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel 3.12. Perbandingan Tingkat Kelulusan Karyasiswa Pendidikan 2019 dan 2020

Program	2019			2020		
	Rencana (orang)	Realisasi (orang)	Persentase (persen)	Rencana (orang)	Realisasi (orang)	Persentase (persen)
Dalam Negeri	230	239	104	200	230	115
Linkage	230	239	104	200	230	115
Luar Negeri	20	7	35	10	11	110
TOTAL	300	300	100	250	334	134

Sumber: LKJ Pusbindiklatren, 2021

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat peningkatan pencapaian jumlah tingkat kelulusan karyasiswa pendidikan dari tahun 2019 sebanyak 300 orang meningkat menjadi sebanyak 334 orang di tahun 2020.

Walaupun telah mencapai target indikator kinerja, kedepan diharapkan perlu terus dilakukan upaya peningkatan penyelenggaraan karyasiswa pendidikan untuk memenuhi tuntutan percepatan prioritas pembangunan nasional dan perkembangan isu-isu perencanaan pembangunan, termasuk dukungan penguatan SDM Aparatur Perencana terhadap pelaksanaan revitalisasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

3) Persentase jumlah peserta terlatih

Secara umum, pencapaian indikator “Persentase jumlah peserta terlatih” telah berhasil **tercapai 100%**. Jumlah peserta terlatih dimaksud adalah jumlah perencana di pusat maupun daerah yang melaksanakan program pelatihan non gelar melalui Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas.

Realisasi peserta pelatihan sudah melebihi target dikarenakan adanya (1) kebijakan baru dari pimpinan untuk memberikan pelatihan kepada pegawai dalam rangka mendukung tuisi Kementerian PPN/Bappenas, yaitu peningkatan kapasitas perencana daerah dalam menyusun dokumen perencanaan; (2) kebijakan penyelenggaraan pelatihan melalui daring.

Perbaikan yang dilaksanakan untuk pelatihan adalah (1) target peserta pelatihan lebih diprioritaskan kepada peserta dari daerah-daerah yang sedang dan akan melaksanakan pemilihan kepala daerah (Pelatihan Perencanaan Pembangunan Daerah-Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah/PPD-RPJMD); (2) target peserta Pelatihan *Public Private Partnership* (PPP) diarahkan kepada pemerintah daerah yang telah menjalankan proyek yang dikerjasamakan dengan badan usaha dengan mekanisme/proyek PPP; (3) memberikan Fasilitasi Penyusunan *Human Capital Development Plan* (HCDP) kepada pengelola kepegawaian daerah di Kawasan timur

Indonesia (KTI); dan (4) memberikan pelatihan perencanaan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Tabel 3.13. Perbandingan Penyelenggaraan Pelatihan Tahun Anggaran 2019 dan 2020

Program	2019			2020		
	Rencana (orang)	Realisasi (orang)	Persentase (persen)	Rencana (orang)	Realisasi (orang)	Persentase (persen)
Dalam Negeri	900	1.367	152	675	725	107
Linkage	0	0	0	0	0	0
Luar Negeri	100	141	141	0	0	0
TOTAL	1.000	1.508	151	675	725	107

Sumber: LKJ Pusbindiklatren, 2021

4) Persentase tingkat kepuasan pelayanan penyelenggaraan Diklat dan JFP

Secara umum, hasil penilaian tingkat kepuasan pelayanan penyelenggaraan Diklat dan JFP telah **tercapai 96,77%**. Hal ini diperoleh dari rata-rata dari penilaian indikator: 1) Tingkat Kepuasan Karyasiswa Program Pendidikan; 2) Tingkat Kepuasan Peserta Pelatihan; dan 3) Tingkat Pelayanan Jabatan Fungsional Perencana. Berikut rincian hasilnya.

Tabel 3.14. Hasil Penilaian Tingkat Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Diklat dan JFP Tahun 2020

No.	Indikator Penilaian	Nilai Capaian
1	Tingkat Kepuasan Karyasiswa Program Pendidikan	95,08
2	Tingkat Kepuasan Peserta Pelatihan	98,99
3	Tingkat Pelayanan Jabatan Fungsional Perencana	96,23
	Rata-rata	96,77

Sumber: LKJ Pusbindiklatren (diolah 2020)

Tingkat kepuasan pelayanan pendidikan dan pelatihan serta fasilitasi JFP diukur dengan menggunakan kesesuaian standar pelayanan Pusbindiklatren dengan standar pelayanan prima.

Kementerian PPN/Bappenas melalui Pusbindiklatren melakukan survei kepuasan kepada para penerima beasiswa Pusbindiklatren, baik program pendidikan, pelatihan, maupun JFP. Jumlah responden program pendidikan pada tahun 2020 sebanyak 409 orang yang mengikuti program S-2 dalam negeri (program S-2 afirmasi dan program S-

2 reguler) serta program S-2 linkage (linkage Jepang, linkage Premium, dan split site). Pertanyaan yang diajukan mencakup lima aspek penilaian, yaitu penyebaran informasi, pelayanan staf, penempatan, pendaftaran dan seleksi, serta tunjangan. Hasil penilaian sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.15. Perbandingan Hasil Penilaian Kepuasan Karyasiswa Program Pendidikan Tahun 2019 dan 2020

No.	Indikator Penilaian	Nilai Capaian	
		2019	2020
1	Penyebaran Informasi	91,08	95,42
2	Pelayanan Staf	99,27	99,57
3	Penempatan	97,80	99,02
4	Pendaftaran dan Seleksi	98,35	98,78
5	Tunjangan	85,33	82,64
Rata-rata		94,36	95,08

Sumber: LKJ Pusbindiklatren, 2021

Dari tabel di atas, terjadi kenaikan hasil capaian pelayanan program pendidikan dari hasil capaian tahun 2020. Dari lima indikator yang dinilai, hanya indikator tunjangan (biaya hidup) yang mengalami penurunan sebesar 2,7 poin. Hal ini dikarenakan pemberian tunjangan biaya hidup mengacu pada ketentuan standar biaya masukan (SBM) Kementerian Keuangan. Meskipun demikian, untuk program pendidikan, Pusbindiklatren melakukan penyesuaian besaran biaya pada komponenkomponen lainnya.

Tabel 3.16. Perbandingan Hasil Penilaian Kepuasan Peserta Pelatihan Tahun 2019 dan 2020

No.	Indikator Penilaian	Nilai Capaian	
		2019	2020
1	Penyebaran Informasi	98	-
2	Pelayanan Pusbindiklatren	96	99,73
3	Penempatan	98	-
4	Pendaftaran dan Seleksi	94	99,73
5	Fasilitas/Sarana	-	97,77
6	Kurikulum	-	98,76
Rata-rata		96	98,99

Sumber: LKJ Pusbindiklatren, 2021

Dari tabel di atas, pada tahun 2020, indikator penyebaran informasi dan indikator penempatan digabungkan dengan indikator pelayanan Pusbindiklatren. Pada tahun 2020 juga ditambahkan indikator fasilitas/sarana dan indikator kurikulum. Kenaikan terjadi pada program pelatihan dari capaian tahun 2019, untuk dua indikator yang dinilai. Kenaikan penilaian responden yang tertinggi adalah pada indikator pendaftaran dan seleksi, yaitu sebesar 5,73 persen. Hal ini dikarenakan Pusbindiklatren terus melakukan peningkatan efisiensi pelayanan website bagi calon peserta pelatihan. Sebanyak 485 dari 725 orang peserta pelatihan telah berhasil mengisi kuesioner dengan aplikasi Sipena. Namun, masih ada pelatihan yang belum menggunakan aplikasi Sipena sehingga peserta tidak dapat mengisi kuesioner. Dengan demikian, total kuesioner yang terisi sebanyak 66,89%.

Tabel 3.17. Perbandingan Hasil Penilaian Kepuasan Pelayanan Jabatan Fungsional Perencana Tahun 2019 dan 2020

No.	Indikator Penilaian	Nilai Capaian	
		2019	2020
1	Penyebaran Informasi	-	95,71
2	Pelayanan Staf	95,00	97,00
3	Penempatan	-	96,60
4	Pendaftaran dan Seleksi	-	95,71
	Rata-rata	95,00	96,23

Sumber: LKJ Pusbindiklatren, 2021

Pelaksanaan pembinaan JFP tahun 2020 salah satunya adalah melalui Pelatihan Fungsional Perencana yang diperuntukkan bagi para PNS yang baru pertama kali diangkat dan atau pindah jabatan ke dalam JFP serta bagi para perencana yang akan naik ke jenjang jabatan setingkat lebih tinggi dalam JFP. Dari Tabel 3.7 di atas, data responden yang diambil adalah sebanyak 559 dari peserta pelatihan dan 111 dari tamu yang berkunjung ke Pusbindiklatren selama periode tahun 2020. Selama tahun 2020, Pelatihan Fungsional Perencana diselenggarakan dengan metode daring dikarenakan adanya pandemi Covid-19 sehingga penilaian kepuasan juga dilaksanakan dengan metode pengisian formulir secara online.

SS-2

Terwujudnya Efektivitas Pengendalian Pembangunan Nasional

Sesuai dengan Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024, Capaian kinerja Sasaran Strategis ke-2 Terwujudnya Efektivitas Pengendalian Pembangunan Nasional ini dicapai melalui pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional. IKU ini sesuai dengan *bridging* penajaman IKU ke-3 Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

IKU 3: Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional

Capaian IKU Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional terdiri dari 2 (dua) capaian indikator kinerja, yaitu: (1) Capaian kinerja pembangunan nasional yang dilakukan melalui Evaluasi Kinerja RKP 2020; dan (2) Capaian kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang dilakukan melalui Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional.

1. Capaian Evaluasi Kinerja RKP 2020



Capaian kinerja evaluasi kinerja RKP ini berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan evaluasi Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Peraturan tersebut diturunkan dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional.

Metodologi dan mekanisme evaluasi kinerja RKP 2020 yang digunakan masih sama dengan evaluasi pada tahun sebelumnya. Pencapaian Prioritas Nasional ditentukan dari kinerja PN berdasarkan: (1) Analisis Gap (self assessment PJ Evaluasi Bappenas), dan (2) Indeks Kinerja Berdasarkan Output K/L (self assessment K/L Pelaksana). Evaluasi kinerja RKP 2020 ini dilakukan oleh Unit Kerja Eselon I Kedeputian Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan.

Hasil akhir berupa telaah keselarasan antara hasil analisis gap dengan dukungan indeks kinerja berdasarkan output K/L dan kesimpulan kinerja berdasarkan angka indeks kinerja dengan kategori Baik-Cukup Baik-Kurang Baik. Evaluasi RKP 2020 hingga Triwulan III dilaksanakan dengan tujuan: (1) Mengetahui hasil capaian kinerja pembangunan utamanya pencapaian PN sebagai bahan untuk perumusan dan perbaikan kebijakan/program/kegiatan;

dan (2) Memberi feedback dan landasan dalam penyusunan tema pembangunan pada RKP 2022. Evaluasi dilakukan atas pencapaian 5 PN tahun 2020.

Adapun capaian kinerja Evaluasi PN RKP 2020 hingga Triwulan III, yaitu: (1) PN 1: 93,01%; (2) PN 2: 73,74%; (3) PN 3: 39,97%; (4) PN 4: 77,79%; dan (5) PN: 74,02%. Secara lengkap capaian PN RKP 2020 Triwulan III, dapat dilihat pada tabel berikut dan selengkapnya pada lampiran:

Tabel 3.18. Capaian Kinerja Prioritas Nasional (PN) RKP 2020 hingga Triwulan III

No.	Prioritas Nasional	Kinerja Berdasarkan				Rata-Rata Kinerja PN		Kesimpulan Kinerja
		Capaian Sasaran PN (%)		Dukungan Output K/L (%)				
1	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	96,36	●	89,65	●	93,01	●	Baik
2	Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah	85,13	●	62,35	●	73,74	●	Cukup Baik
3	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja	28,90	●	51,04	●	39,97	●	Kurang Baik
4	Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	89,88	●	65,70	●	77,79	●	Cukup Baik
5	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	96,52	●	51,52	●	74,02	●	Cukup Baik

Keterangan: ● realisasi >90% target; ● realisasi 60-90% target; ● realisasi < 60% target
Sumber: Direktorat PEPPS, 2020

Rata-rata Kinerja Sasaran	71,72	
Rata-rata Kinerja Dukungan Output K/L	78,01	
Rata-rata Kinerja PN/ Kesimpulan Kinerja	74,87	Cukup Baik ●

Secara umum hingga triwulan III tahun 2020, sebagian besar **capaian kinerja PN RKP 2020 sebesar 74,87% dengan kategori Cukup Baik**. Namun demikian, tetap perlu didorong untuk memastikan ketercapaian pemenuhan target di akhir tahun 2020, dengan memperhatikan berbagai tantangan ataupun permasalahan yang mungkin muncul. Prioritas Nasional yang memiliki kinerja terbaik adalah PN Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan dengan rata-rata kinerja sebesar 93,01 persen. Sementara itu, PN Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja memiliki rata-rata kinerja terendah yaitu sebesar 39,97 persen. Hal ini disebabkan oleh dampak negatif pandemik Covid-19 yang berakibat pada tidak berkembangnya UMKM, pengurangan produksi industri sehingga terjadi pemutusan hubungan kerja, permintaan ekspor komoditas global menurun, dst.

Capaian kinerja PN RKP 2020 Triwulan IV diharapkan dapat tercapai dengan kategori Baik. Perlu kami sampaikan bahwa hingga laporan kinerja ini disusun hasil evaluasi kinerja PN RKP 2020 masih dalam proses perhitungan oleh Kedepatian Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan.

Salah satu contoh capaian indikator Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat adalah hasil evaluasi kinerja Program Prioritas (PP) dan Kegiatan Prioritas (KP) tahun

2020 mencerminkan dampak pandemik COVID-19. Dari capaian sasaran PP, bisa kita lihat bahwa kinerja yang dikategorikan baik (hijau) adalah: (i) PP1: Penguatan Kewirausahaan dan UMKM; dan PP 5: Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi. Hal ini sejalan dengan situasi yang ada bahwa fokus Pemerintah pada saat COVID-19 terjadi adalah bagaimana untuk menyelamatkan kewirausahaan dan UMKM yang memang terdampak sangat berat oleh wabah tersebut. Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penyebaran virus telah menghantam UMKM dari sisi supply dan juga sisi demand.

Kemudian jika kita lihat lebih dalam ke KP, kinerja yang baik ditunjukkan oleh: (i) Peningkatan Tata Kelola Pendidikan dan Pelatihan Vokasi; dan (ii) Pendalaman Sektor Keuangan. Hal ini juga sejalan dengan situasi kebijakan yang diambil Pemerintah saat Pandemi COVID-19, dimana pelatihan vokasi meningkat pesat terutama dilakukan secara daring (online) sebagai bagian dari program Kartu Pra Kerja. Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi berupa bantuan biaya yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja ter-PHK atau pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Dengan adanya COVID-19, Pemerintah menyalurkan Kartu Pra Kerja untuk pekerja yang ter-PHK dimana jumlahnya sangat tinggi.

Sementara itu terkait mekanisme, perbaikan yang dilakukan yaitu pemetaan output K/L yang mendukung KP dilakukan lebih awal berdasarkan data pada aplikasi e-Monev sehingga dapat mempercepat proses penyusunan format kertas kerja. Kemudian, pelaksanaan Rakor per bidang Kemenko dilaksanakan pada bulan September 2020 agar dapat mensosialisasikan konsep dan kertas kerja evaluasi kepada K/L Pelaksana sebagai persiapan Evaluasi TW III dan IV; serta peningkatan peran Direktorat Sektor Bappenas dalam proses konfirmasi data dan informasi terkait capaian sasaran PN-PP-KP. Mekanisme evaluasi melibatkan tiga pihak, yaitu: (1) Bappenas - Direktorat PEPPS sebagai pihak pengolah dan analisis data; (2) Bappenas-Direktorat Sektor sebagai sumber data pencapaian sasaran PN-PP-KP; dan (3) K/L Pelaksana sebagai sumber data dukungan output K/L terhadap KP.

Tindak lanjut atas perbaikan metode evaluasi ke depan, yang akan mulai dilakukan pada penyusunan Evaluasi RKP 2020 hingga triwulan IV adalah melakukan finalisasi penyempurnaan metode evaluasi menjadi 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan kinerja (dengan menyempurnakan penentuan bobot pada tiap variabel kinerja) dan pendekatan kualitas belanja yang akan mempertimbangkan aspek alokasi belanja sekaligus penyerapannya, baik berbasis K/L maupun PN. Pendekatan evaluasi dengan kualitas belanja akan dilakukan dengan kolaborasi data alokasi pendanaan pembangunan.

Untuk meningkatkan capaian kinerja tersebut, pada tahun 2020 Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan kunjungan kerja bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas, Gugus Tugas Kementerian PPN/Bappenas untuk Percepatan Penanganan Covid-19, dan Para Pejabat dan Perencana terkait. Kegiatan tersebut dilakukan utamanya untuk melihat

langsung pemulihan ekonomi dengan tetap melaksanakan protokol produktif dan aman Covid-19 dan memastikan perencanaan pembangunan nasional berjalan sesuai dengan pendekatan tematik, holistik, integrated dan spasial (THIS).

Berhubung tahun 2020 terjadi wabah pandemi Covid-19, Kementerian PPN/Bappenas hanya melakukan kunjungan kerja ke beberapa provinsi percontohan, seperti, Provinsi NTT (Labuan Bajo, Provinsi Gorontalo, Provinsi Bangka Belitung (Belitung), Provinsi Bali (Denpasar), Provinsi Jawa Tengah-D.I. Yogyakarta, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Jawa Barat (Tasik-Garut).

Kunjungan kerja ini selain memberikan pembelajaran bagi Para Perencana Bappenas dalam menjalankan fungsi *clearing house*, juga menghasilkan data dan informasi (*evidences*) tentang dampak sosial-ekonomi dari pandemi covid-19, serta kapasitas dan kesiapan daerah dalam melakukan pemulihan ekonomi dan sosial serta transformasi ekonomi. Rekomendasinya menjadi masukan bagi K/L dan Pemda terutama terkait:

- Dukungan untuk percepatan pemulihan kondisi ekonomi dan sosial yang terdampak pandemi covid-19.
- Dukungan untuk transformasi ekonomi di daerah, misalnya: sektor Pariwisata (berbasis budaya dan alam), sektor Industri berbasis jasa, seni, dan budaya serta UMKM, sektor industri pengolahan, serta didukung oleh kuantitas dan kualitas SDM daerah yang handal, dan infratraktur yang memadai.

Sebagai contoh hasil yang diperoleh dari kunjungan kerja tersebut dapat dilihat pada ringkasan atau *highlight* permasalahan pembangunan dan rekomendasinya pada tabel berikut:

1. Provinsi Bangka Belitung

1. FAKTA	PT. Ration Bangka Abadi (RBA) merupakan pengelola KI Sadai. Di dalam Kawasan terdapat Pelabuhan terintegrasi yang dikelola PT. Sadai Terminal Internasional Logistik (STIL)	Rencana Kawasan seluas 1000 Ha, dengan 167 Ha sudah <i>land clearing</i> bekerja sama dengan PT Waskita Karya. Telah mendapat AMDAL untuk 400 Ha pada tahun 2018.	Pembiayaan pengembangan KI Sadai yaitu: 30% dana perusahaan dan 70% pinjaman dari lembaga pembiayaan asing.	Badan Pengelola KI Sadai sedang melakukan revisi bisnis plan	3. REKOMENDASI
2. MASLAH	 Izin Lingkungan untuk pelabuhan belum diterbitkan KLHK, karena pelabuhan belum masuk penlok pada Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Kemenhub  Keterbatasan APBD dalam membantu penyediaan fasilitas air baku (pompa baru, dan saluran)  Dampak Covid-19: penundaan operasional dan pembahasan MOU dengan investor	 Daya dukung Ki masih kurang: kapasitas jalan menuju KI, sumber air baku, dan pasokan listrik  Sinkronisasi kebijakan antar K/L dan koordinasi pengendalian kurang	 Penyediaan Infrastruktur Pembangunan akses jalan TransBangka, penyediaan air baku, listrik, dan gas  Komunikasi dengan Investor Pembahasan MOU yang tertunda akibat Covid19  Revisi Bisnis Plan: diarahkan untuk menyempurnakan proyeksi kapasitas produksi, jenis produk dan pasar  Ijin Penetapan Lokasi Pelabuhan Perlu dilengkapi dengan analisis melalui metode <i>cost to cost</i> untuk mendukung usulan penetapan Penlok oleh Kementerian Perhubungan  Penguatan Koordinasi dan Sinergi antara K/L, Pemda dan PT RBA selaku badan usaha pengelola  Pelibatan Masyarakat Pengembangan kemitraan antara Badan Pengelola dengan masyarakat dan Pemda dalam penyediaan tenaga kerja, pangan dan jasa yang didukung CSR dan dana desa		
PROTOKOL KESEHATAN					
 Telah dilakukan upaya <i>crowd management</i> dan <i>social distancing</i>		 Tersedianya fasilitas cuci tangan dan <i>hand sanitizer</i>		 <i>Queue and interaction management</i> baik.	
		 Pekerja pembangunan di lapangan belum menggunakan masker dan mencuci tangan secara konsisten.			

Sumber: Laporan Kunker di Provinsi Bangka Belitung, 2020

2. Provinsi Jawa Tengah

1. FAKTA

- 1 Kemiskinan di Kab Purworejo 11,45%, di Kab. Kulonprogo 17,39%, dan Kab. Magelang 10,67%. Ketiga kabupaten terdampak pengembangan Zona Otorita BOB
- 2 Percepatan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah dapat didorong dari sektor pariwisata karena termasuk 5 DPSP
- 3 Telah beroperasi YIA dengan kap. 16 juta penumpang/thn, tol trans jawa, pelabuhan cruise, dan jalur kereta api twin track
- 4 BOB dibentuk berdasarkan Perpres 46/2017 dan sejalan dengan Perpres 79/2019 untuk mempercepat perekonomian Jateng
- 5 Pengalihan status lahan menjadi non hutan (309 Ha) ditargetkan selesai November 2020. Anggaran pembangunan infrastruktur dasar dalam kawasan telah disiapkan untuk tahun 2021.
- 6 MoU dan Lol dari 3 investor resort periode 2022-2023.
4x event Endurocs (400 atlit/event) dengan track sepeda tersertifikasi UCI

3. REKOMENDASI

Dibutuhkan pelebaran jalur jalan sepanjang 6 km akan meningkatkan perekonomian 3 Kabupaten melalui pengembangan kawasan Zona Otorita BOB :

Penyediaan readiness criteria dan pembangunan fisik jalur jalan Sedayu-BOB sepanjang 6 km oleh KemenPUPR

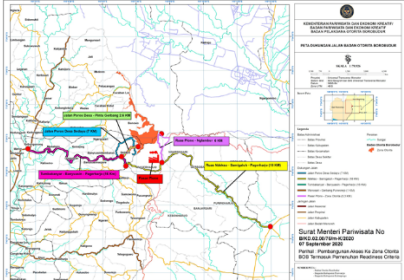
Zona Otorita BOB menjadi bagian dari action plan percepatan investasi di dalam ITMP untuk periode 2021-2024.

2. MASALAH


- Jalur jalan Sedayu-BOB sepanjang 6 km tidak dapat dilalui truk untuk konstruksi dan pengangkut alat berat.
- Kab. Kulonprogo dan Prov. DIY menyatakan ketidaksanggupan memenuhi Readiness Criteria untuk pelebaran jalan.

Zona otorita BOB perlu dimasukkan menjadi zona prioritas investasi tahun 2021-2024 dalam ITMP

Rencana pengembangan Kawasan Pantai Selatan Yogyakarta, kerjasama dengan Paku Alam, membutuhkan dukungan KPBU dari Bappenas dan Kemenkeu



Dokumentasi



Sumber: Laporan Kunker di Provinsi Jawa Tengah-D.I Yogyakarta, 2020

3. Provinsi Sulawesi Utara

1. FAKTA

- 1 KEK/KI Bitung dikelola oleh PT Membangun Sulut Hebat/MSH (BUMD). Telah dibangun jalan dalam Kawasan dan Gedung administrator.
- 2 Telah dikuasai lahan 92,79 Ha atas nama pemprov Sulut namun belum dilimpahkan kewenangan kepada PT. MSH sebagai pengelola Kawasan
- 3 PT. Futal sebagai anchor investor berencana membuat 4 pabrik. Saat ini baru dibangun 1 pabrik pengolah sampah dengan luas 6,8 Ha.
- 4 Sebagian besar perusahaan pada zonasi 534 Ha belum menikmati fasilitas KEK. Tercatat baru satu perusahaan yang mengajukan fasilitas KEK.
- 5 Berkaitan dengan investasi: terdapat 18 perusahaan eksisting, 51 perusahaan visiting, 35 perusahaan menyampaikan Lol, 7 perusahaan sudah MoU, dan 2 perusahaan sudah Memorandum of Agreement.
- 6 KEK Bitung langsung terhubung dengan gerbang tol Manado-Bitung di gerbang utama. Pasokan Listrik sudah teraliri oleh PLN pada industri eksisting

3. REKOMENDASI

- 1 Promosi dan fasilitasi investasi untuk (i) mitra strategis PT MSH, dan (ii) menambah populasi industri khususnya industri yang mengolah sumber daya unggulan Sulut khususnya perikanan dan pengolahan kelapa.
- 2 Percepatan penyiapan pembangunan “rest area” (stasiun pengisian bahan bakar, serta perbaikan/perawatan kapal) sebagai pengungkit aktivitas dan investasi di KEK/KI Bitung.
- 3 Percepatan pelimpahan pemanfaatan lahan (92,79 Ha) yang dimiliki Pemprov kepada Pengelola Kawasan untuk mempercepat penyiapan lahan siap investasi dan memberi kepastian harga sewa.
- 4 Penyesuaian kembali masterplan serta zonasi pada siteplan untuk konsolidasi rantai pasok industri berdasarkan jenis usaha/produk.
- 5 Peningkatan koordinasi K/L dan Pemda untuk membantu debottlenecking isu-isu terkait investasi, lahan dan infrastruktur.

2. MASALAH

Dari rencana 534 Ha sesuai masterplan, lahan yang telah dikuasai penuh oleh Pemda: 97,79 Ha dan belum dilimpahkan sebagai aset PT MSH; dan 441,21 Ha sisanya masih dikuasai pihak lain.

Pengelola mampu mendatangkan Investor (PT. Futal dan PT. Indoworld) namun tidak berlokasi pada lahan 92,79 Ha yang dikuasai. Perusahaan membeli tanah secara mandiri pada zonasi 534 Ha. Pembangunan tertunda karena pandemi. Penetapan PT Futal sebagai anchor industry kurang tepat mewakili keunggulan (value proposition) KEK/KI Bitung.

PT MSH tidak memiliki kapasitas fiskal yang memadai untuk menyiapkan kawasan sehingga setiap untuk investasi. PT MSH menghadapi kendala untuk mengkonsolidasikan perusahaan eksisting yang sudah berada di luar lahan yang dikuasai.

Investor belum siap menanamkan modal karena pandemi covid-19. Mitra kerja (para investor) sementara membatasi aktivitas di KEK Bitung.

Dokumentasi



Sumber: Laporan Kunker di Provinsi Sulawesi Utara, 2020

2. Capaian Kinerja Pembangunan Nasional

Untuk mencapai kinerja pembangunan nasional (RKP 2020) tersebut Kementerian PPN/Bappenas telah melaksanakan tugas dan fungsi pengendalian pembangunan nasional terhadap K/L/D yang melaksanakan prioritas nasional tersebut. Pengendalian pelaksanaan pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana dilakukan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. **Capaian kinerja ini melalui pengukuran IKU Persentase (%) Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional.**



Pengukuran capaian kinerja IKU “Persentase (%) Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional” dilakukan dengan cara mengukur capaian pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan RKP 2020 di tingkat pusat dan daerah. Hal tersebut Kementerian PPN/Bappenas mendapat amanah untuk menyusun perencanaan pembangunan nasional jangka panjang, menengah dan tahunan serta melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan nasional.

Secara keseluruhan, capaian kinerja IKU “Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional” telah dilaksanakan sesuai *bridging* IKU dalam Perjanjian Kinerja tahun 2020 dan hasilnya **tercapai 100% dari target 80–83,9%**. Konsistensi capaian maksimal tersebut disebabkan oleh kondisi diantaranya:

1. Koordinasi yang baik dan rutin dengan mitra K/L/D.
2. Komitmen bersama K/L/D terhadap arahan Presiden RI terkait upaya percepatan pembangunan prioritas nasional di pusat dan daerah.

Rencana perbaikan dalam mempertahankan/meningkatkan hasil capaian kinerja pengendalian pembangunan nasional tersebut adalah:

1. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan mitra K/L/D dalam pengendalian, pemantauan dan evaluasi pembangunan nasional
2. Menggunakan teknologi dan informasi secara intensif dan efisien dalam koordinasi dengan mitra K/L/D.

Rekapitulasi capaian kinerja IKU Persentase (%) Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.19. Pengukuran Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional

No.	Indikator Penilaian	Capaian (%)
1	Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat	100,00
2	Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah	100,00
Rata-rata		100,00

Sumber: Hasil Analisis Bappenas, 2020

Berdasarkan tabel di atas, capaian indikator tersebut secara singkat dijelaskan sebagai berikut:

a. Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat



Capaian indikator Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat Rekomendasi ini dihasilkan dari pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional. Hal tersebut merupakan hasil dari pemantauan, evaluasi, dan pengendalian terhadap pelaksanaan RKP 2020 yang harus ditindaklanjuti oleh K/L. Rekomendasi dapat dilihat melalui laporan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian; dokumen perencanaan dan penganggaran K/L; serta laporan lainnya. Rekomendasi dianggap ditindaklanjuti jika K/L telah melakukan rekomendasi tersebut.

Secara keseluruhan, Capaian indikator Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat Rekomendasi ini telah **tercapai 100% dari target 100%**. Hal ini dapat dilihat dari semua rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian terhadap pelaksanaan RKP 2020 yang dihasilkan oleh masing-masing unit kerja kedeputian telah disampaikan dan ditindaklanjuti oleh K/L terkait.

Tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja pengendalian prioritas pembangunan nasional tahun 2020, utamanya bersumber dari pandemi COVID-19 yang terjadi diluar kendali semua pihak. Shock yang terjadi ini tidak bisa dengan mudah untuk diatasi pada tahun 2020. Kesulitan tidak hanya terjadi dalam perekonomian nasional, tapi juga global. Namun demikian, untuk mengatasi tantangan dan hambatan yang ada, di tahun yang akan datang perlu dilakukan mitigasi, antara lain:

1. Refocusing/redesign program dan kegiatan yang visible dilakukan saat pandemi masih melanda, namun secara perlahan terus mendorong pemulihan ekonomi nasional.
2. Perkuatan koordinasi dengan K/L mitra kerja untuk bersama-sama mengatasi pandemi.
3. Menerapkan pola kerja baru yang adaptif terhadap new normal, didukung oleh optimalisasi pemanfaatan IT.

Rencana Perbaikan yang akan dilakukan untuk mempertahankan/meningkatkan hasil capaian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan koordinasi dengan menggunakan teknologi dan informasi secara efisien.
2. Meningkatkan kerjasama dengan *stakeholder* terkait.

Rekapitulasi indikator persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi dan pengendalian yang ditindaklanjuti K/L berdasarkan Koridor PN RKP 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.20. Pengukuran Indikator Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat

Koridor PN RKP 2020	Jumlah Rekomendasi yang Ditindaklanjuti K/L	Jumlah Total Rekomendasi	Nilai Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)=(2/3)*100%
PN 1	33	33	100
PN 2	33	33	100
PN 3	24	24	100
PN 4	13	13	100
PN 5	9	9	100
TOTAL			100%
Persentase (%) Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat			

Sumber: Hasil Analisis Bappenas, 2020

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh rekomendasi yang dihasilkan Kementerian PPN/Bappenas terkait pengendalian pencapaian target PN RKP 2020 telah disampaikan dan ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga terkait.

Contohnya, berdasarkan hasil evaluasi, rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh Badan Pusat Statistik terkait dengan rencana pembangunan nasional tahun 2021 yang akan dilakukan adalah perbaikan kualitas perhitungan produksi padi/beras menggunakan KSA. Rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan tersebut di atas telah ditindaklanjuti 100% oleh Badan Pusat Statistik sebagai mitra kerja Direktorat Perencanaan Makro dan Analisis Statistik.

Contoh lainnya, Kementerian PPN/Bappenas pada tahun 2020 memberi arahan untuk menetapkan sasaran inflasi pangan bergejolak (*volatile food*/VF) dan menjadikannya sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Perdagangan selama periode 2020-2024. Arahan tersebut dituangkan di dalam RPJMN 2020-2024 dan ditindaklanjuti oleh Kementerian Perdagangan dengan mencantumkan target inflasi VF di dalam Renstranya. Dalam bidang keuangan negara, pada tahun 2020 dilakukan evaluasi yang menghasilkan 4 (empat) rekomendasi. Rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan tersebut telah ditindaklanjuti 100 % oleh Kementerian Keuangan sebagai mitra kerja Kementerian PPN/Bappenas. Hasil capaian indikator Persentase Kinerja Pengendalian

Pembangunan Pusat lainnya secara lengkap dapat dilihat pada Laporan Kinerja Unit Kerja Eselon I Kedeputusan Tahun 2020.

b. Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah

Capaian indikator Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah dihasilkan dari upaya dalam pengendalian pencapaian pembangunan prioritas nasional di daerah yang menjadi kewenangan Kementerian PPN/Bappenas. Pelaksanaan kinerja pengendalian pembangunan daerah dilakukan dan tanggung jawab Kementerian PPN/Bappenas melalui Kedeputusan Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan (PEPP).

Secara keseluruhan, indikator kinerja persentase kinerja pengendalian pembangunan daerah **telah tercapai 100%**. Hal ini dapat diartikan bahwa Kementerian PPN/Bappenas melalui Kedeputusan PEPP telah menyelenggarakan pengendalian pembangunan daerah pada tahun 2020, melalui:

(1) Evaluasi Pembangunan Daerah

Evaluasi Pembangunan Daerah (EPD) bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap hasil kinerja pembangunan daerah serta memberikan informasi hasil pembangunan daerah kepada pemangku kebijakan perencanaan untuk dimanfaatkan sebagai salah satu masukan dalam proses perencanaan pembangunan. Pada awalnya, fokus EPD Tahun 2020 adalah pada pencapaian pembangunan daerah dan evaluasi tematik berdasarkan tema RKP 2020. Namun, dengan adanya pandemi covid-19 menyebabkan ruang lingkup pelaksanaan EPD tahun 2020, menjadi: (1) Evaluasi Pencapaian Pembangunan Daerah; dan (2) Evaluasi Adaptasi Daerah dalam Penanganan Covid-19; (3) Uji Coba Evaluasi Dukungan Daerah terhadap Capaian Prioritas Nasional. Hasil Evaluasi Pembangunan Daerah (EPD) sebagai berikut:

1. Hasil evaluasi pencapaian pembangunan daerah di 34 provinsi:
 - a. Target makro RKP dan RKPD 2020 di 34 Provinsi sulit untuk dicapai di tengah situasi pandemi covid- 19, dan hampir semua provinsi melakukan perubahan pada target makro.
 - b. Sebagian besar daerah memiliki progress pencapaian lebih baik dibandingkan dengan nasional, pada indikator tingkat kemiskinan dan TPT.
 - c. Isu strategis pembangunan yang banyak menjadi perhatian pemerintah daerah adalah isu terkait konektivitas dan infrastruktur wilayah, ketenagakerjaan dan pengangguran, struktur ekonomi daerah, dan kemiskinan.
 - d. Telah disusun rekomendasi kebijakan tiap provinsi yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi proses perencanaan pembangunan.

2. Hasil Evaluasi Adaptasi Daerah dalam Penanganan COVID-19 di 34 provinsi:
 - a. Realisasi belanja daerah lebih kecil dibandingkan dengan realisasi pendapatan.
 - b. Mayoritas daerah mengalokasikan penganggaran covid-19 terbesar untuk penanganan bidang kesehatan dan terkecil untuk penanganan dampak ekonomi.
 - c. Realiasi penanganan covid-19 terbesar pada penanganan bidang kesehatan dan terkecil untuk penanganan dampak ekonomi.
 - d. Mayoritas pemerintah daerah menurunkan target pertumbuhan ekonomi dan memproyeksikan terjadinya peningkatan angka kemiskinan dan pengangguran tahun 2020.
 - e. Skenario pemulihan ekonomi daerah fokus pada pariwisata, UMKM, investasi, dan industri.
 - f. Telah disusun rekomendasi kebijakan yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi proses perencanaan pembangunan.
3. Hasil Uji Coba Evaluasi Dukungan Daerah terhadap Capaian Prioritas Nasional di Provinsi Jawa Timur:
 - a. Proses pengerjaan self tagging program secara manual membutuhkan waktu yang cukup lama, karena belum ada sistem yang dapat memetakan dukungan program daerah terhadap PN-PP-KP.
 - b. Distribusi dukungan program daerah terhadap PN, uji coba pada dokumen RPKP Provinsi Jawa Timur adalah sebesar 42 persen terhadap PN1, 29 persen terhadap PN3, 17 persen terhadap PN4, 8 persen terhadap PN2, dan 4 persen terhadap PN5.
 - c. Kegiatan prioritas paling banyak didukung adalah Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Cara Pembelajaran, dengan jumlah dukungan sebanyak 27 program.
 - d. Tidak semua kegiatan prioritas mendapat dukungan program daerah, ada sebanyak 33 kegiatan prioritas yang tidak didukung oleh program daerah Provinsi Jawa Timur.

(2) Pemantauan Pembangunan di Daerah

Pemantauan pembangunan bertujuan untuk: (1) menampilkan perkembangan indikator sasaran pokok yang disajikan dalam Dashboard RPJMN terkait pencapaian pembangunan di 34 provinsi; (2) menganalisis keterkaitan perencanaan pusat dan daerah tahun 2020; (3) mengidentifikasi dan menganalisis kegiatan pembangunan kewilayahan pada RPJMN 2020-2024. Ruang lingkup pemantauan meliputi: 1) Pemantauan sasaran pokok yang terdiri dari indikator makro beserta komposit ataupun turunan indikator sebagai berikut: (a) Pertumbuhan Ekonomi; (b) Kemiskinan; (c) Pengangguran; (d) Gini rasio; (e) Indeks Pembangunan Manusia; 2) Pemantauan keterkaitan perencanaan pusat

dan daerah; 3) Pemantauan arah pembangunan kewilayahan RPJMN 2020–2024. Hasil pemantauan pembangunan di daerah diantaranya sebagai berikut:

- a. Data capaian indikator makro pembangunan di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota yang ditampilkan dalam dashboard PPD.
- b. Sebesar 50 persen dari indikator sasaran prioritas pembangunan RKP juga menjadi indikator sasaran dan prioritas pembangunan daerah.
- c. Program prioritas daerah mendukung arah kebijakan PN RKP, dimana dukungan tertinggi pada PN infrastruktur dan pemerataan wilayah, sedangkan dukungan terendah pada pengembangan lintas bidang perencana dan perubahan iklim.
- d. Tantangan dalam pengembangan kawasan unggulan berbasis sektor unggulan di Kabupaten Bangka, yaitu: (1) Produksi sawah per petak masih belum optimal dikarenakan permasalahan hama terutama tikus sawah yang sering menyerang pada saat padi mulai berisi; (2) Benih padi yang baru ditanam pada petak sawah terkadang mengalami gagal tanam dikarenakan terendam air akibat kondisi cuaca hujan dengan intensitas tinggi; (3) Lokasi areal persawahan pada lahan reklamasi timah merupakan lahan konsesi milik PT Inhutani yang saat ini sedang dalam proses perizinan dengan PT Inhutani.
- e. Pengembangan Kawasan Belitung sebagai salah satu lokus pengembangan Kawasan strategis yang terdapat dalam Buku RPJMN 2020–2024 masih dalam proses perbaikan aksesibilitas, atraksi dan amenities DPP Tanjung Kelayang/KEK Tanjung Kelayang. Progress sudah mencapai 4 persen dari total lahan sebesar 324 hektar. Namun untuk pengembangan akses jalan dan ketersediaan air baku, air bersih dan listrik mengikuti kebutuhan tenant yang sudah terbangun. Salah satu tenant yang sudah terbangun yaitu Hotel Sheraton
- f. Telah disusun rekomendasi yang dapat menjadi masukan bagi proses perencanaan.

(3) Pemantauan pembangunan RKP 2020 di Daerah

Pemantauan pembangunan RKP 2020 di Daerah dilakukan dengan 2 (dua) cakupan yaitu Joint Money Analisis Implementasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2020 dalam Pandemi COVID-19, dan Joint Review Pemanfaatan Dana Insentif Daerah (DID) Tahun 2020. Ruang lingkup dalam Analisis Implementasi DAK Fisik adalah DAK Fisik bidang Pendidikan dan kesehatan, sedangkan ruang lingkup dalam Review Pemanfaatan DID adalah daerah pemenang dalam Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2019.

Hasil Analisis Implementasi DAK Fisik 2020 dalam Pandemi COVID-19 diantaranya sebagai berikut.

- a. Berdasarkan hasil analisis, pelaksanaan DAK Fisik Kesehatan ditengah situasi pandemi tidak merubah target-target output, namun pandemi COVID-19 ini telah mempengaruhi target-target outcome langsung. Pada DAK Fisik Kesehatan, pelaksanaan kegiatan mengurangi pencapaian

- b. outcome langsung karena terjadinya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) serta perubahan psikologis masyarakat terhadap COVID-19. Dampak administratif pengelolaan DAK dalam masa pandemi COVID-19 juga telah mempengaruhi pencapaian outcome langsung kegiatan DAK Fisik Pendidikan. Berdasarkan hasil pemantauan, meskipun pelaksanaan DAK Fisik Pendidikan tidak merubah target output, namun pandemi COVID-19 ini telah mempengaruhi outcome langsung akibat adanya kebijakan pembelajaran secara jarak jauh/virtual. Pada periode awal pandemi COVID-19 (Maret 2020), Kementerian Pendidikan memberlakukan kebijakan pembelajaran jarak jauh sehingga fasilitas sekolah tidak digunakan oleh siswa dan guru.
- c. Hasil analisis gap perencanaan pada dokumen RKPD 34 Provinsi TA 2020 menunjukkan bahwa masih banyak menu dan kegiatan DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB serta Bidang Pendidikan yang belum masuk dalam perencanaan pemerintah provinsi.
- d. Pandemi COVID-19 memiliki dampak signifikan pada terganggunya pelaksanaan DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB serta Bidang Pendidikan TA 2020. Hal ini terjadi karena beberapa hal diantaranya: a) Pelaksana DAK di daerah masih fokus pada penanganan COVID-19; b) Hambatan pelaksanaan karena pembatasan sosial (social distancing); c) Hambatan supply (waktu pelayanan puskesmas dibatasi) dan demand (orang tidak mau datang) di puskesmas, khusus untuk DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB; d) Pelaksanaan pengadaan terhambat masalah transportasi/ logistik untuk daerah-daerah terpencil; e) Sulitnya ketersediaan tenaga kerja (untuk kegiatan fisik); f) Pengiriman alat-alat kesehatan mengalami keterlambatan; g) Banyak pabrik tidak beroperasi; h) Pengiriman bahan non lokal mengalami keterlambatan akibat hambatan transportasi; i) Adanya pembatasan mobilitas distribusi barang selama masa pandemi COVID-19; j) Pokja Panitia Pengadaan tidak bisa melakukan peninjauan lapangan dikarenakan tidak ada alat transportasi yang memadai (pesawat tidak beroperasi) sementara pembuktian kualifikasi yang dilakukan secara virtual memiliki resiko penularan COVID-19; k) Pengadaan prasarana TIK belum mendukung kebutuhan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19; l) Terbatasnya ketersediaan barang prasarana pendidikan dan kendala pengiriman untuk barang impor (kasus sarana laboratorium SMK, khusus untuk DAK Fisik Bidang Pendidikan); m) Tidak dapat dilakukannya sosialisasi tatap muka karena adanya COVID-19 sehingga tatap muka dilakukan terbatas oleh fasilitator.

Hasil Review Pemanfaatan Dana Insentif Daerah Tahun 2020 diantaranya sebagai berikut.

- a. Sebagian besar pemerintah daerah mengalokasikan DID untuk penanggulangan covid-19, baik untuk penanganan kesehatan maupun untuk mendukung pemulihan ekonomi.

- b. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan dan penggunaan DID Tahun 2020 diantaranya: 1) Masih sulitnya monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan DID akibat tidak adanya indikator keberhasilan yang jelas dalam mengelola DID; 2) Akibat adanya Pandemi COVID-19 dan PSBB di beberapa wilayah, pencapaian target realisasi program/kegiatan tidak maksimal; 3) Informasi terkait alokasi DID sering terlambat sehingga penyusunan rencana penggunaan tidak dapat optimal sesuai sasaran; 4) Tidak ada pengaturan khusus terkait bidang dan proporsi dalam pemanfaatan DID, meskipun sebenarnya menguntungkan daerah karena lebih fleksibel dalam pemanfaatan DID, namun disisi lain justru menimbulkan keraguan dalam pengajuan komitmen terkait rincian pemanfaatan DID; 5) Aplikasi dalam tata Kelola DID masih menyatu dengan ALADIN (Aplikasi Pelaporan DAK Non Fisik) dimana belum terakomodirnya DID Tambahan dalam menu aplikasi ALADIN tersebut; 6) Reward dan Punishment dalam tata kelola dana DID belum tersedia, sehingga pelaksana kegiatan tidak memiliki target pelaksanaan yang terukur; 7) Petunjuk teknis DID terbit setelah proses penganggaran. Hal ini menjadi kendala dalam pengalokasian DID kedalam program/kegiatan yang sesuai.

Selain itu, Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan pengendalian dan evaluasi melalui unit kerja Kedeputian Bidang Pengembangan Regional dengan indikator persentase jumlah K/L/D yang menindaklanjuti rencana percepatan pelaksanaan pembangunan. Ketercapaian indikator diukur dengan membandingkan jumlah K/L/D yang melaksanakan penugasan dengan jumlah K/L/D yang seharusnya melaksanakan penugasan sesuai rencana. Hasil pengukuran indikator ini dapat dilihat secara singkat sebagai berikut:

Tabel 3.21. Perhitungan Indikator Persentase Jumlah K/L/D yang Menindaklanjuti Rencana Percepatan Pelaksanaan Pembangunan

Jumlah K/L/D Pelaksana Penugasan	Jumlah Realisasi K/L/D Pelaksana Penugasan	Nilai (%)
(1)	(2)	$(3) = (1/2) * 100\%$
77	77	100%

Sumber: Hasil Analisis dari Laporan LKJ unit kerja, Kedeputian Bidang Pengembangan Regional 2020

Dalam mendukung pencapaian indikator tersebut, Kementerian PPN/Bappenas melalui Unit Kerja Kedeputian Bidang Pengembangan Regional melaksanakan kegiatan “Koordinasi Strategis Perencanaan dan Penguatan Pemerintah Daerah dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah”. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah (i) meningkatkan efektivitas terhadap perencanaan dan penganggaran untuk penguatan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah dan (ii) mengkoordinasikan kegiatan pemantauan dan evaluasi penerapan SPM di daerah. Output yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan tersebut, yaitu: (i) substansi terkait perencanaan dan penganggaran SPM pada

Dokumen RKP 2021, Dokumen Renja 2021 K/L pengampu dan (ii) Rencana Kegiatan dan Instrumen Monev Terpadu di tingkat sekber SPM dan K/L pengampu SPM. Kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan output kegiatan tersebut, yaitu: (i) rangkaian koordinasi pengampu SPM lingkup pemerintah pusat; (ii) rangkaian FGD pengampu SPM lingkup pemerintah daerah; dan (iii) perumusan evaluasi hasil kegiatan dan rekomendasi strategi.

Oleh karena kegiatan koordinasi strategis SPM bersifat lintas sektor, di lingkup pemerintah pusat dalam pelaksanaannya melibatkan direktorat sektor di Kementerian PPN/Bappenas seperti Direktorat Pendidikan, Agama, dan Kebudayaan; Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat; Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat; Direktorat Perumahan dan Permukiman; dan Direktorat Tata Ruang dan Penanganan Bencana – dan K/L pengampu SPM yaitu Kementerian Dalam Negeri (selaku koordinator Sekretariat Bersama SPM tingkat pusat), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Sosial, dan BNPB. Sementara itu, di lingkup Pemda, mencakup perwakilan OPD dari 34 Provinsi-Sekretariat Daerah (Biro Tata Pemerintahan), Bappeda, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Sosial, BPBD, OPD yang mengurus perihal trantibumlinmas, dan OPD yang mengurus perihal pemadam kebakaran.



Terwujudnya Kebijakan Pembangunan Nasional Yang Visioner

Berdasarkan Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024, sasaran strategis ini merupakan wujud dari penguatan peran enabler Kementerian PPN/Bappenas dalam percepatan. Sasaran Strategis (SS) Terwujudnya Kebijakan Pembangunan yang visioner ini dimaksud untuk mendukung tercapainya kinerja prioritas nasional RKP 2020.

Capaian sasaran tersebut diukur dari 2 (dua) indikator kinerja, yaitu: (i) Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L; dan (2) Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L. Berikut uraian pencapaian kedua indikator dimaksud.

IKU 4: Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L



IKU Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L ditujukan untuk mewujudkan sasaran terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner. Indikator ini disusun dengan tujuan untuk mengetahui tingkat penyelesaian penugasan dari arahan Presiden/arahan Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Secara keseluruhan, capaian indikator kinerja Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L telah **tercapai 100% dari target 85-87,9%**. Hal ini dapat diartikan bahwa kebijakan penyelesaian isu strategis pembangunan nasional yang dihasilkan oleh Kementerian PPN/Bappenas dapat dilaksanakan oleh Mitra K/L dan menjawab solusi permasalahan pembangunan nasional kekinian. Konsistensi capaian tersebut dapat tercapai maksimal disebabkan oleh:

1. Rekomendasi kebijakan isu strategis yang dihasilkan telah sesuai dengan Tugas dan Fungsi serta kebutuhan Mitra K/L; dan
2. Perkuatan jaringan komunikasi yang baik dengan Mitra K/L.

Rencana perbaikan dalam mempertahankan/meningkatkan hasil capaian indikator tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan mitra K/L dan sektor terkait;
2. Menggunakan teknologi dan informasi untuk berkoordinasi mitra K/L secara intensif dan efisien; dan
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi kebijakan tersebut bersama Mitra K/L sehingga hasil yang dicapai dapat bermanfaat optimal bagi masyarakat.

Adapun rekapitulasi persentase rekomendasi kebijakan penyelesaian isu strategis pembangunan nasional yang dijalankan oleh K/L dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.22. Rekapitulasi Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L

Koridor PN RKP 2020	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L	Jumlah Total Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional	Nilai Keselarasan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)=(2/3)*100%
PN 1	20	20	100%
PN 2	21	21	100%
PN 3	10	10	100%
PN 4	6	6	100%
PN 5	6	6	100%
TOTAL			100%
Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L			

Sumber: Rekapitulasi Laporan Kinerja UKE I (diolah, 2020)

Pada tahun 2020, Kementerian PPN/Bappenas telah menghasilkan beberapa rekomendasi kebijakan isu strategis pembangunan nasional sesuai dengan lingkup bidang perencanaan pembangunan. Sebagai contoh, pada lingkup bidang ekonomi adalah kegiatan koordinasi strategis perencanaan kebijakan pengendalian inflasi. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk penugasan khusus kepada Kementerian PPN/Bappenas untuk turut serta menjaga stabilitas inflasi dengan menjadi anggota Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) sebagaimana diamanatkan di dalam Keputusan Presiden No.23/2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional. Penugasan tersebut kemudian ditindaklanjuti Kementerian PPN/Bappenas (c.q. Deputi Bidang Ekonomi) dengan mengeluarkan Peraturan Menteri PPN/Bappenas No.6/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Kebijakan Pengendalian Inflasi dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional.

Kemudian pada tahun 2020, mandat tersebut dioperasionalkan oleh Direktorat Keuangan Negara dan Analisis Moneter dengan menyusun Petunjuk Pelaksanaan Tagging Pengendalian Inflasi. Hal tersebut dilakukan untuk penajaman fungsi *clearing house* Kementerian PPN/Bappenas dalam hal pengendalian inflasi, karena tagging yang dibuat merupakan bentuk pengendalian, monitoring, dan evaluasi terhadap program/kegiatan K/L yang mendukung pencapaian sasaran inflasi nasional. Kedepan Bidang Ekonomi menjalankan fungsi *clearing house* dengan mengawal pencapaian sasaran dan implementasi kebijakan pengendalian inflasi di pusat dan daerah sejak proses perencanaan, melalui: (i) Penetapan sasaran inflasi nasional dan inflasi pangan bergejolak; (ii) Identifikasi program/kegiatan K/L yang mendukung pengendalian inflasi (disusun buku padoman Tagging Anggaran Pengendalian Inflasi); (iii) Sinkronisasi kebijakan pengendalian inflasi dengan daerah melalui forum Rakortek Pembangunan, Musrenbang Provinsi, Rakornas Inflasi,

Rakorpusda Inflasi). Koordinasi bersifat multisektor, tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Nasional (TPIN) yang terdiri dari Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Nasional (TPIN) Daerah.

Contoh lainnya penugasan yang bersifat sangat strategis yang sudah berlangsung dari tahun sebelumnya adalah koordinasi percepatan pemindahan Ibu Kota Negara. Koordinasi ini dilakukan melalui 10 Pokja di bawah Tim Koordinasi Strategis Persiapan Pemindahan Ibu Kota Negara, yang salah satu output utamanya adalah Rencana Induk dan Strategi Pengembangan Ibu Kota Negara (Masterplan Ibu Kota Negara (MP IKN). Tercatat sebanyak lebih dari 60 koordinasi telah dilaksanakan di kesepuluh Pokja.

Dari penugasan yang telah berhasil dilaksanakan tersebut, dihasilkan rekomendasi agar tujuan utama dari masing-masing penugasan dapat tercapai. Dalam penugasan Koordinasi Percepatan Pemindahan Ibu Kota Negara ini, rekomendasi yang dapat disampaikan adalah:

- Melakukan penguatan peran dan optimalisasi fungsi Tim Koordinasi Strategis Persiapan Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara, khususnya dengan Pemerintah Daerah sebagai tahap selanjutnya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan koordinasi pelaksanaan pembangunan ibu kota negara termasuk persiapan transisi menuju pembentukan Otorita Ibu Kota Negara;
- Melakukan pendampingan dan fasilitasi terhadap legalisasi serta penyusunan peraturan dan regulasi untuk mendukung pelaksanaan ibu kota negara;
- Mendorong keberlanjutan dari strategi pengembangan IKN dan rencana pembangunan seluruh aspek IKN termasuk tahapan dan pembiayaan yang telah disusun hingga tahun 2020;
- Melakukan pendalaman dan pendetailan dari strategi pelaksanaan pembangunan, khususnya strategi ekonomi dan strategi pembiayaan, untuk memastikan pembangunan ibu kota negara menjadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru Indonesia yang dapat mendorong pemerataan ekonomi nasional dan pemulihan ekonomi nasional dengan membuka peluang investasi serta lapangan kerja.

Secara lengkap capaian IKU Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L **dapat dilihat pada Laporan Kinerja UKE I Kedeputian.**

IKU 5: Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L



Rekomendasi kebijakan inovasi pembangunan nasional yang dijalankan oleh K/L bertujuan untuk mengukur tingkat inovasi pembangunan yang dilaksanakan sebagai bagian dari percepatan program pembangunan nasional. Inovasi pembangunan adalah program/kegiatan yang menghasilkan kebijakan pembangunan baru diinisiasi serta dikoordinasikan oleh Kementerian PPN/Bappenas.

Secara keseluruhan, capaian indikator kinerja Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L telah **tercapai 100% dari target 75-79,9%**. Hal ini dapat diartikan bahwa rekomendasi kebijakan inovasi pembangunan nasional yang dihasilkan oleh Kementerian PPN/Bappenas dapat dilaksanakan oleh Mitra K/L demi tercapainya pembangunan nasional yang diinginkan. Konsistensi capaian tersebut dapat tercapai maksimal disebabkan oleh:

1. Rekomendasi kebijakan inovasi yang dihasilkan telah sesuai dengan Tugas dan Fungsi serta kebutuhan Mitra K/L; dan
2. Perkuatan jaringan komunikasi yang baik dengan Mitra K/L.

Rencana perbaikan dalam mempertahankan/meningkatkan hasil capaian indikator tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan mitra K/L dan sektor terkait;
2. Menggunakan teknologi dan informasi untuk berkoordinasi mitra K/L secara intensif dan efisien; dan
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi kebijakan inovasi tersebut bersama Mitra K/L sehingga hasil yang dicapai dapat bermanfaat optimal bagi masyarakat.

Adapun rekapitulasi persentase rekomendasi kebijakan penyelesaian isu strategis pembangunan nasional yang dijalankan oleh K/L dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.23. Rekapitulasi Perhitungan Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L

Koridor PN RKP 2020	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L	Jumlah Total Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional	Nilai Keselarasan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)=(2/3)*100%
PN 1	2	2	100%
PN 2	2	2	100%
PN 3	1	1	100%
PN 4	2	2	100%
PN 5	2	2	100%
TOTAL			100%
Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L			

Sumber: Rekapitulasi Laporan Kinerja UKE I (diolah, 2020)

Inovasi pembangunan merupakan program/kegiatan yang menghasilkan kebijakan pembangunan baru diinisiasi serta dikoordinasikan oleh Kementerian PPN/Bappenas. Inovasi yang ditetapkan sebagai kebijakan/program yang dijalankan oleh Kementerian/Lembaga/Daerah terkait. Pada tahun 2020, salah satu inovasi yang dilakukan adalah *capacity building* Kerangka Ekonomi Makro (KEM) Daerah, yang menghasilkan perkiraan asumsi KEM Daerah yang dicantumkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). *Capacity Building* KEM Daerah adalah bentuk inovasi Kementerian PPN/Bappenas yang memberikan penugasan kepada daerah dalam rangka menjalankan pelaksanaan kebijakan nasional yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014, klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan provinsi dan kabupaten/kota. Oleh karenanya, Direktorat Perencanaan Makro dan Analisis Statistik turut berpartisipasi dalam memberikan asistensi kepada daerah dalam bentuk rapat-rapat koordinasi, serta perencanaan terkait Kerangka Ekonomi Makro Daerah kepada provinsi/kabupaten/kota.

Contoh lainnya adalah kegiatan yang dihasilkan oleh Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF). ICCTF berfungsi sebagai instrumen pendukung pemerintah dalam menghasilkan perencanaan percepatan pelaksanaan pembangunan nasional yang berkualitas, salah satunya dengan menghasilkan rekomendasi kebijakan inovasi pembangunan dibidang perubahan iklim (khususnya tahun 2020 pada sektor kelautan dan perikanan) sebagai masukan bagi perumusan kebijakan, untuk kemudian dikoordinasikan dengan Kementerian/Lembaga dan stakeholder pembangunan lainnya.

Tahun 2020, capaian fokus program yang dilaksanakan oleh ICCTF antara lain: Coral Reef Rehabilitation Management Program-Coral Triangle Initiative (COREMAP-CTI) World Bank dan Asian Development Bank (ADB), Blended Finance, Blue Carbon dan Bioeconomic Modelling sumberdaya perikanan serta pencapaian lainnya. Uraian capaian program ICCTF akan diuraikan secara singkat pada subbab capaian kinerja lainnya. Sementara itu, untuk capaian indikator Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L dapat dilihat pada Laporan Kinerja Unit Kerja Eselon I Kedeputan.

SS-4

Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM

Berdasarkan Renstra Kementerian PPN/Bappenas tahun 2020-2024, sasaran strategis terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas. Sasaran strategis ini dapat tercapai dari capaian 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu: Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas; Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional; dan Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional. Sasaran strategis yang terakhir ini dikoordinasikan oleh unit kerja Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas. Adapun capaian kinerja IKU tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

IKU 6: Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas

Pada capaian Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian PPN/Bappenas ini akan menyampaikan tidak hanya capaian Indeks RB namun juga menyampaikan capaian Opini BPK dan Nilai SAKIP.

1. Indeks Reformasi Birokrasi



Capaian IKU Indeks Reformasi Birokrasi
Kementerian PPN/Bappenas

NILAI **83,93** (angka sementara)
dari **83,00**

Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas merupakan IKU Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024 yang di-bridging dari IKU PK Tahun 2020 "Tingkat Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kementerian PPN/Bappenas". Secara keseluruhan, capaian kinerja IKU Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas pada tahun 2020 ini diprediksi **tercapai 83,93 (angka sementara) dari target 83,00**. Capaian kinerja dari IKU Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas diperoleh dari

penilaian yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Tahun 2020, pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas secara rutin dilaksanakan dengan melibatkan Tim Reformasi Birokrasi (RB) dan Tim Agen Perubahan, baik Tim RB dan Tim Agen Perubahan pada level Kementerian maupun Tim RB dan Tim Agen Perubahan Unit Kerja Eselon I dan Eselon II. Hal tersebut mengharuskan Biro Renortala sebagai penanggungjawab Tim RB Kementerian untuk melakukan koordinasi yang intensif dengan Kementerian PAN dan RB selaku pembina pelaksanaan RB nasional dikarenakan adanya penyesuaian mekanisme penilaian sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB No. 30/2018 tentang Perubahan atas Permen PANRB No. 14/2014 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.

Tata kelola pemerintahan yang baik sejalan dengan agenda reformasi birokrasi nasional sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025 dan Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010 – 2025 untuk mewujudkan pola pemerintahan yang baik, dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan netral. Selain itu, pada RPJMN 2020 – 2024 pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik diarahkan untuk mendukung pembangunan nasional. Melalui kebijakan pengarusutamaan, diharapkan seluruh instansi pemerintah dapat meningkatkan kualitas tata kelola.

Selain itu, dalam rangka penerapan prinsip good governance, Kementerian PPN/Bappenas melaksanakan reformasi birokrasi (RB) untuk memaksimalkan tugas dan fungsi pelayanan serta perkuatan peran dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. Pelaksanaan RB di Kementerian PPN/Bappenas didasarkan pada kondisi dan kebutuhan Kementerian PPN/Bappenas dalam mewujudkan Agenda Pembangunan Nasional RPJMN 2020-2024 dan Prioritas Nasional RKP 2020 sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024.

Meskipun menunjukkan peningkatan yang cukup baik, namun masih terdapat beberapa rekomendasi terhadap peningkatan capaian seluruh area perubahan yang perlu ditindaklanjuti di tahun berikutnya serta dalam rangka menumbuhkan budaya kinerja dan memperkuat integritas pegawai di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas. Upaya perubahan yang telah dilakukan demi kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas dapat dilihat dari adanya dukungan pimpinan dan komitmen yang tinggi untuk melakukan berbagai perubahan. Adapun upaya peningkatan pelaksanaan RB di Kementerian PPN/Bappenas diantaranya sebagai berikut:

1. Manajemen Perubahan
 - a. Penetapan Roadmap RB Kementerian PPN/Bappenas 2020 - 2024
 - b. Pelibatan tanggungjawab Agen Perubahan dan komitmen Pimpinan pada Quick Wins RB:
 - Penyederhanaan birokrasi dengan penghapusan Eselon 3 dan 4

- Penerapan IDW dengan cascading manajemen kinerja berbasis aplikasi
 - Implementasi PP 17/2017 dengan perubahan database perencanaan penganggaran, Kajian Major Project, dan Kajian Enabler yang dilakukan Unit kerja
2. Deregulasi Kebijakan
Penyelesaian regulasi kebijakan terkait Quick Wins RB 2020, yakni: peraturan mengenai restrukturisasi dan penyederhanaan birokrasi, penerapan IDW, dan revisi atas turunan PP 17/2017.
 3. Penataan dan Penguatan Organisasi
Finalisasi usulan restrukturisasi organisasi dan penyederhanaan birokrasi (penghapusan Eselon 3-4)
 4. Penataan Tata Laksana
 - a. Revisi/pemutakhiran Peta Proses Bisnis sesuai Renstra terbaru
 - b. Revisi/pemutakhiran SOP sesuai dengan Peta Proses Bisnis terbaru
 - c. Implementasi SPBE secara menyeluruh
 5. Penataan Sistem Manajemen SDM
 - a. Reviu Anjab dan ABK sesuai kebutuhan dan strategi dalam Renstra
 - b. Pemutakhiran perhitungan kebutuhan pegawai 5 tahun
 - c. Reviu implementasi kebijakan HCDP
 - d. Penyelesaian cascading, pengukuran, dan penilaian kinerja individu (penerapan IDW)
 - e. Penyusunan/pemutakhiran Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)
 6. Penguatan Akuntabilitas
 - a. Penetapan Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2020 -2024
 - b. Penetapan Renstra UKE-1 2020-2024
 - c. Penyusunan Pedoman SAKIP
 - d. Penyempurnaan dan operasionalisasi aplikasi e-performance yang mengintegrasikan data kinerja dengan anggaran program/kegiatan.
 7. Penguatan Pengawasan
 - a. Revisi/pemutakhiran Peta Risiko sesuai Proses Bisnis terbaru
 - b. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penerapan SPIP berkala
 - c. Penetapan unit ZI: Direktorat Keuangan Negara dan Analisa Moneter
 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
 - a. Pemutakhiran SOP pelayanan perencanaan dan pengendalian sesuai Proses Bisnis terbaru
 - b. Perumusan kebijakan rewards and punishment serta pemberian kompensasi pelayanan
 - c. Survei mandiri kepuasan pelayanan kepada mitra kerja/stakeholders

2. Opini BPK atas Laporan Keuangan K/L

Salah satu komponen penilaian RB adalah penilaian Opini BPK atas Laporan Keuangan K/L yang WTP. Opini WTP merupakan hal yang sangat penting karena memberikan gambaran tingkat kewajaran dan akuntabilitas pengelolaan dana publik yang terwujud pada suatu laporan keuangan. Untuk mempertahankan opini tersebut Kementerian PPN/Bappenas harus dapat melakukan perbaikan proses manajemen dan menjaga kualitas pengelolaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan, serta menindaklanjuti rekomendasi BPK atas kelemahan-kelemahan yang ada. Kementerian PPN/Bappenas telah berhasil mencapai opini WTP sejak Laporan Keuangan tahun 2008 sampai dengan tahun 2019 yaitu 12 (dua belas) tahun berturut-turut.

Pada tahun 2020, BPK telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian PPN/Bappenas tahun 2019 sehingga diprediksikan pada tahun 2020 juga akan mendapat penilaian Opini WTP. Opini WTP tersebut berarti: (i) laporan keuangan Kementerian PPN/Bappenas telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah; (ii) laporan keuangan Kementerian PPN/Bappenas telah menerapkan akuntansi berbasis akrual, (iii) keandalan sistem pengendalian intern dalam penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan tercapainya opini WTP, maka menunjukkan terjaganya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja Kementerian PPN/Bappenas. Dengan semakin meningkatnya peran Kementerian PPN/Bappenas, maka semakin bertambah pula alokasi anggaran Satuan Kerja (Satker). Tahun 2020, Kementerian PPN/Bappenas memiliki 2 (dua) Satker, yaitu Satker Pusat (terdiri dari 4 Satker) dan Satker Dekonsentrasi (terdiri dari 32 Satker Provinsi).

Capaian atas pengukuran ini tidak mudah karena nilai anggaran dan jumlah satker yang dikelola semakin meningkat yang berarti tantangan dan kompleksitas proses pertanggungjawaban anggaran juga semakin meningkat. Opini WTP ini dicapai melalui kerja keras, upaya perbaikan secara terus-menerus, serta koordinasi dan kerjasama seluruh unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas, khususnya di lingkungan Setmen PPN/Settama Bappenas dan Inspektorat Utama. Setmen PPN/Settama Bappenas telah bekerja keras dalam hal pengelolaan manajemen kelembagaan, manajemen kinerja, pelayanan kelembagaan dan pelayanan anggaran. Upaya ini kemudian didukung dengan adanya pengawasan atas pengelolaan anggaran dan kinerja tersebut, antara lain melalui reviu atas laporan keuangan dan pendampingan pengelolaan anggaran.

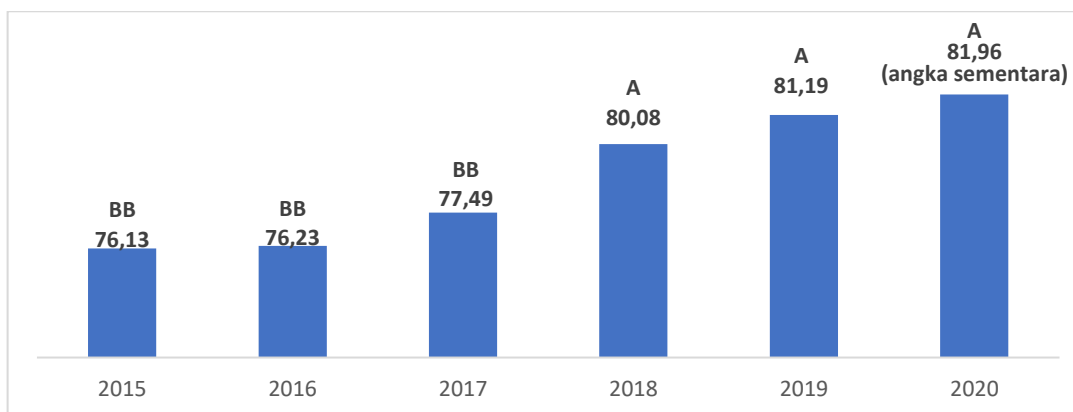
3. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Selain penilaian Opini WTP di atas, komponen penilaian Indeks RB adalah penilaian SAKIP. Sesuai amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan

implementasi atas SAKIP dengan melaksanakan perencanaan strategis, penetapan perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja serta reviu dan evaluasi kinerja.

Pada tahun 2020, Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan berbagai langkah perbaikan dalam implementasi SAKIP, utamanya terkait pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja serta pelaporan kinerja. Berdasarkan hasil evaluasi atas Laporan Kinerja yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB, Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Perlu diketahui bahwa sampai dengan tanggal 26 Februari 2021, penilaian SAKIP masih dilakukan oleh Kementerian PAN RB sehingga sementara menggunakan angka prediksi dan selanjutnya akan dilakukan pemutakhiran data. Pada tahun 2020 diprediksikan akan menunjukkan hasil evaluasi **SAKIP dengan nilai 81,96 (angka sementara) predikat A atau naik jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019 sebesar 81,19**). Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Kementerian PPN/Bappenas sudah menunjukkan hasil yang memuaskan. Perkembangan capaian hasil evaluasi SAKIP tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.

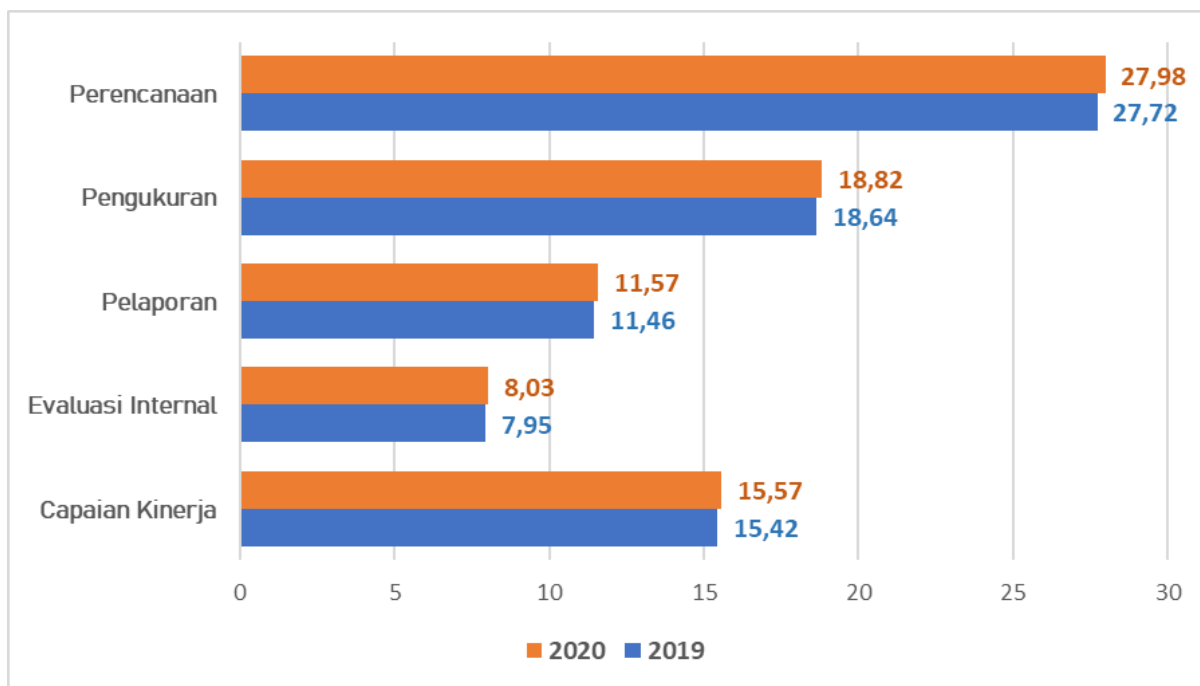
Gambar 3.5. Perkembangan Nilai Akuntabilitas Tahun 2015-2020 (angka sementara)



Sumber: Kementerian PANRB (diolah, 2020)

Meskipun secara keseluruhan nilai SAKIP Kementerian PPN/Bappenas meningkat dari tahun ke tahun, namun jika dilihat dari seluruh komponen, terjadi penurunan nilai dari komponen Capaian Kinerja. Kementerian PAN dan RB menilai bahwa Laporan kinerja di tingkat Kementerian dan Unit Kerja telah menyajikan analisis pencapaian kinerja yang berorientasi hasil, perbandingan data kinerja tahun berjalan dan tahun sebelumnya, namun kedepan perlu penyajian analisis efisiensi penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja. Berikut secara detail dapat dilihat perbandingan nilai hasil evaluasi per komponen tahun 2019-2020.

Gambar 3.6. Nilai Komponen Akuntabilitas Kementerian PPN/Bappenas Tahun lama 2019-2020 (angka sementara)



Sumber: Kementerian PANRB, 2019-2020

Walaupun Kementerian PPN/Bappenas telah mendapatkan penilaian yang baik, capaian nilai SAKIP harus terus ditingkatkan dari tahun ke tahun. Proses perbaikan telah dilaksanakan oleh Kementerian PPN/Bappenas, Berbagai upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja antara lain:

1. Memastikan Komitmen bersama melakukan perbaikan penerapan akuntabilitas kinerja diseluruh jajaran Pimpinan (Eselon 1) dari Eselon 2 hingga Koordinator dan Staf.
2. Menyusun Perjanjian Kinerja sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024 yang telah dilegalkan.
3. Menyusun Rencana Aksi untuk mengawal pencapaian kinerja
4. Membentuk Tim Penyelenggaraan SAKIP yang aktif dan berkelanjutan
5. Membangun E-SAKIP melalui penyelesaian pembangunan sistem e-Performance
6. Membangun E-SKP
7. Memastikan segala kebijakan terkait penerapan RB dapat terimplementasi sampai ke level unit.
8. Melakukan penyempurnaan cascading kinerja secara berjenjang dengan menitikberatkan pada keselarasan tujuan dan sasaran strategis dari level organisasi paling atas sampai dengan yang terendah.
9. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan kinerja, khususnya dalam meningkatkan kualitas pengukuran pencapaian tujuan dan

sasaran sehingga dapat digunakan sebagai sarana monitoring dan evaluasi secara berkala.

10. Meningkatkan kualitas pengungkapan informasi dan analisis yang memadai dalam penyajian laporan kinerja unit kerja.
11. Melakukan kajian terhadap mekanisme pemberian tunjangan kinerja kepada pegawai yang selaras dengan capaian kinerja organisasi dan individu.
12. Memaksimalkan peran agen perubahan sebagai penggerak perubahan dengan melakukan monitoring evaluasi atas pelaksanaan rencana kerjanya.

IKU 7: Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional



IKU Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan IKU Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024 yang di-bridging dari IKU PK Tahun 2020 "Tingkat Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kementerian PPN/Bappenas

Secara keseluruhan, capaian kinerja IKU Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional pada tahun 2020 diprediksi **tercapai 91,17 dari target 85,00**. Capaian kinerja dari IKU Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional diperoleh hasil survey internal maupun survey eksternal.

Survei Kepuasan ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar tingkat kepuasan stakeholder terhadap pelayanan perencanaan pembangunan nasional yang diberikan oleh Kementerian PPN/Bappenas. Tujuan yang akan dicapai dalam survei adalah sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di masa yang akan datang. Penyusunan Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan suatu langkah untuk mengakomodasi harapan dari stakeholder, menilai tingkat kepuasan stakeholder terhadap kinerja dari proses penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan nasional di Kementerian PPN/Bappenas, serta sebagai tolak ukur "apakah proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan yang sudah dijalankan efektif dan efisien".

Tahun 2020 menjadi tahun yang sangat tidak terprediksi setelah pandemi COVID-19 menyerang seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Dampak sosial dan ekonomi yang melanda Indonesia akibat pandemi ini memaksa semua level pemerintahan, baik pusat maupun daerah untuk melakukan koreksi terhadap rencana pembangunan yang telah ditetapkan. Terutama yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran

mengingat pada saat menyusun sama sekali tidak memperhitungkan pandemi. Oleh karena itu, IKU Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional ini mengambil tema Survei Evaluasi Peran Kementerian PPN/Bappenas lingkup bidang ekonomi.

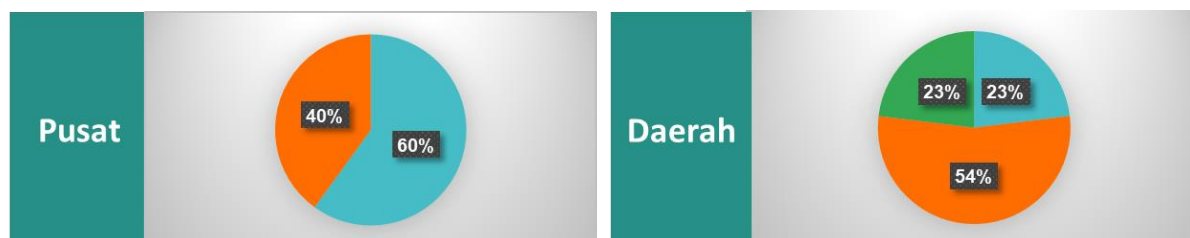
Dalam rangka mewujudkan kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih dan akuntabel serta mengedepankan pelayanan prima kepada semua mitra K/L/D, maka pengukuran kualitas pelayanan Kementerian PPN/Bappenas terhadap Mitra Kementerian/Lembaga/Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai anggota Tim Pengendalian Inflasi Nasional (TPIN) berdasarkan Keputusan Presiden No. 23 Tahun 2017, Atas arahan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Kedepuitan Bidang Ekonomi melakukan survei kepuasan stakeholders di tingkat pusat dan daerah.

Survei dilakukan *secara daring* dilakukan oleh Unit Kerja Kedepuitan Ekonomi melalui tautan <http://bit.ly/SurveyEvaluasiBappenas>.

Seluruh responden memberikan **respon positif** terhadap kualitas pelayanan Kemen.PPN/Bappenas (dalam hal ini Kedepuitan Bidang Ekonomi) dalam melaksanakan tugas dan fungsi Menteri PPN/Kepala Bappenas dalam TPIN.

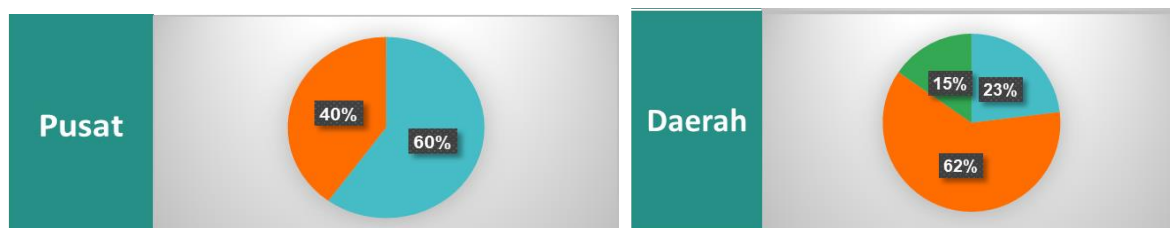
- **100% responden Pusat Sangat Setuju dan Setuju** serta **77% responden Daerah Sangat Setuju dan Setuju** bahwa Kedepuitan Bidang Ekonomi berperan aktif dalam proses perencanaan dan penetapan inflasi.
- **100% responden Pusat Sangat Setuju dan Setuju** serta **85% responden daerah Sangat Setuju dan Setuju** bahwa Kedepuitan Bidang Ekonomi berperan aktif dalam monev pengendalian inflasi.
- **100% responden Pusat Sangat Setuju dan Setuju** dan **85% responden Daerah Sangat Setuju dan Setuju** bahwa Kedepuitan Bidang Ekonomi memberikan pelayanan yang prima (cepat dan berintegritas).

Gambar 3.7. Kementerian PPN/Bappenas Berperan Aktif dalam Proses Perencanaan dan Penetapan Sasaran Inflasi



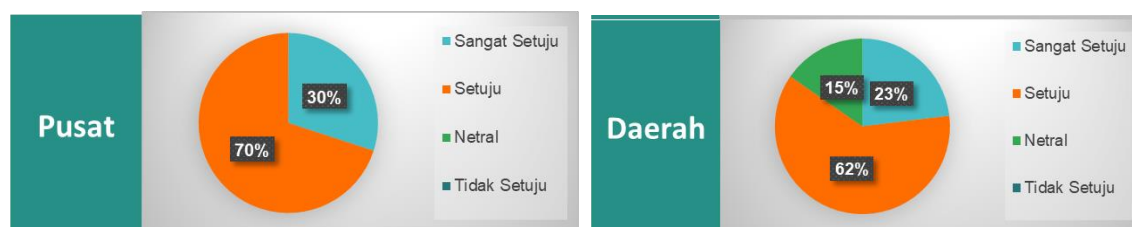
Sumber: Laporan Kinerja Kedepuitan Bidang Ekonomi, 2020

Gambar 3.8. Kementerian PPN/Bappenas Berperan Aktif dalam Pengendalian dan Monev Kebijakan Pengendalian Inflasi



Sumber: Laporan Kinerja Kedeputan Bidang Ekonomi, 2020

Gambar 3.9. Kementerian PPN/Bappenas Memberikan Pelayanan Prima (Cepat dan Berintegritas)



Sumber: Laporan Kinerja Kedeputan Bidang Ekonomi, 2020

Kedepan Bappenas diharapkan untuk: (i) meningkatkan perannya dalam sinkronisasi program/kegiatan dan anggaran K/L/D terkait pengendalian inflasi; (ii) meningkatkan *capacity building* dan pendampingan terhadap TPID; dan (iii) meningkatkan ketersediaan data yang akurat, cepat, dan tepat.

IKU 8: Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional



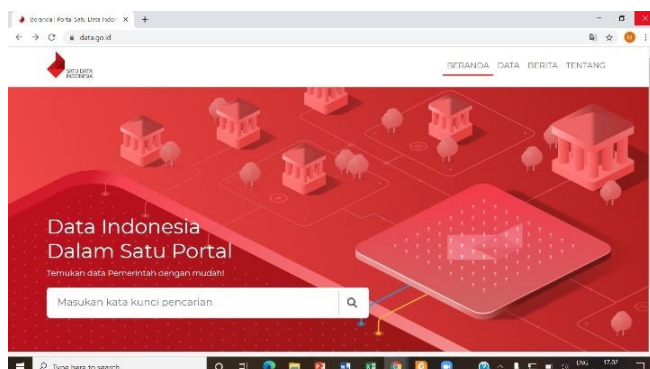
IKU Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan IKU baru (belum ada di tahun sebelumnya) yang hadir untuk memastikan bahwa data dan informasi di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas mendukung tercapainya perencanaan pembangunan nasional. IKU ini ditujukan untuk mengukur kualitas dan kuantitas keterpaduan sistem dan aplikasi internal serta substansi data dan informasi perencanaan pembangunan agar penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan menjadi lebih efektif dan efisien.

Secara keseluruhan, capaian kinerja IKU Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional pada tahun 2020 diprediksi **tercapai 88,89% dari target 85%**. Hasil capaian ini diukur dari jumlah aplikasi data dan informasi yang telah terintegrasi terhadap jumlah aplikasi perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Kementerian PPN/Bappenas. Sebanyak 9 (Sembilan) aplikasi internal yang mengelola data dan informasi renbang, hanya 8 (delapan) aplikasi yang telah terintegarsi data dan informasi renbang. Dengan demikian berdasarkan kamus pengukuran pada Bab 2, capaian kinerja IKU ini sebesar 88,89%.

Walaupun sudah melebihi capaian target, upaya integrase data dan informasi perencanaan pembangunan nasinal tidak akan berhenti. Kedepan, Kementerian PPN/Bappenas berupaya untuk terus mengembangkan aplikasi yang dimiliki untuk didorong dan diarahkan mendukung proses perencanaan pembangunan nasional. Selain itu, data dan informasi yang disajikan terus diupayakan selalu up to date atau data terkini sehingga menghasilkan ketepatan sasaran pengambilan keputusan terkait perencanaan pembangunan nasional akan lebih berkualitas dan kredibel.

Terwujudnya integrasi data dan informasi perencanaan merupakan kinerja aplikasi yang dimiliki oleh Kementerian PPN/Bappenas dalam mendukung proses perencanaan pembangunan nasional. Capaian IKU ini mengukur aplikasi internal Kementerian PPN/Bappenas yang berpotensi/telah berintegrasi antar aplikasi atau menyajikan integrasi data dan informasi perencanaan pembangunan. Aplikasi internal Kementerian PPN/Bappenas tersebut diantaranya adalah:

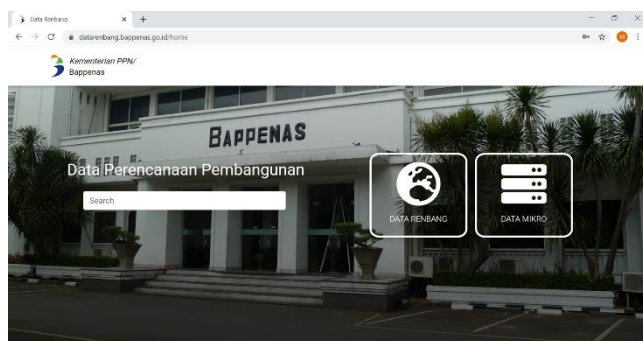
1. Satu Data Indonesia (<https://data.go.id>)



Satu Data Indonesia (SDI) merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan data berkualitas, mudah diakses, dan dapat dibagipakaikan antar Instansi Pusat serta Daerah. Tahun 2020, capaian kinerja aplikasi portal ini belum menunjukkan integrasi data dan

informasi yang optimal dan belum terintegrasi dengan aplikasi lainnya. Isi dari portal ini adalah kumpulan data dasar daerah untuk perencanaan pembangunan. Namun, belum semua daerah menerapkan Satu Data tingkat Daerah sehingga data yang disajikan belum lengkap dan belum data terkini. Aplikasi ini dikelola di bawah tanggung jawab Staf Ahli Menteri Bidang Pemerataan dan Kewilayahan.

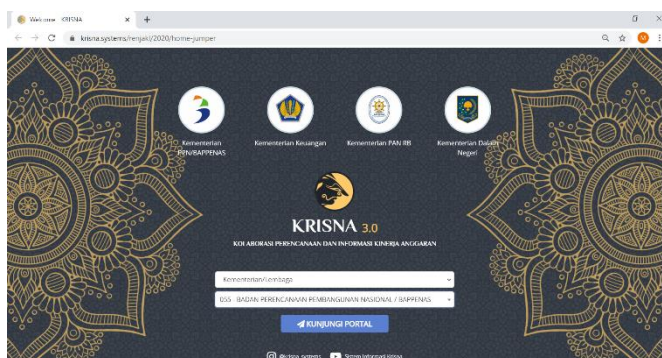
2. Data Renbang (<https://datarenbang.bappenas.go.id/>)



Portal data renbang ini merupakan kumpulan data yang mayoritas berasal dari data BPS dan data pemetaan BIG. Aksesibilitas penggunaan portal ini terbatas dan tidak semua pegawai Kementerian PPN/Bappenas mudah mengakses portal ini, hanya Pejabat tertentu saja.

Masyarakat umum tidak dapat mengakses portal ini. Data dan informasi yang tersedia dalam portal ini diharapkan dapat menyajikan kondisi terkini. Portal data renbang ini sudah bisa dilihat pada tampilan dashboard aplikasi Bitrix (flexiwork.bappenas.go.id) bersama dengan beberapa aplikasi lainnya. Capaian kinerja aplikasi ini bisa dikatakan sudah menyajikan integrasi data dan informasi yang dibutuhkan untuk proses perencanaan pembangunan nasional namun aksesibilitasnya terbatas. Aplikasi data renbang ini dikelola di bawah tanggung jawab Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas yang secara teknis dikelola oleh Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan.

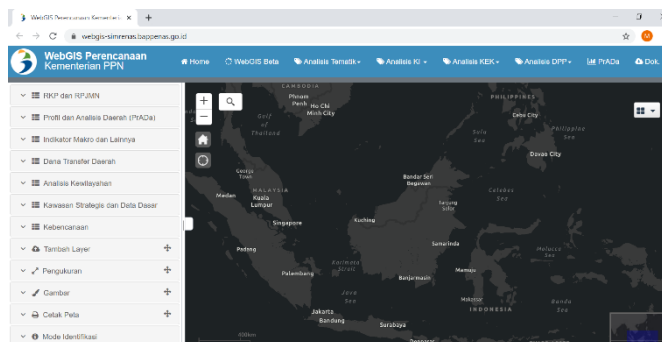
3. Krisna (<https://krisna.systems>)



Aplikasi KRISNA merupakan sistem e-planning baru yang diiniasi Bappenas pertengahan 2016 silam. KRISNA mengintegrasikan platform perencanaan dan anggaran yang telah ada di Bappenas ke dalam satu sistem tunggal dan mudah digunakan. Aplikasi elektronik itu telah terkoneksi langsung ke

sistem aplikasi penganggaran SAKTI di Kementerian Keuangan RI. Selain itu, juga sudah terkoneksi dengan sistem aplikasi di Kementerian PAN RB dan Kementerian Dalam Negeri. Sejak diluncurkan pada April 2017, KRISNA telah digunakan oleh 125 kementerian dan lembaga negara untuk mengembangkan serta merevisi rencana kerja dan anggaran di Tahun Anggaran 2020. Dengan demikian, capaian kinerja aplikasi KRISNA telah tercapat terintegrasi data dan informasi perencanaan pembangunan. Kedepan, aplikasi KRISNA akan terus berkembang dan berinovasi sehingga terwujud sinkronisasi perencanaan dan anggaran pembangunan nasional di pusat dan daerah dengan pendekatan perencanaan Tematik, Holistik, Integrasi dan Spasial (THIS). Aplikasi KRISNA ini dikelola di bawah tanggung jawab Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan.

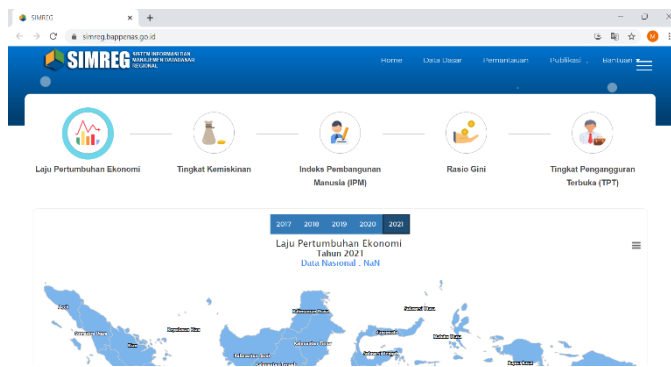
4. WebGIS Perencanaan (<https://webgis-simrenas.bappenas.go.id>)



Aplikasi WebGIS Perencanaan ini berisikan kumpulan data tematik daerah yang disajikan dalam bentuk GIS. Data tematik dimaksud diantaranya data: lokasi Proyek Prioritas RPJMN dan RKP, Dana Alokasi Khusus (DAK), dan data dasar dari BPS, serta analisis

pembangunan daerah. Aplikasi ini terinisiasi dari penajaman perencanaan pembangunan nasional melalui pendekatan perencanaan Tematik, Holistik, Integrasi dan Spasial (THIS) sehingga pembangunan nasional dapat tepat sasaran lokasinya dan lebih dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Aplikasi ini telah mudah diakses publik dan dapat ditemukan dalam dashboard aplikasi Bitrix. WebGIS Perencanaan ini dikelola aktif di bawah tanggung jawab Deputi Pengembangan Regional.

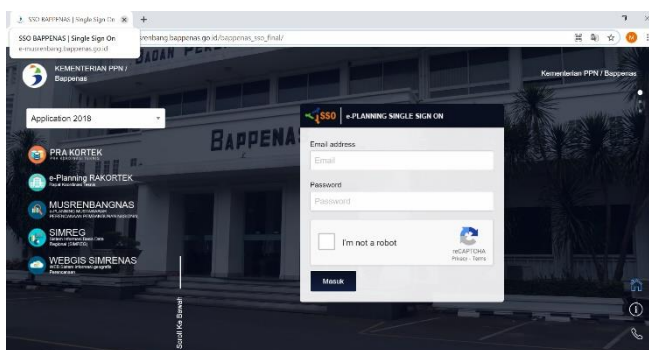
5. SIMREG (<https://simreg.bappenas.go.id>)



Aplikasi SIMREG ini berisikan data-data dasar pusat dan daerah yang berasal dari BPS dan instansi terkait lainnya. Selain itu, aplikasi ini berisikan laporan hasil analisis tematik hasil pembangunan di daerah. Kekurangan dari aplikasi ini belum seluruh fitur terisi data yang terkini. Dari segi

aksesibilitas, aplikasi ini mudah diakses publik. Dengan demikian, capaian kinerja aplikasi ini telah terintegrasikan data dan informasi perencanaan pembangunan. Kedepan, sasaran daripada kehadiran aplikasi ini terus dioptimalkan sehingga publik dapat memperoleh data dan informasi guna kepentingan proses perencanaan pembangunan di pusat maupun daerah. Aplikasi ini dikelola di bawah tanggung jawab Deputy Bidang Pengembangan Regional.

6. E-Musrenbang (<https://e-musrenbang.bappenas.go.id>)



Aplikasi e-Musrenbang merupakan portal aplikasi perencanaan berbasis website yang dibangun untuk mendukung upaya sinergi perencanaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah baik di Pusat maupun di Daerah.

e-Musrenbang Mencakup: Aplikasi Isu Strategis Pembangunan Daerah (e-ISUS); Aplikasi Usulan Kegiatan dan Pendanaan Pembangunan Daerah (e-UKPPD); Aplikasi Dana Alokasi Khusus (e-DAK); Aplikasi Dana Hibah (e-HIBAH); Aplikasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi (e-MusrenbangProv); dan Aplikasi Pra-Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (e-PraMusrenbangNas).

Dengan dikembangkan e-Musrenbang berbasis website ini diharapkan dapat membantu mempermudah proses sinergi perencanaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah khususnya sinergi perencanaan dan penganggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan; serta mendorong penerapan prinsip-prinsip governance (partisipatif, transparan, efektif dan efisiensi, serta akuntabel) dalam pemberian pelayanan publik dari Kementerian PPN/Bappenas.

Pengembangan e-Musrenbang dikelola di bawah tanggung jawab Deputy Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah; dengan melibatkan semua direktorat di Bappenas diantaranya: Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan (PUSDATINRENBANG); Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana (Biro ORTALA); dan Kedeputan Bidang Pendanaan Pembangunan. Aplikasi ini telah terintegrasi dengan aplikasi SIMREG, WebGIS SIMRENAS, dan PRA KORTEK. Dengan demikian, aplikasi e-Musrenbang telah berhasil terintegrasi data dan informasi perencanaan pembangunan nasional. Kedepan, terus ditingkatkan fitur-fitur didalamnya sehingga hasil perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel.

7. E-Monev (<https://e-monev.bappenas.go.id>)

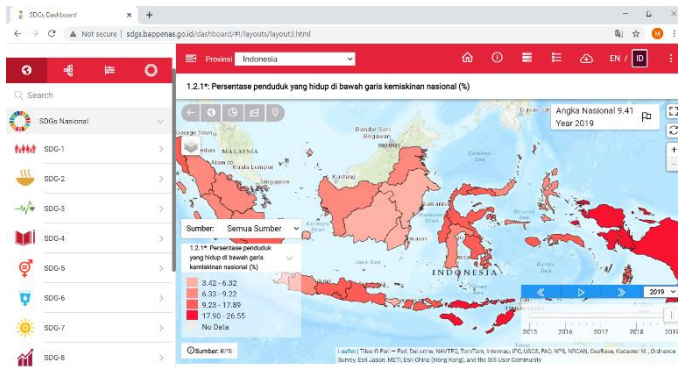


Aplikasi E-Monev merupakan salah satu instrument PEPP yang digunakan untuk menghimpun data dan informasi hasil pemantauan (data realisasi) pelaksanaan rencana pembangunan. Data dan informasi hasil pemantauan ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pengendalian dan bahan

bagi pelaksanaan evaluasi pembangunan. Aplikasi E-Monev ini telah terintegrasi dengan aplikasi KRISNA sehingga mendukung proses perencanaan, penganggaran, serta pelaporan informasi kinerja. Dari segi aksesibilitas, aplikasi ini mudah diakses oleh Kementerian/Lembaga dan Daerah untuk kepentingan pengendalian, pemantauan dan evaluasi implementasi perencanaan pembangunan nasional. Aplikasi E-Monev sudah dapat ditemukan pada dashboard aplikasi Bitrix. Dengan demikian capaian kinerja aplikasi E-Monev telah berhasil terintegrasi data dan informasi perencanaan pembangunan. Kedepan, akan terus dikembangkan guna semakin mempermudah proses pengendalian, pemantauan dan evaluasi pembangunan nasional. Aplikasi ini dikelola di bawah tanggung jawab Deputy Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan.

8. Dashboard SDGS (<http://sdgs.bappenas.go.id>)

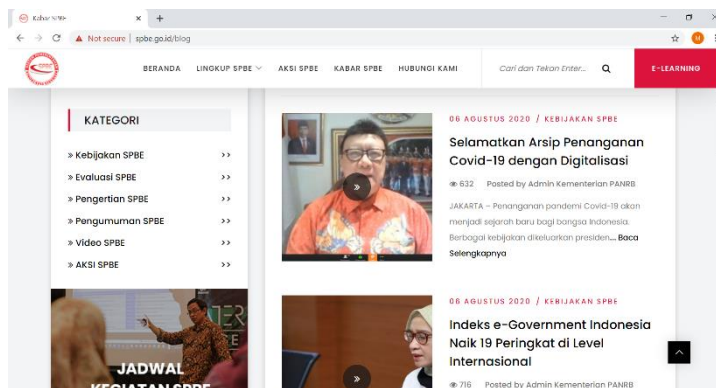
Indonesia berkomitmen kuat untuk melaksanakan SDGs karena tujuan pembangunan nasional dan tujuan pembangunan global saling menguatkan. Dashboard SDGs merupakan visualisasi dari capaian indikator SDGs Indonesia untuk 17 Tujuannya (Goals), yang sebagian besar merupakan indikator pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah yang disajikan dalam bentuk data capaian dan spasial. Dashboard ini



disusun dan dimutakhirkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS selaku koordinator pelaksanaan SDGs di Indonesia bersama BPS dan didukung oleh Lembaga-lembaga UN. Data dari pihak nonpemerintah merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dalam pemutakhiran data SDGs. Aplikasi ini tersedia di dashboard aplikasi Bitrix. Dengan demikian, aplikasi Dashboar SDGs dapat dikatakan telah berhasil berintegrasi dengan data dan informasi perencanaan pembangunan nasional. Kedepan, akan terus ditingkatkan penyajian data capaian indikator SDGs yang terkini. Aplikasi ini dikelola di bawah tanggung jawab Deputy Maritime and Natural Resources through the Secretariat of SDGs Indonesia.

9. SPBE (<https://spbe.go.id>)



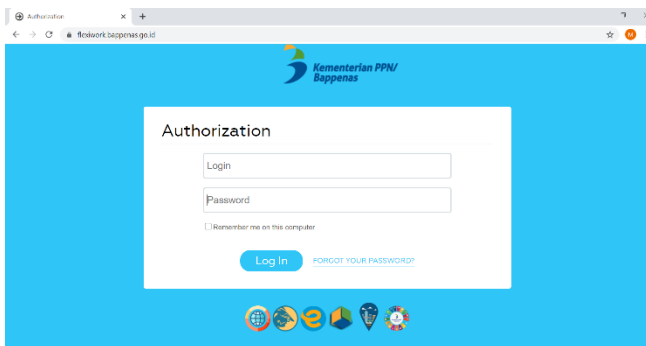
Portal SPBE Nasional (spbe.go.id) hadir dalam rangka diseminasi informasi mengenai perkembangan penerapan SPBE di Indonesia. Anda adalah unsur penting bagi perkembangan SPBE di Indonesia.

Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau E-Government, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya.

SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Sementara itu, berdasarkan hasil evaluasi SPBE Kementerian PPN/Bappenas tahun 2020 menunjukkan nilai 3,26 dari skala 5 berkategori Baik. Dengan demikian, tahun 2020 ini aplikasi SPBE belum terintegrasi data dan informasi perencanaan pembangunan nasional. Kedepan, aplikasi ini akan lebih mendukung upaya pemerintah menerapkan E-Government penyelenggaraan pemerintahan berbasis IT. Berdasarkan PP 95/2018 tentang SPBE, output yang harus dihasilkan Kementerian PPN/Bappenas hingga tahun 2025 adalah Integrasi Data dan Pengelolaan Portal Data Nasional dalam rangka Pembangunan Portal Data Nasional.

10. IDW-SO (<https://flexiwork.bappenas.go.id>)



Sejak mewabahnya pandemik Covid-19 pada bulan Maret 2020, perubahan pola kerja ASN disesuaikan dengan pola kerja New Normal dimana diberlakukan WFH dan WFO secara bergantian. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan social distancing.

Dengan adanya aplikasi Bitrix ini, Kementerian PPN/Bappenas menjadi contoh di Indonesia yang sudah menerapkan Flexiwork. Flexiwork ini adalah kebijakan yang membuat Aparatur Sipil Negara dapat bekerja tanpa harus 'ngantor' secara konvensional. Pola Flexiwork ini perlahan demi perlahan akan mengubah pola yang lama ke pola yang baru sehingga diharapkan produktivitas kerja dapat naik.

Sejak awal diluncurkan, Flexiwork dituntut mampu menjawab sejumlah tantangan yang mengemuka, terutama tentang bagaimana memantau kinerja para ASN selagi remote working dan minim supervisi. Untuk itu, Kementerian PPN/Bappenas merumuskan sejumlah indikator produktivitas untuk menilai kinerja ASN. Terkait kehadiran ASN, dipantau melalui fitur Bitrix.24time.

Berdasarkan uraian di atas, capaian kinerja aplikasi Bitrix tidak masuk dalam capaian IKU Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional melainkan capaian manajemen kinerja ASN. Kedepan, aplikasi Bitrix ini akan dikembangkan terus guna mewujudkan Bitrix sebagai pola baru pengukuran kinerja ASN berbasis IT.

3.2. CAPAIAN KINERJA LAINNYA TAHUN 2020

3.2.1. Perumusan Kebijakan Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, Kementerian PPN/Bappenas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Selama tahun 2020, beberapa kebijakan yang telah disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas mencakup Peraturan Pemerintah, Peraturan/Keputusan Presiden, Peraturan/Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas dan kebijakan lainnya sebagai berikut:

Tabel 3.24. Jenis Peraturan yang Telah Dihasilkan Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020 Berdampak Langsung pada Perencanaan Pembangunan Nasional

No.	Jenis Peraturan	Keterangan
1	Instruksi Presiden	1. Nomor 9 Tahun 2020 Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat
	Keputusan Presiden	1. Nomor 20 Tahun 2020 Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat
2	Peraturan Presiden	1. Nomor 86 Tahun 2020 Rencana Kerja Pemerintah 2021 2. Nomor 122 Tahun 2020 Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah 2021
3	Peraturan Menteri PPN/ Kepala Bappenas	1. Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024 2. Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur 3. Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah

No.	Jenis Peraturan	Keterangan
		<p>untuk Penanganan Perubahan Iklim pada Kementerian PPN/Bappenas</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 5. Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 6. Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Proyek yang Dibiayai melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Nasional 7. Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengajuan Usulan, Penilaian, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri dan Hibah 8. Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Perencanaan Pembangunan 9. Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Urusan pemerintahan Bidang Perencanaan Pembangunan Kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2021 10. Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 11. Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia 12. Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Satu Data Indonesia

Disamping itu, masih terdapat beberapa peraturan yang sampai saat ini masih dalam proses penyusunan, diantaranya seperti Rancangan Perpres tentang Percepatan Penurunan Stunting; Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; INEK Gas

Rumah Kaca; Korporasi Petani; Jamu; Bantuan Sosial. Selain itu, masih proses Rancangan Undang Undang: Revisi UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Ibu Kota Negara; Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Papua. Kemudian, Rancangan Peraturan Pemerintah: Penyelenggaraan Nama Rupabumi; Perkotaan; Informasi Geospasial; dan KPBU IG.

3.2.2. Perencanaan Strategis Pemindahan Ibu Kota Negara

Kegiatan Penyusunan Konsep Pemindahan Ibu Kota Negara Tahun 2017 merupakan kajian awal (*preliminary study*) untuk menyusun rekomendasi rencana pemindahan Ibu Kota pemerintahan Republik Indonesia. Ruang lingkup kegiatan ini mencakup: analisa latar belakang pemindahan ibukota serta pembelajaran pemindahan ibukota dari negara lain; alternatif bentuk pemindahan ibukota; penetapan kriteria lokasi; penilaian alternatif lokasi ibukota; dan analisa perhitungan kebutuhan pembiayaan dan kelembagaan. Kriteria yang menjadi dasar penilaian lokasi potensial ibukota mencakup 6 aspek, antara lain: letak geografis spasial, tata guna lahan, ketersediaan infrastruktur pendukung, daya dukung fisik lingkungan dan kebencanaan, sosial budaya dan kependudukan serta pertahanan dan keamanan. Kajian awal ini menghasilkan tiga lokasi potensial Ibukota Negara di Pulau Kalimantan.

Pada tahun 2018 telah dilaksanakan Kajian Mendalam Sosial Kependudukan dan Ekonomi Wilayah Ibu Kota Negara di tiga calon lokasi yang meliputi Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Selatan, serta bekerja sama dengan Kementerian ATR/BPN untuk menyusun kajian fisik lingkungan dan Kementerian PUPR untuk menyusun urban design. Hingga saat ini telah dilakukan serangkaian diskusi untuk memperdalam penilaian aspek fisik lingkungan bersama dengan daerah termasuk klarifikasi data fisik lingkungan termasuk tata guna tanah dan penguasaan lahan pada 3 lokasi potensial Ibukota Negara di Pulau Kalimantan.

Pada tahun 2019, Kementerian PPN/Bappenas bersama dengan K/L terkait telah melakukan kajian mendalam lanjutan untuk aspek dampak lingkungan, infrastruktur, pertahanan dan keamanan, peluang pengembangan DKI Jakarta sebagai dampak pemindahan Ibu Kota Negara, pembiayaan dan kelembagaan serta aspek hukum dan regulasi. Adapun kegiatan strategis terkait pemindahan Ibu Kota Negara yang telah Kementerian PPN/Bappenas lakukan di tahun 2019 sebagai regulator dan K/L, diantaranya menghasilkan: (1) Peta dasar skala 1:5.000; (2) Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Tim Koordinasi Strategis Persiapan Pemindahan Ibu Kota Negara; (3) Survey Inventarisasi Penguasaan Tanah, Kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan/IP4T; (4) Kajian Lingkungan Strategis/KLHS; (5) Penilaian sosial awal; (6) Rancangan peraturan presiden tentang kewenangan IKN; (7) Studi FS dan konsep masterplan; (8) Draft Naskah Akademik UU IKN dan RUU IKN; dan (9) Perubahan Pemberian Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (Sk.838/MENLHK/Setjen/HPL.0/10/2019).

Pada tahun 2020, kegiatan perencanaan strategis terkait pemindahan Ibu Kota Negara tidak dapat berjalan sesuai rencana. Hal ini dikarenakan dampak negatif penyebaran wabah pandemik Covid-19. Adapun kegiatan yang tidak terlaksana adalah penyusunan KLHS RDTR dan penyusunan Studi *Outline Business Case* (OBC) dan *Final Business Case* (FBC) untuk Skema *Public-Private Partnerships* (PPPs). Sementara itu, *output* kegiatan tahun 2020 telah menghasilkan: (1) Masterplan Pembangunan IKN; (2) Rencana Tata Ruang Wilayah Strategis Nasional (RTRW KSN); (3) Pembahasan legislatif tentang UU IKN; (4) Rancangan Peraturan Presiden tentang Otoritas Modal Negara; (5) Penyusunan LKHS Masterplan; (6) Desain perkotaan, RTBL, dan DED; (7) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) 1: 5.000; dan (7) Bank Tanah (*land bank*) atau cadangan lahan milik pemerintah.

3.2.3. Trilateral Meeting Kinerja

Capaian Trilateral Meeting Kinerja ini sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), dan Keputusan Bersama Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Staf Kepresidenan tentang Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2019-2020, telah ditetapkan Integrasi Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Elektronik sebagai salah satu aksi pencegahan korupsi (Aksi PK). Salah satu target yang harus tercapai di tahun 2020 dalam aksi tersebut adalah "Tersedianya Pedoman Pelaksanaan Trilateral Meeting Kinerja dalam penyusunan Renja K/L".

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*outcome*) dan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah telah diterbitkan berbagai kebijakan yang terkait dengan hal tersebut yang menjadi acuan bagi K/L, yaitu: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional terkait dengan kebijakan dan instrumen sistem perencanaan pembangunan, monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan; Kementerian Keuangan terkait dengan kebijakan dan instrumen sistem penganggaran dan pertanggungjawaban keuangan, serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait dengan kebijakan dan instrumen sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Kebijakan dan instrumen yang terbitkan oleh ketiga kementerian ini tentunya harus sinergi dan harmoni, karena adanya keterkaitan yang sangat erat antar sistem yang dibangun dan dikembangkan. Terdapat hubungan yang saling mempengaruhi antara sistem-sistem tersebut yaitu Sistem Perencanaan Pembangunan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas, Sistem Penganggaran dan Sistem Perbendaharaan Negara oleh Kementerian Keuangan, dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Kementerian PANRB.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan dorongan yang kuat dan upaya bersama untuk meningkatkan kualitas dan capaian kinerja yang dimulai dari penguatan kualitas kinerja mulai fase perencanaan kinerja instansi pemerintah melalui forum bersama bersama tiga pihak pembahasan perencanaan kinerja (Trilateral Kinerja) antara Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PANRB, dan K/L Teknis. Trilateral Kinerja ini merupakan forum untuk mensinergikan dan mengkonsolidasikan rencana prioritas pembangunan serta kinerja K/L yang ditetapkan RPJMN, RKP Renstra K/L dalam periode 5 (lima) tahunan dan dalam Renja K/L setiap tahunnya.

Melalui Pedoman Pelaksanaan Tilateral Kinerja ini, diharapkan agar agenda penyusunan Renstra dan Renja K/L dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan sebaik-baiknya, meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil, meningkatkan kualitas perencanaan kinerja K/L teknis agar dapat mewujudkan anggaran berbasis kinerja, dan memastikan keselarasan perencanaan pada K/L teknis dengan RPJMN dan RKP.

3.2.4. Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat

Kegiatan pelaksanaan teknis operasional, substantif dan administratif Satu Data Indonesia merupakan pelaksanaan mandat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai Koordinator Pelaksana Satu Data Indonesia membentuk Struktur Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat yang terbagi menjadi 7 (tujuh) kelompok kerja yaitu Arsitektur Data dan Informasi, Interoperabilitas dan Portal SDI, Hubungan Daerah dan Data Kependudukan, Keuangan Negara, Data Statistik dan Data Spasial.

Inisiasi awal Peraturan Presiden tentang pelaksanaan Satu Data Indonesia ini dimulai sejak tahun 2017 dan baru disahkan pada tanggal 17 Juni 2019, sehingga sosialisasi dan pemahaman tentang Perpres Satu Data Indonesia di tingkat Pusat dan Daerah menjadi tugas utama Sekretariat di tahun 2020 ini.

Tahun 2020 Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat mencapai kinerja dalam empat bagian yaitu; 1) Kelembagaan dan Koordinasi Strategis; 2) Regulasi dan Pedoman; 3) Sosialisasi dan Komunikasi; 4) Integrasi Teknis dan Portal Data.

Selain permasalahan yang utama tentang data yang tidak akurat, mutakhir, tidak dapat dibagipakaikan dan tidak terkini, ada potensi permasalahan yang strategis yaitu:

- a. Berbagai regulasi data yang berpotensi tumpang tindih;
- b. Layanan data tersebar dan belum terintegrasi dengan Portal Satu Data;
- c. SDM dan pendanaan K/L/D untuk penyelenggaraan Satu Data;
- d. Besarnya lingkup dan tata kelola SDI;
- e. Kemerataan infrastruktur data terutama Daerah.

Sehingga penyelesaian yang harus dan sedang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan Satu Data ini dengan melakukan beberapa kesiapan:

- a. Kesiapan Kelembagaan Pembentukan Sekretariat SDI Pusat dan K/L/D, Walidata K/L/D, Forum Satu Data sedang terus berlangsung, 60 instansi tingkat pusat sudah menetapkan walidata. 10 Provinsi dalam pendampingan pembentukan Sekretariat SDI.
- b. Kesiapan Pendanaan: K/L/D butuh dorongan agar mengalokasikan cukup untuk penyelenggaraan Satu Data.
- c. Kesiapan Regulasi Regulasi turunan Perpres 39/2019, dan regulasi Satu Data tingkat K/L/D sedang terus dilakukan penyusunan. 34 peraturan dan dokumen turunan SDI dalam proses perancangan
- d. Kesiapan Regional: Dorongan dari Kemendagri untuk pelaksanaan Satu Data Daerah sedang disiapkan, integrasi SIPD dengan SIMPREG sedang dikerjakan Kedeputusan Regional.
- e. Kesiapan Teknis: Perlu percepatan dan ekspansi penyiapan dan integrasi Portal Satu Data dan layanan interoperabilitas. 50 Portal data instansi pemerintah sudah terintegrasi.

Selama tahun 2020, beberapa Kegiatan yang sedang dan sudah dilaksanakan Sekretariat SDI adalah:

1. Penyusunan Peraturan Menteri Organisasi Tata Kerja SDI
2. Penyusunan Peraturan Menteri Manajemen Data SPBE
3. Penyusunan Surat Keputusan Kelompok Kerja SDI
4. Penyusunan Petunjuk Teknis Standar Data dan Metadata Statistik
5. Penyusunan Petunjuk Teknis Standar Data dan Metadata Spasial
6. Penyusunan Petunjuk Teknis Standar Data dan Metadata Keuangan
7. Penyusunan Dokumen Peta Jalan SDI 2020 – 2022
8. Penyusunan Dokumen Manajemen Data SDI – SPBE
9. Penyusunan Dokumen Arsitektur Data SDI – SPBE
10. Penyusunan Dokumen Manajemen Kode Referensi / Data Induk
11. Penyusunan Dokumen Model Referensi
12. Penyusunan Referensi Regulasi SDI tingkat InstansiPusat
13. Penyusunan Referensi Regulasi SDI tingkat Provinsi
14. Penyusunan Referensi Regulasi SDI tingkat Kota/Kabupaten
15. Manajemen Interoperabilitas Data
16. Penyelenggaraan Infrastruktur SDI
17. Pengembangan Portal SDI
18. Penyusunan Daftar Data untuk Kebutuhan SDGs
19. Penyusunan Pedoman Pengelolaan Data Bantuan Sosial Keadaan Mendesak di Pemerintah Daerah (Lokasi Pilot Provinsi DIY)

20. Penyusunan Pedoman Pengelolaan Data Aset UMKM tingkat Pemerintah Daerah (Lokasi Pilot Provinsi Sumatera Barat dan Kota Bukittinggi)
21. Penyusunan Pedoman Pengelolaan Data Aset Desa (Lokasi Pilot Desa Panggunharjo, DIY)
22. Penyusunan Pedoman Pengelolaan Data Covid-19 di Pemerintah Daerah (Lokasi Pilot Provinsi Jawa Barat)
23. Penyelenggaraan Komunikasi dan Sosialisasi Satu Data Indonesia
24. Penyelenggaraan Kegiatan dan Koordinasi Strategis SDI tingkat Daerah
25. Penyelenggaraan Kegiatan dan Koordinasi Strategis SDI tingkat Pusat
26. Penyusunan Laporan Presiden Pelaksanaan SDI 2020.

Dalam pelaksanaan kegiatan SDI ini, masih terdapat kendala yang masih dihadapi. Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan SDI meliputi yaitu:

1. Berbagai regulasi data berpotensi tumpang tindih;
SDI menghadapi tantangan berupa perlu adanya harmonisasi dengan berbagai kebijakan dan peraturan yang lain (menghadapi ego sektoral). Beberapa masalah yang dihadapi adalah salah satunya terkait dengan peraturan turunan dari UU Cipta Kerja, lalu peraturan existing lain baik pada level Perpres, Permen, maupun Perka Daerah.
2. Layanan data tersebar dan belum terintegrasi dengan Portal Satu Data;
Terkait interoperabilitas data, memiliki tantangan sendiri dan yang paling sering ditemukan, yaitu adanya rasa kepemilikan terhadap data pada masing-masing layanan digital dan portal data pemerintah.
3. SDM dan pendanaan K/L/D untuk penyelenggaraan Satu Data;
Perlunya ada sistem sosialisasi supaya hasil sosialisasi bisa menjadikan adanya penyamaan level pemahaman dari SDI. Namun tantangan yang lain adalah, adanya pergantian personal yang dinamis, perlu adanya kebutuhan sumber daya manusia SDI yang memadai (diklat, jenjang karir). K/L/D butuh dorongan agar mengalokasikan cukup untuk penyelenggaraan Satu Data.
4. Besarnya lingkup skala tata kelola SDI;
Skala tata kelola SDI besar, terdiri dari lebih dari 600 Walidata, ribuan Walidata Pendukung, dan ribuan Produsen Data. Selain skala tata kelolanya yang besar, skala substansi SDI juga besar, termasuk standar data, metadata, interoperabilitas, dan big data. Regulasi turunan Perpres 39/2019, dan regulasi Satu Data tingkat K/L/D sedang terus dilakukan penyusunan. 34 peraturan dan dokumen turunan Perpres SDI dalam proses perancangan.

5. Ketersediaan infrastruktur data terutama Daerah;

Tantangan yang berasal dari internal, yaitu terkait dengan infrastruktur dan aplikasi (pusat data nasional/cloud pemerintah, jaringan, aplikasi). Perlu percepatan dan ekspansi penyiapan dan integrasi Portal Satu Data dan layanan Interoperabilitas.

Kinerja Sekretariat Satu Data Indonesia di tahun 2020 mampu memberikan dasar penyelenggaraan Satu Data Indonesia yang cukup kuat, yaitu mengenai pentingnya pemenuhan prinsip Satu Data Indonesia yaitu: Satu Standar Data, Satu format Metadata, Interoperabilitas, dan satu Kode Referensi/Data Induk dalam tata kelola data instansi Pusat dan Daerah. Masing-masing kegiatan telah berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi bidangnya masing-masing sehingga bentuk pelaksanaan Sekretariat Satu Data Indonesia tahun 2020 dapat menjadi contoh penyelenggaraan Satu Data Indonesia di masa yang akan datang.

3.2.5. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sesuai dengan Perpres No. 95/2018 penyelenggaraan SPBE bertujuan untuk (1) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; (2) Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya; dan (3) Mewujudkan system pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu. Sedangkan sasaran dari penyelenggaraan SPBE, di antaranya (1) Terwujudnya tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien; (2) Terwujudnya layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna; (3) Terselenggaranya infrastruktur SPBE yang terintegrasi; dan (4) Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia SPBE.

Sampai dengan tahun 2020, capaian gambaran pelaksanaan kegiatan SPBE adalah sebagai berikut:

1) Pengoordinasian Proses Perencanaan SPBE

Penetapan Pokok-Pokok Kebijakan Belanja K/L untuk Mendukung SPBE, dilakukan dengan:

- a. Pembangunan/pengembangan aplikasi baru, server, pusat data (data center) harus mendapatkan clearance dari Kemenkominfo; dan
- b. Dalam hal belum mendapatkan clearance maka anggaran untuk kegiatan/proyek tersebut diblokir.

2) Pengoordinasian Penyelenggaraan Tata Kelola dan Manajemen Data

Capaian dari kegiatan pengoordinasian penyelenggaraan tata kelola, dilakukan melalui:

- a. Telah dilaksanakan sosialisasi Satu Data Indonesia (SDI) pada 3 Agustus 2020, yang dihadiri oleh lebih dari 300 perwakilan K/L dan Pemda;
- b. Telah dilakukan konfirmasi penetapan 61 Walidata Instansi Tingkat Pusat;
- c. Disusunnya draf Rancangan Peraturan Menteri (R-Permen) PPN tentang Portal SDI;

- d. Sedang disusun Rancangan Permen PPN tentang Tata Kerja, Forum, Dewan Pengarah, dan Sekretariat Tingkat Pusat;
- e. Penetapan Peta Jalan (Road Map) SDI;
- f. Petunjuk teknis Prinsip SDI tentang Standar Data dan Metadata Statistik, dan sedang disusun petunjuk teknis Standar Data dan Metadata pada data spasial dan data keuangan; dan
- g. Implementasi skema SDI pada topik strategis terkait dengan tata kelola data mendesak bantuan sosial dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada sektor UMKM.

Capaian dari penyusunan Arsitektur Data dan Informasi & Permen PPN tentang Manajemen Data SPBE, di antaranya:

- a. Telah diselesaikan penyusunan Model Referensi Data SPBE, yang juga merupakan pemenuhan target B17 Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK);
 - b. Telah diselesaikannya usulan draf Arsitektur Data dan Informasi SPBE;
 - c. Telah disusun Rancangan Permen PPN/Kepala Bappenas tentang Manajemen Data SPBE (di samping sebagai pemenuhan target B21 Stranas PK);
 - d. Finalisasi Rancangan Permen Manajemen Data SPBE menjadi Permen (di samping pemenuhan target B24 Stranas PK), yang dalam substansinya mencakup lima aspek sebagaimana diamanatkan dalam Perpres No. 95/2018, yaitu: (1) arsitektur data, (2) data induk, (3) data referensi, (4) basis data, dan (5) kualitas data.
- 3) Pengoordinasian Perencanaan, Penganggaran, Pengadaan Barang Jasa, Akuntabilitas Kinerja, dan Pemantauan Evaluasi
- Capaian dari integrasi perencanaan, penganggaran, pengadaan, akuntabilitas kinerja dan pemantauan evaluasi, di antaranya:
- a. KRISNA telah digunakan sebagai sistem perencanaan dan penganggaran sesuai dengan proses bisnis berdasarkan Peraturan Pemerintahan No. 17/2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
 - b. KRISNA digunakan sebagai rujukan penyusunan RKA-K/L yang merupakan rincian anggaran per satker;
 - c. KRISNA telah digunakan untuk proses perencanaan dan pengalokasian DAK fisik sesuai dengan proses bisnis yang diatur oleh KemenPPN/Bappenas, Kemenkeu dan Kemendagri;
 - d. Standar teknis dan prosedur pengembangan KRISNA sedang diuji oleh BPPT; dan
 - e. Sistem Informasi KRISNA sebagai aplikasi umum perencanaan dan SAKTI (sebelumnya RKAK/L) sebagai aplikasi umum penganggaran telah terintegrasi dengan menggunakan API service.

Namun, masih terdapat permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan SPBE ini, antara lain:

- (1) Dalam pengoordinasian penyelenggaraan tata kelola dan manajemen data terdapat kendala untuk penyiapan Rancangan Permen PPN tentang manajemen data (disamping pemenuhan target Stranas PK) di antaranya terbatasnya waktu yang tersedia untuk melakukan finalisasi dokumen Rancangan Permen yang kurang dari tiga bulan, dan banyaknya jumlah rancangan peraturan perundang-undangan yang perlu difinalisasi oleh Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas sehingga terjadi penumpukan dan berdampak pada waktu finalisasi yang lebih lama dari seharusnya; dan
- (2) Dalam pengoordinasian perencanaan, penganggaran, pengadaan barang jasa, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan evaluasi dari hasil diseminasi pemanfaatan KRISNA belanja K/L dan DAK Fisik masih diperlukan integrasi aplikasi KRISNA DAK dan KRISNA Renja K/L khususnya penyesuaian nomenklatur output/rincian output yang lebih rinci untuk mensinkronkan belanja K/L dan DAK Fisik.

3.2.6. Penyelenggaraan ICCTF

Capaian Kinerja Majelis Wali Amanat Indonesia Climate Change Trust Fund (MWA ICCTF) merupakan gambaran kinerja kegiatan ICCTF sebagai instrumen untuk mendukung pemerintah dalam menyusun perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan akuntabel dengan fokus pada kebijakan inovasi pembangunan yang kemudian dijalankan/dikoordinasikan oleh Kementerian/Lembaga dan stakeholder pembangunan lainnya. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2011 tentang Dana Perwalian, Lembaga Wali Amanat adalah suatu organisasi yang dibentuk oleh Kementerian/Lembaga untuk mengelola Dana Perwalian sesuai dengan kewenangan yang disepakati dalam perjanjian hibah yang dikoordinasikan oleh Majelis Wali Amanat (MWA).

Sesuai dengan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor. 111 Tahun 2018 tentang Pembentukan Majelis Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/Indonesia Climate Change Trust Fund, terdapat 3 (tiga) struktur kelompok kerja (Pokja), yang terdiri dari: Kelompok Kerja (Pokja I) di bidang program dan kegiatan strategis dan inovasi untuk pengurangan emisi gas rumah kaca dan peningkatan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim pada sektor kehutanan dan lahan gambut, industri, transportasi, dan limbah. Pokja II, mengatur bidang program dan kegiatan strategis dan inovatif untuk peningkatan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim pada sektor energi baru dan terbarukan. Serta, Pokja III di bidang program dan kegiatan strategis dan inovatif untuk peningkatan ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim pada sektor kelautan dan perikanan.

Pada Tahun 2020, sesuai dengan perubahan kebijakan dan kegiatan prioritas Kementerian PPN/Bappenas maka Pokja I dan Pokja II melaksanakan kegiatan mandiri yang terpisah dari program kerja ICCTF yang dikoordinasikan langsung oleh Direktorat Lingkungan Hidup dan Direktorat Sumber Daya Energi Mineral dan Pertambangan. Pokja I telah menginisiasi kegiatan mandiri berupa Pembangunan Rendah Karbon (Low Carbon Development Initiatives).

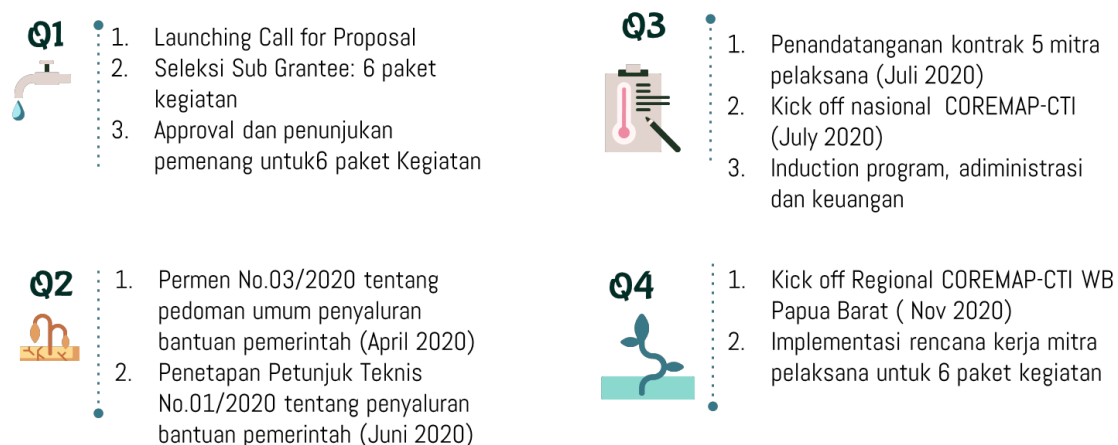
Sedangkan Pokja II melanjutkan Penyiapan Proyek Energi Terbarukan (Project Pipeline) serta Kerja Sama Pendanaan dan Pengembangan Proyek Energi Terbarukan. Oleh karena itu, LKj MWA ICCTF Tahun 2020 ini akan memuat pelaksanaan kegiatan dibidang Kelautan dan Perikanan yang telah dilaksanakan oleh Pokja III saja sebagai Koordinator ICCTF tahun 2020.

Fokus program yang dilaksanakan oleh ICCTF Tahun 2020 antara lain: Coral Reef Rehalitation Management Program-Coral Triangle Initiative (COREMAP-CTI) World Bank dan Asian Development Bank (ADB), Blended Finance, dan Blue Carbon. Selain itu, ICCTF juga melakukan kegiatan inovasi seperti bioeconomic modelling sumberdaya perikanan, dan penerapan protocol COVID-19 yang ketat pada setiap kegiatan yang dilaksanakan.

Capaian Program:

- COREMAP-CTI World Bank (WB) memiliki tujuan untuk peningkatan efektifitas pengelolaan ekosistem pesisir prioritas. Program ini akan dilaksanakan dalam kurun waktu 19 Juni 2019 – 30 Juni 2022 dengan total pendanaan dari hibah Global Environment Facility (GEF) yang disalurkan melalui WB sebesar USD 6,2 juta. Lokasi kegiatan COREMAP-CTI WB meliputi TWP Laut Sawu, NTT serta SAP Kep. Waigeo Sebelah Barat, SAP Kep. Raja Ampat, dan KKPD Raja Ampat, Papua Barat. Penyaluran pendanaan hibah COREMAP-CTI WB ini melalui 6 paket program yang dilaksanakan oleh mitra pelaksana yang berasal dari NGO/CSO dan Universitas.

Gambar 3.10. Capaian Program COREMAP-CTI WB Tahun 2020

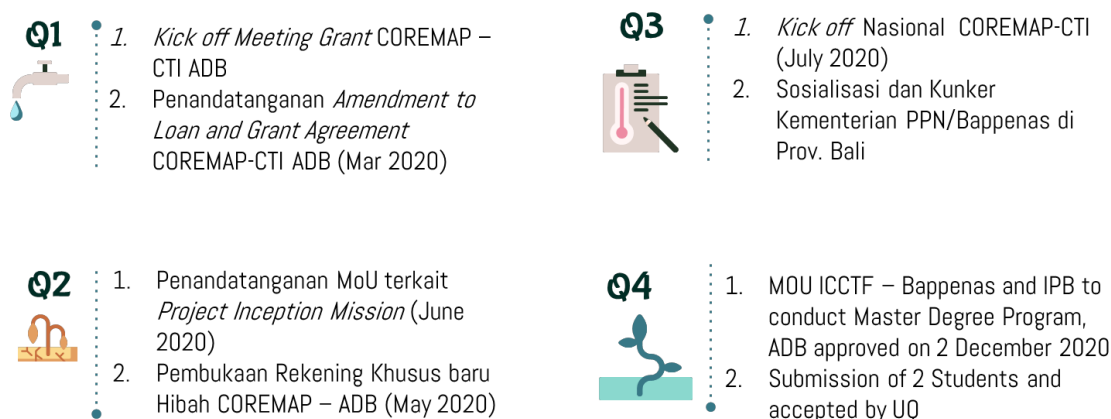


Gambar 3.11. Paket Program COREMAP-CTI WB yang dilaksanakan oleh 6 (enam) Mitra Pelaksana

	Paket 1	Paket 2	Paket 3	Paket 4	Paket 5	Paket 6
Judul Kegiatan	Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan oleh Masyarakat secara berkelanjutan di Raja Ampat	Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan oleh Masyarakat secara berkelanjutan di Laut Sawu	Implementasi Rencana Aksi Nasional (RAN)/ National Plan of Action (NPOA) Jenis Terancam	Implementasi terhadap Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu / Integrated Coastal Zone Management (ICZM)	Dukungan untuk Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Akses Wilayah Pengelolaan Sumber Daya Perikanan untuk Masyarakat Setempat
Mitra Pelaksana	Yayasan Terangi	YAPEKA	Reef Check Indonesia	PKSPL IPB	Yayasan Terangi	Yayasan PILI
Nilai Hibah	IDR 17,4 M	IDR 10,5 M	IDR 13,5 M	IDR 12,1 M	IDR 18,8 M	IDR 8,3 M
Output Kegiatan (summary)	<ul style="list-style-type: none"> • Infrastruktur skala kecil untuk ekowisata • Pengembangan usaha berbasis rumah tangga • Rehabilitasi ekosistem • Peningkatan kapasitas • Pemantauan ekosistem pesisir 	<ul style="list-style-type: none"> • Infrastruktur skala kecil untuk ekowisata • Pengembangan usaha berbasis rumah tangga • Rehabilitasi ekosistem • Peningkatan kapasitas • Pemantauan ekosistem pesisir 	<ul style="list-style-type: none"> • Platform pencatatan dan system database • Kajian dinamika populasi, kesesuaian habitat, pola pergerakan dan sensus populasi • Panduan laku wisata jenis • Peningkatan kapasitas • Pengembangan usaha ekowisata berbasis jenis 	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana teknis implementasi RZWP3K • Rencana teknis pemanfaatan KKP • Sistem monitoring dan evaluasi implementasi RZWP3K • Peningkatan kapasitas • Rehabilitasi ekosistem pesisir 	<ul style="list-style-type: none"> • Legalisasi POKMASWAS • Rencana kerja POKMASWAS • Peningkatan kapasitas • Infrastruktur dan sarana pengawasan operasional POKMASWAS 	<ul style="list-style-type: none"> • POKJA KMHA • Kajian mekanisme kerja tenurial system • Kajian bioekonomi untuk rencana RBFM • Rencana pengelolaan berbasis hak • Kemitraan dan implementasi Rencana pengelolaan

- COREMAP-CTI Asian Development Bank (ADB) memiliki tujuan untuk manajemen ekosistem terumbu karang yang berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas untuk mengelola ekosistem terumbu karang di kawasan konservasi perairan yang ditargetkan. Program ini akan dilaksanakan dalam kurun waktu 4 Maret 2020 – 31 Desember 2022 dengan total pendanaan dari hibah Global Environment Facility (GEF) yang disalurkan melalui ADB sebesar USD 5,2 juta. Lokasi kegiatan COREMAP-CTI ADB meliputi Provinsi Bali (KKP Nusa Penida) dan Provinsi Nusa Tenggara Barat (KKP Gili Matra, KKP Gili Balu). Penyaluran pendanaan hibah COREMAP-CTI ADB ini melalui 6 paket program yang dilaksanakan oleh mitra pelaksana yang berasal dari Perusahaan Konsultan, NGO/CSO dan/atau Universitas. Selain itu, terdapat pula kegiatan kajian Supply Chain untuk komoditas Tuna, Snapper dan Seaweed serta kegiatan beasiswa Master Degree Program (S2) dan International Short Training bagi para pihak pemangku kebijakan di sektor Kelautan dan Perikanan.

Gambar 3.12. Capaian Program COREMAP-CTI ADB Tahun 2020



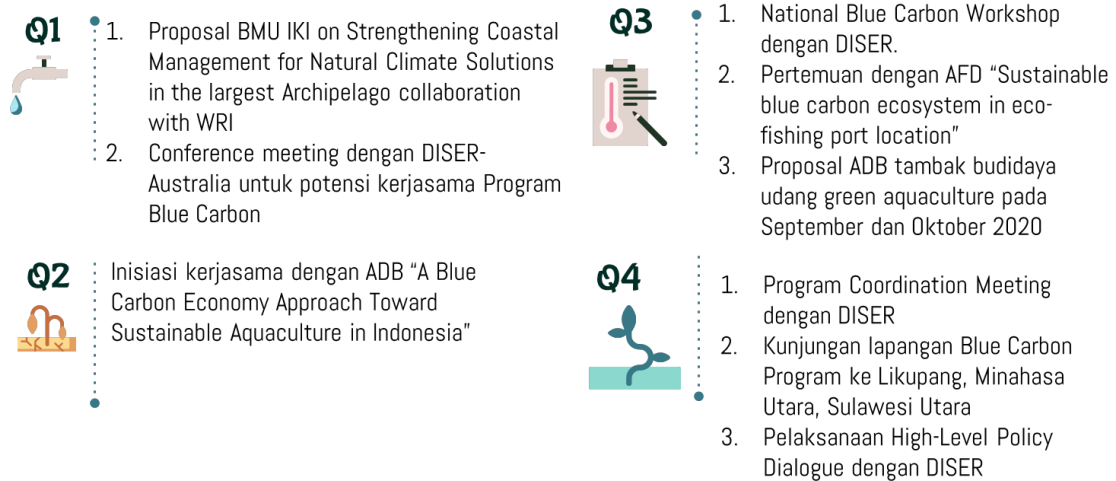
- **Blended Finance** memiliki tujuan untuk mengkaji dan menginisiasi inovasi strategi untuk pembiayaan terkait pesisir dan laut khususnya pendanaan inovatif untuk investasi yang mendukung pencapaian target-target Sustainable Development Goals (SDGs). Kegiatan yang dilaksanakan adalah pengembangan Institusi Pendanaan Kelautan dan Perikanan (IPKP) sebagai embrio lahirnya Sustainable Blue Finance Institution (SBFI) melalui dukungan Pro-Blue Program World Bank.

Gambar 3.13. Capaian Program Blended Finance Tahun 2020



- **Blue Carbon** memiliki tujuan untuk mendukung pengembangan Karbon Biru Indonesia (Indonesia Blue Carbon Strategy Framework-IBCSF) sebagai framework yang dapat diimplementasikan oleh Kementerian/Lembaga dalam pengembangan karbon biru. Kegiatan yang dilaksanakan adalah Policy Dialogue melalui dukungan DISER-Australia dan pengembangan proposal pendanaan karbon biru.




Gambar 3.14. Capaian Program Blue Carbon Tahun 2020



- **Bioeconomic Modelling** adalah salah satu kegiatan ICCTF di level nasional yang bertujuan menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk pengelolaan perikanan berkelanjutan melalui pengaturan jumlah armada optimal, resource rent tax/penerimaan negara bukan pajak (PNBP), serta instrument pengendalian pengelolaan perikanan.

Pada tahun 2020, terdapat 3 rangkaian kegiatan utama yang dilaksanakan yaitu: Data dan analisis, capacity building dan diseminasi rekomendasi kebijakan. Untuk kegiatan data dan analisis telah dilakukan 3 (tiga) kegiatan trip survey eksplorasi sumber daya udang di laut arafura dengan bekerjasama antara ICCTF dan KKP. Dari trip ini diperoleh data primer penangkapan udang untuk periode Juli – November 2020 yang nantinya akan digunakan sebagai data parameter untuk kajian Bioekonomi. Selanjutnya, telah dihasilkan rekomendasi pengelolaan sumber daya udang berdasarkan hasil modelling bioekonomi berupa pengaturan jumlah armada optimal, resource rent tax/penerimaan negara bukan pajak (PNBP), serta instrument pengendalian pengelolaan perikanan. Untuk kegiatan capacity building telah dilakukan kegiatan Short course bioeconomic analysis to improve fisheries management practice bagi para peneliti dibidang sosioekonomi dan manajemen perikanan KKP. Serta dilakukan pula kegiatan Workshop bioeconomic for fisheries management untuk meningkatkan pengetahuan para pihak dibidang pengelolaan sumber daya perikanan dan perikanan tangkap. Sedangkan untuk kegiatan diseminasi telah dilakukan Workshop hasil kajian modeling bioeconomic sumber daya udang di Laut Arafura kepada para pihak terkait dan disusun pula policy brief pengelolaan sumber daya udang di WPP 718 untuk disampaikan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas serta Menteri Kelautan dan Perikanan. Secara ringkas capaian program Bioeconomic pada setiap Quartal 2020 ditunjukkan pada Gambar berikut ini

Gambar 3.15. Capaian Program Bioeconomic Tahun 2020

 Data & Analisis <ol style="list-style-type: none"> 1. 3 trip survey eksplorasi sumber daya udang di laut arafura terlaksana 2. Data primer penangkapan udang Juli – November tersedia 3. Rekomendasi pengelolaan sumber daya udang berdasarkan hasil modelling tersedia 	 Capacity Building <ol style="list-style-type: none"> 1. Short course bioeconomic analysis to improve fisheries management practice 2. Workshop bioeconomic for fisheries management 	 Dissemination <ol style="list-style-type: none"> 1. Workshop hasil kajian modeling bioeconomic sumber daya udang 2. Policy brief pengelolaan sumber daya udang di WPP 718
--	---	---

Dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2020, terdapat kendala utama yaitu Pandemi COVID-19 yang menghambat semua rencana kerja ICCTF yang telah direncanakan. Dampak dari pandemi ini adalah mundurnya waktu pelaksanaan kegiatan serta tidak dapat terlaksananya beberapa kegiatan di lapangan dan melibatkan khalayak ramai. Untuk menanggapi permasalahan ini, ICCTF telah melaksanakan revisi rencana kerja dan anggaran beserta penyesuaian waktu pelaksanaannya. Selain itu, ICCTF juga telah melaksanakan penerapan kegiatan berdasarkan protokol COVID-19 baik untuk pelaksanaan kegiatan operasional sekretariat dan juga pelaksanaan proyek di lapangan.

3.2.7. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs)

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas selaku koordinator Pelaksanaan TPB/SDGs terus menerus mengarusutamakan Target TPB/SDGs dalam Perencanaan Pembangunan Nasional dan bahkan pada tahun 2020-2024 jumlah target TPB/SDGs meningkat dari 94 di tahun 2015-2019 menjadi 124 target. Hal ini menunjukkan wujud besarnya komitmen Indonesia untuk mencapai TPB/SDGs sampai tahun 2030.

Percepatan pencapaian Prioritas Nasional dalam kerangka kerja TPB/SDGs menekankan adanya hubungan kerja sama yang saling terkait pada setiap indikator, target bahkan Tujuan/*Goal*. Hubungan keterkaitan ini untuk memastikan bahwa target yang akan dicapai telah memperhitungkan ketercapaian target yang lain sehingga prioritas nasional dapat tercapai secara inklusif. Selama tahun 2020, Sekretariat TPB/SDGs telah mencapai beberapa hal berikut.

1. Pengarusutamaan TPB/SDGs ke dalam RPJMN 2020-2024.
2. Pemutakhiran indikator dan ketersediaan sumber data TPB/SDGs yang disajikan dalam Pedoman Metadata Edisi II untuk empat pilar (sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola).

3. Penerbitan panduan strategi komunikasi TPB/SDGs yang merupakan acuan bagi semua pihak untuk menyampaikan pesan-pesan TPB/SDGs.
4. Penerbitan panduan penyusunan rencana aksi TPB/SDGs edisi II untuk periode 2020-2024 dan dilengkapi pula dengan panduan untuk melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan mengenai pencapaian pelaksanaan TPB/SDGs Edisi II.
5. Penerbitan Laporan perkembangan pelaksanaan TPB/SDGs tahun 2019.
6. Fasilitasi terbentuknya 21 SDGs *Center* Perguruan Tinggi yang tersebar di seluruh Indonesia.
7. Koordinasi fasilitasi dan pendampingan penyusunan Rencana Aksi Daerah dan fasilitasi peningkatan kapasitas terhadap pelaksanaan TPB/SDGs di daerah.
8. Pelibatan seluruh platform TPB/SDGs (Pemerintah dan Parlemen, Filantropi dan Pelaku Usaha, Akademisi dan Pakar, serta Organisasi Kemasyarakatan).
9. Keterlibatan dalam agenda internasional yang memiliki keterkaitan dengan TPB/SDG.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, pada pasal 10 ayat 2 menetapkan bahwa Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam sebagai Tim Pelaksana Koordinasi TPB/SDGs yang dalam hal ini merupakan Penanggung Jawab Pelaksana PN-6 yaitu Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.

3.2.8. Pengelolaan Program Kerjasama Bilateral dan Multilateral

▪ Kegiatan Kerjasama Pembangunan Global

Kegiatan dilaksanakan dalam rangka memenuhi penugasan khusus dari Menteri PPN/Kepala Bappenas terkait koordinasi pembangunan global G20 Development Working Group (DWG). Kementerian PPN/Bappenas merupakan focal point isu pembangunan mewakili Pemerintah Indonesia dalam forum G20.

Tahun 2020 merupakan G20 Presidensi Arab Saudi. Pada DWG kegiatan diawali melalui pertemuan informal dan workshop G20 DWG pada 21-22 Oktober 2019 di New York dan dilanjutkan dengan kegiatan Side Event South-South and Triangular Cooperation di Riyadh pada 9 Desember 2019. Pertemuan formal DWG pertama dilakukan di Riyadh pada 10-11 Desember 2019, kemudian pertemuan selanjutnya dilakukan secara virtual karena adanya pandemic COVID-19. Pertemuan kedua pada 17 Juni 2020, pertemuan ketiga pada 1- 2 September 2020, dan pertemuan keempat (drafting session) pada 16-20 November 2020.

Pada setiap pertemuan DWG, Direktorat Kerja Sama Pendanaan Multilateral menyampaikan intervensi Pemerintah Indonesia guna memperjuangkan prioritas nasional dan membawa isu pada negara berkembang. Dikarenakan Indonesia menjadi negara yang mewakili aspirasi negara berkembang pada forum G20. Hal ini merupakan

hasil koordinasi dan diskusi Kementerian PPN/Bappenas, Sherpa (Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian), Kementerian/Lembaga terkait serta akademisi.

Hasil pertemuan G20 dari semua working group dirumuskan ke dalam Leaders Declaration yang telah terlaksana pada 20 November 2020 yang dihadiri Presiden RI. Hasil dari pertemuan G20 dilaporkan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas. Pada tahun 2021, kegiatan G20 DWG akan dilanjutkan dengan kepemimpinan Presidensi Italia dan tahun 2022 Presidensi Indonesia.

▪ **Kerjasama Bilateral dengan Mitra Pembangunan**

Pada tahun 2020 telah melaksanakan 3 (tiga) Pertemuan Bilateral yang terdiri atas Pertemuan Konsultasi Bilateral Indonesia-Inggris, Senior Official Meeting Indonesia-Kanada dan Sosialisasi Bilateral Development Cooperation Framework (BDCF) Indonesia-Amerika Serikat.

Selain itu, Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan 6 penandatanganan kesepakatan dengan 3 mitra pembangunan yang terdiri atas 2 kesepakatan kerjasama dengan Pemerintah Korea, 1 kesepakatan dengan Pemerintah Inggris dan 3 kesepakatan dengan Pemerintah Amerika Serikat.

Pemerintah Indonesia mendapatkan kesempatan untuk menjadi penerima hibah kompetisi Program Compact Tahap 2 dari Millennium Challenge Corporation (MCC) yang merupakan lembaga independen Pemerintah Amerika Serikat (AS).

Dalam rangka persiapan dan Pengembangan Program Hibah COMPACT Tahap 2 MCC, Pemerintah Amerika Serikat melalui Millennium Challenge Corporation (MCC) pada kurun waktu 2013-2018 telah menyediakan komitmen hibah sebesar 600 juta dolar AS melalui Program Compact I yang bertujuan untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dana hibah tersebut telah direalisasikan untuk membiayai berbagai program (fisik dan non-fisik) melalui 3 kegiatan utama yaitu Program Kemakmuran Hijau, Program Kesehatan Berbasis Masyarakat untuk Mengurangi Stunting, dan Program Modernisasi Pengadaan. Pada bulan Desember 2018 MCC kembali memberikan kesempatan Pemerintah Indonesia untuk mendapatkan hibah Compact yang kedua. Pemerintah Indonesia menyambut positif atas tawaran MCC pada hibah Compact Tahap II. Kementerian PPN/Bappenas ditunjuk sebagai Koordinator Nasional untuk melakukan persiapan dan pengembangan Program Compact Tahap II.

Sehubungan dengan hal tersebut Kementerian PPN/Bappenas ditunjuk sebagai Koordinator Nasional untuk melakukan persiapan dan pengembangan Program Compact Tahap II. Untuk mempersiapkan program hibah tersebut, Direktur KSP Bilateral ditugaskan untuk menjadi koordinator Kegiatan Persiapan dan Pengembangan Program Hibah COMPACT Tahap 2 MCC. Dalam pelaksanaan kegiatan, Direktur KSP Bilateral

dibantu oleh Compact Development Team (CDT) yang terdiri atas satu orang koordinator nasional, satu orang penasihat senior, 9 orang tenaga ahli dan 3 orang tim kesekretariatan. Sepanjang tahun 2020 CDT telah melaksanakan kegiatan antara lain:

- a. Penyusunan Root Cause Analysis
- b. Penyusunan Concept Note (Concept Note ini telah diajukan oleh Pemerintah Indonesia kepada MCC dan telah disepakati)
- c. Pembentukan Tim Pengarah dan Kelompok Kerja Multistakeholder
- d. Melaksanakan konsultasi dengan kedeputian dan direktorat terkait di Bappenas serta FGD dalam rangka mendapatkan masukan bagi penyusunan proposal kegiatan
- e. Pengembangan konsep/mode kelembagaan/fund channelling

3.2.9. Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD)

Pemberian penghargaan kepada pemerintah daerah telah dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas sejak tahun 2011. Apresiasi diberikan pada daerah terbaik berupa piala dan piagam. Namun, sejak tahun 2017, penghargaan yang diberikan tidak saja dalam bentuk piala dan piagam, tetapi ada insentif tambahan lain, diantaranya usulan penambahan alokasi Dana Insentif Daerah (DID) oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan; pembinaan bagi aparatur daerah oleh Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencana, Kementerian PPN/Bappenas; dan Seminar Knowledge Sharing Pembangunan Daerah untuk sharing praktik – praktik cerdas pembangunan daerah.

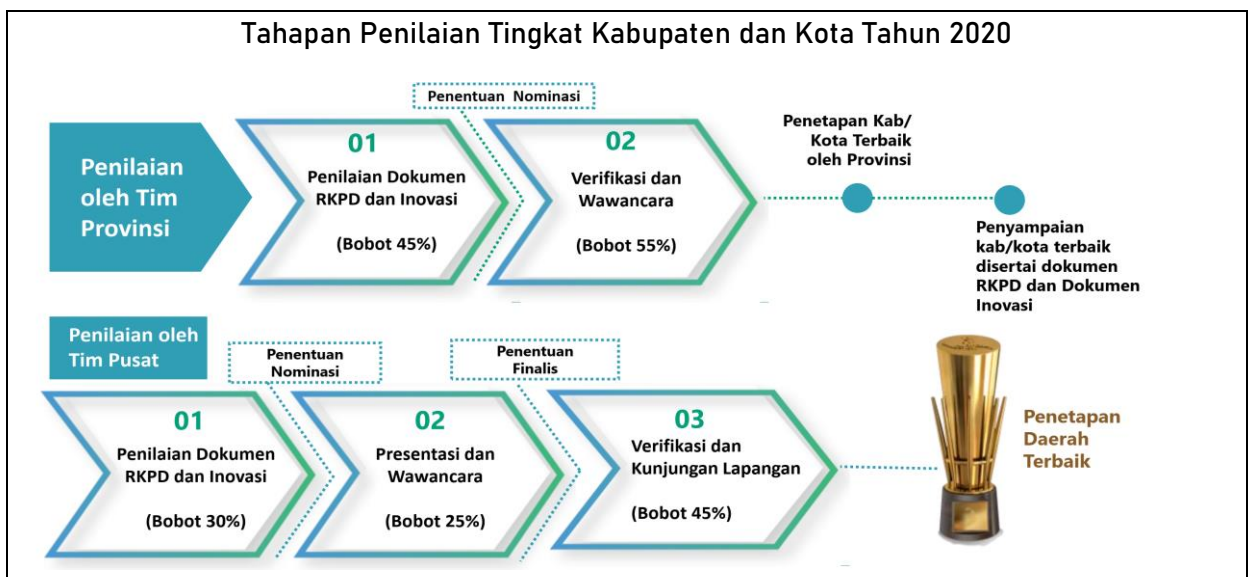
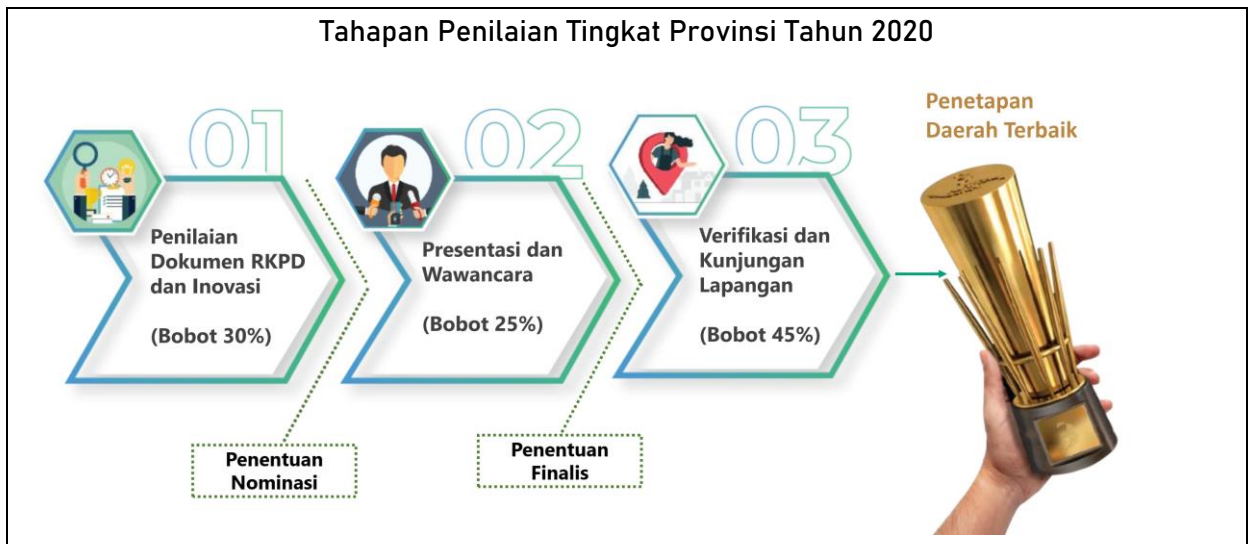
Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2020 bertujuan untuk: (1) Mendorong pemerintah daerah untuk menyusun dokumen perencanaan yang konsisten, komprehensif, terukur, dan dapat dilaksanakan; (2) Mendorong integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara perencanaan pusat dan daerah; dan (3) Mendorong pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan; serta (4) Mendorong pemerintah daerah untuk terus berinovasi dibidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Penghargaan Pembangunan Daerah diberikan kepada 3 provinsi terbaik, 3 kabupaten terbaik, dan 3 kota terbaik dengan ruang lingkup penilaian meliputi: (1) Proses penyusunan dokumen RKPD, (2) Kualitas dokumen perencanaan daerah (RKPD), (3) Pencapaian pembangunan daerah, dan (4) Inovasi pembangunan yang dikembangkan. Tim penilai yang terlibat dalam PPD ini meliputi Tim Penilai Teknis (TPT), Tim Penilai Utama (TPU), dan Tim Penilai Independen (TPI).

Dalam pelaksanaan PPD Tahun 2020, perbaikan dan penyempurnaan yang telah dilakukan antara lain: (1) Memperkuat basis penilaian, (2) Meningkatkan fairness, (3) Memperkuat aturan main, dan (4) Pengembangan lingkup pelaksanaan PPD. Beberapa upaya yang dilakukan dalam mendukung perbaikan PPD Tahun 2020 adalah sosialisasi PPD kepada pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota; penyamaan tahapan penilaian untuk provinsi,

kabupaten dan kota, pelaksanaan pembinaan bagi aparaturnya pemerintah daerah, pengembangan sistem informasi PPD, serta penyusunan buku praktik-praktik cerdas pembangunan daerah. Adapun tahapan penilaian Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam PPD 2020 ditunjukkan pada gambar berikut.

Gambar 3.16. Tahapan Penilaian PPD Tahun 2020



Sumber: Kedeputan PEPP, 2020

Perbedaan tahapan penilaian provinsi dan kab/kota yaitu pada tahapan penilaian kab/kota, terlebih dilakukan penilaian oleh tim provinsi, kemudian tim provinsi akan menetapkan 1 kota dan 1 kabupaten terbaik untuk dinilai oleh Tim Pusat. Jumlah total dokumen RKPD yang dinilai oleh pusat adalah 34 dokumen RKPD Provinsi, 34 dokumen RKPD Kabupaten, dan 34 dokumen RKPD Kota.

Sehubungan dengan pandemi covid-19, tahapan presentasi dan wawancara dilaksanakan secara daring dan tahapan verifikasi dan kunjungan lapangan ditiadakan. Perubahan ini menyebabkan terjadinya perubahan pada bobot penilaian pada masing-masing tahapan.

Kementerian PPN/Bappenas menyusun modul penilaian pada setiap tahapan penilaian, dan modul tersebut menjadi acuan bagi tim penilai untuk memberikan angka penilaian yang sesuai. Hasil penilaian oleh masing-masing tim penilai, diberikan kepada Kementerian PPN/Bappenas melalui Direktorat PEPPD untuk diolah. Setelah semua tahapan penilaian terlaksana, hasil penilaian seluruh tahapan dibahas dalam rapat pleno yang dihadiri oleh seluruh tim penilai. Rapat dilaksanakan bertujuan untuk mendiskusikan hasil dan menyepakati penentuan provinsi, kabupaten, dan kota terbaik. Hasil kesepakatan ini kemudian disampaikan kepada Bapak Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk mendapatkan persetujuan penetapan provinsi, kabupaten, dan kota terbaik dan selanjutnya dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri PPN/ Kepala Bappenas.

Daerah yang mendapatkan Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Kategori Perencanaan dan Pencapaian Terbaik Tingkat Provinsi:

- Terbaik I : Provinsi Jawa Tengah
- Terbaik II : Provinsi Bengkulu
- Terbaik III : Provinsi Jawa Timur

Kategori Perencanaan dan Pencapaian Terbaik Tingkat Kabupaten:

- Terbaik I : Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah
- Terbaik II : Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah
- Terbaik III : Kabupaten Bangka, Bangka Belitung

Kategori Perencanaan dan Pencapaian Terbaik Tingkat Kota:

- Terbaik I : Kota Semarang, Jawa Tengah
- Terbaik II : Kota Yogyakarta, DIY
- Terbaik III : Kota Padang, Sumatera Barat

3.2.10. Dukungan Capaian Rencana Aksi Nasional (RAN)

Tahun 2020, Kementerian PPN/Bappenas menerima mandat dari Presiden RI untuk terlibat dalam mendukung tercapaian Rencana Aksi Nasional (RAN) yang terdiri dari: a) RAN Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK); dan b) RAN Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN). Berikut uraian singkat capaian kinerja Kementerian PPN/Bappenas terkait hal tersebut.

A. RAN Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi diberi mandat oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 (Perpres 54/2018) untuk melakukan monitoring dan pendampingan aksi pencegahan korupsi terhadap 87 Kementerian/Lembaga dan 542 Pemerintah Daerah.

Bappenas menjadi penanggung jawab 3 sub-aksi pencegahan korupsi yang berada di bawah pendampingan dan monitoring Stranas PK. Dari hasil monitoring, realisasi pelaksanaan aksi oleh Bappenas sampai Triwulan VIII (B24) mencapai 56,25% (Cukup) Namun demikian, capaian Bappenas secara agregat sudah mencapai 92,16% (Baik) karena ada pemenuhan target tertanggung sebesar 35,91%.

Berikut adalah intisari capaian 3 sub aksi tersebut (dengan mempertimbangkan kepatuhan waktu pelaporan)

Sub-Aksi dan Nilai Kepatuhan	Capaian dan Kendala
Integrasi Perencanaan dan Penganggaran Berbasis elektronik 47,32% (Cukup)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Meskipun target roadmap dan draf pedoman pelaksanaan trilateral meeting sudah tercapai, namun masih banyak target Bappenas dalam sub-aksi ini belum terlaksana dengan baik. Masih ada 6 target yang seharusnya dilaksanakan pada periode-periode sebelumnya (B06-B18) namun sampai saat ini (B24) masih belum dapat dipenuhi. ■ Beberapa target tidak terlaksana karena sangat bergantung pada target di K/L lain. Misalnya, Compliance Aplikasi Umum Perencanaan dan Penganggaran tidak dapat dilaksanakan karena harus menunggu selesainya asesmen sistem terkini di pusat dan di daerah oleh BPPT dan Kemenkominfo. ■ Sementara terkait target Kesepakatan Proses Bisnis Integrasi, juga akan sulit tercapai karena sangat bergantung kepada kerja-sama tiga pihak yaitu Bappenas, Kemendagri, dan Kemenkeu. Sampai saat ini, baru terdapat proses bisnis tingkat pusat dan proses bisnis tingkat daerah, sedangkan proses bisnis yg mengintegrasikan antara pusat-daerah masih menjadi tantangan dalam penyelesaiannya.
Percepatan SPBE 99,9% (Baik)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sampai periode B24 ini, pelaksanaan target Bappenas sudah tercapai seluruhnya, yakni Tersedianya Referensi Arsitektur dan Domain Arsitektur Data dan Informasi SPBE Nasional. ■ Referensi Arsitektur merupakan bagian dari Arsitektur SPBE Nasional yang mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur. Sementara Domain Arsitektur merupakan bagian dari Arsitektur SPBE Nasional yang mendeskripsikan substansinya ■ Target terakhir yang dipenuhi Bappenas di periode B24 adalah terbitnya Permen PPN Pedoman Manajemen Data SPBE.

Sub-Aksi dan Nilai Kepatuhan	Capaian dan Kendala
Percepatan Pelaksanaan Sistem Merit 87,50% (Baik)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sejak periode B18 lalu, Stranas PK ikut melakukan monitoring terhadap pelaksanaan sistem merit di Bappenas. Dari 5 target yang harus dilaksanakan, seluruhnya berhasil dipenuhi Bappenas, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> - Melaporkan progres implementasi sistem merit melalui SiPinter berdasarkan 8 aspek penilaian sistem merit dalam manajemen ASN. - Melakukan pemetaan Kesiapan Integrasi SIMPEG melalui https://sscndashboard.bkn.go.id/kuesioner/ - Melakukan rekonsiliasi data kepegawaian Bappenas dengan data Kepegawaian Nasional di BKN dengan menggunakan rekon data mandiri. - Mengidentifikasi perbedaan dan permasalahan antara data Simpeg Instansi dengan data BKN. - Melaksanakan Penilaian Kinerja PNS di Instansi Pemerintah untuk tahun 2019 minimal 50% dari jumlah PNS dari masing-masing instansi. ■ Secara keseluruhan, pelaksanaan aksi sistem merit oleh Bappenas berjalan sangat baik.

Sumber: Laporan Triwulan VIII Stranas PK, 2021

Untuk meningkatkan capaian kinerja kedepan, Kementerian PPN/Bappenas terus melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selaku Sekterariat Nasional Stranas PK guna peningkatan tercapainya target.

B. RAN Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN)

Presiden Joko Widodo, pada tanggal 28 Februari 2020, telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN).

Seperti telah diketahui bersama, narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) berpotensi merusak moral dan masa depan bangsa, khususnya generasi muda. Pemerintah terus berupaya memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba dengan berbagai cara. Masifnya peredaran dan penyalahgunaan narkoba saat ini memerlukan upaya pencegahan dari berbagai pihak. Dengan keluarnya Inpres No. 2 Tahun 2020, pemerintah ingin merangkul seluruh elemen, baik lembaga pemerintahan pusat dan daerah maupun masyarakat dan pelaku usaha, untuk bersama-sama menyusun dan melaksanakan RAN P4GN periode 2020-2024.

Terkait pelaksanaan Inpres No. 2 Tahun 2020, Kementerian PPN/Bappenas menjadi salah satu lembaga regulator yang berperan mengoordinasikan perencanaan kegiatan dan penganggaran serta melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAN P4GN 2020-2024. Di sisi lain, Kementerian PPN/Bappenas juga menjadi lembaga pelaksana yang wajib menyusun dan melaksanakan program-program untuk mendukung RAN

P4GN 2020–2024. Program-program tersebut disesuaikan dengan lingkup pekerjaan yang dilakukan oleh tiap-tiap unit kerjanya.

Tahun 2020, Kementerian PPN/Bappenas telah melaksanakan beberapa kegiatan yang menjadi amanat Inpres RAN P4GN, diantaranya:

- (1) telah disusun dokumen perencanaan penguatan Grand Design of Alternative Development (GDAD) di Provinsi Aceh;
- (2) sosialisasi pada berbagai kegiatan baik internal maupun eksternal serta melalui media cetak dan media sosial;
- (3) deteksi dini penggunaan narkoba melalui tes urin kepada seluruh pegawai;
- (4) penambahan persyaratan Surat Keterangan Bebas Narkoba untuk calon pendaftar diklat; dan
- (5) memasukkan materi sosialisasi antinarkoba dalam setiap pembukaan diklat.

Untuk meningkatkan capaian kinerja kedepan, Kementerian PPN/Bappenas terus melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) guna peningkatan tercapainya target Inpres Stranas PK.

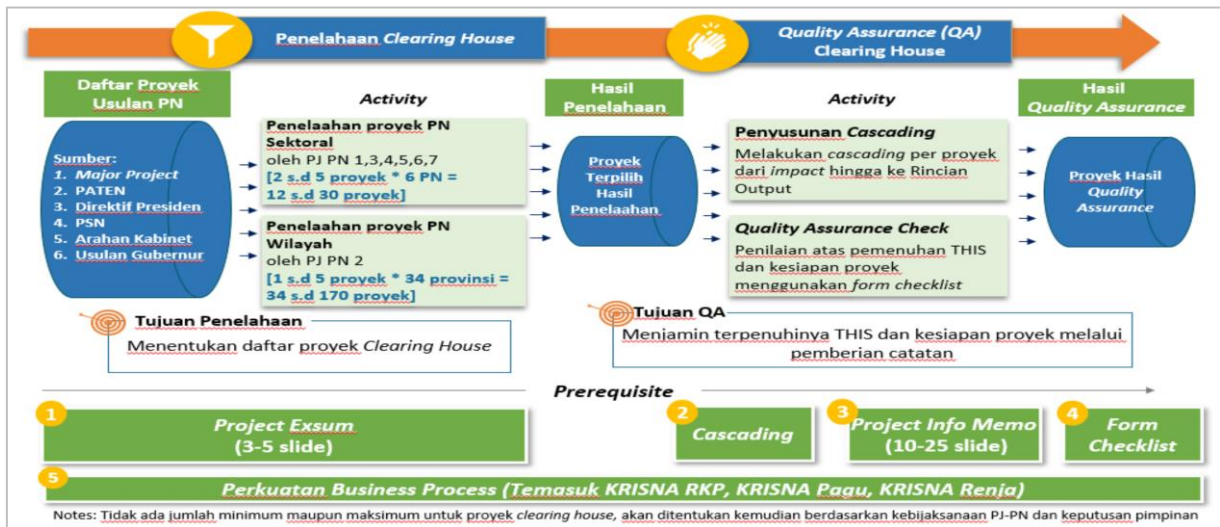
3.2.11. Perkuatan *Clearing House* Pembangunan dalam RKP 2022

Pada pidato pelantikan Presiden 17 Oktober tahun 2019, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa birokrasi harus dapat menjamin agar manfaat program benar-benar dirasakan oleh masyarakat (*making program delivered*). Presiden mengamanatkan kepada Kementerian PPN/Bappenas agar dapat menjadi *clearing house* untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan hingga level proyek benar-benar dapat dilaksanakan dan memiliki dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun tujuan pelaksanaan *clearing house* adalah:

- 1) Menghasilkan daftar proyek sebagai masukan proses *clearing house* yang jumlahnya terbatas sehingga dapat difokuskan untuk penajaman substansi.
- 2) Meningkatkan kualitas rencana proyek melalui pengecekan terhadap substansi dari aspek-aspek dalam rencana tersebut.

Penerapan *clearing house* dalam proses penyusunan RKP 2022 secara umum dibagi dalam 2 tahapan, yaitu tahapan penelaahan dan Quality Assurance. Melalui dua tahapan tersebut akan dihasilkan proyek prioritas yang akan masuk dalam dokumen RKP dan kesiapan dari proyek itu sendiri yang akan dituangkan dalam Executive Summary dan Info Memo.

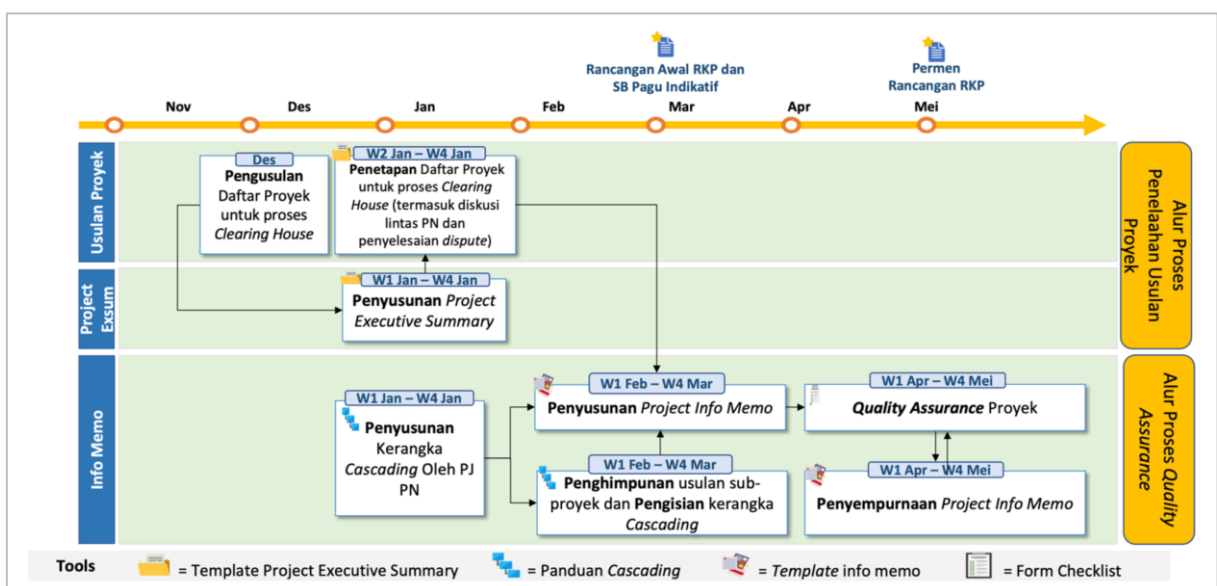
Gambar 3.17. Skema Penerapan Clearing House Proyek



Sumber: Kedeputan PEPP, 2020

Penerapan Clearing House Proyek dimulai dari Desember tahun 2020 dan berakhir pada Mei tahun 2021. Penerapan Clearing House Proyek merupakan proses internal yang berjalan di Kementerian PPN/Bappenas dalam masa penyusunan RKP Tahun 2022. Proses clearing house diawali dengan penelaahan usulan proyek sampai dengan penetapan daftar proyek untuk selanjutnya daftar proyek terpilih akan dilakukan peningkatan kualitas proyek melalui proses quality assurance sebagaimana dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3.18. Alur Penerapan Proses Clearing House Proyek Pada RKP Tahun 2022



Sumber: Kedeputan PEPP, 2020

Pada penyusunan RKP Tahun 2022 Kementerian PPN/Bappenas diharapkan dapat melakukan penguatan, sehingga RKP dapat lebih operasional dan menjadi acuan bagi kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah dalam menyusun dokumen perencanaannya.

Penyusunan dokumen RKP merupakan proses iteratif yang terus mengalami penguatan guna menjawab tantangan dinamika pembangunan dan menjamin keselarasan dengan RPJMN Tahun 2020-2024. Dalam konteks ini, penyusunan RKP Tahun 2022 mengalami penguatan melalui penyempurnaan terhadap tahapan reguler melalui penambahan fitur baru, seperti: (1) Memperkuat tahapan RKP dengan melakukan sinkronisasi program lintas sektor dan arah pengembangan wilayah, serta menambahkan kegiatan Kunjungan Kerja Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rapat Koordinasi dengan Menteri Koordinator, dan Multilateral Meeting PN; (2) Mewujudkan pendanaan komprehensif; (3) Memperkuat sistem perencanaan, penganggaran serta pelaporan informasi kinerja (KRISNA); dan (4) Memasukkan proses clearing house dalam proses penyusunan RKP, serta (5) Memasukkan suplemen BUMN dalam dokumen RKP.

Gambar 3.19. Fitur Baru dan Penguatan dalam RKP Tahun 2022



Sumber: Kedeputan PEPPS

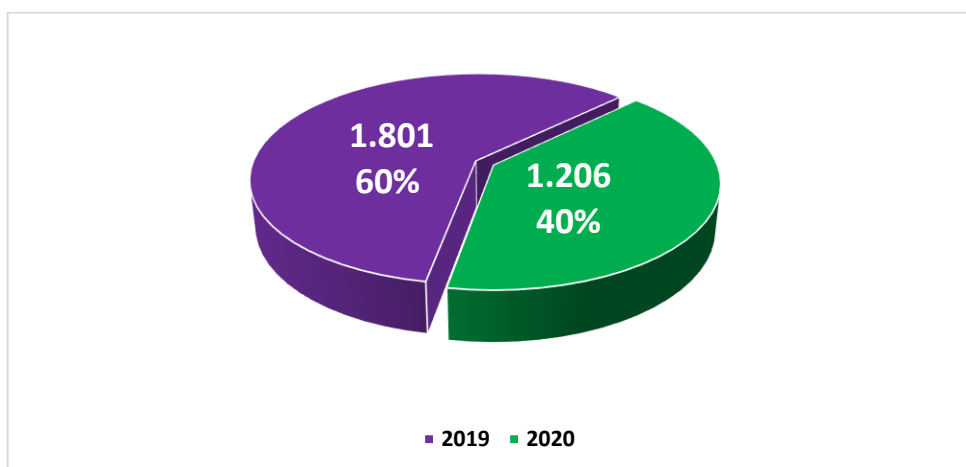
Upaya tersebut juga ditujukan untuk memperkuat implementasi dari money follow program melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, Spasial (THIS). Sehingga dapat menjamin delivery manfaat berbagai proyek pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Capaian Perkuatan Clearing House Pembangunan dalam RKP 2022 ini akan berdampak penguatan keselarasan muatan RKP 2022 hingga RKA K/L 2022.

3.3. PAGU DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020

3.3.1. Pagu Anggaran

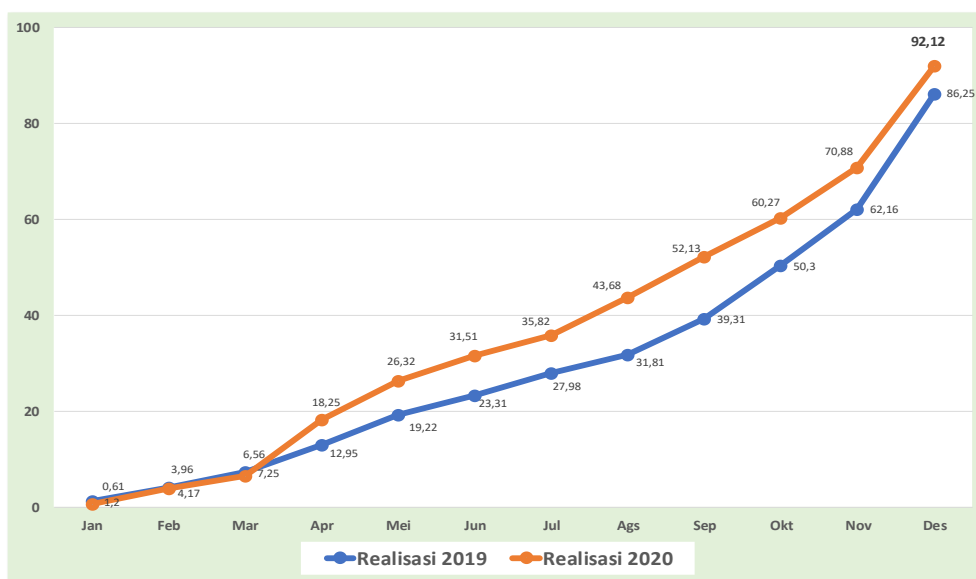
Pada Tahun 2020 Kementerian PPN/Bappenas memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 1.206.521.004.000,-. Anggaran tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, dikarenakan adanya kebijakan pemotongan anggaran terkait penanggulangan wabah Covid19.

Gambar 3.20. Perbandingan Pagu Anggaran Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2019 – 2020



Jika dibandingkan realisasi anggaran tahun 2019, realisasi penyerapan anggaran Tahun 2020 mengalami peningkatan sekitar 5,78%. Realisasi anggaran tahun 2019 (86,25%) lebih rendah dibandingkan tahun 2020 (92.12%) dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3.21. Realisasi Anggaran Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2019 – 2020



Secara rinci perbandingan realisasi per program dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.25 Pagu dan Realisasi Anggaran Program Kegiatan Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2019 – 2020

NO	PROGRAM	PAGU		REALISASI	
		2019	2020	2019	2020
1	Program Perencanaan Pembangunan Nasional	943.887.160.000	637.185.373.000	835.029.390.000 (88,47%)	602.734.246.079 (94,56%)
2	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	879.122.480.000	562.659.605.000	736.098.800.000 (83,73%)	502.064.200.862 (83,96%)
3	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur	10.950.000.000	6.676.026.000	10.602.640.000 (96,83%)	6.598.177.690 (98,83%)
JUMLAH		1.833.959.640.000	1.206.521.004.000	1.581.730.830.000 (86,25%)	1.111.396.624.631 (92,12%)

Dari beberapa gambar dan tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi anggaran Kementerian PPN/Bappenas ke depan harus terus ditingkatkan. Capaian tersebut sangat berpengaruh besar terhadap capaian kinerja Kementerian PPN/Bappenas sehingga realisasi tersebut akan menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan pejanjian kinerja dan alokasi anggaran lebih tepat dan terukur pada tahun berikutnya lebih baik.

3.3.2. Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2020

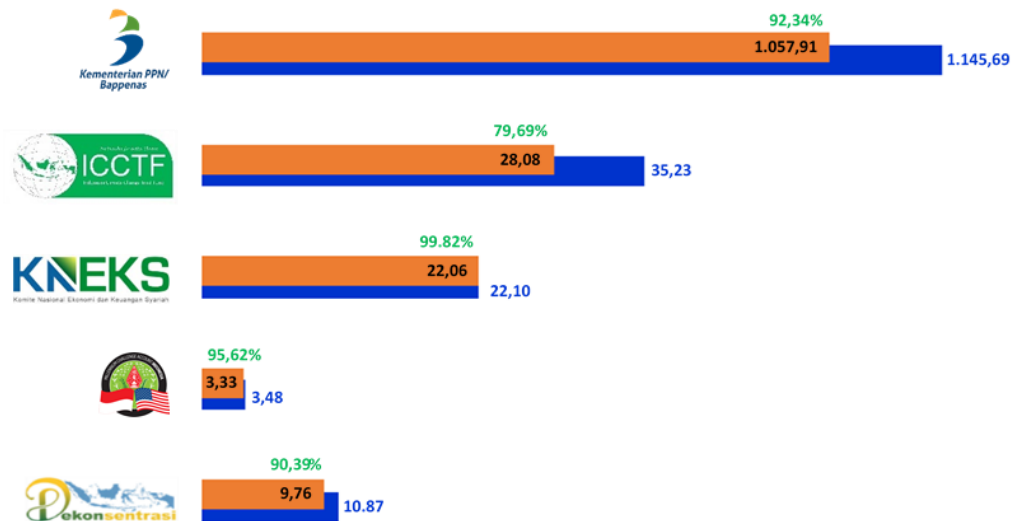
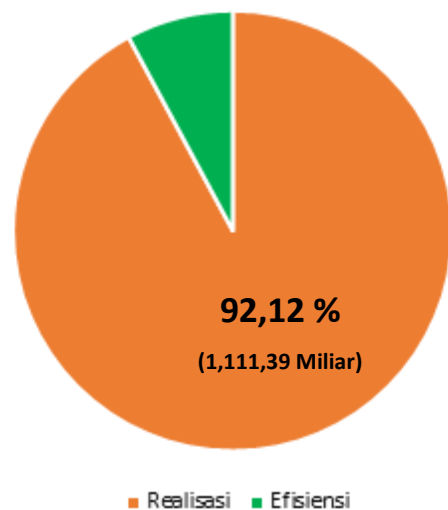
Pada Tahun 2020 Kementerian PPN/Bappenas memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 1.206.521.004.000,- yang terdiri dari dana Rupiah Murni (RM) sebesar Rp. 998.035.305.000,-, Pinjaman Luar Negeri (PLN) sebesar Rp. 147.818.412.000,- dan Hibah Luar Negeri (HLN) sebesar Rp. 60.667.287.000,-. Realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.111.396.624.631,- (92,12%), yang terdiri dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp. 1.357.560.770.000,- (85,92%), Pinjaman Luar Negeri (PLN) sebesar Rp. 147.818.412.000,-, dan Hibah Luar Negeri (HLN) sebesar Rp. 60.667.287.000,-. Anggaran tersebut terbagi ke dalam 3 (tiga) program, yaitu :

1. Program Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
3. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur

Secara rinci alokasi anggaran dan realisasi per program menurut dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:

Tabel 3.26. Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2020

NO	PROGRAM	PAGU				REALISASI			
		RM	PLN	HLN	JUMLAH	RM	PLN	HLN	JUMLAH
1	Program Perencanaan Pembangunan Nasional	428.699.674.000	147.818.412.000	60.667.287.000	637.185.373.000	421.996.107.185 (98,39%)	136.704.503.981 (92,48%)	44.033.634.913 (72,58%)	602.734.246.079 (99,31%)
2	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	562.659.605.000	-	-	562.659.605.000	502.064.200.862 (89,26%)			502.064.200.862 (89,26%)
3	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur	6.676.026.000	-	-	6.676.026.000	6.598.177.690 (98,83%)			6.598.177.690 (98,83%)
JUMLAH		998.035.305.000	147.818.412.000	60.667.287.000	1.206.521.004.000	930.658.485.737 (93,25%)	136.704.503.981 (92,48%)	44.033.634.913 (72,58%)	1.111.396.624.631 (92,12%)



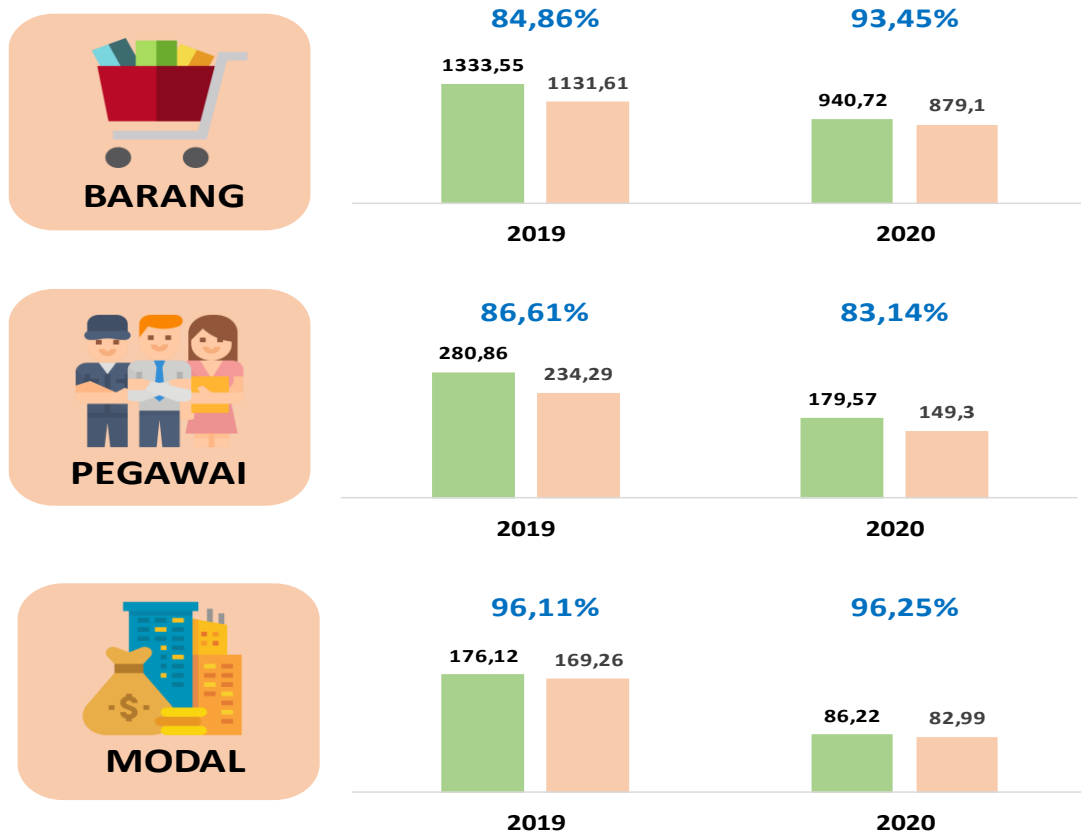
Dalam miliar rupiah

PAGU

REALISASI

Sedangkan realisasi penyerapan anggaran berdasarkan per Jenis Belanja, dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3.22. Realisasi Anggaran Kementerian PPN/Bappenas Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2019 dan 2020

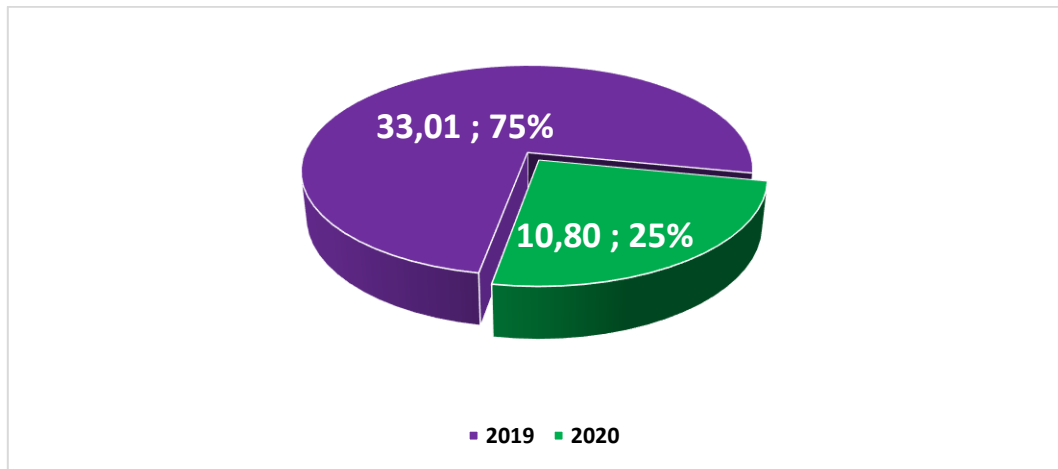


Jika dilihat dari jenis belanja, realisasi anggaran Tahun 2020 terbesar adalah belanja modal yaitu sebesar 96,25%, sedangkan realisasi terkecil adalah belanja pegawai (83,14%). Rendahnya belanja pegawai dikarenakan adanya kebijakan pemerintah tidak memberikan gaji dan tunjangan bagi Eselon I, II PAU.

SATKER DEKONSENTRASI

Pada Tahun 2020 Satker Dekonsentrasi memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 10.807.270.000,-. Anggaran tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, dikarenakan adanya kebijakan pemotongan anggaran terkait penanggulangan wabah Covid19.

Gambar 3.23. Perbandingan Pagu Anggaran Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2019 – 2020



Jika dibandingkan realisasi anggaran tahun 2019, realisasi penyerapan anggaran Tahun 2020 mengalami peningkatan sekitar 5,78%. Realisasi anggaran tahun 2019 (86,25%) lebih rendah dibandingkan tahun 2020 (92.12%) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 27. Pagu dan Realisasi Anggaran Satker Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2019 – 2020

SATKER	PAGU		REALISASI	
	2019	2020	2019	2020
Dekonsentrasi	33.014.685.000	10.807.270.000	29.289.926.030 (88,72%)	9.768.500.685 (90,39%)

Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Satker Dekonsentrasi Tahun 2020

Pada Tahun 2020 Satker Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 10.807.270.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 9.768.500.685,- (90,39%). Secara rinci alokasi anggaran dan realisasi per program menurut dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:

Tabel 3.28. Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2020

NO	PROVINSI	PAGU	REALISASI	%
1	Jawa Tengah	572.216.000	569.317.100	99,49
2	DIY	271.924.000	232.380.450	85,46
3	Jawa Timur	235.822.000	72.201.400	30,62
4	Aceh	261.320.000	117.767.050	45,07
5	Sumatera Utara	103.704.000	103.588.600	99,89
6	Sumatera Barat	385.727.000	380.599.780	98,67
7	Riau	290.934.000	286.753.222	98,56
8	Jambi	239.700.000	235.443.596	98,22
9	Sumatera Selatan	383.051.000	371.855.065	97,08
10	Lampung	555.717.000	555.431.189	99,95
11	Kalimantan Barat	278.522.000	272.552.184	97,86
12	Kalimantan Tengah	248.740.000	190.198.929	76,46
13	Kalimantan Selatan	355.794.000	319.240.000	89,73
14	Kalimantan Timur	383.103.000	376.035.500	98,16
15	Sulawesi Utara	600.776.000	583.869.615	97,19
16	Sulawesi Tengah	292.896.000	292.220.800	99,77
17	Sulawesi Selatan	106.088.000	104.833.650	98,82
18	Sulawesi Tenggara	261.903.000	247.838.881	94,63
19	Maluku	683.884.000	652.271.641	95,38
20	Bali	395.145.000	392.110.595	99,23
21	NTB	425.577.000	363.642.066	85,45
22	NTT	328.320.000	318.263.400	96,94
23	Bengkulu	466.219.000	463.237.700	99,36
24	Maluku Utara	361.123.000	271.197.200	75,10
25	Banten	226.395.000	196.321.400	86,72
26	Bangka Belitung	249.113.000	248.995.647	99,95
27	Gorontalo	604.624.000	601.930.416	99,55
28	Kepulauan Riau	243.999.000	226.652.708	92,89
29	Papua Barat	260.448.000	-	-
30	Sulawesi Barat	277.340.000	270.959.155	97,70
31	Kalimantan Utara	457.146.000	450.791.746	98,61
JUMLAH		10.807.270.000	9.768.500.685	90,39

Sumber: data aplikasi OM-SPAN, 2020



PENUTUP

4.1. SIMPULAN

Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas telah melaporkan dan mengukur capaian kinerjanya berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2020 dan telah menyajikan informasi mengenai restrukturisasi organisasi yang dilakukan pada akhir tahun 2020. Akan tetapi, IKU yang digunakan masing mengacu pada IKU yang tercantum dalam Renstra 2015-2019 sehingga dalam perhitungan capaian indikator menggunakan metode *bridging* ke IKU dalam Renstra 2020-2024.

Secara umum, **capaian kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020 telah dilaksanakan dengan baik sesuai target kinerja tahun 2020** dalam Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024. Adapun capaian kinerja dari masing-masing IKU diuraikan sebagai berikut:

A. Sasaran Strategis 1: Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional

1. **Capaian IKU 1: Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional, tercapai 93,55 dari target 75** dengan rincian:
 - i. Capaian indikator **“Integrasi Perencanaan Pembangunan Pusat”** dengan nilai sebesar **39,94** dari **40**, dicapai melalui pemetaan dan pengukuran keselarasan sasaran, indikator dan target dari RPJPN 2005-2025, RPJMN 2020-2024, Renstra K/L 2020-2024, RKP 2021, dan Renja K/L 2021.
 - ii. Capaian indikator **“Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pusat”** dengan nilai sebesar **39,72** dari **40**, dicapai melalui pemetaan dan pengukuran keselarasan sasaran, indikator dan target Kegiatan Prioritas dan Proyek Prioritas RKP 2021 terhadap sasaran kegiatan dan Klasifikasi Rincian Output (KRO) – Rincian Output (RO) RKA K/L 2021.
 - iii. Capaian indikator **“Sinergi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah”** sebesar **13,90** dari **20**, dicapai melalui pemetaan dan pengukuran keselarasan muatan RPJMD Provinsi dengan muatan RPJMN Tahun 2020-2024 dan muatan RKPD Provinsi Tahun 2021 dengan RKP Tahun 2021.
2. **Capaian IKU 2: Persentase Perencana yang Memenuhi Standar Kompetensi tercapai 99,19%** dicapai melalui pengukuran jumlah perencana yang memenuhi kompetensi perencana di seluruh K/L/D yang diselenggarakan oleh Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana Bappenas (Pusbindiklatren).

- B. Sasaran Strategis 2: Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional**
- 1. Capaian IKU 3: Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional telah tercapai sebesar 100% dari target 84%**, yang diukur melalui: (a) pengukuran kinerja pengendalian pembangunan pusat; dan (b) pengukuran kinerja pengendalian pembangunan daerah.
- C. Sasaran Strategis 3: Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner**
- 1. Capaian IKU 4: Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L telah tercapai sebesar 100% dari target 85-87,9%**, dicapai melalui pemetaan rekomendasi kebijakan yang diterima oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas dari Presiden yang menjadi perhatian nasional.
 - 2. Capaian IKU 5: Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L telah tercapai 100% dari 75-79,9%**, dicapai melalui pemetaan rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L.
- D. Sasaran Strategis 4: Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM**
- 1. Capaian IKU 6: Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas tercapai nilai 83,93 (angka sementara) dari target 83**, dicapai melalui penilaian yang dilakukan oleh Kementerian PAN RB dan juga penilaian internal yang dilakukan oleh Inspektorat Utama Kementerian PPN/Bappenas. Sampai saat penyerahan Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas, hasil penilaian RB masih dalam proses *assessment* oleh Kementerian PAN RB.
 - 2. Capaian IKU 7: Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional telah tercapai nilai 91,17 dari target 85,00** dicapai melalui hasil kuesioner kepuasan *stakeholder* terhadap layanan Kementerian PPN/Bappenas.
 - 3. Capaian IKU 8: Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional telah tercapai 88,89% dari target 85%** dicapai melalui upaya integrasi berbagai sistem data dan informasi perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Kementerian PPN/Bappenas.

4.2. TINDAK LANJUT

Dalam upaya meningkatkan kinerja Kementerian PPN/Bappenas di masa yang akan datang, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan peran koordinasi dan kerjasama berkelanjutan antar sektor guna mempercepat pembangunan prioritas nasional di pusat maupun daerah, salah satunya melalui peningkatan kegiatan bersama lintas sektor dengan melihat langsung pelaksanaan kegiatan *Major Project* dan pencapaian proyek prioritas dalam RKP.
2. Meningkatkan kegiatan pemantauan dan evaluasi lintas sektor atas pelaksanaan PN-PP-KP-ProP dan *Major Project* sehingga sasaran dan target pembangunan nasional dalam RKP dapat tercapai.
3. Merumuskan kebijakan pengelolaan dan integrasi data dan informasi perencanaan pembangunan nasional untuk mewujudkan Satu Data Indonesia di tingkat pusat dan daerah.
4. Memperbaiki tata kelola ASN di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas, diantaranya melalui pemutakhiran data seluruh pegawai PNS maupun PPNNP, pengembangan pola karir PNS, dan evaluasi pelaksanaan pengadaan PPNNP.
5. Melakukan pembinaan dan koordinasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan *Integrated Digital Workspace (IDW)* dan *Smart Office (SO)* masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas.

LAMPIRAN





LAMPIRAN
Perjanjian Kerja 2020





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suharso Monoarfa

Jabatan : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Januari 2020

Menteri PPN/Kepala Bappenas

Suharso Monoarfa

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel	1. Persentase (%) keselarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana kerja Kementerian/Lembaga/Daerah	100%
		2. Rancangan Perpres RKP 2021	1 dokumen
		3. Persentase (%) rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti K/L	100%
2.	Manajemen tata kelola pemerintah di Kementerian PPN/Bappenas yang baik dan bersih	Tingkat kualitas tata kelola pemerintahan Kementerian PPN/Bappenas	Baik

Program	Anggaran
1. Program Utama Perencanaan Pembangunan Nasional	Rp948.439.846.000,00
2. Program Pendukung:	
1) Dukungan Manajemen Kementerian PPN/Bappenas	Rp870.250.000.000,00
2) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur	Rp10.000.000.000,00

Jakarta, Januari 2020

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Bappenas



Suharso Monoarfa



LAMPIRAN
Rencana Kerja Tahunan 2020



Rencana Kerja Tahun 2020

Dalam upaya mencapai sasaran strategis Tahun 2020, Kementerian PPN/Bappenas telah menyusun rencana kerja selama 1 (satu) tahun sesuai dengan Renstra Kementerian PPN/Bappenas tahun 2020-2024 serta memenuhi Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang sudah ditetapkan.

Berikut perencanaan kegiatan selama tahun 2020:

No	Rencana Kegiatan	Pelaksanaan			
		TW I	TW II	TW III	TW IV
A. PERENCANAAN					
Sasaran Strategis:					
<ul style="list-style-type: none"> - Persentase (%) keselarasan muatan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) - Persentase (%) keselarasan muatan RPJMN 2020-2024 dengan RPJPN 2005-2025 - Rancangan Perpres RKP 2021 					
1	Kajian	√	√	√	√
2	Koordinasi penyusunan draft RKP 2021	√	√	√	√
	<ul style="list-style-type: none"> • Persiapan (penjamaan TOR, penyusunan jadwal rapat sesuai siklus perencanaan, pengumpulan materi/bahan RKP, analisis rekomendasi hasil monev dan usulan pemangku kepentingan, dan penyusunan kerangka laporan) 	√			
	<ul style="list-style-type: none"> • Rapat koordinasi pertama dengan mitra K/L untuk menyiapkan materi RKP 	√	√		
	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan rancangan awal RKP berdasarkan RPJMN 2020-2024, Kerangka Ekonomi Makro (KEM) 2021, rancangan tema dan prioritas RKP, rekomendasi hasil monev, usulan K/L, usulan pemangku kepentingan, dan bahan-bahan lain yang terkait. 	√			
	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan usulan untuk rancangan pagu indikatif RKP, berdasarkan rancangan awal RKP 	√			
	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan Rakorbangpus I 	√			
	<ul style="list-style-type: none"> • Rapat koordinasi dengan K/L dan pemangku kepentingan terkait tindak lanjut Rakorbangpus I 	√			
	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan rancangan awal RKP, termasuk alokasi anggaran, berdasarkan Surat Bersama Rancangan Awal RKP dan Pagu Indikatif, untuk digunakan dalam pembahasan <i>Trilateral Meeting</i> RKP 	√			
	<ul style="list-style-type: none"> • Pendampingan Pemda dalam penyelenggaraan Musrenbang Provinsi 	√	√		
	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan forum konsultasi publik 		√		
	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan Rakorbangpus II 		√		
	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan Pra-Musrenbangnas 		√		

	• Penyelenggaraan Musrenbangnas		√		
	• <i>Trilateral Meeting</i> RKP		√		
	• Perbaikan draft RKP berdasarkan Musrenbangnas dan <i>trilateral meeting</i>		√		
	• Penetapan RKP		√		
	• Rapat Pembahasan RKP dengan Panja DPR RI		√		
Sasaran Strategis:					
Persentase (%) keselarasan muatan Rencana Kerja (Renja) Kementerian/Lembaga (K/L) dengan RKP					
1	Kegiatan Koordinasi	√	√	√	√
2	Pendampingan K/L dalam penyusunan rancangan Renja K/L	√			
3	Musrenbangnas	√			
4	<i>Trilateral Meeting</i> , yang juga mencakup pembahasan rancangan Renja K/L	√	√		
5	Pendampingan K/L dalam perbaikan Renja K/L 2020 berdasarkan hasil <i>trilateral meeting</i> dan Musrenbangnas untuk menjadi dasar penyusunan RKA-K/L		√		
6	Penyerahan Renja K/L oleh K/L mitra		√		
7	Evaluasi kesesuaian Renja K/L dengan RKP		√		
8	Rancangan Perpres RKP Tahun 2020		√		
9	Pemutakhiran RKP Tahun 2020				√
B. PENGANGGARAN					
Sasaran Strategis:					
Persentase (%) keselarasan muatan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L dengan RKP					
1	Kegiatan Koordinasi	√	√	√	√
2	Penyerahan Renja K/L oleh K/L mitra		√		
3	Pendampingan K/L dalam penyusunan RKA-K/L berdasarkan RKP		√	√	√
4	Penyusunan RKA-K/L oleh K/L mitra:		√	√	√
	• Pagu Anggaran (RKA-K/L)		√		
	• Penelaahan RKA-K/L I oleh K/L, Bappenas, dan Kementerian Keuangan			√	
	• RAPBN dan Nota Keuangan			√	
	• Konsultasi dengan DPR			√	
	• Penetapan APBN				√
	• Alokasi anggaran K/L (Revisi RKA-K/L)				√
	• Penelaahan RKA-K/L II oleh K/L, Bappenas, dan Kementerian Keuangan				√
	• DIPA K/L				√
5	Evaluasi kesesuaian RKA-K/L dengan RKP				√

C. PENGENDALIAN					
Sasaran Strategis:					
Persentase (%) rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti K/L					
1	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan				
	• Kegiatan Pemantauan/Evaluasi:	√	√	√	√
	• Rapat koordinasi pemantauan program dan kegiatan terkait sasaran prioritas nasional	√			
	• Pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan terkait sasaran prioritas nasional tahun		√	√	√
	• Analisis hasil pemantauan		√	√	√
	• Rapat pembahasan tindak lanjut hasil pemantauan untuk perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan yang sedang berjalan oleh K/L	√	√	√	√
	• Penyusunan Lampiran Pidato Presiden		√	√	
	• Penyusunan rekomendasi hasil pemantauan untuk menjadi bahan perencanaan dan perbaikan pelaksanaan di tahun-tahun berikutnya			√	√
D. ENABLER					
Sasaran Strategis:					
Persentase (%) rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti K/L					
1	Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	√	√	√	√
E. MANAJEMEN TATA KELOLA					
Sasaran Strategis:					
Meningkatkan kinerja yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM					
1	Penyelenggaraan SPIP				
	• Pembentukan Satgas SPIP 2020	√			
	• Penyusunan Rencana SPIP TA 2020	√			
	• Identifikasi risiko kegiatan utama		√		
	• Menyusun Rencana Tindak Lanjut		√		
	• Koordinasi SPIP	√	√	√	√
	• Melakukan Monitoring dan Evaluasi SPIP		√		√
	• Penyusunan Laporan SPIP		√		√
2	Pelaksanaan RB				
	• Pembentukan Tim RB TA 2020	√			
	• Penyusunan Rencana Kerja RB TA 2020	√			
	• Identifikasi capaian RB di delapan area perubahan serta pengumpulan data dukungannya		√		
	• Melaksanakan Penilaian Mandiri RB			√	
	• Koordinasi, sosialisasi, dan internalisasi RB	√	√	√	√
	• Melakukan Monitoring dan Evaluasi RB		√		√
	• Penyusunan Laporan RB				√

3	Pelaksanaan <i>Flexywork/Inregrated Digital Workspace</i> (IDW)				
	• Pembentukan Tim Implementasi IDW	√			
	• Sosialisasi dan uji coba	√			
	• Cascading dan integrasi IKU ke dalam bitrix		√	√	
	• Koordinasi IDW	√	√	√	√
	• Melakukan Monitoring dan Evaluasi Implementasi IDW		√		√
	• Bimbingan Teknis Implementasi IDW			√	√



LAMPIRAN
Rencana Kerja 2020 dan 2021



**RENCANA KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
TAHUN 2020**

Nama Kementerian : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BAPPENAS

Program : 055.01.01-Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bappenas

Sasaran Program : 01-Tersedianya Pelayanan dan Dukungan Proses Perencanaan Pembangunan Nasional yang Baik dan Bersih

Sasaran Strategis : 02-Manajemen tata kelola pemerintahan di Kementerian PPN/Bappenas yang bersih

Output Program : 01-Layanan dan Dukungan Proses Perencanaan Pembangunan Nasional yang Baik dan Bersih

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	OUTPUT	SUB OUTPUT	KOMPONEN	ALOKASI
2911-Pelayanan Kehumasan, Keprotokol/Persidangan, dan Ketatausahaan Pimpinan	01-Tersusunnya Pelayanan Kehumasan, Keprotokol/Persidangan, dan Ketatausahaan Pimpinan	958-Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	112-Tanpa Sub Output	112-Kehumasan dan Hubungan Antar Lembaga	19.303.709
				115-Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	-
		959-Layanan Protokoler	112-Tanpa Sub Output	113-Ketatausahaan dan persidangan pimpinan	4.326.081
				114-Protokoler lembaga	9.370.210
2912-Pembinaan dan Pelayanan Hukum	01-Tersusunnya Pembinaan dan Pelayanan Hukum	957-Layanan Hukum	091-Produk Hukum	091-Penguatan Kapasitas Kelembagaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	1.375.200
				092-Pelaksanaan Komunikasi dan Jejaring Hukum untuk peningkatan kepatuhan terhadap regulasi	1.200.000
			092-Bantuan Hukum	092-Peningkatan Profesionalitas Pemberian Konsultasi dan Pendampingan Hukum	1.375.200
2913-Penyusunan Perencanaan, Analisis Organisasi, dan Tata Laksana	01-Tersusunnya Perencanaan, Analisis Organisasi, dan Tata Laksana	952-Layanan Perencanaan	110-Tanpa Sub Output	110-Pelayanan Penyusunan Program dan Anggaran	648.000
				953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi	110-Tanpa Sub Output
		960-Layanan Manajemen Organisasi	110-Tanpa Sub Output	107-Koordinasi Peningkatan Kapasitas Organisasi dan Tata Laksana	1.700.000
				108-Koordinasi dan Monitoring Reformasi Birokrasi	-
				109-Koordinasi Penyusunan dan Evaluasi Tata Laksana	-
964-Layanan Kerjasama Internasional	110-Tanpa Sub Output	106-Pengembangan Kerjasama	1.100.000		
2914-Penyusunan Kebijakan dan Pelayanan Kepegawaian	01-Penyusunan Kebijakan dan Pelayanan Kepegawaian	954-Layanan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)	001-Tanpa Sub Output	093-Koordinasi Pengelolaan SDM	2.990.000
				094-Koordinasi Pengembangan SDM	10.800.000
				095-Koordinasi Kinerja Pegawai	1.850.000
				096-Koordinasi Sistem Informasi Kepegawaian	1.360.000

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	OUTPUT	SUB OUTPUT	KOMPONEN	ALOKASI
2915-Pelayanan Umum dan Keuangan	01-Terselenggaranya Pelayanan Umum dan Keuangan	955-Layanan Manajemen Keuangan	001-Tanpa Sub Output	102-Penerapan SAI	739.755
				103-Pelayanan Administrasi Satker	18.689.052
				104-Pelayanan Pengujian Pembayaran	3.502.565
		956-Layanan manajemen Barang Milik Negara (BMN)	001-Tanpa Sub Output	098-Pengelolaan BMN	2.149.584
				099-Pencatatan BMN	1.924.923
		962-Layanan Umum	001-Tanpa Sub Output	100-Pelayanan Dukungan Umum dan Perkantoran	15.111.967
				101-Pelayanan Perencanaan Fasilitas Umum Perkantoran dan Pengadaan	30.770.001
		994-Layanan Perkantoran	001-Tanpa Sub Output	001-Gaji dan Tunjangan	180.164.552
002-Operasional dan Pemeliharaan Kantor	162.398.725				
2916-Pengelolaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional	01-Tersusunnya Pengelolaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional	963-Layanan Data dan Informasi	001-Tanpa Sub Output	116-Dukungan Penyusunan Dokumen Perencanaan	700.000
				117-Pengelolaan Data dan TI	13.540.000
				119-Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan	2.300.000
				120-pengembangan kapasitas TI	23.460.000
				121-Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	20.000.000
2918-Dukungan Penyusunan Perencanaan Kebijakan Pembangunan	01-Dukungan Penyusunan Perencanaan Kebijakan Pembangunan	950-Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	001-Tanpa Sub Output	051-Penyusunan rencana program; dan Penyusunan rencana anggaran	86.150.476
2946-Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan Umum dan Operasional	01-Tersusunnya Sarana dan Prasarana Aparatur Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kementerian PPN/Bappenas	951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	001-Tanpa Sub Output	051-Pengadaan kendaraan bermotor	1.306.998
				053-Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	97.312.002
				054-Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan	151.381.000

**RENCANA KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
TAHUN 2020**

Nama Kementerian : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BAPPENAS

Program : 055.01.03-Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bappenas

Sasaran Program : 01-Terjaganya Akuntabilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kementerian PPN/Bappenas

Sasaran Strategis : 02-Manajemen tata kelola pemerintahan di Kementerian PPN/Bappenas yang bersih

Output Program : 01-Layanan Pengawasan Internal kementerian PPN/Bappenas

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	OUTPUT	SUB OUTPUT	KOMPONEN	ALOKASI
2920-Pembinaan dan Pengawasan Bidang Administrasi Umum	01-Terlaksananya Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kementerian PPN/Bappenas Bidang Administrasi Umum	965-Layanan Audit Internal	001-Layanan Penjaminan/ Assurance	052-Pelaksanaan audit internal	850.000
				054-Tindak lanjut hasil Laporan Hasil Pemeriksaan LHP	400.000
			002-Layanan Pembinaan	056-Pembinaan pengawasan Kinerja dan keuangan	1.050.000
			003-Manajemen Internal	051-Penyusunan kebijakan dan SOP pengawasan internal	4.450.000
2921-Pembinaan dan Pengawasan Bidang Kinerja Kelembagaan	01-Terlaksananya Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kementerian PPN/Bappenas Bidang Kinerja Kelembagaan	965-Layanan Audit Internal	001-Layanan Penjaminan/ Assurance	052-Pelaksanaan audit internal	1.380.000
				054-Tindak lanjut hasil Laporan Hasil Pemeriksaan LHP	150.000
			002-Layanan Pembinaan	056-Pembinaan pengawasan Kinerja dan keuangan	275.000
			003-Manajemen Internal	051-Penyusunan kebijakan dan SOP pengawasan internal	1.445.000

**RENCANA KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
TAHUN 2020**

Nama Kementerian : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BAPPENAS

Program : 055.01.06-Program Perencanaan Pembangunan Nasional

Sasaran Program : 01-Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Nasional yang Berkualitas, Sinergis, dan Kredibel

Sasaran Strategis : 01-Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel.

Output Program : 01-Perencanaan Pembangunan Nasional

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	OUTPUT	SUB OUTPUT	KOMPONEN	ALOKASI
2922-Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pendidikan dan Agama	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pendidikan dan Agama	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	510-Kajian Percepatan Penerapan Kebijakan Bidang Pendidikan dan Agama Tahun 2020a	1.500.000
		603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Tanpa Sub Output	570-Koordinasi penyusunan RKP Bidang Pendidikan dan Agama Tahun 2020	1.250.000
		604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah		570-Koordinasi Sinkronisasi RPJMN 2020-2024 dengan K/L dan RPJMD Bidang Pendidikan dan Agama	750.000
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan		610-Pemantauan Terpadu Dan Pengendalian Pelaksanaan Program Pembangunan Bidang Pendidikan Dan Agama	750.000
				611-Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Bidang Pendidikan Dan Agama	750.000
		608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan		640-Pengendalian Strategis Dana Transfer Daerah Bidang Pendidikan	750.000
				641-Pengendalian Strategis Pembiayaan Program Pendidikan Dan Agama Berbasis Bantuan Pinjaman Dan Hibah	750.000
2923-Perencanaan Pembangunan Bidang Alokasi Pendanaan Pembangunan	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Bidang Alokasi Pendanaan Pembangunan	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	510-Koordinasi Strategis Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2020 untuk	4.572.898
				511-Koordinasi Penyusunan Kebijakan Alokasi Pada Prioritas Dana Alokasi Khusus (DAK)	357.992
		602-Sistem Regulasi Perencanaan	056-Tanpa Sub Output		-
		603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek		570-Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2020	2.085.452
		604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah		570-KOORDINASI Penyusunan Perpres Rencana Kerja Pemerintah (PERPRES RKP) Tahun 2021	2.746.212
				571-Kajian penajaman major project rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN)	648.440
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan		610-Pemantauan dan Evaluasi Alokasi Evaluasi Lingkup Pendanaan Pembangunan Tahun 2020	905.882
		608-Kebijakan percepatan pelaksanaan pembangunan		640-Pengembangan dan pemutakhiran database dalam rangka penyusunan pagu indikatif tahun 2021	483.124
610-Rancangan Perpres RKP			-		

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	OUTPUT	SUB OUTPUT	KOMPONEN	ALOKASI
2925-Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Aparatur Negara	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Aparatur Negara	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	510-Kajian Skenario Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Aspek Aparatur Negara (ASN)	1.000.000
		603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Tanpa Sub Output	570-Koordinasi Penyusunan RKP lingkup Aparatur Negara	702.500
		604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah	057-Tanpa Sub Output	570-Finalisasi, Harmonisasi dan Sinkronisasi Penyusunan RPJMN 2020-2024 Bidang Aparatur	100.000
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Tanpa Sub Output	610-Pemantauan dan Pengendalian Kegiatan Prioritas Pembangunan Aparatur Negara Tahun 2020	725.000
				611-Evaluasi Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Aparatur Negara tahun 2019	500.000
608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Tanpa Sub Output	641-Koordinasi Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah (OGI)	1.000.000		
2926-Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Energi, Telekomunikasi dan Informatika	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Energi, Telekomunikasi dan Informatika	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	052-Tanpa Sub Output	510-Kajian Integrasi Energi Baru Terbarukan (EBT) Intermitten ke dalam Grid	650.000
		603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Tanpa Sub Output	571-Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 Lingkup Energi Telekomunikasi dan Informatika	1.050.000
		604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah	057-Tanpa Sub Output	570-Integrasi, Harmonisasi, Sinkronisasi dan Sosialisasi RPJMN 2020-2024 dalam lingkup Sektor Energi, Telekomunikasi dan Informatika	850.000
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Tanpa Sub Output	610-Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan 2019 Lingkup energi, Telekomunikasi dan Informatika	1.000.000
		608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Tanpa Sub Output	640-Koordinasi Strategis Pelaksanaan dan Monev Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (RISPE)	650.000
				641-Koordinasi Strategis Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Ketenagalistrikan Nasional	650.000
				642-Koordinasi Strategis Perencanaan dan Pelaksanaan Transformasi Digital	650.000
643-Koordinasi Sekretariat Dewan Tik Nasional TA 2020	7.500.000				
2927-Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah	01-Terlaksananya Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah	606-Informasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan	062-Tanpa Sub Output	620-Evaluasi Pembangunan Daerah	6.000.000
			621-Pemantauan Pembangunan di Daerah	1.000.000	
			622-Koordinasi Pembangunan	1.000.000	
			623-Penghargaan Pembangunan Daerah	7.000.000	
2928-Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektoral	01-Terlaksananya Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektoral	603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Tanpa Sub Output	570-Koordinasi Penyusunan RKP Bidang Pengendalian Pembangunan	1.202.950
		606-Informasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan	062-Tanpa Sub Output	620-Pemantauan Pembangunan Sektoral	2.573.007
				621-Evaluasi Tematik Pembangunan Sektoral	2.436.824
				622-Evaluasi Pelaksanaan RKP	1.963.839
				623-Penyusunan Lampiran Pidato Presiden 2020	823.380
608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Tanpa Sub Output	640-Pemanfaatan Jasa Konsultan dalam Mendukung Pembangunan Nasional	-		

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	OUTPUT	SUB OUTPUT	KOMPONEN	ALOKASI
2929-Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Hukum dan Regulasi	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Hukum dan Regulasi	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	510-Penyusunan Kerangka Kelembagaan dalam rangka Pembangunan Hukum dan Peradilan	474.076
			052-Policy Paper	520-Penyusunan Policy Paper Optimalisasi Penerapan Alternatif Pemidanaan di Indonesia	450.921
		603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Tanpa Sub Output	570-Koordinasi Penyusunan RKP 2021 Bidang Hukum dan Regulasi	537.090
				571-Penelahaan Renja dan RKA Mitra K/L Bidang Hukum dan Regulasi	20.700
		604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah	057-Tanpa Sub Output	570-Koordinasi Pelaksanaan RPJMN Periode 2020-2024 Bidang Hukum dan Regulasi	200.495
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Tanpa Sub Output	610-Pengendalian Pelaksanaan Program/Kegiatan pembangunan Tahun 2020 Bidang Lingkup Hukum dan Regulasi	179.350
				611-Evaluasi Pelaksanaan Program/ Kegiatan Pembangunan Tahun 2020 Bidang Lingkup Hukum dan Regulasi	498.270
				612-Pengembangan Penyusunan Indeks pembangunan Hukum (IPH) Tahun 2019	515.436
		608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Tanpa Sub Output	641-Kordinasi Implementasi SDG's Goal 16	70.840
				642-Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Hibah Luar Negeri	153.360
				643-Dukungan Pelaksanaan Kebijaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi TA 2020	497.224
				644-Koordinasi Arah Kebijakan Pelaksanaan Rencana Aksi HAM Nasional Tahun 2020	223.838

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	OUTPUT	SUB OUTPUT	KOMPONEN	ALOKASI
2930-Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	510-Kajian Pengembangan Sektor Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	900.000
			052-Policy Paper	520-Policy Paper Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-
		603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Tanpa Sub Output	570-Koordinasi Penyusunan RKP 2020 Sektor Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	600.000
				571-Koordinasi Penyusunan Kebijakan DAK 2020 Bidang IKM dan Pariwisata	-
		604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah	057-Tanpa Sub Output	570-Singkronisasi RPJMN 2020-2024 Bidang Industri,Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	300.000
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Tanpa Sub Output	610-Pemantauan dan Evaluasi Bidang Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	500.000
				611-Evaluasi Bidang Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-
		608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Tanpa Sub Output	640-Pengendalian dan Percepatan Pelaksanaan Prioritas Nasional Bidang Industri dan Pariwisata	400.000
				641-koordinasi Strategis Pengelolaan Hibah Sektor Pengetahuan	700.000
				642-Pengembangan Strategis Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	400.000
643-Koordinasi Strategis Program Pembangunan Pariwisata yang Terintegrasi dan Berkelanjutan	700.000				
2931-Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Jasa Keuangan dan BUMN	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Jasa Keuangan dan BUMN	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	051-Kajian Jasa Keuangan Syariah	710.858
		603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Tanpa Sub Output	570-Koordinasi penyusunan RKP tahun 2021	627.365
		604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah	064-Tanpa Sub Output	640-Koordinasi RPJMN 2020-2024	471.685
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Tanpa Sub Output	610-Evaluasi PHLN di Bidang Pemerataan dan Pertumbuhan Ekonomi Tahun Anggaran 2020	598.696
				611-Pemantauan Sumber Pembiayaan Jangka Panjang	583.647
				612-Pemantauan Digitalisasi Jasa Keuangan	507.749
		608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Tanpa Sub Output	641-Kesekretariat Komite Nasional Keuangan Syariah	38.200.000
				642-Penyusunan Kebijakan Syariah Terkait Hukum, Promosi dan Hubungan Eksternal	4.000.000
				643-Penyusunan Kebijakan Syariah Terkait Inovasi Produk, Pedalaman Pasar, dan Pengembangan Infrastruktur Keuangan Syariah	4.000.000

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	OUTPUT	SUB OUTPUT	KOMPONEN	ALOKASI
				644-Penyusunan Kebijakan Syariah Terkait Keuangan Inklusif, Dana Sosial Keagamaan dan Keuangan Mikro Syariah	4.000.000
				645-Penyusunan Kebijakan Syariah Terkait Pendidikan dan Riset Keuangan Syariah	4.000.000
				646-Penyusunan Kebijakan Syariah Terkait Pengembangan Ekonomi Syariah dan Industri Halal	4.000.000
				647-Kesekretariatan PPK Komite Nasional Keuangan Syariah	1.800.000
2932-Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	510-Kajian Pengembangan Kawasan Perdesaan Sebagai Pelaksanaan dari Undang-Undang No. 6 Tahun	600.000
				511-Kajian Penguatan Manajemen Kebencanaan Nasional	600.000
		603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Tanpa Sub Output	570-Koordinasi Perencanaan Program Pembangunan Tahun 2021 dengan Kementerian/ Lembaga dalam	800.000
		604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah	057-Tanpa Sub Output		-
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Tanpa Sub Output	610-Pemantauan Pelaksanaan RKP Tahun 2020 Bidang Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Rawan	500.000
				611-Evaluasi Pelaksanaan RKP Tahun 2019 Bidang Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Rawan	600.000
		608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Tanpa Sub Output	640-Koordinasi Strategis Pelaksanaan Masterplan Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan	750.000
				641-Koordinasi Strategis Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan	750.000
				642-Koordinasi Strategis Pembangunan Desa Terpadu Melalui Program Solusi Lokal untuk Pengentasan	300.000
				643-Koordinasi Strategis Pemantapan Implementasi Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah	300.000
				644-Koordinasi Strategis Penguatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi dalam mendukung Percepatan	400.000
				645-Koordinasi Strategis Lembaga Pengelola Pendanaan Penanggulangan Bencana	400.000
				646-Koordinasi Strategis Perencanaan dan Pengendalian Penanganan Pascabencana (PPPP)	1.500.000
				647-Koordinasi Strategis Percepatan Pelaksanaan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan	7.500.000
648-Koordinasi Strategis Desk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Papua dan Papua Barat	8.000.000				

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	OUTPUT	SUB OUTPUT	KOMPONEN	ALOKASI
2933-Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pendidikan Tinggi, Iptek dan Kebudayaan	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pendidikan Tinggi, Iptek dan Kebudayaan	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	511-Kajian Peran Kebudayaan Dalam Pembangunan di Kalimantan	850.000
		603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Tanpa Sub Output	570-Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Nasional Bidang Pendidikan Tinggi, Iptek, dan Kebudayaan	1.500.000
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Tanpa Sub Output	610-Pemantauan Terpadu dan Pengendalian Pelaksanaan Program Pembangunan Bidang Pendidikan Tinggi, Iptek, dan Kebudayaan	1.100.000
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Tanpa Sub Output	611-Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Bidang Pendidikan Tinggi, Iptek, dan Kebudayaan	1.083.000
		608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Tanpa Sub Output	640-Pengendalian Strategis Pembiayaan Program Pendidikan Tinggi, Iptek, dan Kebudayaan yang Bersumber Dari Pendanaan Alternatif	900.000
2934-Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	510-Kegiatan Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kehutanan	1.100.000
			520-Policy Paper	520-Value chain industri hasil hutan	-
				521-Digitalisasi pengelolaan hutan	-
				522-Forest based ecotourism cluster	-
		603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Tanpa Sub Output	570-Koordinasi Penyusunan RKP Tahun 2021 bidang Kehutanan	725.000
				571-Koordinasi Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi DAK Sub Bidang Kehutanan	400.000
		604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah	057-Tanpa Sub Output	590-Koordinasi Penyusunan RPJMN Tahun 2020 - 2024 Bidang Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air	750.000
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Tanpa Sub Output	610-Pemantauan RKP Tahun 2020 Bidang Kehutanan	500.000
				611-Evaluasi RKP Tahun 2019 Bidang Kehutanan	500.000
		608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Tanpa Sub Output	640-Percepatan Pencapaian SDGs Tujuan 15	550.000
				641-Kegiatan Koordinasi Strategis Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)	24.975.000
				642-Koordinasi Proyek Pinjaman Dan Hibah Luar Negeri Tahun 2020 untuk Percepatan Pembangunan Bidang Kehutanan	500.000

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	OUTPUT	SUB OUTPUT	KOMPONEN	ALOKASI
2935-Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Kelautan dan Perikanan	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Kelautan dan Perikanan	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	510-Kajian Strategi Penguatan Integrasi Hulu Hilir Perikanan dan Dukungan Lintas Sektor Dalam	2.000.000
			052-Policy Paper	052-Policy Study : Tantangan Sinergitas Pembangunan Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Dalam	-
		603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Tanpa Sub Output	570-Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Bidang Kemaritiman dan Kelautan	1.000.000
				580-Koordinasi Perencanaan Pembangunan Lintas Sektor Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam	-
		604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah	057-Tanpa Sub Output	570-Diseminasi RPJMN 2020 - 2024 Bidang Kemaritiman dan Kelautan	2.900.000
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Tanpa Sub Output	610-Pemantauan RKP Tahun Berjalan Lingkup Kelautan dan Perikanan	1.000.000
				611-Evaluasi Pelaksanaan RKP Bidang Kemaritiman dan Kelautan	1.000.000
				613-Koordinasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	600.000
		608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Tanpa Sub Output	643-Dukungan Pendampingan dan Operasional Kegiatan PHLN Bidang Kelautan dan Perikanan	1.500.000
				644-Dukungan Pendampingan dan Operasional POKJA 3 Kelautan dan Perikanan	31.600.000
2936-Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	510-Kajian Kebijakan dan Strategi peningkatan peran perempuan dalam ketenagakerjaan	800.000
		603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Tanpa Sub Output	570-Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Bidang Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga Tahun 2020	1.200.000
		604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah	057-Tanpa Sub Output	570-Koordinasi Penyusunan RPJMN lingkup Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga	549.530
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Tanpa Sub Output	610-Pemantauan program dan kegiatan bidang keluarga, perempuan, anak, pemuda dan olahraga	1.000.000
				611-Evaluasi Program dan Kegiatan Bidang Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga	900.000
		608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Tanpa Sub Output	640-Koordinasi Strategis Pengelolaan Program Kerja Sama Hibah Pelaksanaan TA 2020	700.000
				641-Koordinasi Strategis Pengarusutamaan Gender Kementerian PPN/Bappenas TA 2020	700.000
				642-Koordinasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan	1.000.000

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	OUTPUT	SUB OUTPUT	KOMPONEN	ALOKASI
2937-Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Kesehatan dan Gizi Masyarakat	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Kesehatan dan Gizi Masyarakat	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	510-Kajian Pembangunan Kesehatan	1.042.000
		603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Tanpa Sub Output	570-Koordinasi penyusunan Rencana Pembangunan bidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat	1.628.780
		604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah	057-Tanpa Sub Output	570-Koordinasi Sosialisasi RPJMN lingkup kesehatan dan gizi masyarakat	-
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Tanpa Sub Output	610-Pemantauan dan evaluasi terpadu program dan kegiatan prioritas pembangunan kesehatan	1.092.000
		608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Tanpa Sub Output	640-Koordinasi Strategis Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi	1.042.000
				641-Koordinasi Strategis Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	1.042.000
				642-Koordinasi Strategis Pengelolaan Program Kerjasama RI Unicef 2016-2020	575.000
				643-Hibah Investing in Nutrition and Early Years Project (INEY)	14.300.000
2938-Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Keuangan Negara dan Analisis Moneter	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Keuangan Negara dan Moneter	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	510-Koordinasi Strategis Inovasi Kebijakan Pembiayaan	850.000
			052-Policy Paper	-	
		603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Tanpa Sub Output	570-Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 Bidang Keuangan Negara dan	900.000
		604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah	057-Tanpa Sub Output	570-Sinkronisasi Penyusunan Pembangunan Nasional Jangka Menengah 2020-2024 Bidang Keuangan Negara	100.000
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Tanpa Sub Output	610-Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Bidang Keuangan Negara dan Moneter	700.000
		608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Tanpa Sub Output	640-Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Insentif Pajak Sektor Energi dan Cukai Hasil Tembakau	250.000
				641-koordinasi Strategis Perencanaan Kebijakan Pengendalian Inflasi	500.000

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	OUTPUT	SUB OUTPUT	KOMPONEN	ALOKASI
2939-Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Lingkungan Hidup	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Lingkungan Hidup	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	510-Kajian	510-Kajian Analisis Kebijakan Penanganan Limbah dan Bahan Makanan yang Terbuang (Food Loss and Waste)	1.000.000
		603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	570-Tanpa Sub Output	570-Koordinasi Penyusunan RKP Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2021	1.000.000
				571-Koordinasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2020	500.000
		604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah	590-Tanpa Sub Output	590-Finalisasi Penyusunan RPJM 2020-2024 Bidang Lingkungan Hidup	500.000
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	610-Tanpa Sub Output	610-Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2020	250.000
				611-Evaluasi Pelaksanaan RPJMN 2015-2019 Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2019	250.000
		608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	640-Tanpa Sub Output	640-Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Hibah Lingkungan Hidup dan Keanekaragaman Hayati	1.000.000
				641-Koordinasi Penguatan Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	500.000
				642-Koordinasi Pelaksanaan SDG's (Goal 12 dan 13)	250.000
				643-Koordinasi Pelaksanaan dan Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim	8.000.000
644-Koordinasi Penyusunan Informasi Daya Dukung Lingkungan untuk Mendukung Satu Data Perencanaan	750.000				
2940-Perencanaan Pembangunan Nasional Terkait Lingkup Otonomi Daerah	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Nasional Terkait Lingkup Otonomi Daerah	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	510-Kajian Potensi dan Tantangan Alternatif Pembiayaan Pembangunan Daerah	750.000
		603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Tanpa Sub Output	570-Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Lingkup Desentralisasi dan Otonomi Daerah Tahun 2021	650.000
		604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah	057-Tanpa Sub Output	570-Sinkronisasi dan Harmonisasi Program dan Kegiatan RPJMN 2020-2024 dengan Renstra K/L 2020-	600.000
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Tanpa Sub Output	610-Monitoring RKP 2020 Lingkup Desentralisasi dan Otonomi Daerah	400.000
			061-Tanpa Sub Output	611-Evaluasi RKP 2019 Lingkup Desentralisasi dan Otonomi Daerah	400.000
		608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Tanpa Sub Output	640-Koordinasi Strategis Penyusunan Kebijakan dan Perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK)	3.500.000
				641-Koordinasi Strategis Penguatan dan Percepatan Standar Pelayanan Minimum (SPM)	850.000
				642-Koordinasi Strategis Harmonisasi Kebijakan Terkait Aparatur Sipil Negara (ASN) di Daerah	850.000
				643-Koordinasi Strategis Pembangunan Provinsi Aceh	4.000.000

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	OUTPUT	SUB OUTPUT	KOMPONEN	ALOKASI
2941-Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pangan dan Pertanian	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pangan dan Pertanian	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	510-Kajian Sistem Perbenihan dan Perbibitan Nasional	1.000.000
				511-Kajian Swasembada Protein	1.000.000
		603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Tanpa Sub Output	570-Koordinasi Penyusunan RKP 2021 dan DAK Tahun 2021	1.000.000
				571-Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas Internal Direktorat Pangan dan Pertanian TA 2020	-
		604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah	057-Tanpa Sub Output	570-Koordinasi Sosialisasi RPJMN	500.000
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Tanpa Sub Output	610-Evaluasi Pelaksanaan Transfer Teknologi Melalui Pembangunan Techno Park Pertanian	1.000.000
				611-Evaluasi Pelaksanaan RPJMN 2015 - 2019 Bidang Pangan dan Pertanian TA 2020	1.000.000
		608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Tanpa Sub Output	640-Koordinasi Kebijakan Pembangunan Pangan dan Pertanian (Pengembangan Policy Lab)	1.500.000
				641-Koordinasi Strategis Perencanaan Pangan Dan Pertanian Tindak Lanjut Kerjasama Dengan Lembaga	-
				642-Koordinasi Penyusunan Rencana Jangka Menengah Sistem Pangan Nasional	2.000.000
2942-Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pengembangan Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pengembangan Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	510-Kajian Peran Koperasi (Worker Coop) Dalam Peningkatan Kesejahteraan dan Potensi	800.000
				603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Tanpa Sub Output
		604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah	057-Tanpa Sub Output	570-Koordinasi Penyusunan RPJMN lingkup UMKM dan koperasi	497.000
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Tanpa Sub Output	610-Pemantauan Program dan Kegiatan Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi	600.000
				611-Evaluasi Perencanaan Peningkatan Kapasitas UMKM dan Koperasi	785.000
		608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Tanpa Sub Output	640-Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Wirausaha berbasis Oportunity	483.000
				641-Implementasi Perluasan Model Kemitraan Strategis Antara Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Dengan Usaha Menengah dan Besar (UMB)	3.660.929
2943-Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	510-Kajian Terkait Lingkup Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial	1.000.000
				603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Tanpa Sub Output
		604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah	057-Tanpa Sub Output	570-Finalisasi Penyusunan RPJMN 2020-2024 Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial	-
				571-Koordinasi RPJMN Lingkup Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial	300.000
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Tanpa Sub Output	610-Pemantauan Program Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial	600.000
				611-Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial	600.000

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	OUTPUT	SUB OUTPUT	KOMPONEN	ALOKASI
		608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Tanpa Sub Output	640-Koordinasi Percepatan Pengurangan Kemiskinan	1.000.000
				641-Koordinasi Strategis Perencanaan, Penganggaran, Pemantauan, Evaluasi dan Analisis Kemiskinan Terpadu	1.500.000
				642-Koordinasi Strategis Strategi Komunikasi	4.500.000
2944-Perencanaan Pembangunan Bidang Pendanaan Luar Negeri Bilateral	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Bidang Pendanaan Luar Negeri Bilateral	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	510-kajian pengembangan model pelaksanaan (Delivery Model) dan penyaluran (Channeling)	414.900
			055-Rancangan Pendanaan	551-Koordinasi Rencana Kegiatan Pendanaan Luar Negeri Bilateral	661.503
				552-Penyusunan dan Pengembangan Kerjasama dan Pendanaan Bilateral serta Aktivitas Pengembangan	2.247.875
				553-Koordinasi Peningkatan Kesiapan Pendanaan Luar Negeri Bilateral	549.541
				554-Koordinasi Persiapan dan Pengembangan Program Hibah Compact 2	15.000.000
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Tanpa Sub Output	610-Pemantauan Proyek-Proyek Yang Didanai Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) Bilateral	769.289
				611-Evaluasi Pelaksanaan Proyek Melalui pendanaan Pinjaman pemerintah tiongkok	356.892
2945-Perencanaan Pembangunan Bidang Pendanaan Luar Negeri Multilateral	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Bidang Pendanaan Luar Negeri Multilateral	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	510-Kajian	510-Policy Paper pengembangan strategis kerjasama pendanaan luar negeri multilateral dengan uni eropa	542.000
			550-Rancang Pendanaan	520-Koordinasi kebijakan dan strategis pendanaan luar negeri multilateral	3.318.500
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	610-Tanpa Sub Output	610-Pengembangan Sistem Pemantauan dan Evaluasi Bersama dengan Mitra Pembangunan Multilateral	713.500
				611-Pengembangan Strandar Prosedur Perencanaan Pendanaan Luar Negeri Multilateral TA 2020	605.000
		608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	640-Tanpa Sub Output	640-Koordinasi Strategis G-20 Working Group on Development	1.739.835
2947-Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pengairan dan Irigasi	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pengairan dan Irigasi	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	510-Kajian Sinergitas Penyediaan Air Baku di Pulau Terpencil dengan Melibatkan Kerjasama Swasta PDAM	500.000
		603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Tanpa Sub Output	570-Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Air	400.000
		604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah	057-Tanpa Sub Output	570-Sosialisasi dan Integrasi RPJMN 2020-2024 Bidang Sumber Daya Air	200.000
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Tanpa Sub Output	610-Pemantauan dan Evaluasi terhadap dampak dari kegiatan Dam Operational Improvement and Safety	3.200.000
				611-Flood Management in Selected River Basin (FMSRB)	5.129.123
				612-Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Irigasi Project (IPDMIP)	4.500.000
				613-Komering Irrigation Project (Phase III)	1.380.000
				614-Rentang Irrigation Modernization Proiect (RIMP)	1.400.000
				615-Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Irigasi Air	350.000
				616-Koordinasi Penyusunan Kebijakan, Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK)	300.000

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	OUTPUT	SUB OUTPUT	KOMPONEN	ALOKASI
		608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Tanpa Sub Output	640-Koordinasi Strategis Percepatan Pemanfaatan Sumber Daya Air untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air	659.167
				641-Koordinasi Strategis Nasional Program Pembangunan Bidang Prasarana Sumber Daya Air	550.000
				642-Koordinasi Strategis Pengembangan Terpadu Pesisir Utara Jawa	3.025.000
				643-Koordinasi Strategis Pelaksanaan Program Pembangunan Citarum Harum	1.125.000
				644-Koordinasi Strategis Perencanaan, Rehabilitasi, Rekonstruksi Infrastruktur Berketahanan Terhadap Ancaman Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi	400.000
2948-Perencanaan pembangunan Terkait Lingkup Kerja Sama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun	01-Tersusunnya Perencanaan pembangunan Terkait Lingkup Kerja Sama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	054-Rancang bangun	540-Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan (Toolkit) Pra Studi Kelayakan Proyek Kerjasama Pemerintah dengan	1.250.000
				541-Koordinasi Strategis Rancang Bangun Infrastruktur dan Infrastruktur Ibukota Baru	6.200.000
		603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Tanpa Sub Output		-
		604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah	057-Tanpa Sub Output		-
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Tanpa Sub Output	610-Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha	770.000
		608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Tanpa Sub Output	640-Koordinasi Strategis Fasilitasi Penilaian dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Proyek KPBU	1.900.000
				641-Koordinasi Strategis Fasilitasi Pemerintah untuk Pembiayaan Non Anggaran Pemerintah (PINA)	17.272.000
				642-Koordinasi Strategis Penyeleksian Proyek (Screening) dan Penyusunan Daftar Rencana Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha/Public Private	2.470.000
				643-Koordinasi Strategis Fasilitasi Penyusunan Dokumen Penyiapan Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Infrastruktur Konektivitas dan	7.780.000
				644-Koordinasi Strategis Fasilitasi Penyusunan Dokumen Penyiapan Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Infrastruktur Perkotaan	7.350.000
				645-Koordinasi Strategis Fasilitasi Penyusunan Dokumen Penyiapan Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Infrastruktur Layanan Dasar	6.920.000
				646-Koordinasi Strategis Kantor Bersama Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha	4.130.000

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	OUTPUT	SUB OUTPUT	KOMPONEN	ALOKASI
2949-Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pengembangan Wilayah dan Kawasan	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pengembangan Wilayah dan Kawasan	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	510-Penyusunan Kajian Kawasan Strategis Ekonomi	1.150.000
				511-Pengembangan Model Pembangunan Wilayah(PRADA)	1.500.000
				512-Penyusunan Proyeksi Ekonomi Wilayah Dalam RPJPN 2025-2045	500.000
		602-Sistem/regulasi perencanaan	056-Tanpa Sub Output	560-Pengembangan Web GIS Perencanaan dan Penyusunan Peta Tematik RKP 2021	550.000
				561-Pengembangan Mekanisme dan Tata Kelola Penyelarasan Perencanaan Pusatdan Daerah	500.000
		603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Tanpa Sub Output	570-Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah dan Kawasan Tahun 2020	550.000
		604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah	057-Tanpa Sub Output	570-Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 Bidang Pengembangan Wilayah dan Kawasan	-
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Tanpa Sub Output	610-Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan bidang pengembangan wilayah dan kawasan	800.000
				611-Temu Konsultasi Bappenas dengan Bappeda Provinsi Seluruh Indonesia	600.000
				640-Harmonisasi Penyelarasan Perencanaan Tahunan Derah RKPd dengan Perencanaan Pusat RKP Tahun	500.000
		609-Rancangan Perpres RKP	065-Tanpa Sub Output	650-Pengelolaan Data dan Informasi Kewilayahan Berbasis Spasial dalam mendukung Penyusunan	1.100.000
				651-Pengembangan Studio RKP On Map Berbasis Spasial Bidang Pengembangan Wilayah 2020	250.000

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	OUTPUT	SUB OUTPUT	KOMPONEN	ALOKASI
2950-Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Perdagangan, Investasi dan Kerja Sama Ekonomi Internasional	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Perdagangan, Investasi dan Kerja Sama Ekonomi Internasional	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	061-Kajian Perhitungan Biaya Logistik Perdagangan	1.044.957
		603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Tanpa Sub Output	570-Koordinasi penyusunan rencana pembangunan jangka pendek tahun 2021 lingkup bidang perdagangan, investasi, dan kerjasama ekonomi	886.307
		604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah	057-Tanpa Sub Output	570-Koordinasi Disiminasi rencana pembangunan nasional jangka menengah tahun 2020-2025 bidang perdagangan, investasi, dan kerjasama ekonomi internasional	592.752
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Tanpa Sub Output	610-Monitoring dan evaluasi lingkup bidang perdagangan, investasi, dan kerjasama ekonomi internasional tahun 2019	954.273
				611-Pengendalian dan Percepatan Pelaksanaan Prioritas Nasional Lingkup Bidang Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional Tahun 2019	483.090
		608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Tanpa Sub Output	640-Koordinasi Lintas Sektor Terhadap Penugasan Bappenas Sebagai Focal Point Indonesia untuk The	1.486.590
641-Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional Pada Forum Kerjasama dan Pertemuan	978.481				
642-koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi Pendukung Hibah Indonesia-EU Trade Support Facility (TSF) Tahun 2020	278.550				
2951-Perencanaan Pembangunan Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	510-Kajian Inovasi Pendanaan Pembangunan	568.578
				511-Koordinasi Perencanaan Pendanaan Pembangunan	1.358.024
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Tanpa Sub Output	610-Pemantauan Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan	631.676
				611-Evaluasi Perencanaan Pendanaan Pembangunan	615.834

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	OUTPUT	SUB OUTPUT	KOMPONEN	ALOKASI
2952-Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Perencanaan Makro dan Analisis Statistik	01-Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Perencanaan Makro dan Analisis Statistik	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	510-Kajian Strategis Penyusunan Roadmap Transformasi Perubahan Struktur Ekonomi Nasional	980.000
				511-Kajian Pengembangan Indikator Makro dan Statistik	775.000
			053-Modelling	530-Model Outlook Makro Ekonomi Indonesia	1.350.000
		603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Tanpa Sub Output	057-Koordinasi Penyusunan RKP Lingkup Perencanaan Makro dan Analisis Statistik	850.000
		604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah	057-Tanpa Sub Output	570-Koordinasi RPJMN 2020-2024 Lingkup Perencanaan Makro dan Analisis Statistik	850.000
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Tanpa Sub Output	610-Pemantauan Pelaksanaan Sensus Penduduk 2020	520.000
				611-Evaluasi Pemanfaatan Data Potensi Desa (Podes)	515.000
		608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Tanpa Sub Output	640-Forum Masyarakat Statistik (FMS)	1.255.000
609-Rancangan Perpres RKP	065-Tanpa Sub Output	650-Koordinasi Penyusunan Rancangan Perpres RKP	405.000		
2953-Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	511-Kajian Tematik Indeks Kota Berkelanjutan	550.000
				512-Kajian Keterjangkauan Perumahan di Kawasan Metropolitan Terpilih	550.000
		603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Tanpa Sub Output	570-Koordinasi Multipihak Penyusunan RKP, Renja dan RKA K/L tahun 2021 Lingkup Perkotaan, Perumahan dan Permukiman	900.000
		604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah	057-Tanpa Sub Output		-
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Tanpa Sub Output	610-Pemantauan dan Evaluasi Program Pembangunan Bidang Perkotaan, Perumahan, Air Minum dan Sanitasi	900.000
		608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Tanpa Sub Output	640-Sekretariat Kelompok Kerja Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi Nasional	2.400.000
				641-Koordinasi Strategis Pembangunan Perkotaan Nasional	1.300.000
				642-Pendampingan Teknis Kegiatan Hibah dan Pinjaman	800.000
				643-National Slum Upgrading Project (NSUP)	7.600.000
				644-Koordinasi Percepatan Pemindahan Ibu Kota Negara	130.000.000
2954-Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan Sosial	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan Sosial	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	510-Kajian Pengembangan Jaminan Pekerjaan (Unemployment Benefit) dalam Jaminan Sosial Bidang	900.000
		603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Tanpa Sub Output	570-Koordinasi Penyusunan RKP Lingkup Bidang Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan Sosial	1.000.000
		604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah	057-Tanpa Sub Output	590-Koordinasi Penyusunan RPJMN 2020-2024 Lingkup Bidang Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan	800.000
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Tanpa Sub Output	610-Pemantauan Pelaksanaan Perluasan Akses Kepemilikan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk	700.000
				611-Evaluasi Peta Jalan Jaminan Sosial	800.000
		608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Tanpa Sub Output	640-Percepatan Pelaksanaan Kemudahan Berwarga Negara di Indonesia (Ease of Being Indonesian)	4.597.960

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	OUTPUT	SUB OUTPUT	KOMPONEN	ALOKASI
2956-Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pertahanan dan Keamanan	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pertahanan dan Keamanan	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian		-
		603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Tanpa Sub Output	570-Penyusunan RKP Tahun 2020 bidang Pertahanan dan Keamanan	1.270.000
		604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah	057-Tanpa Sub Output		-
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Tanpa Sub Output	610-Pemantauan RKP Tahun 2020 Bidang Pertahanan dan Keamanan	1.085.000
				611-Evaluasi RKP Tahun 2019 Bidang Pertahanan dan Keamanan	645.000
		608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Tanpa Sub Output		-
2957-Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Politik dan Komunikasi	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Politik dan Komunikasi	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	510-Kajian Kelembagaan Partai Politik dalam Demokrasi	800.000
		603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Tanpa Sub Output	570-Koordinasi penyusunan RKP 2021 Bidang Politik dan Komunikasi	600.000
		604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah	057-Tanpa Sub Output	570-Koordinasi Finalisasi RPJMN 2020-2024	200.000
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Tanpa Sub Output	610-Pengendalian Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Tahun 2020 Bidang Politik dan	800.000
				611-Review Penyelenggaraan Pemilu 2019	800.000
				612-Review Efektifitas Pemberdayaan Organisasi Masyarakat	700.000
				613-Review Hambatan Kebebasan Pers dalam Demokrasi	600.000
		608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Tanpa Sub Output	643-Koordinasi Strategis Penguatan Demokrasi Indonesia Tahun 2020	1.193.860
2958-Pengembangan Kebijakan dalam Lingkup Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan	01-Tersusunnya Pengembangan Kebijakan dalam Lingkup Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan	606-Informasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan	062-Tanpa Sub Output	620-Pemantauan Pelaksanaan Proyek Strategis Pembangunan Berbasis THIS (Tematik, Holistik,	2.250.000
			062-Tanpa Sub Output	621-Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan	2.000.000
		607-Sistem/Regulasi Pemantauan Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Nasional	063-Tanpa Sub Output	630-Koordinasi Pelaksanaan Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan	2.500.000
				631-Koordinasi Penyusunan Pelaporan Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan	100.000
				632-Koordinasi Pelaksanaan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan	2.000.000

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	OUTPUT	SUB OUTPUT	KOMPONEN	ALOKASI
2959-Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	510-Kajian Klasterisasi Hilirisasi Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Mineral dan Ekonomi di Daerah	950.000
		603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Tanpa Sub Output	570-Koordinasi penyusunan RKP Tahun 2021 Bidang Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan	1.000.000
		604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah	057-Tanpa Sub Output	570-Sosialisasi RPJMN 2020 - 2024 Sektor Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan	750.000
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Tanpa Sub Output	610-Pemantauan Pelaksanaan Program Peningkatan Akses Pemanfaatan Minyak dan Gas Bumi Domestik	1.000.000
				611-Evaluasi Kebijakan Konservasi dan Efisiensi Energi	750.000
		608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Tanpa Sub Output	640-Koordinasi Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon di Sektor Energi	800.000
				641-Koordinasi Strategis Implementasi, Monitoring Dan Evaluasi Rencana Aksi Geopark Yang Terintegrasi	750.000
				642-Koordinasi Pelaksanaan Tugas Kelompok Kerja (Pokja) II-ICCTF Bidang Energi	-
				643-Koordinasi Strategis Penanganan Perubahan Iklim Di Indonesia Untuk Sektor Energi Terbarukan Dan Konservasi Energi	1.000.000
		2960-Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Tata Ruang dan Pertanahan	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Tata Ruang dan Pertanahan	601-Kebijakan Perencanaan Pembangun	051-Kajian
511-Kajian Reviu Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 2008-2028	1.000.000				
603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Tanpa Sub Output			570-Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Lingkup Bidang Tata Ruang, Pertanahan dan	1.700.000
604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah	057-Tanpa Sub Output				-
605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Tanpa Sub Output			610-Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Penataan Ruang, Reforma Agraria dan Informasi	1.000.000
608-Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Tanpa Sub Output			640-Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional	1.500.000

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	OUTPUT	SUB OUTPUT	KOMPONEN	ALOKASI
2961-Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	510-Kajian Proyeksi Dampak Pemindahan Ibu Kota Negara Terhadap Penciptaan Kesempatan Kerja	1.500.000
		603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Tanpa Sub Output	570-Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 Bidang Ketenagakerjaan	700.000
		604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah	057-Tanpa Sub Output	570-Koordinasi Finalisasi Penyusunan RPJMN Tahun 2020-2024 Bidang Ketenagakerjaan	450.000
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Tanpa Sub Output	610-Pemantauan Pelaksanaan Program Kartu Pra Kerja	550.000
				611-Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	539.395
		608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Tanpa Sub Output	641-Forum Komunikasi Reformasi Sistem Diklat Vokasi Tahap Kedua	5.000.000
2962-Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Transportasi	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Transportasi	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian		-
		603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Tanpa Sub Output	057-Koordinasi penyusunan RKP 2021 terkait lingkup Transportasi	1.200.000
		604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah	057-Tanpa Sub Output	570-Integrasi, Harmonisasi, Sinkronisasi dan Sosialisasi RPJMN 2020-2024 lingkup Transportasi	1.300.000
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Tanpa Sub Output	610-Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RKP 2019 terkait lingkup Transportasi	1.700.000
		608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Tanpa Sub Output	640-Koordinasi Strategis Kebijakan Pembangunan Transportasi Nasional	1.000.000
				641-Koordinasi Strategis dan Penyelarasan Keselamatan Transportasi Jalan Berdasarkan Pilar	5.500.000
				642-Koordinasi Strategis Pelaksanaan DAK Transportasi	4.000.000
				643-Koordinasi Strategis Perencanaan Konektivitas ASEAN	1.300.000
		5203-Pengelolaan Hibah MCC Indonesia	01-Terlaksananya Pengelolaan Hibah MCC	608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	OUTPUT	SUB OUTPUT	KOMPONEN	ALOKASI
5215-Perencanaan Pembangunan Terkait Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Terkait Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	510-Kajian Reviu dan Ujicoba Pengukuran Indeks Diplomasi	300.000
				511-Kajian Pengukuran Dampak Ekonomi atas Kebijakan Pembangunan Internasional	200.000
			052-Policy paper	520-Policy PaperPemanfaatan Perjanjian Internasional	140.000
				521-Policy PaperEvaluasi keanggotaan Indonesia dalam forum dan Organisasi Internasional	140.000
				522-Policy PaperPemetaan kebutuhan perwakilan RI di kawasan Afrika	140.000
		603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Tanpa Sub Output	570-Penyusunan RKP Bidang Polugri dan KPI	200.000
		604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah	057-Tanpa Sub Output	570-Koordinasi RPJMN 2020-2024 Bidang Polugri dan KPI	440.742
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Tanpa Sub Output	610-Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Program Pembangunan Bidang Politik Luar	340.000
		608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Tanpa Sub Output	640-Koordinasi Pelibatan Indonesia Dalam Forum Kerjasama Pembangunan Internasional	1.500.000
				641-Koordinasi Pelaksanaan Bidang Politik Luar Negeri	250.000
				642-Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) dan Program Reverse Linkage	400.000
				643-Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) untuk Kerja Sama Pembangunan Internasional	460.000
				644-Pendukung Hibah Luar Negeri Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular	550.000
				645-Knowledge Sharing Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular dalam mendukung Perdagangan dan Investasi	500.000
				646-Pengembangan Inisiatif Kemitraan Global, Berbagi pengalaman dan kerjasama Pembangunan dengan Organisation for Economic Cooperation and Development	550.000

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	OUTPUT	SUB OUTPUT	KOMPONEN	ALOKASI
5216-Perencanaan Pembangunan Bidang Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Bidang Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	510-Kajian Analisis Penyusunan Renja K/L	600.000
		602-Sistem/Regulasi Perencanaan	602-Tanpa Sub Output	560-Koordinasi Pengembangan Sistem Dan Prosedur Pendanaan Pembangunan Pemerintah Pusat Pada Sistem Informasi Krisna	2.975.000
				561-Pengembangan Sistem/Regulasi Perencanaan Pembangunan	1.300.000
				562-Koordinasi Pengembangan Sistem Dan Prosedur Pendanaan Pembangunan Pemerintah Daerah Pada Sistem Informasi Krisna	2.900.000
		603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Tanpa Sub Output	570-Koordinasi penyusunan RKP dan Penelaahan Renja K/L dan RKA K/L	1.300.000
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Tanpa Sub Output	610-Koordinasi Pelaporan Kinerja Pelaksanaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri	1.500.000
		608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Tanpa Sub Output	640-Pengendalian Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan	425.000
5217-Penyusunan Analisis Kebijakan Pembangunan	01-Tersusunnya Analisis Kebijakan Pembangunan	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	510-Koordinasi Penyusunan Analisis Kebijakan	1.510.930
				511-Koordinasi Pengelolaan Kegiatan dan Kebijakan	1.250.000
				512-Koordinasi Analisis Kinerja	750.000
5246-Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	510-Analisis Perkembangan Ekonomi dan Keuangan Indonesia dan Global	286.103
				511-Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Sektor Unggulan dan Infrastruktur	771.577
				512-Pengembangan Kewirausahaan Sosial Dalam Rangka Percepatan Pengurangan Kesenjangan Antar	1.176.000
				513-Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	780.000
				514-Optimalisasi Hubungan Kelembagaan Dalam Mendukung Implementasi Integrasi Perencanaan dan	700.000
				515-Koordinasi Strategis Simplifikasi Regulasi dan Penyusunan kerangka Regulasi RPJMN 2020-2024 dan	1.500.000
				516-Monitoring Pelaksanaan Simplifikasi Regulasi Tahun 2019	1.000.000
				517-Forum Konsultasi Publik Dalam Proses Perumusan Kebijakan RKP 2021	790.000
				518-Analisa Pola Konsumsi Masyarakat	3.233.220
				519-Penyempurnaan Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	980.677
				520-Lembaga Pembina Pendampingan Pembangunan	10.000.000

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	OUTPUT	SUB OUTPUT	KOMPONEN	ALOKASI
		608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Tanpa Sub Output	641-Kajian/Model Inovatif Dalam Rangka Penyusunan Kebijakan Perencanaan	19.399.050
				642-Koordinasi Kelautan dan Perikanan	700.000
				643-Koordinasi Pangan dan Pertanian	3.500.000
				644-Koordinasi Lingkungan Hidup	4.000.000
				645-Pemindahan Ibu Kota Negara (Lintas Sektor)	8.000.000
				646-Koordinasi Perkotaan, Perumahan dan Permukiman	4.000.000
5847-Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan	01-Terlaksananya Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan	610-Layanan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Perencana	066-Koordinasi Penyelenggaraan	660-Penyelenggaraan, Pengendalian dan Pemantauan Diklat Gelar	141.835.146
			067-Koordinasi Penyelenggaraan	670-Penyelenggaraan, Pengendalian dan Pemantauan Diklat Non Gelar	12.934.925
			068-Koordinasi Pembinaan	680-Pembinaan, Pengembangan, Pengendalian dan Pemantauan JFP	22.127.785
			069-Fasilitasi Pembinaan dan Diklat	690- Kegiatan Perencanaan, Persiapan, Pengembangan, Publikasi dan Informasi serta Evaluasi	33.714.900

REKAP 2A: PROGRAM K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2021

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BAPPENAS
2. UNIT ORGANISASI : 01 - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
3. SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG : 04 - Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM
4. PROGRAM : Program Dukungan Manajemen
5. PRIORITAS NASIONAL

KODE	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	ALOKASI 2021 (RIBU)
Total		0,0

6. SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

KODE	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2021	ALOKASI 2021 (RIBU)
01	Terlaksananya pelayanan dukungan manajemen		779.142.600,0
01.01	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas	86	
01.02	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional	88	
01.03	Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional	88	
02	Terlaksananya pelayanan pengawasan intern		10.000.000,0
02.01	Tingkat Persepsi Stakeholder Inspektorat Utama atas Pemberian Nilai Tambah dalam Pencapaian Tujuan Kementerian PPN/Bappenas	Baik	
02.02	% Rekomendasi hasil pengawasan dan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh Unit Kerja di Kementerian PPN/Bappenas	100	
02.03	Tingkat Maturitas SPIP Kementerian PPN/Bappenas	3	
02.04	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Kementerian PPN/Bappenas	3	
Total			789.142.600,0

7. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

KODE	OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM	ALOKASI 2021 (RIBU)
01	Layanan Dukungan Manajemen Internal Tepat Waktu	789.142.600,0
01.01	Terlaksananya Pelayanan Dukungan Manajemen Internal Tepat Waktu	

KODE	OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM	ALOKASI 2021 (RIBU)
Total		789.142.600,0

8. KEGIATAN DAN PENDANAAN

KODE	KEGIATAN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2021											PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)		
		RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL	2022	2023	2024
			RMP	PLN	RMP	HLN	HDN								
6257	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	112.500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	112.500.000,0	112.500.000,0	112.500.000,0	112.500.000,0
6258	Legislasi dan Litigasi	5.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.000.000,0	5.000.000,0	5.000.000,0	5.000.000,0
6259	Pengelolaan Perencanaan, Organisasi, dan SDM	147.684.584,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	147.684.584,0	147.684.584,0	147.684.584,0	147.684.584,0
6260	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	513.958.016,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	513.958.016,0	513.958.016,0	513.958.016,0	513.958.016,0
6261	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	10.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.000.000,0	10.100.000,0	10.100.000,0	10.100.000,0
Total		789.142.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	789.142.600,0	789.242.600,0	789.242.600,0	789.242.600,0

Jakarta, 09 Februari 2021

REKAP 2A: PROGRAM K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2021

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BAPPENAS
2. UNIT ORGANISASI : 01 - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
3. SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG : 01 - Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional.
02 - Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional.
03 - Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner
4. PROGRAM : Program Perencanaan Pembangunan Nasional
5. PRIORITAS NASIONAL

KODE	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	ALOKASI 2021 (RIBU)
01	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	5.000.000,0
01.06	Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi	5.000.000,0
07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	10.200.000,0
07.02	Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri	2.600.000,0
07.04	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	7.600.000,0
Total		15.200.000,0

6. SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

KODE	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2021	ALOKASI 2021 (RIBU)
01	Terwujudnya kualitas integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan sesuai bidangnya		633.253.748,0
01.01	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai Bidangnya	80	
01.02	% perencana yang memenuhi standar kompetensi	87,5	
02	Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan sesuai bidangnya		85.373.814,0
02.01	% Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional sesuai bidangnya	84-87,9	
03	Tersusunnya rekomendasi percepatan pembangunan sesuai bidangnya		252.551.001,0
03.01	% Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional sesuai bidangnya yang dijalankan oleh K/L	88-90,9	
04	Terwujudnya kebijakan inovasi pembangunan sesuai bidangnya		10.100.000,0

KODE	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2021	ALOKASI 2021 (RIBU)
04.01	% rekomendasi kebijakan inovasi pembangunan sesuai bidangnya yang dijalankan oleh K/L	80-84,9	
Total			981.278.563,0

7. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

KODE	OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM	ALOKASI 2021 (RIBU)
06	Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas	981.278.563,0
06.01	Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas	
Total		981.278.563,0

8. KEGIATAN DAN PENDANAAN

KODE	KEGIATAN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2021											PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)		
		RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL	2022	2023	2024
			RMP	PLN	RMP	HLN	HDN								
6262	Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	23.800.005,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23.800.005,0	23.800.005,0	23.800.005,0	23.800.005,0
6263	Perencanaan Pembangunan Regional	70.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70.000.000,0	70.000.000,0	70.000.000,0	70.000.000,0
6264	Perencanaan Pembangunan Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam	104.050.000,0	0,0	0,0	0,0	44.820.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	148.870.000,0	148.870.000,0	148.870.000,0	148.870.000,0
6265	Perencanaan Pembangunan Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan	39.500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39.500.000,0	39.500.000,0	39.500.000,0	39.500.000,0
6266	Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan	35.332.000,0	0,0	0,0	0,0	15.790.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51.122.000,0	51.122.000,0	51.122.000,0	51.122.000,0
6267	Perencanaan Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana	64.388.887,0	0,0	21.680.000,0	0,0	4.800.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90.868.887,0	90.868.887,0	90.868.887,0	90.868.887,0

KODE	KEGIATAN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2021											PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)		
		RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL	2022	2023	2024
			RMP	PLN	RMP	HLN	HDN								
6268	Perencanaan Pembangunan Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	39.100.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39.100.000,0	39.100.000,0	39.100.000,0	39.100.000,0
6269	Perencanaan Pembangunan Bidang Pendanaan Pembangunan	70.627.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70.627.200,0	70.627.200,0	70.627.200,0	70.627.200,0
6270	Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan	42.800.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42.800.000,0	42.800.000,0	42.800.000,0	42.800.000,0
6271	Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang	254.800.471,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	254.800.471,0	254.800.471,0	254.800.471,0	254.800.471,0
6272	Fasilitasi Peningkatan Institusi Perencana yang Berkelanjutan	62.000.000,0	25.000.000,0	62.790.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	149.790.000,0	149.790.000,0	149.790.000,0	149.790.000,0
Total		806.398.563,0	25.000.000,0	84.470.000,0	0,0	65.410.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	981.278.563,0	981.278.563,0	981.278.563,0	981.278.563,0

Jakarta, 09 Februari 2021



LAMPIRAN
Capaian IKU



CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

DEPUTI BIDANG EKONOMI

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel	1. Persentase (%) keselarasan muatan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) lingkup bidang ekonomi	100%	100%	100%
		2. Persentase (%) keselarasan muatan Rencana Kerja (Renja) Kementerian/Lembaga (K/L) dengan RKP lingkup bidang ekonomi	100%	100%	100%
		3. Persentase (%) keselarasan muatan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L dengan RKP lingkup bidang ekonomi	100%	100%	100%
		4. Persentase (%) rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional lingkup bidang ekonomi yang ditindaklanjuti K/L	100%	100%	100%
		5. Persentase (%) keselarasan muatan RPJMN dengan RPJPN lingkup bidang ekonomi	100%	100%	100%
		6. Persentase (%) keselarasan muatan Renstra K/L dengan RPJMN lingkup bidang ekonomi	100%	100%	100%
2.	Rancangan Perpres RKP	Rancangan Perpres RKP 2021 lingkup bidang ekonomi	1 dok	1 dok	100%

Kegiatan	Anggaran:	Realisasi	%
1. Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Perencanaan Makro dan Analisis Statistik	4.699.475.000	4.685.260.355	99,70
2. Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Keuangan Negara dan Analisa Moneter	1.633.500.000	1.616.469.037	98,96
3. Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Jasa Keuangan dan BUMN	1.834.551.000	1.789.807.367	97,56
4. Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Perdagangan, Investasi, dan Kerja Sama Ekonomi Internasional	3.671.775.000	3.530.174.125	96,14
5. Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	3.566.500.000	3.409.859.146	95,61

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN REGIONAL

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel	1. Persentase (%) keselarasan muatan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) lingkup pengembangan regional	100%	100%	100%
		2. Persentase (%) keselarasan muatan Rencana Kerja (Renja) Kementerian/Lembaga (K/L) dengan RKP lingkup pengembangan regional	100%	100%	100%
		3. Persentase (%) keselarasan muatan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L dengan RKP lingkup pengembangan regional	100%	100%	100%
		4. Persentase (%) keselarasan muatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi dengan RKP	100%	71,79%	71,79%
		5. Persentase (%) rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional lingkup pengembangan regional yang ditindaklanjuti K/L	100%	100%	100%
		6. Persentase (%) keselarasan muatan RPJMN dengan RPJPN lingkup pengembangan regional	100%	100%	100%
		7. Persentase (%) keselarasan muatan Renstra K/L dengan RPJMN lingkup pengembangan regional	100%	100%	100%
		8. Persentase (%) keselarasan muatan RPJMD dengan RPJMN lingkup pengembangan regional	100%	67,16%	67,16%
2.	Rancangan Perpres RKP	Rancangan Perpres RKP 2021 lingkup pengembangan regional	1 dok	1 dok	100%

Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1. Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pengembangan Wilayah dan Kawasan	5.071.946.000	4.973.983.780	98,07
2. Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan	11.151.695.000	10.716.446.198	96,10
3. Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Otonomi Daerah	5.714.370.000	5.129.371.997	89,76
4. Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman	17.732.725.000	16.519.911.946	93,16
5. Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Tata Ruang dan Pertanahan	3.428.728.000	3.285.930.890	95,84

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021
DEPUTI BIDANG KEMARITIMAN DAN SUMBER DAYA ALAM

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel	1. Persentase (%) keselarasan muatan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) lingkup kemaritiman dan sumber daya alam	100%	100%	100%
		2. Persentase (%) keselarasan muatan Rencana Kerja (Renja) Kementerian/Lembaga (K/L) dengan RKP lingkup kemaritiman dan sumber daya alam	100%	100%	100%
		3. Persentase (%) keselarasan muatan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L dengan RKP lingkup kemaritiman dan sumber daya alam	100%	100%	100%
		4. Persentase (%) rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional lingkup kemaritiman dan sumber daya alam yang ditindaklanjuti K/L	100%	100%	100%
		5. Persentase (%) keselarasan muatan RPJMN dengan RPJPN lingkup kemaritiman dan sumber daya alam	100%	100%	100%
		6. Persentase (%) keselarasan muatan Renstra K/L dengan RPJMN lingkup kemaritiman dan sumber daya alam	100%	100%	100%
2.	Rancangan Perpres RKP	Rancangan Perpres RKP 2021 lingkup kemaritiman dan sumber daya alam	1 dok	1 dok	100%

Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1. Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air	13.233.807.000	13.018.267.106	98,37
2. Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Kelautan dan Perikanan	6.090.000.000	5.936.616.960	97,48
3. Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Lingkungan Hidup	8.910.000.000	8.882.044.391	99,69
4. Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pangan dan Pertanian	10.656.941.000	10.402.385.424	97,61
5. Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan	5.005.690.000	4.954.369.773	98,97

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

DEPUTI KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel	1. Persentase (%) keselarasan muatan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) lingkup kependudukan dan ketenagakerjaan	100%	100%	100%
		2. Persentase (%) keselarasan muatan Rencana Kerja (Renja) Kementerian/Lembaga (K/L) dengan RKP lingkup kependudukan dan ketenagakerjaan	100%	100%	100%
		3. Persentase (%) keselarasan muatan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L dengan RKP lingkup kependudukan dan ketenagakerjaan	100%	100%	100%
		4. Persentase (%) rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional lingkup kependudukan dan ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti K/L	100%	100%	100%
		5. Persentase (%) keselarasan muatan RPJMN dengan RPJPN lingkup kependudukan dan ketenagakerjaan	100%	100%	100%
		6. Persentase (%) keselarasan muatan Renstra K/L dengan RPJMN lingkup kependudukan dan ketenagakerjaan	100%	100%	100%
2.	Rancangan Perpres RKP	Rancangan Perpres RKP 2021 lingkup kependudukan dan ketenagakerjaan	1 dok	1 dok	100%

Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1. Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pengembangan Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi	3.783.235.000	3.692.492.347	97,60
2. Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat	5.179.772.000	5.157.610.618	99,57
3. Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Kependudukan dan Jaminan Sosial	3.604.990.000	3.509.237.340	97,34
4. Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Ketenagakerjaan	3.683.071.000	3.648.703.288	99,07

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA, MASYARAKAT DAN KEBUDAYAAN

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel	1. Persentase (%) keselarasan muatan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) lingkup pembangunan manusia, masyarakat dan kebudayaan	100%	100%	100%
		2. Persentase (%) keselarasan muatan Rencana Kerja (Renja) Kementerian/Lembaga (K/L) dengan RKP lingkup pembangunan manusia, masyarakat dan kebudayaan	100%	100%	100%
		3. Persentase (%) keselarasan muatan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L dengan RKP lingkup pembangunan manusia, masyarakat dan kebudayaan	100%	100%	100%
		4. Persentase (%) rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional lingkup pembangunan manusia, masyarakat dan kebudayaan yang ditindaklanjuti K/L	100%	97,05%	97,05%
		5. Persentase (%) keselarasan muatan RPJMN dengan RPJPN lingkup pembangunan manusia, masyarakat dan kebudayaan	100%	100%	100%
		6. Persentase (%) keselarasan muatan Renstra K/L dengan RPJMN lingkup pembangunan manusia, masyarakat dan kebudayaan	100%	100%	100%
2.	Rancangan Perpres RKP	Rancangan Perpres RKP 2021 lingkup pembangunan manusia, masyarakat dan kebudayaan	1 dok	1 dok	100%

Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1. Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Agama, Pendidikan dan Kebudayaan	3.017.500.000	2.984.508.036	98,91
2. Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pendidikan Tinggi, dan Iptek	2.549.335.000	2.493.625.208	97,81
3. Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga	6.726.361.000	6.568.924.287	97,66
4. Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Kesehatan dan Gizi Masyarakat	22.886.354.000	13.379.248.030	58,46

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

DEPUTI BIDANG POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)		
1.	Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel	1. Persentase (%) keselarasan muatan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) lingkup politik, hukum, pertahanan dan keamanan	100%	100%	100%
		2. Persentase (%) keselarasan muatan Rencana Kerja (Renja) Kementerian/Lembaga (K/L) dengan RKP lingkup politik, hukum, pertahanan dan keamanan	100%	100%	100%
		3. Persentase (%) keselarasan muatan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L dengan RKP lingkup politik, hukum, pertahanan dan keamanan	100%	100%	100%
		4. Persentase (%) rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional lingkup politik, hukum, pertahanan dan keamanan yang ditindaklanjuti K/L	100%	100%	100%
		5. Persentase (%) keselarasan muatan RPJMN dengan RPJPN lingkup politik, hukum, pertahanan dan keamanan	100%	100%	100%
		6. Persentase (%) keselarasan muatan Renstra K/L dengan RPJMN lingkup politik, hukum, pertahanan dan keamanan	100%	100%	100%
2.	Rancangan Perpres RKP	Rancangan Perpres RKP 2021 lingkup politik, hukum, pertahanan dan keamanan	1 dok	1 dok	100%

Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1. Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Aparatur Negara	2.045.689.000	2.021.404.320	98,81
2. Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Hukum dan Regulasi	2.061.839.000	2.021.793.966	98,06
3. Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pertahanan dan Keamanan	1.834.868.000	1.792.375.644	97,68
4. Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Politik dan Komunikasi	2.818.461.000	2.815.247.868	99,89
5. Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional	3.293.364.000	3.284.851.069	99,74

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
DEPUTI BIDANG PENDANAAN PEMBANGUNAN

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel	1. Persentase (%) keselarasan muatan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) lingkup pendanaan pembangunan	100%	100%	100%
		2. Persentase (%) keselarasan muatan Rencana Kerja (Renja) Kementerian/Lembaga (K/L) dengan RKP lingkup pendanaan pembangunan	100%	100%	100%
		3. Persentase (%) keselarasan muatan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L dengan RKP lingkup pendanaan pembangunan	100%	100%	100%
		4. Persentase (%) rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional lingkup pendanaan pembangunan yang ditindaklanjuti K/L	100%	100%	100%
		5. Persentase (%) penyiapan regulasi sistem pendanaan pembangunan sesuai rencana	100%	100%	100%
		6. Persentase (%) keselarasan rancangan pendanaan RPJMN dengan muatan RPJPN	100%	100%	100%
2.	Rancangan Perpres RKP	Rancangan Perpres RKP 2021 lingkup pendanaan pembangunan	1 dok	1 dok	100%
3.	Keselarasan antara RKP dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN)	Tersusunnya konsep rencana pendanaan pembangunan dalam rangka RAPBN	4 dok	7 dok	175%

Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1. Perencanaan Pembangunan Bidang Alokasi Pendanaan Pembangunan	6.935.610.000	6.684.077.071	96,37
2. Perencanaan Pembangunan Bidang Pendanaan Luar Negeri Bilateral	12.195.000.000	12.012.072.520	98,50
3. Perencanaan Pembangunan Bidang Pendanaan Luar Negeri Multilateral	2.103.206.000	2.004.654.082	95,31
4. Perencanaan Pembangunan Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan	1.706.782.000	1.665.465.280	97,58
5. Perencanaan Pembangunan Bidang Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan	6.184.422.000	5.937.903.892	96,01

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

DEPUTI BIDANG PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel	1. Persentase (%) rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti K/L/D	100%	100%	100%
		2. Persentase (%) pemanfaatan sistem/regulasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional	100%	100%	100%
		3. Rancangan Lampiran Pidato Presiden RI atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional	1 dok	1 dok	100%

Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1. Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah	7.275.000.000	7.155.006.528	98,35
2. Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektoral	6.265.431.000	6.226.614.859	99,38
3. Pengembangan Kebijakan dalam Lingkup Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan	4.610.000.000	4.457.047.483	96,68

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
DEPUTI BIDANG SARANA DAN PRASARANA

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel	1. Persentase (%) keselarasan muatan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) lingkup sarana dan prasarana	100%	100%	100%
		2. Persentase (%) keselarasan muatan Rencana Kerja (Renja) Kementerian/Lembaga (K/L) dengan RKP lingkup sarana dan prasarana	100%	100%	100%
		3. Persentase (%) keselarasan muatan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L dengan RKP lingkup sarana dan prasarana	100%	100%	100%
		4. Persentase (%) rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional lingkup sarana dan prasarana yang ditindaklanjuti K/L	100%	100%	100%
		5. Persentase (%) keselarasan muatan RPJMN dengan RPJPN lingkup sarana dan prasarana	100%	100%	100%
		6. Persentase (%) keselarasan muatan Renstra K/L dengan RPJMN lingkup sarana dan prasarana	100%	100%	100%
2.	Rancangan Perpres RKP	Rancangan Perpres RKP 2021 lingkup sarana dan prasarana	1 dok	1 dok	100%

Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1. Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Transportasi	10.952.000.000	10.802.495.270	98,63
2. Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Energi Telekomunikasi dan Informatika	8.596.484.000	8.207.962.281	95,48
3. Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Kerjasama Pemerintah – Swasta dan rancang Bangun	22.850.373.000	22.690.013.397	99,30
4. Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pengairan dan Irigasi	27.147.653.000	26.986.998.153	99,41
5. Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Perumahan dan Permukiman	17.732.725.000	16.519.911.946	93,16

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

SEKRETARIAT KEMENTERIAN PPN/SEKRETARIAT UTAMA BAPPENAS

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Perencanaan Pembangunan Nasional yang Berkualitas, Sinergis, dan Kredibel	1. % Kebijakan pengkajian/koordinasi perencanaan di Kementerian PPN/Bappenas	100%	100%	100%
		2. Jumlah sumber daya manusia Perencana pusat dan daerah yang berkualitas	1.300 orang	1.618 orang	124,46%
2.	Manajemen Tata Kelola Pemerintahan Kementerian PPN/Bappenas yang Baik dan Bersih				
	a. Tersedianya Pelayanan dan Dukungan Proses Perencanaan Pembangunan Nasional yang Baik dan Bersih	1. Tingkat kepuasan pelayanan internal dan pelayanan publik	Baik	Baik	100%
		2. Skor RB K/L	A	A	100%
		3. Opini BPK	WTP	WTP	100%
		4. Skor Evaluasi AKIP	A	A	100%
		5. % Penyelesaian rumusan Peraturan Perundangan lingkup perencanaan pembangunan nasional	100%	100%	100%
	b. Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kementerian PPN/Bappenas	% Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang sesuai dengan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	100%	100%	100%

Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Pelayanan Kehumasan, Keprotokolan/Persidangan, dan Ketatausahaan Pimpinan	19.448.053.000	19.437.468.704	99,95
Pembinaan dan Pelayanan Hukum	1.955.448.000	1.907.911.884	97,57
Penyusunan Perencanaan, Analisis Organisasi, dan Tata Laksana	2.525.508.000	2.385.673.011	94,46
Penyusunan Kebijakan dan Pelayanan Kepegawaian	8.915.000.000	8.599.742.456	96,46
Pelayanan Umum dan Keuangan	323.899.134.000	272.279.327.095	84,06
Pengelolaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional	50.929.482.000	50.528.368.465	99,21
Dukungan Penyusunan Perencanaan Kebijakan Pembangunan	13.600.065.000	13.293.851.753	97,75
Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang	2.857.111.000	2.706.388.303	94,72
Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan Umum dan Operasional	115.810.347.000	109.165.684.967	94,26
Penyusunan Analisis Kebijakan Pembangunan	7.418.152.000	6.915.718.181	93,23
Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan	183.348.216.000	172.383.555.815	94,02

**CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
INSPEKTORAT UTAMA**

Sasaran Strategis K/L :
Meningkatnya Kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang Bersih, Akuntabel, dan Profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terlaksananya Akuntabilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kementerian PPN/Bappenas	1. Tingkat Persepsi <i>Stakeholder</i> Inspektorat Utama atas Pemberian Nilai Tambah dalam Pencapaian Tujuan Kementerian PPN/Bappenas	Baik	Baik	100%
		2. Persentase (%) Rekomendasi Hasil Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti oleh Unit Kerja di Kementerian PPN/Bappenas	100%	100%	100%
		3. Tingkat Maturitas SPIP Kementerian PPN/Bappenas	Level 3	Level 3	100%
		4. Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Kementerian PPN/Bappenas	Level 3	Level 3	100%

Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1. Pembinaan dan Pengawasan Bidang Administrasi Umum	4.256.250.000	4.221.525.049	99,18
2. Pembinaan dan Pengawasan Bidang Kinerja Kelembagaan	2.073.276.000	2.035.596.592	98,18



LAMPIRAN
Capaian Keselarasan



PRIORITAS NASIONAL 1

Keselerasan RKP 2021 dengan RPJMN 2020-2024

Mitra Bappenas	KL Mitra	RPJMN 2020-2024			RKP 2021							Keselerasan
		Agenda Pembangunan	Sasaran	Arah Kebijakan	Kegiatan Prioritas (KP)	Sasaran	Indikator KP	ProP	Indikator ProP	Proyek (RO)	Target Proyek	
Direktorat Perencanaan Makro dan Analisis Statistik	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing Perekonomian	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	01 - Peningkatan Industri Pengolahan Berbasis Pertanian, Kemaritiman, dan Non Agro yang Terintegrasi Hulu-Hilir	Meningkatnya industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan nonagro yang terintegrasi hulu-hilir	01 - Pertumbuhan PDB subsektor industri makanan dan minuman	01 - Pengembangan Industri Berbasis Perkebunan	01 - Produksi kopi 02 - Produksi kakao	003 - Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Hilirisasi Komoditi	1 Rekomendasi Kebijakan	Selaras
Direktorat Perencanaan Makro dan Analisis Statistik	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing Perekonomian	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	05 - Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi, termasuk Reformasi Ketenagakerjaan	01 - Terlaksananya perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan	03 - Kontribusi PMDN terhadap total realisasi PMA dan PMDN Kontribusi realisasi investasi luar Jawa	03 - Peningkatan Iklim Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial	01 - Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	001 - Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan	1 Rekomendasi Kebijakan	Selaras
Direktorat Keuangan Negara dan Analisis Moneter	Kementerian Keuangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi melalui peningkatan iklim usaha dan peningkatan investasi termasuk reformasi ketenagakerjaan	05 - Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi, termasuk Reformasi Ketenagakerjaan	Terlaksananya perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan	1. Kontribusi PMDN terhadap total realisasi PMA dan PMDN 2. Kontribusi realisasi investasi luar Jawa 3. Penerapan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	02 - Fasilitasi Kemudahan Usaha dan Investasi	Jumlah perusahaan yang difasilitasi penyelesaian masalah penanaman modal di Wilayah I, II, III, dan IV	001 - Kajian Perbaikan Iklim Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business) dan Investasi	1 Rekomendasi Kebijakan	Selaras
Direktorat Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional	Badan Koordinasi Penanaman Modal	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi melalui peningkatan industrialisasi melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa	02 - Peningkatan Industrialisasi Berbasis Hilirisasi Sumber Daya Alam, Termasuk Melalui Pengembangan Smelter dan Kawasan Industri Terutama di Luar Jawa	Meningkatnya industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa	Jumlah Kawasan Industri (KI) yang difasilitasi di luar Jawa (KIKEK Industri)	1 - Pengembangan Kawasan Industri dan Smelter secara Terintegrasi	Pertumbuhan PDB industri Logam Dasar (%)	024 - Rekomendasi Peraturan Perizinan Investasi Tingkat Pusat/Kementerian Lembaga dan Daerah yang Disimplifikasi, Diharmonisasi, dan Disinkronisasi	1 Rekomendasi Kebijakan	Selaras
Direktorat Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian	Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri	04 - Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk dan Usaha Kreatif dan Digital	01 - Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital	01 - Pertumbuhan PDB ekonomi kreatif	05 - Pengembangan 'Start-Up Parks' dan Center of Excellence	01 - Jumlah 'start-up parks' dan dan Center of Excellence	001 - Implementasi Nota Kesepahaman World Conference on Creative Economy	1 Kesepakatan	Selaras
Direktorat Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian	Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri	04 - Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk dan Usaha Kreatif dan Digital	01 - Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital	01 - Pertumbuhan PDB ekonomi kreatif	07 - Pengembangan Kawasan BeCreative District (BCD)	01 - Jumlah Kawasan Be Creative District (BCD)	003 - Be Creative District (BCD) yang Dikembangkan	1 Kegiatan	Selaras
Direktorat Ketenagakerjaan	Kementerian Ketenagakerjaan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian	Penguatan kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan koperasi	05 - Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi, termasuk Reformasi Ketenagakerjaan	Meningkatnya penciptaan startup dan peluang usaha	Jumlah Wirausaha baru industri kecil yang tumbuh	02 - Fasilitasi Kemudahan Usaha dan Investasi	Jumlah wirausaha yang dilatih	30 - Tenaga Kerja yang mengikuti kegiatan Padat Karya	400 orang	Selaras

PRIORITAS NASIONAL 1

Keselerasan Renja K/L dengan RKP 2021

Mitra Bappenas	KL Mitra	RKP 2021						Renja K/L 2021				Keselerasan
		Kegiatan Prioritas (KP)	Indikator KP	ProP	Indikator ProP	Target	Alokasi (Rp Juta)	Kegiatan K/L	RO	Target Ro	Alokasi	
Direktorat Pangan dan Pertanian	Kementerian Pertanian	01 - Peningkatan Industri Pengolahan Berbasis Pertanian, Kemaritiman, dan Non Agro yang Terintegrasi Hulu-Hilir	Peningkatan produksi kopi	01 -Pengembangan Industri Berbasis Perkebunan	Produksi kopi	9364 Unit	151962,3	1777- Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar	001-Kawasan Kopi	9364	151962,25	Selaras
Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air	Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	01 - Peningkatan Industri Pengolahan Berbasis Pertanian, Kemaritiman, dan Non Agro yang Terintegrasi Hulu-Hilir	Pertumbuhan PDB subsektor industri makanan dan minuman Pertumbuhan PDB perkebunan Peningkatan produksi kakao Peningkatan produksi	03 - Pengembangan Industri Berbasis Kehutanan	Pertumbuhan PDB Industri Furnitur	1 Rekomendasi Kebijakan	800	PBV - Kebijakan Bidang Kehutanan	001 - Rekomendasi Pengembangan Pasar dan Perbaikan Rantai Pasok Hasil Hutan Kayu	1 Rekomendasi Kebijakan	800	Selaras

PRIORITAS NASIONAL 1

Keselarasan RPJMN 2020-2024 dengan RPJP 2005-2025

Unit Kerja	RPJP 2005-2025			RPJMN 2020-2024			Keselarasan
	Visi	Sasaran	Arah Pembangunan	Agenda Pembangunan	Sasaran	Arah Kebijakan	
Kedeputan Bidang Ekonomi	Terwujudnya perekonomian yang maju, mandiri, dan mampu secara nyata memperluas peningkatan kesejahteraan masyarakat berlandaskan pada prinsip-prinsip ekonomi yang menjunjung persaingan sehat dan keadilan, serta berperan aktif dalam perekonomian global dan regional dengan bertumpu pada kemampuan serta potensi bangsa.	Terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perekonomian dikembangkan dengan mekanisme pasar yang berlandaskan persaingan sehat 2. Peranan pemerintah yang efektif dan optimal sebagai fasilitator sekaligus katalisator pembangunan 3. Daya saing global perekonomian perlu terus dikembangkan dan ditingkatkan dengan bertumpu pada peningkatan produktivitas dan inovasi 	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	<p>Sasaran Sisi Produksi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memperbaiki lingkungan usaha yang mendukung modernisasi industri, termasuk melalui penerapan Industri 4.0 2. Meningkatkan produktivitas lahan dan memperkuat nilai tambah pertanian 3. Mendorong sektor jasa dengan nilai tambah yang tinggi didorong oleh inovasi dan teknologi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi 2. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi 3. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 	Selaras

PRIORITAS NASIONAL 1

Keselarasn Renstra K/L dengan RPJMN 2020-2024

Unit Kerja Sektor Bappenas	K/L Mitra	RPJMN 2020-2024			Renstra K/L 2020-2024		Keselarasan
		Agenda Pembangunan	Sasaran	Arah Kebijakan	Indikator	Target 2021	
Kedeputan Bidang Ekonomi	Kementerian Keuangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Rasio perpajakan terhadap PDB - Rasio perpajakan terhadap PDB - Persentase penyelesaian proyek strategis TIK* *termasuk pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (core tax administration system) yang merupakan target RPJMN tahun 2020-2024.	<ul style="list-style-type: none"> - 8,51-8,69% - Naik - 85% 	Selaras

PRIORITAS NASIONAL 1

Keselerasan RKP 2021 dengan RKA K/L

Mitra Bappenas	KL Mitra	RKP 2021									Keselerasan
		Kegiatan Prioritas (KP)	Indikator KP	ProP	Indikator ProP	Target	Alokasi (Rp Juta)	RO	Target Ro	Alokasi	
Direktorat Perencanaan Makro dan Analisis Statistik	Kemeko Perekonomian	05 - Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi, termasuk Reformasi Ketenagakerjaan	03 - Kontribusi PMDN terhadap total realisasi	03 - Peningkatan Iklim Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial	01 - Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak- hak pekerja dan dialog sosial	1 Rekomendasi Kebijakan	1000	001 - Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomen dasi Kebijakan	1000	Selaras
Direktorat Perencanaan Makro dan Analisis Statistik	Kemeko Perekonomian	05 - Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi, termasuk Reformasi Ketenagakerjaan	03 - Kontribusi PMDN terhadap total realisasi	03 - Peningkatan Iklim Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial	01 - Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak- hak pekerja dan dialog sosial	1 Rekomendasi Kebijakan	5000	001 - Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomen dasi Kebijakan	5000	Selaras

PRIORITAS NASIONAL 3

Keselarasn RKP 2021 dengan RPJMN 2020-2024

RPJMN 2020-2024				RKP 2021		Keselarasn
Agenda Pembangunan	Prioritas Naional	Program Prioritas	Sasaran	Program Prioritas (PP)	Sasaran	
SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Terpenuhinya layanan dasar (kesehatan)	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan melakukan reformasi sistem kesehatan	Selaras
		Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas	Terpenuhinya layanan dasar (pendidikan)	Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan berkualitas	Selaras
		Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda	Meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda	Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda	Meningkatnya perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, pemberdayaan perempuan, serta partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, organisasi, dan berwirausaha	Selaras
		Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing	Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing	Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing	Meningkatnya produktivitas dan daya saing	Selaras

PRIORITAS NASIONAL 3

Keselarasn Renja K/L dengan RKP 2021

RKP 2021			Renja K/L 2021			Keselarasan
Program Prioritas (PP)	Kegiatan Prioritas (KP)	Output RKP	Kegiatan K/L	Output Renja K/L	K/L Mitra Pelaksana	
Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan	Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan	Akta Kematian yang diterbitkan Akta Kelahiran yang diterbitkan	Pembinaan Administrasi Kependudukan	Akta Kematian yang diterbitkan Akta Kelahiran yang diterbitkan	Kemendagr	Selaras
Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial	Bantuan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran	Keluarga Yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat	Penyelenggaraan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan	Keluarga Yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat	Kemensos	Selaras
	Kesejahteraan Sosial	Kartu Penyandang Disabilitas	Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas	Kartu Penyandang Disabilitas	Kemensos	Selaras
Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat	Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) yang mendapat makanan tambahan	Pembinaan Gizi Masyarakat	Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) yang mendapat makanan tambahan	Kemenkes	Selaras
	Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	Kelompok Masyarakat yang Diberdayakan dalam Germas	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kelompok Masyarakat yang Diberdayakan dalam Germas	Kemenkes	Selaras

PRIORITAS NASIONAL 3

Keselerasan Renja K/L dengan RKP 2021

RKP 2021			Renja K/L 2021				Keselerasan
Program Prioritas (PP)	Kegiatan Prioritas (KP)	Output K/L	Kegiatan K/L	Output K/L	Alokasi Rp. Juta)	K/L Mitra Pelaksana	
Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan	Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan	Akta Kematian yang diterbitkan Akta Kelahiran yang diterbitkan	Pembinaan Administrasi Kependudukan	Akta Kematian yang diterbitkan Akta Kelahiran yang diterbitkan	449,2 800	Kemendagri	Selaras
Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial	Bantuan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran	Keluarga Yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat	Penyelenggaraan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan	Keluarga Yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat	28.782.227,70	Kemensos	Selaras
	Kesejahteraan Sosial	Kartu Penyandang Disabilitas	Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas	Kartu Penyandang Disabilitas	722.250,00	Kemensos	Selaras
Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat	Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) yang mendapat makanan tambahan	Pembinaan Gizi Masyarakat	Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) yang mendapat makanan tambahan	127.612,80	Kemenkes	Selaras
	Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	Kelompok Masyarakat yang Diberdayakan dalam Germas	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kelompok Masyarakat yang Diberdayakan dalam Germas	60.619,70	Kemenkes	Selaras

PRIORITAS NASIONAL 3

Keselarasn RPJMN 2020-2024 dengan RPJP 2005-2025

RPJP 2005-2025				RPJMN 2020-2024				Keselarasan
Visi	Arah Pembangunan	Sasaran	Σ Sasaran Renstra K/L	Agenda Pembangunan	Prioritas Nasional	Sasaran	Σ Sasaran RPJMN	
Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur	Mewujudkan bangsa yang berdayasaing.	Terwujudnya bangsa yang berdayasaing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera ditunjukkan antara lain oleh meningkatnya kualitas sumber daya manusia.	1	SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	<ul style="list-style-type: none"> • Terpenuhinya layanan dasar • Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing • Meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda 	3	Selaras

PRIORITAS NASIONAL 4

Keselarasan RKP 2021 dengan RPJMN 2020-2024

RPJMN 2020-2024				RKP 2021		Keselarasan
Agenda Pembangunan	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Sasaran	Program Prioritas (PP)	Sasaran	
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila	Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk Memantapkan ketahanan budaya	Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter	Terwujudnya Indonesia Melayani, Indonesia Bersih, Indonesia Tertib, Indonesia Mandiri, dan Indonesia Bersatu	Selaras
		Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> Meningkat-nya pemajuan kebudayaan untuk meningkat-kan peran kebudayaan dalam pembangun-an Meningkat-nya ketahanan keluarga untuk memper-kukuh karakter bangsa Meningkat-nya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial 	Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia	Terbangunnya ekosistem kebudayaan untuk mendukung pemajuan kebudayaan	Selaras
		Memperkuat Moderasi Beragama	Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat	Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan, dan Harmoni Sosial	Menguatnya pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama yang toleran, inklusif, dan moderat di kalangan umat beragama	Selaras
		Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi dan Kreativitas	Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat ber-pengetahuan, inovatif dan kreatif	Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter	Meningkatnya akses dan kualitas infrastruktur literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif	Selaras

PRIORITAS NASIONAL 4

Keselerasan Renja K/L dengan RKP 2021

RKP 2021			Renja K/L 2021			Keselerasan
Program Prioritas (PP)	Kegiatan Prioritas (KP)	Output RKP	Kegiatan K/L	Output Renja K/L	K/L Mitra Pelaksana	
Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkokuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter	Revolusi Mental dalam Sistem Pendidikan untuk Memperkuat Nilai Integritas, Etos Kerja, Gotong Royong, dan Budi Pekerti	Layanan Penguatan Karakter Masyarakat	Kebijakan Penguatan Karakter	Layanan Penguatan Karakter Masyarakat	Kemendikbud	Selaras
	Pembinaan Ideologi Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara untuk Menumbuhkan Jiwa Nasionalisme dan Patriotisme	Rembug Nasional Bela Negara	Pembinaan Kesadaran Bela Negara	Rembug Nasional Bela Negara	Kemenhan	Selaras
		Layanan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	BPIP	Selaras
Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia	Pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan Budaya untuk Memperkuat Karakter Bangsa dan Kesejahteraan Rakyat	Karya Perfilman dan Musik Indonesia	Pengembangan Film, Musik dan Media Baru	Karya Perfilman dan Musik Indonesia	Kemendikbud	Selaras
		Even Festival Budaya Indonesiana	Pelestarian Nilai Budaya	Even Festival Budaya Indonesiana	Kemendikbud	Selaras
	Pelindungan Hak Kebudayaan dan Ekspresi Budaya untuk Memperkuat Kebudayaan yang Inklusif	Wilayah Adat yang Dikembangkan Menjadi Ruang Interaksi Pemajuan Kebudayaan	Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat	Wilayah Adat yang Dikembangkan Menjadi Ruang Interaksi Pemajuan Kebudayaan	Kemendikbud	Selaras
		Advokasi Kepercayaan dan Masyarakat Adat	Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat	Advokasi Kepercayaan dan Masyarakat Adat	Kemendikbud	Selaras
Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial	Penguatan Harmoni dan Kerukunan Umat Beragama	Konflik Intra Umat Beragama Islam yang ditindaklanjuti	Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah	Konflik Intra Umat Beragama Islam yang ditindaklanjuti	Kemenag	Selaras
		Kerukunan umat beragama di daerah	Penguatan Ketahanan Ideologi, Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Kerukunan umat beragama di daerah	Kemendagri	Selaras
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama	Penghulu yang ditingkatkan kompetensinya	Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah	Penghulu yang ditingkatkan kompetensinya	Kemenag	Selaras

PRIORITAS NASIONAL 4

Keselerasan Renja K/L dengan RKP 2021

RKP 2021			Renja K/L 2021				Keselarasan
Program Prioritas (PP)	Kegiatan Prioritas (KP)	Output K/L	Kegiatan K/L	Output K/L	Alokasi Rp. Juta)	K/L Mitra Pelaksana	
Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkokoh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter	Revolusi Mental dalam Sistem Pendidikan untuk Memperkuat Nilai Integritas, Etos Kerja, Gotong Royong, dan Budi Pekerti	Layanan Penguatan Karakter Masyarakat	Kebijakan Penguatan Karakter	Layanan Penguatan Karakter Masyarakat	30.605,00	Kemendikbud	Selaras
	Pembinaan Ideologi Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara untuk Menumbuhkan Jiwa Nasionalisme dan Patriotisme	Rembug Nasional Bela Negara	Pembinaan Kesadaran Bela Negara	Rembug Nasional Bela Negara	1.250,00	Kemenhan	Selaras
		Layanan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	8.395,20	BPIP	Selaras
Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia	Pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan Budaya untuk Memperkuat Karakter Bangsa dan Kesejahteraan Rakyat	Karya Perfilman dan Musik Indonesia	Pengembangan Film, Musik dan Media Baru	Karya Perfilman dan Musik Indonesia	49.423,10	Kemendikbud	Selaras
		Even Festival Budaya Indonesiana	Pelestarian Nilai Budaya	Even Festival Budaya Indonesiana	22.957,90	Kemendikbud	Selaras
	Pelindungan Hak Kebudayaan dan Ekspresi Budaya untuk Memperkuat Kebudayaan yang Inklusif	Wilayah Adat yang Dikembangkan Menjadi Ruang Interaksi Pemajuan Kebudayaan	Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat	Wilayah Adat yang Dikembangkan Menjadi Ruang Interaksi Pemajuan Kebudayaan	4.550,00	Kemendikbud	Selaras
		Advokasi Kepercayaan dan Masyarakat Adat	Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat	Advokasi Kepercayaan dan Masyarakat Adat	7.400,00	Kemendikbud	Selaras
Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial	Penguatan Harmoni dan Kerukunan Umat Beragama	Konflik Intra Umat Beragama Islam yang ditindaklanjuti	Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah	Konflik Intra Umat Beragama Islam yang ditindaklanjuti	8.946,40	Kemenag	Selaras
		Kerukunan umat beragama di daerah	Penguatan Ketahanan Ideologi, Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Kerukunan umat beragama di daerah	1.000,00	Kemendagri	Selaras
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama	Penghulu yang ditingkatkan kompetensinya	Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah	Penghulu yang ditingkatkan kompetensinya	19.762,00	Kemenag	Selaras

PRIORITAS NASIONAL 4

Keselarasn RPJMN 2020-2024 dengan RPJP 2005-2025

RPJP 2005-2025				RPJMN 2020-2024				Keselarasan
Visi	Arah Pembangunan	Sasaran	Σ Sasaran Renstra K/L	Agenda Pembangunan	Prioritas Nasional	Sasaran	Σ Sasaran RPJMN	
Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur	Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab.	Terwujudnya masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab ditandai oleh hal-hal berikut: (1) Terwujudnya karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dan bermoral berdasarkan falsafah Pancasila; (2) Makin mantapnya budaya bangsa.	1	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya • Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial • Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan • Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat • Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkukuh karakter bangsa • Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif dan 	6	Selaras

PRIORITAS NASIONAL 5

Keselarasn RKP 2021 dengan RPJMN 2020-2024

KL Mitra	RPJMN 2020-2024			RKP 2021							Keselarasn
	Agenda Pembangunan	Sasaran	Arah Kebijakan	KP	Sasaran KP	Indikator KP	Target	Pro P	Indikator Pro P	Target	
Kementerian PUPR	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Penyediaan Infrastruktur Layanan Dasar	Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau	Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau	Tersedianya akses perumahan dan permukiman layak, aman, dan terjangkau	Jumlah hunian baru layak huni yang terbangun	223.180 Unit	Peningkatan Fasilitas Penyediaan Hunian Baru	Jumlah hunian baru layak yang terbangun melalui fasilitas pemerintah (unit)	18.417	Selaras
						Jumlah rumah tangga yang menerima fasilitas pembiayaan perumahan	85.000 Rumah Tangga		Peningkatan Fasilitas Pembiayaan Perumahan	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan fasilitas pembiayaan dari lembaga keuangan (rumah tangga)	
						Jumlah rumah tangga berpendapatan rendah yang menerima bantuan/subsidi pembiayaan perumahan	197.496 Rumah Tangga	Jumlah rumah tangga berpendapatan rendah yang menerima bantuan/subsidi pembiayaan perumahan berupa bantuan uang muka dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) (rumah tangga)		197.496	
						Jumlah pengurangan luas kawasan permukiman kumuh	5.779 Hektar	Fasilitas Penanganan Permukiman Kumuh		Jumlah luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu (ha)	5.779

PRIORITAS NASIONAL 5

Keselerasan Renja K/L dengan RKP 2021

KL Mitra	RKP 2021					RENJA K/L 2021			Target	Keselerasan		
	Kegiatan Prioritas (KP)		Proyek Prioritas			Program						
	KP	Sasaran	ProP	Indikator	Target	Kegiatan/Sasaran Kegiatan K/L	KRO	RO				
Kemenkominfo	Penuntasan Infrastruktur TIK	Terlaksananya penuntasan infrastruktur TIK	Pengembangan Infrastruktur Pitalebar	Jumlah desa di wilayah 3T yang mendapatkan akses seluler 4G	2417 Desa	Penyediaan dan Pengelolaan Infrastruktur Telekomunikasi dan Informasi	Sarana Pengembangan Kawasan	Palapa Ring	1 Unit	Selaras		
								BTS/Lastmile	2417 Unit	Selaras		
								Penyediaan Kapasitas Satelit	1 Unit	Selaras		
								Akses Internet	4940 Unit	Selaras		
						Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Telekomunikasi dan Informasi untuk masyarakat dan pemerintah	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	Solusi Ekosistem	20 Kelompok Masyarakat	Selaras		
									Layanan Telekomunikasi dan Informasi untuk Badan Usaha	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	Kerjasama Badan Usaha	4 Badan usaha
						Pengembangan jaringan fixed broadband dan mobile broadband	Pelayanan Publik Lainnya	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	Pusat Monitoring Telekomunikasi	1 Lembaga	Selaras	
								Operasional Perangkat SMFR	Pembangunan Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR) Tranportable, SMFR Bergerak dan Transportable	1 layanan	Selaras	
										Operasional Perangkat SMFR	1 layanan	Selaras
										Pengembangan Infrastruktur SIMS	1 layanan	Selaras
Pelayanan dan Kepatuhan Perizinan SFR dan SOR	Kebijakan Bidang Teknologi Informasi	Rekomendasi Kebijakan yang Mendukung Optimalisasi Penyediaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Broadband	1 Rekomendasi Kebijakan	Selaras								

				Pengembangan akses next generation broadband	Kebijakan Bidang Teknologi Informasi	Roadmap 5G	2 Rekomendasi Kebijakan	Selaras			
				Digitalisasi penyiaran	Kebijakan Bidang Teknologi Informasi	Rekomendasi Pemerintah atas Revisi Undang-Undang Nomor 32 tentang Penyiaran dan aturan turunannya	18 Rekomendasi Kebijakan	Selaras			
			Pengembangan Infrastruktur Penyiaran			Jumlah dukungan infrastruktur penyiaran digital	10 Unit	Rekomendasi Terkait Kebutuhan Infrastruktur dan Rencana Teknis Penggelaran Infrastruktur Sistem Penyiaran TV Digital	3 Rekomendasi Kebijakan	Selaras	
					Bantuan Peralatan / Sarana	Satuan Transmisi LPP TVRI Menerima Perangkat Sistem Headend	10 Unit	Selaras			
				Pelayanan dan Kepatuhan Perizinan SFR dan SOR	Kebijakan Bidang Teknologi Informasi	Rekomendasi kebijakan yang mendukung optimalisasi spektrum frekuensi radio untuk digitalisasi penyiaran	1 Rekomendasi Kebijakan	Selaras			
				Pengembangan Infrastruktur TIK Pemerintahan	Persentase K/L/D yang menggunakan/terhubung jaringan intra pemerintah (JIP/Government Network)	15 Persen	Pengembangan infrastruktur dan layanan aplikasi pemerintahan	Layanan Data dan Informasi	Data Center Nasional	2 Layanan	Selaras

PRIORITAS NASIONAL 5

Keselerasan RPJMN 2020-2024 dengan RPJP 2005-2025

KL Mitra	RPJPN 2005-2025			RPJMN 2020-2024			Keselerasan
	Visi	Sasaran	Arah Pembangunan Jangka Panjang	Agenda Pembangunan	Sasaran	Arah Kebijakan	
KESDM	Terwujudnya infrastruktur yang memberi manfaat bagi kesejahteraan rakyat dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung pembangunan di berbagai bidang, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta meningkatkan hubungan antar bangsa	<p>1. Terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera ditunjukkan oleh:</p> <p>a. Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang andal dan efisien sesuai kebutuhan, termasuk hampir sepenuhnya elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat terpenuhi.</p> <p>b. Terselenggaranya pelayanan pos dan telematika yang efisien dan modern guna terciptanya masyarakat informasi Indonesia.</p> <p>2. Terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan ditandai oleh:</p>	<p>a. Pembangunan energi diarahkan pada penyediaan dan pemanfaatan sumber daya energi</p> <p>b. Peningkatan prasarana dan sarana produksi, peningkatan fungsi kelembagaan, peningkatan mutu SDM dan penguasaan teknologi serta peningkatan peran masyarakat dan kepedulian terhadap lingkungan dalam pemanfaatan energi</p> <p>c. Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan pada penyediaan tenaga listrik yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dengan melakukan peningkatan kapasitas pembangkit melalui rehabilitasi dan repowering pembangkit yang telah ada maupun pembangunan pembangkit baru yang diarahkan pada peningkatan efisiensi, penggunaan bahan bakar yang lebih murah</p> <p>d. Sistem jaringan transmisi dan distribusi ditingkatkan kualitas dan jangkauannya agar mampu menunjang penyediaan tenaga listrik yang handal melalui pembangunan sistem transmisi yang terintegrasi dan dengan kapasitas yang memadai, serta pengembangan sistem jaringan distribusi yang berbasis teknologi informasi</p>	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal, dan efisien	Mendukung keberlanjutan penyediaan energi ketenagalistrikan	Selaras

a. Tingkat pembangunan yang makin merata ke seluruh wilayah diwujudkan dengan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, termasuk berkurangnya kesenjangan antarwilayah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Terwujudnya Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional ditandai oleh:

a. Terbangunnya jaringan sarana dan prasarana sebagai perekat semua

pulau dan kepulauan Indonesia.

e. Restrukturisasi industri ketenagalistrikan dilanjutkan dengan menerapkan

mekanisme pasar dan rasionalisasi tarif listrik dalam upaya mendorong partisipasi swasta dan redefinisi peran pemerintah

f. Kemandirian penyediaan tenaga listrik ditingkatkan dan diperluas terutama untuk pulau pulau dan daerah-daerah terpencil, terisolir, serta daerah perbatasan.

			<p>g. Tenaga kerja, barang dan jasa produksi dalam negeri dimanfaatkan melalui pengembangan teknologi ketenagalistrikan nasional dan sumberdaya manusia</p>				
<p>- Kominfo</p>			<p>Pembangunan telematika diarahkan dengan:</p> <p>a. mendorong persaingan yang sehat dalam penyelenggaraan telekomunikasi dan mempersiapkan tahapan migrasi alamiah dari bentuk duopoli ke bentuk kompetisi penuh yang setara dan berimbang</p>		<p>Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi</p>	<p>Mendukung penuntasan infrastruktur TIK</p>	
<p>- LPP TVRI</p>			<p>b. menciptakan leadership dalam penyelenggaraan telematika yang mampu memberikan arahan jelas bagi pengembangan sektor ini selanjutnya</p>				
<p>- LPP RRI</p>			<p>c. mengantisipasi implikasi dari konvergensinya telekomunikasi, TI dan penyiaran baik mengenai kelembagaan maupun peraturannya termasuk yang terkait dengan isu keamanan, kerahasiaan, privasi dan integritas informasi; hak atas kekayaan intelektual; serta legalitas</p>				
			<p>d. mengoptimalkan dan mensinergikan pembangunan dan pemanfaatan prasarana telekomunikasi dan nontelekomunikasi dalam penyelenggaraan telematika guna menciptakan efisiensi termasuk efisiensi investasi yang pada akhirnya akan menentukan harga/biaya layanan yang dibebankan kepada masyarakat pengguna</p>				
			<p>e. memanfaatkan konsep teknologi netral yang responsif terhadap kebutuhan pasar dan industri namun tetap menjaga keutuhan sistem yang telah ada</p>				<p>Selaras</p>

			f. meningkatkan pengetahuan dan awareness masyarakat terhadap potensi pemanfaatan telematika;				
			g. mendorong pengembangan industri konten dan aplikasi sebagai upaya penciptaan nilai tambah dari informasi				
						Mendukung pemanfaatan infrastruktur TIK	Selaras
						Mendukung fasilitas pendukung transformasi digital	Selaras

PRIORITAS NASIONAL 5

Keselerasan Renja K/L 2021 dengan RKA K/L

KL Mitra	RENJA K/L 2021			RKA K/L 2021					Keselerasan
	Program			Kegiatan					
	Kegiatan/Sasaran Kegiatan K/L	KRO	RO	KRO	RO	Lokasi RO	Target	Alokasi (Ribuan)	
KP Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau									
Kementerian PUPR	4978 - Penyediaan Akses Rumah Layak Huni	CBB - Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman	Rumah Susun Asrama Pendidikan Tinggi	CBB - Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman	Rumah Susun Asrama Pendidikan Tinggi	Tersebar di 21 provinsi	2278	861.865.300	Selaras
			Rumah Susun Asrama Pendidikan Keagamaan		Rumah Susun Asrama Pendidikan Keagamaan	Tersebar di 15 provinsi	2040	443.744.587	Selaras
		RBB - Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman	Rumah Khusus	RBB - Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman	Rumah Khusus	Tersebar di 30 provinsi	2423	548.443.931	Selaras
			Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI		Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI	Tersebar di 27 provinsi	2831	1.371.063.202	Selaras
			Rumah Susun Hunian MBR/Pekerja		Rumah Susun Hunian MBR/Pekerja	Tersebar di 14 provinsi	1134	1.165.002.312	Selaras
			Bantuan Perumahan Swadaya Sejahtera		Bantuan Perumahan Swadaya Sejahtera	-	0	0	Selaras
			Bantuan Perumahan Swadaya Usaha		Bantuan Perumahan Swadaya Usaha	Tersebar di 5 provinsi	900	51.500.000	Selaras
	Bantuan Stimulan Pembangunan Baru Rumah Swadaya	Bantuan Stimulan Pembangunan Baru Rumah Swadaya	-	0	0	Selaras			
	4976 - Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	PEA - Koordinasi	Fasilitasi Pembiayaan Perumahan	PEA - Koordinasi	Fasilitasi Pembiayaan Perumahan	Pusat	1	500.000	Selaras
		QAH - Pelayanan Publik Lainnya	Fasilitasi Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka	QAH - Pelayanan Publik Lainnya	Fasilitasi Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka	Pusat	1	4.500.000	Selaras
			Fasilitasi Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan		Fasilitasi Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan	Pusat	1	5.000.000	Selaras
			Fasilitasi Penyaluran FLPP		Fasilitasi Penyaluran FLPP	Pusat	1	5.600.000	Selaras
	QFC - Subsidi kepada Keluarga	Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan	QFC - Subsidi kepada Keluarga	Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan	Pusat	312	10.000.000	Selaras	
	4978 - Penyediaan Akses Rumah Layak Huni	RBB - Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman	Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	RBB - Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman	Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	Tersebar di 33 provinsi	114000	2.315.715.000	Selaras
	4971 - Penyelenggaraan Permukiman dan Bangunan Gedung	RBB - Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman	Pemugaran Permukiman Kumuh	CBB - Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman	Pemugaran Permukiman Kumuh	Tersebar di 26 provinsi	1218,12	342.716.543	Tidak Selaras
			Peremajaan Permukiman Kumuh		Peremajaan Permukiman Kumuh	-	0	0	Selaras
			Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh		Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh	-	0	0	Selaras
Pembangunan Infrastruktur Permukiman Berbasis Masyarakat di Perkotaan		Pembangunan Infrastruktur Permukiman Berbasis Masyarakat di Perkotaan	Pusat	1	580.566.989	Tidak Selaras			

PRIORITAS NASIONAL 7

Keselerasan RKP 2021 dengan RPJMN 2020-2024

Agenda Pembangunan	RPJMN 2020-2024		RKP 2021				Keselerasan
	Sasaran	Arah Kebijakan	Program Prioritas (PP)	Sasaran PP	Kegiatan Prioritas (KP)	Sasaran KP	
Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi instansi pemerintah	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola melalui Penguatan Implementasi Manajemen ASN	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi instansi pemerintah	Penguatan Implementasi Manajemen ASN	Terbangunnya Manajemen Talenta Nasional ASN	Selaras
Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Terwujudnya Demokrasi yang Terkonsolidasi, Terpeliharanya Kebebasan, Menguatnya Kapasitas Lembaga-Lembaga Demokrasi dan Terjaganya Kesetaraan Warga Negara Secara Optima	Konsolidasi Demokrasi melalui Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan	Konsolidasi Demokrasi	Terwujudnya komunikasi publik yang efektif, integratif, dan partisipatif	Penguatan Kapasitas lembaga demokrasi	Terwujudnya Penguatan Kapasitas lembaga demokrasi	Selaras
Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Terjaganya Stabilitas Keamanan Nasional	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	Terjaganya stabilitas keamanan nasional	Penguatan Keamanan Dalam Negeri	Terwujudnya Penguatan Keamanan Dalam Negeri	Selaras
Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Terwujudnya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan netral	Penegakan Hukum Nasional melalui Penataan Regulasi, Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata, Penguatan Sistem Anti Korupsi, dan Peningkatan Akses terhadap Keadilan	Penegakan Hukum Nasional	Terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap	Penataan Regulasi	Terwujudnya regulasi yang berkualitas	Selaras
Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalnya Kebijakan Luar Negeri Indonesia	Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri dengan memperkuat kerja sama pembangunan internasional	Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri	Meningkatnya Efektivitas Diplomasi dan Pemanfaatan Kerja Sama Internasional	Penguatan Kerjasama Pembangunan Internasional	Terlaksananya Penguatan Kerjasama Pembangunan Internasional	Selaras

PRIORITAS NASIONAL 7

Keselerasan Renja K/L dengan RKP 2021

Unit Sektor Bappenas	KL Mitra	RKP 2021			Renja K/L 2021			Keselerasan
		Program Prioritas (PP)	Kegiatan Prioritas (KP)	Sasaran KP	Kegiatan K/L	RO	Target Ro	
Direktorat Aparatur Negara	Kementerian PAN dan RB	RB dan Tata Kelola	Penguatan Implementasi Manajemen ASN	Terwujudnya Penguatan Implementasi Manajemen ASN	Perumusan Kebijakan PANRB	PP Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua	1 PP	Selaras
Direktorat Politik dan Komunikasi	Kementerian Dalam Negeri	Konsolidasi Demokrasi	Peningkatan kapasitas Lembaga Demokrasi	Terwujudnya kapasitas lembaga demokrasi	Pembinaan Politik Dalam Negeri dan organisasi	Bantuan Keuangan bagi Partai Politik	126.418 Suara Sah	Selaras
Direktorat Hukum dan Regulasi	Kementerian Hukum dan HAM	Penegakan Hukum Nasional	Peningkatan Akses terhadap Keadilan	Terlaksananya Peningkatan Akses terhadap Keadilan	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi	5699 Orang	Selaras
Direktorat Politik Luar Negeri dan KPI	Kementerian Luar Negeri	Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri	Penguatan Integritas NKRI dan Perlindungan WNI di Luar Negeri	Terwujudnya Penguatan Integritas NKRI dan Perlindungan WNI di Luar Negeri	Pelayanan dan Perlindungan WNI/BHI Pusat	Kualitas Pelayanan dan Perlindungan WNI di Luar Negeri	23862 Orang	Selaras
Direktorat Pertahanan dan Keamanan	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	Penguatan Keamanan Dalam Negeri	Terwujudnya Penguatan Keamanan Dalam Negeri	Pengembangan Fasilitas dan Konstruksi Polri	Pembangunan Pos Pol SubSektor di Wilayah Perbatasan	2 unit	Selaras

PRIORITAS NASIONAL 7

Keselerasan RPJMN 2020-2024 dengan RPJP 2005-2025

Unit Kerja	RPJP 2005-2025			RPJMN 2020-2024			Keselerasan
	Visi	Sasaran	Arah Pembangunan	Agenda Pembangunan	Sasaran	Arah Kebijakan	
Direktorat Aparatur Negara	Terwujudnya Aparatur Negara yang amanah dan mampu mendukung pembangunan nasional serta menjawab kebutuhan dinamika bangsa sesuai Pancasila dan UUD '45.	Meningkatnya profesionalisme aparatur negara pusat dan daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab, serta profesional yang mampu mendukung pembangunan nasional	Terwujudnya tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum, serta birokrasi yang profesional dan netral;	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan Implementasi Manajemen ASN 2. Transformasi Pelayanan Publik 3. Penataan Kelembagaan dan Proses Bisnis 4. Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja 	Selaras
Direktorat Politik dan Komunikasi	Terwujudnya demokrasi, melalui konsolidasi demokrasi yang bertahap pada berbagai aspek kehidupan politik, sehingga demokrasi konstitusional dapat diterima sebagai konsensus dan pedoman politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	Terwujudnya Indonesia yang demokratis, berlandaskan hukum dan berkeadilan	Arah pembangunan politik diwujudkan melalui penyempurnaan struktur politik; penataan peran negara dan masyarakat; pengembangan budaya politik; perbaikan proses politik; peningkatan peran hubungan luar negeri; serta peningkatan peran komunikasi dan informasi.	Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Terwujudnya komunikasi publik yang efektif, integratif, dan partisipatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi 2. Penguatan kesetaraan dan kebebasan 3. Peningkatan kualitas komunikasi publik 	Selaras
Direktorat Hukum dan Regulasi	Tegaknya supremasi hukum dengan didukung oleh sistem hukum nasional yang mantap dan mencerminkan kebenaran dan keadilan, serta memperoleh legitimasi yang kuat dari masyarakat luas	Terwujudnya Indonesia yang demokratis, berlandaskan hukum dan berkeadilan, yang ditunjukkan oleh terciptanya supremasi hukum dan penegakkan hak-hak asasi manusia yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tertatanya sistem hukum nasional yang mencerminkan kebenaran, keadilan, akomodatif, dan aspiratif. Terciptanya penegakan hukum tanpa memandang kedudukan, pangkat,	Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta ditandai dengan terwujudnya konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi hukum dan penegakan hak-hak asasi manusia;	Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan publik	Meningkatnya penegakan dan pelayanan hukum serta akses terhadap keadilan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan Regulasi 2. Perbaikan sistem Hukum Pidana dan Perdata 3. Penguatan sistem anti korupsi 4. Peningkatan akses terhadap keadilan 	Selaras

<p>Direktorat Pertahanan dan Keamanan</p>	<p>kemampuan pertahanan dan keamanan yang mampu menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari segala ancaman serta menciptakan kondisi aman, damai, tertib dan tentram masyarakat.</p>	<p>Terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat serta terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari ancaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri</p>	<p>Terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari ancaman, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.</p>	<p>Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik</p>	<p>Terjaganya Stabilitas Pertahanan dan Keamanan</p>	<p>1. Penguatan keamanan dalam negeri; 2. Penguatan kemampuan pertahanan dibarengi CBM; 3. Penguatan keamanan laut; 4. Penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat; 5. Penguatan ketahanan dan keamanan siber</p>	<p>Selaras</p>
<p>Direktorat Politik Luar Negeri dan KPI</p>	<p>Terwujudnya Indonesia berperan penting dalam pergaulan internasional</p>	<p>Terwujudnya peranan Indonesia yang meningkat dalam pergaulan dunia internasional</p>	<p>Terwujudnya kemandirian nasional dalam konstelasi global. Berkembangnya usaha dan investasi dari perusahaan-perusahaan Indonesia di luar negeri termasuk ZEE dan laut bebas dalam rangka peningkatan perekonomian nasional.</p>	<p>Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik</p>	<p>Meningkatnya Efektivitas Diplomasi dan Pemanfaatan Kerja Sama Internasional</p>	<p>kepemimpinan Indonesia di Forum Regional dan Global 2. Penguatan Kerjasama pembangunan internasional 3. Peningkatan citra positif di dunia internasional; 4. Penguatan integritas NKRI dan perlindungan WNI di luar negeri</p>	<p>Selaras</p>

PRIORITAS NASIONAL 7

Keselarasn Renstra K/L dengan RPJMN 2020-2024

Unit Kerja Sektor Bappenas	K/L Mitra	RPJMN 2020-2024			Renstra K/L 2020-2024		Keselarasan
		Agenda Pembangunan	Sasaran	Arah Kebijakan	Indikator	Target 2021	
Direktorat Aparatur Negara	Kemenpan-RB	Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Menguatnya Stabilitas Polhukhankam dan Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik melalui reformasi birokrasi dan tata kelola	Transformasi pelayanan publik melalui Pelayanan publik berbasis elektronik (e-services) yang terintegrasi, Penguatan ekosistem inovasi, Penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik dan Penguatan pelayanan terpadu	Jumlah Kebijakan/Peraturan Pelaksanaan PP Gaji, Tunjangan dan Fasilitas	1 Kebijakan	Selaras

PRIORITAS NASIONAL 7

Keselerasan RKP 2021 dengan RKA K/L

Mitra Bappenas	KL Mitra	RKP 2021					RKA K/L		Keselerasan
		Program Prioritas (PP)	Sasaran PP	Kegiatan Prioritas (KP)	Proyek K/L Ooutput Prioritas	Alokasi (Rp miliar)	RO	Alokasi (Rp miliar)	
Direktorat Aparatur Negara	BKN	RB dan Tata Kelola	Meningkatnya kualitas pelaksanaan RB instansi pemerintah	Penguatan Implementasi Manajemen ASN	Penerapan Pola Karier Instansi Pemerintah	2,3	Penerapan Pola Karier Instansi Pemerintah	2,3	Selaras
Direktorat Politik dan Komunikasi	KPU	Konsolidasi Demokrasi	Terwujudnya komunikasi public yang efektif, integratif dan partisipatif	Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	16,5	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	16,5	Selaras
Direktorat Pertahanan dan Keamanan	Badan Narkotika Nasional	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	Terjaganya stabilitas keamanan nasional	Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Lembaga Rehabilitasi Narkoba yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	3,3	Lembaga Rehabilitasi Narkoba yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	3,3	Selaras
Direktorat Politik Luar Negeri dan KPI	Kementerian Luar Negeri	Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri	Meningkatnya efektivitas diplomasi dan pemanfaatan kerja sama internasional	Peningkatan Peran Indonesia di Tingkat Regional dan Global	Optimalisasi Keanggotaan Tidak Tetap Indonesia pada Dewan HAM PBB	4	Optimalisasi Keanggotaan Tidak Tetap Indonesia pada Dewan HAM PBB	4	Selaras
Direktorat Hukum dan Regulasi	Kemenkumham	Penegakan Hukum Nasional	Meningkatnya penegakan dan pelayanan hukum serta akses terhadap keadilan	Penataan Regulasi	Penyusunan Rancangan Undang-Undang Jaminan Benda Bergerak	0,3	RUU Jaminan Benda Bergerak yang disusun	0,3	Selaras


















LAMPIRAN
Evaluasi RKP 2020







A. RANGKUMAN HASIL EVALUASI RKP 2020 HINGGA TRIWULAN III

Pembangunan nasional tahun 2020 difokuskan pada pelaksanaan 5 Prioritas Nasional (PN). Secara umum hingga triwulan III tahun 2020, sebagian besar PN memiliki kinerja yang cukup baik. Namun demikian, tetap perlu didorong untuk memastikan ketercapaian pemenuhan target di akhir tahun 2020, dengan memperhatikan berbagai tantangan ataupun permasalahan yang mungkin muncul. PN yang memiliki kinerja terbaik yaitu PN Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan dengan rata-rata kinerja sebesar 93,01 persen. Sementara itu, PN Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja memiliki rata-rata kinerja terendah yaitu sebesar 39,97 persen. Pencapaian seluruh PN RKP 2020 hingga triwulan III dapat dilihat pada Tabel 1, sedangkan rincian pencapaian sasaran PN-PP-KP untuk masing-masing PN dapat dilihat pada Tabel B.1.1 sampai dengan Tabel B.5.3.

Tabel 1.
Pencapaian Prioritas Nasional Hingga Triwulan III Tahun 2020

Prioritas Nasional	Kinerja PN Berdasarkan		Rata-Rata Kinerja PN	Kesimpulan Kinerja
	Capaian Sasaran PN (%)	Dukungan Output K/L (%)		
1 Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	96,36 	89,65 	93,01 	Baik
2 Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah	85,13 	62,35 	73,74 	Cukup Baik
3 Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja	28,90 	51,04 	39,97 	Kurang Baik
4 Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	89,88 	65,70 	77,79 	Cukup Baik
5 Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	96,52 	51,52 	74,02 	Cukup Baik

Sumber: Perhitungan data hingga Triwulan III 2020

Keterangan:  realisasi >90% target;  realisasi 60-90% target;  realisasi <60% target;
 belum dapat diberikan notifikasi

Permasalahan umum yang dihadapi dalam pelaksanaan PN RKP 2020 hingga triwulan III yaitu adanya pemberlakuan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan *refocusing* anggaran sebagai respon terjadinya pandemi COVID-19. Hal tersebut berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan pembangunan

utamanya kegiatan fisik dan penyesuaian target pembangunan dalam RKP dan Renja K/L tahun 2020. Tindak lanjut yang dilakukan untuk menghadapi permasalahan tersebut yaitu dengan melaksanakan kegiatan secara daring serta *carry over* target dan pelaksanaan kegiatan yang tertunda pada tahun 2020 ke tahun selanjutnya.

A.1. PRIORITAS NASIONAL 1 PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PENGENTASAN KEMISKINAN

Tabel A.1
Kinerja PN-PP-KP
PN 1. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan,
Hingga Triwulan III Tahun 2020

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Kinerja Berdasarkan				Rata-Rata Kinerja (%)	
	Capaian Sasaran (%)		Dukungan Output K/L (%)			
PN 1. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	96,36		89,65		93,01	
PP 1. Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan	97,53		94,13		95,83	
KP 1. Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan Peningkatan Kepesertaan Mandiri	83,95		99,76		91,85	
KP 2. Bantuan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran	94,13		94,10		94,12	
KP 3. Kesejahteraan Sosial	71,52		85,05		78,28	
KP 4. Penguatan Sistem Layanan Terpadu dan Pendampingan	85,25		46,02		65,63	
KP 5. Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan	98,40		81,82		90,11	
KP 6. Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan	100		0,52		50,26	
PP 2. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	93,72		68,62		81,17	
KP 1. Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Keluarga Berencana (KB), dan Kesehatan Reproduksi	61,50		54,72		58,11	
KP 2. Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat	100		43,67		71,84	
KP 3. Peningkatan Pengendalian Penyakit	82,56		70,16		76,36	
KP 4. Pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	74,77		64,57		69,67	
KP 5. Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan	78,40		75,30		76,85	
PP 3. Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas dan Pengembangan Iptek-Inovasi	94,16		65,87		80,01	
KP 1. Penguatan Kualitas Pengajaran dan Cara Pembelajaran	90,95		49,94		70,45	
KP 2. Afirmasi Akses dan Percepatan Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun	92,55		40,87		66,71	
KP 3. Peningkatan Kualitas, Pengelolaan dan Penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	77,77		86,26		82,01	
KP 4. Penjaminan Mutu Pendidikan	89,86		26,18		58,02	
KP 5. Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas	99,38		19,62		59,50	
KP 6. Peningkatan Tata Kelola Pendidikan	73,00		76,27		74,64	

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Kinerja Berdasarkan			Rata-Rata Kinerja (%)		
	Capaian Sasaran (%)	Dukungan Output K/L (%)				
KP 7. Kapabilitas Adopsi Iptek dan Penciptaan Inovasi	80,20		37,65		58,93	
PP 4. Pengentasan Kemiskinan	N/A		78,69		78,69	
KP 1. Akselerasi Penguatan Ekonomi Keluarga	100		86,52		93,26	
KP 2. Keperantaraan Usaha dan Dampak Sosial	40,93		79,19		60,06	
KP 3. Peningkatan Akses Pembiayaan Ultra Mikro	65,00		N/A		65,00	
KP 4. Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial	74,68		73,06		73,87	
PP 5. Revolusi Mental, Pembangunan Kebudayaan, dan Prestasi Bangsa	100		61,89		80,95	
KP 1. Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila	71,68		41,69		56,69	
KP 2. Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan	62,00		57,20		59,60	
KP 3. Penguatan Moderasi Beragama	61,52		56,50		59,01	
KP 4. Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas	75,00		73,18		74,09	
KP 5. Pemenuhan Hak dan Perlindungan bagi Anak, Perempuan, dan Pemuda	46,01		74,41		60,21	
KP 6. Peningkatan Kualitas Keluarga	65,21		99,77		82,49	
KP 7. Peningkatan Prestasi Olahraga	87,05		77,75		82,40	

Sumber: Perhitungan data hingga Triwulan III 2020

Keterangan: realisasi >90% target; realisasi 60-90% target; realisasi <60% target; belum dapat diberikan notifikasi

A.2. PRIORITAS NASIONAL 2 INFRASTRUKTUR DAN PEMERATAAN WILAYAH

Tabel A.2
Kinerja PN-PP-KP
PN 2. Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah,
Hingga Triwulan III Tahun 2020

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Kinerja Berdasarkan			Rata-Rata Kinerja (%)		
	Capaian Sasaran (%)	Dukungan Output K/L (%)				
PN 2. Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah	85,13		62,35		73,74	
PP 1. Perluasan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar	91,56		61,78		76,67	
KP 1. Penyediaan Akses Perumahan serta Permukiman Layak, Aman, dan Terjangkau	59,28		59,92		59,60	
KP 2. Penyediaan Akses Air Minum serta Sanitasi yang Layak dan Aman	56,36		47,66		52,01	
KP 3. Keselamatan dan Keamanan Transportasi	81,21		82,95		82,08	
KP 4. Penyediaan serta Pengamanan Air Baku dan Air Tanah	68,92		70,11		69,51	
PP 2. Penguatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana	68,43		60,68		64,56	
KP 1. Aksesibilitas Daerah Tertinggal	73,57		60,76		67,17	
KP 2. Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur	42,68		64,83		53,76	
KP 3. Pembangunan Terpadu Pesisir Utara Pulau Jawa	30,97		71,88		51,43	

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Kinerja Berdasarkan				Rata-Rata Kinerja (%)
	Capaian Sasaran (%)		Dukungan Output K/L (%)		
KP 4. Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat	62,58	●	57,04	●	59,81 ●
PP 3. Peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antarmoda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	67,26	●	56,34	●	61,80 ●
KP 1. Konektivitas Transportasi Jalan	55,18	●	49,19	●	52,19 ●
KP 2. Konektivitas Transportasi Kereta Api	40,37	●	55,83	●	48,10 ●
KP 3. Konektivitas Transportasi Laut	100	●	N/A	○	100 ●
KP 4. Konektivitas Transportasi Udara	93,75	●	N/A	○	93,75 ●
KP 5. Konektivitas Transportasi Darat	100	●	61,40	●	80,70 ●
PP 4. Peningkatan Infrastruktur Perkotaan	100	●	64,60	●	82,30 ●
KP 1. Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Rel	100	●	N/A	○	100 ●
KP 2. Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Jalan	100	●	72,00	●	86,00 ●
KP 3. Infrastruktur Jalan Perkotaan	66,67	●	N/A	○	66,67 ●
KP 4. Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman di Perkotaan	N/A	○	0,18	●	0,18 ●
KP 5. Penyediaan Akses Perumahan serta Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau di Perkotaan	N/A	○	48,86	●	48,86 ●
KP 6. Energi Berkelanjutan terutama untuk Perkotaan	18,51	●	N/A	○	18,51 ●
KP 7. Infrastruktur dan Ekosistem TIK Perkotaan	75,00	●	0,00	●	37,50 ●
PP 5. Transformasi Digital	98,34	●	92,70	●	95,52 ●
KP 1. Penuntasan Infrastruktur TIK	83,89	●	95,94	●	89,91 ●
KP 2. Pemanfaatan Infrastruktur TIK	23,71	●	91,89	●	57,80 ●
KP 3. Fasilitas Pendukung Transformasi Digital	76,54	●	21,50	●	49,02 ●

Sumber: Perhitungan data hingga Triwulan III 2020

Keterangan: ● realisasi >90% target; ● realisasi 60-90% target; ● realisasi <60% target; ○ belum dapat diberikan notifikasi

A.3. PRIORITAS NASIONAL 3 NILAI TAMBAH SEKTOR RIIL, INDUSTRIALISASI, DAN KESEMPATAN KERJA

Tabel A.3
Kinerja PN-PP-KP
PN 3. Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja,
Hingga Triwulan III Tahun 2020

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Kinerja Berdasarkan				Rata-Rata Kinerja (%)
	Capaian Sasaran (%)		Dukungan Output K/L (%)		
PN 3. Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja	28,90	●	51,04	●	39,97 ●
PP 1. Penguatan Kewirausahaan dan UMKM	91,41	●	74,02	●	82,72 ●
KP 1. Peningkatan Kemitraan Usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar	30,28	●	72,43	●	51,36 ●

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Kinerja Berdasarkan				Rata-Rata Kinerja (%)
	Capaian Sasaran (%)		Dukungan Output K/L (%)		
KP 2. Peningkatan Akses Pembiayaan bagi Wirausaha	21,45	●	61,62	●	41,54 ●
KP 3. Peningkatan Kapasitas, Jangkauan, dan Inovasi Koperasi	51,58	●	85,40	●	68,49 ●
KP 4. Peningkatan Penciptaan Peluang Usaha	43,88	●	74,26	●	59,07 ●
PP 2. Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi	48,56	●	49,39	●	48,98 ●
KP 1. Peningkatan Industri Berbasis Pertanian Terintegrasi Hulu-Hilir	51,47	●	19,35	●	35,41 ●
KP 2. Peningkatan Industri Berbasis Kemaritiman yang Terintegrasi Hulu-Hilir	60,00	●	19,41	●	39,71 ●
KP 3. Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Industri Non-Agro yang Didukung Sistem Bisnis Terintegrasi Hulu-Hilir	76,00	●	57,71	●	66,86 ●
KP 4. Peningkatan Daya Saing Destinasi dan Industri Pariwisata, Termasuk Wisata Alam, yang Didukung Penguatan Rantai Pasok	80,00	●	74,05	●	77,03 ●
KP 5. Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kreatif dan Digital	58,78	●	82,17	●	70,48 ●
KP 6. Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi	76,33	●	73,10	●	74,72 ●
KP 7. Peningkatan Hilirisasi Sumber Daya Alam, Termasuk Melalui Pengembangan <i>Smelter</i> dan Kawasan Industri Terutama di Luar Jawa	71,11	●	59,75	●	65,43 ●
KP 8. Pengembangan Industri Halal	63,19	●	65,63	●	64,41 ●
PP 3. Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja	72,72	●	40,34	●	56,53 ●
KP 1. Peningkatan Peran dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dengan Dunia Usaha	47,34	●	39,46	●	43,40 ●
KP 2. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	N/A	○	37,62	●	37,62 ●
KP 3. Peningkatan Sertifikasi Kompetensi	60,04	●	77,82	●	68,93 ●
KP 4. Peningkatan Tata Kelola Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	100	●	54,23	●	77,12 ●
PP 4. Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)	57,12	●	66,35	●	61,74 ●
KP 1. Peningkatan Diversifikasi, Nilai Tambah, dan Daya Saing Produk Ekspor dan Jasa	78,41	●	76,83	●	77,62 ●
KP 2. Peningkatan Akses dan Pendalaman Pasar Ekspor	86,76	●	54,27	●	70,52 ●
KP 3. Peningkatan Efektivitas <i>Free Trade Agreement</i> (FTA) dan Diplomasi Ekonomi	60,00	●	76,48	●	68,24 ●
KP 4. Peningkatan Partisipasi Dalam Jaringan Produksi Global (Investasi <i>Inbound</i> dan <i>Outbound</i>)	44,21	●	45,00	●	44,61 ●
KP 5. Pengelolaan Impor	68,58	●	54,37	●	61,48 ●
KP 6. Peningkatan Pengadaan Pemerintah yang Menggunakan Produk Dalam Negeri	82,53	●	73,64	●	78,09 ●
KP 7. Peningkatan Citra dan Diversifikasi Pemasaran Pariwisata dan Produk Kreatif	45,23	●	65,56	●	55,40 ●
PP 5. Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi	100	●	59,36	●	79,68 ●
KP 1. Peningkatan Pendalaman Sektor Keuangan	97,37	●	76,13	●	86,75 ●
KP 2. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Digital dan	54,29	●	53,06	●	53,68 ●

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Kinerja Berdasarkan				Rata-Rata Kinerja (%)
	Capaian Sasaran (%)		Dukungan Output K/L (%)		
<i>Industry 4.0</i>					
KP 3. Penguatan Sistem Logistik dan Stabilitas Harga	54,60	●	61,90	●	58,25 ●
KP 4. Peningkatan Pengembangan Industri dan Pariwisata yang Berkelanjutan	40,00	●	21,38	●	30,69 ●
KP 5. Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi Perkembangan Ekonomi, Terutama Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital	N/A	○	0,00	●	0,00 ●
KP 6. Reformasi Fiskal	25,33	●	57,92	●	41,63 ●

Sumber: Perhitungan data hingga Triwulan III 2020

Keterangan: ● realisasi >90% target; ● realisasi 60-90% target; ● realisasi <60% target; ○ belum dapat diberikan notifikasi

A.4. PRIORITAS NASIONAL 4 KETAHANAN PANGAN, AIR, ENERGI DAN LINGKUNGAN HIDUP

Tabel A.4
Kinerja PN-PP-KP
PN 4. Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup,
Hingga Triwulan III Tahun 2020

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Kinerja Berdasarkan				Rata-Rata Kinerja (%)
	Capaian Sasaran (%)		Dukungan Output K/L (%)		
PN 4. Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	89,88	●	65,70	●	77,79 ●
PP 1. Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan	27,17	●	72,52	●	49,85 ●
KP 1. Peningkatan Kualitas Konsumsi, Keamanan, Fortifikasi, dan Biofortifikasi Pangan	65,11	●	90,60	●	77,86 ●
KP 2. Peningkatan Ketersediaan Pangan Hasil Pertanian	75,64	●	76,74	●	76,19 ●
KP 3. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perikanan dan Produk Laut	72,06	●	44,79	●	58,43 ●
KP 4. Peningkatan Produktivitas dan Kesejahteraan SDM Pertanian	88,78	●	74,71	●	81,75 ●
KP 5. Peningkatan Produktivitas dan Keberlanjutan Sumber Daya Pertanian	77,42	●	74,80	●	76,11 ●
KP 6. Tata Kelola Sistem Pangan Nasional	65,91	●	45,30	●	55,61 ●
PP 2. Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air	41,93	●	66,11	●	54,02 ●
KP 1. Penataan Kawasan Hutan	0,00	●	65,20	●	32,60 ●
KP 2. Pemeliharaan, Pemulihan, dan Konservasi Sumber Daya Air dan Ekosistemnya	40,68	●	58,64	●	49,66 ●
KP 3. Optimalisasi Pemanfaatan Waduk Multiguna	48,55	●	72,37	●	60,46 ●
KP 4. Pengelolaan Air Terpadu Berbasis Pemanfaatan Teknologi (<i>Smart Water Management</i>)	1,47	●	N/A	○	1,47 ●
KP 5. Modernisasi Pengelolaan Air Irigasi	51,45	●	59,27	●	55,36 ●
KP 6. Citarum Harum	47,78	●	69,94	●	58,86 ●

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Kinerja Berdasarkan		Rata-Rata Kinerja (%)
	Capaian Sasaran (%)	Dukungan Output K/L (%)	
PP 3. Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan EBT	76,59	59,20	67,90
KP 1. Akselerasi Pembangunan Energi Terbarukan	93,71	43,05	68,38
KP 2. Peningkatan Pasokan dan Akses Listrik	82,57	65,00	73,79
KP 3. Peningkatan Produksi dan Akses Minyak dan Gas	60,00	60,88	60,44
KP 4. Peningkatan Implementasi Efisiensi Energi	66,67	90,21	78,44
KP 5. Pengembangan Industri Pendukung EBT	79,96	76,00	77,98
PP 4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	98,29	43,79	71,04
KP 1. Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	99,72	44,40	72,06
KP 2. Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	58,09	76,75	67,42
KP 3. Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	87,57	32,81	60,19
KP 4. Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	99,35	90,51	94,93
PP 5. Penguatan Ketahanan Bencana	100	52,37	76,19
KP 1. Penguatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	100	28,64	64,32
KP 2. Penguatan Peringatan Dini Bencana	87,22	60,63	73,93
KP 3. Peningkatan Manajemen Kedaruratan	100	41,86	70,93
KP 4. Percepatan Pemulihan Pascabencana	100	15,61	57,81

Sumber: Perhitungan data hingga Triwulan III 2020

Keterangan: ● realisasi >90% target; ● realisasi 60-90% target; ● realisasi <60% target;
○ belum dapat diberikan notifikasi

A.5. PRIORITAS NASIONAL 5 STABILITAS PERTAHANAN DAN KEAMANAN

Tabel A.5
Kinerja PN-PP-KP
PN 5. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan,
Hingga Triwulan III Tahun 2020

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Kinerja Berdasarkan		Rata-Rata Kinerja (%)
	Capaian Sasaran (%)	Dukungan Output K/L (%)	
PN 5. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	96,52	51,52	74,02
PP 1. Penguatan Kemampuan Pertahanan	N/A	47,52	47,52
KP 1. Peningkatan Kekuatan Pertahanan	100	47,47	73,74
KP 2. Penguatan Kemandirian Pertahanan	100	50,00	75,00
KP 3. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pertahanan dan Keamanan di Perbatasan dan Pulau Terluar	54,17	48,03	51,10
PP 2. Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan Internasional	88,79	76,78	82,79
KP 1. Penguatan Diplomasi Politik-Keamanan dan Perbatasan	78,86	67,39	73,13

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Kinerja Berdasarkan				Rata-Rata Kinerja (%)
	Capaian Sasaran (%)		Dukungan Output K/L (%)		
KP 2. Penguatan Perlindungan WNI di Luar Negeri	80,29	●	77,44	●	78,87 ●
KP 3. Penguatan Kerjasama Pembangunan Internasional	100	●	92,69	●	96,35 ●
PP 3. Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi	95,69	●	80,10	●	87,90 ●
KP 1. Penataan Regulasi	67,50	●	57,89	●	62,70 ●
KP 2. Perbaikan Peradilan Perdata untuk Kemudahan Berusaha	100	●	100	●	100 ●
KP 3. Perbaikan Peradilan Pidana dengan Pendekatan Keadilan Restoratif	63,17	●	80,89	●	72,03 ●
KP 4. Penguatan Upaya Anti Korupsi	46,55	●	49,13	●	47,84 ●
KP 5. Penataan Biaya Politik	57,07	●	91,62	●	74,35 ●
PP 4. Penanggulangan Terorisme, Peningkatan Keamanan Siber, dan Penguatan Keamanan Laut	N/A	○	43,01	●	43,01 ●
KP 1. Pencegahan dan Pemberantasan Terorisme	63,69	●	49,81	●	56,75 ●
KP 2. Penguatan Ketahanan dan Keamanan Siber	32,35	●	21,81	●	27,08 ●
KP 3. Penguatan Keamanan Laut	0,00	●	56,56	●	28,28 ●
PP 5. Penanggulangan Narkotika dan Penguatan Kamtibmas	50,00	●	73,67	●	61,84 ●
KP 1. Pencegahan, Pemberantasan, dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika	67,13	●	88,91	●	78,02 ●
KP 2. Peningkatan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban	42,99	●	70,84	●	56,92 ●

Sumber: Perhitungan data hingga Triwulan III 2020

Keterangan: ● realisasi >90% target; ● realisasi 60-90% target; ● realisasi <60% target; ○ belum dapat diberikan notifikasi

B. RINCIAN PENCAPAIAN SASARAN
PRIORITAS NASIONAL (PN)-PROGRAM PRIORITAS (PP)-KEGIATAN PRIORITAS (KP)

B.1. PRIORITAS NASIONAL 1 PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PENGENTASAN KEMISKINAN

Tabel B.1.1
Pencapaian Sasaran PN
PN 1. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan,
Hingga Triwulan III Tahun 2020

Sasaran/Indikator	Target	Capaian	Kinerja (%) dan Notifikasi
PN 1. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan			96,36
1. Meningkatnya kualitas SDM Indonesia sebagai individu maupun sebagai komponen dari masyarakat			
a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,51	Nilai 71,92 (2019)	99,19
b. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	55,33	Nilai 52,67 (2019)	95,19
2. Meningkatnya dan meratanya kesejahteraan masyarakat			
a. Tingkat kemiskinan	8,5-9,0	Persen 9,78	91,33
b. Gini Rasio	0,375-0,380	Nilai 0,381	99,74

Sumber: Perhitungan data hingga Triwulan III 2020

Keterangan: realisasi > 90% target; realisasi 60-90% target; realisasi < 60% target;
 belum dapat diberikan notifikasi

Tabel B.1.2
Pencapaian Sasaran PP
PN 1. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan,
Hingga Triwulan III Tahun 2020

Sasaran/Indikator	Target	Capaian	Kinerja (%) dan Notifikasi
PP 1. Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan			97,53
1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap program-program perlindungan sosial			
a. Persentase penduduk yang tercakup dalam program perlindungan sosial	85	Persen 82,5	97,06
b. Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah ⁹⁾	70	Persen N/A	N/A
2. Meningkatnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan			

Sasaran/Indikator	Target	Capaian	Kinerja (%) dan Notifikasi
Persentase penduduk yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)	100	Persen	98 98,00
3 Meningkatnya kesejahteraan penduduk rentan			
a. Tingkat kemiskinan penduduk penyandang disabilitas ^{a)}	13	Persen	N/A N/A
b. Tingkat kemiskinan penduduk lanjut usia ^{a)}	11	Persen	N/A N/A
PP 2. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan			93,72
1 Meningkatnya status kesehatan ibu dan anak, KB, kesehatan reproduksi, serta gizi masyarakat			
a. Prevalensi <i>stunting</i> /pendek dan sangat pendek pada balita	27,1	Persen	27,67 97,90
b. Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan ^{a)}	64	Persen	N/A N/A
c. Prevalensi <i>wasting</i> /kurus dan sangat kurus pada balita	8,08	Persen	7,44 100
d. Angka kelahiran total (<i>Total Fertility Rate</i> /TFR)	2,1	Per wanita usia subur (15-49 tahun)	2,45 83,33
e. Angka prevalensi pemakaian kontrasepsi modern (<i>Contraceptive Prevalence Rate</i> /mCPR)	61,78	Persen	58,71 95,03
f. Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>Unmet Need</i>)	8,6	Persen	12,10 59,30
2 Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan faktor resiko penyakit tidak menular			
a. Insidensi HIV	0,21	Per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV	0,052 100
b. Insidensi TB ^{a)}	272	Per 100.000 penduduk	N/A N/A
c. Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun ^{b)}	9,1	Persen	N/A N/A
d. Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	325	Kab/Kota	312 96,00
3 Meningkatnya kinerja sistem kesehatan dan pemerataan akses pelayanan kesehatan berkualitas			
a. Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi	65	Persen	56,4 86,77
b. Persentase rumah sakit terakreditasi	80	Persen	88,4 100
c. Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	35	Persen	39,9 100
d. Persentase puskesmas tanpa dokter	12	Persen	8,68 100
e. Persentase obat yang memenuhi syarat	80,8	Persen	92,47 100
f. Persentase makanan yang memenuhi syarat	76	Persen	76,61 100

Sasaran/Indikator	Target	Capaian	Kinerja (%) dan Notifikasi
PP 3. Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas dan Pengembangan Iptek-Inovasi			94,16
1 Meningkatnya Partisipasi Pendidikan			
a. Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas	8,74	Tahun	8,75 100
b. Harapan Lama Sekolah	13,24	Tahun	12,95 97,81
c. Persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti pendidikan anak usia dini TK/RA/BA/PAUD)	75,6	Persen	63,3 83,73
d. Tingkat Penyelesaian SD/MI/Sederajat	93,66	Persen	93,03 99,33
e. Tingkat Penyelesaian SMP/Mts/Sederajat	85,65	Persen	83,12 97,05
f. Tingkat Penyelesaian SMA/MA/Sederajat	67,82	Persen	58,06 85,61
g. Angka Partisipasi Kasar (APK) PT	33,29	Persen	30,27 90,93
2 Meningkatnya kualitas pendidikan			
a. Nilai rata-rata hasil PISA			
- Matematika ^{c)}	N/A	Nilai	N/A N/A
- Membaca ^{c)}	N/A	Nilai	N/A N/A
- Sains ^{c)}	N/A	Nilai	N/A N/A
b. Proporsi anak di atas standar kompetensi minimum dalam test PISA			
- Matematika ^{c)}	N/A	Persen	N/A N/A
- Membaca ^{c)}	N/A	Persen	N/A N/A
- Sains ^{c)}	N/A	Persen	N/A N/A
3 Meningkatnya Kapabilitas Adopsi Iptek dan Penciptaan Inovasi SDM Indonesia			
Peringkat <i>Global Innovation Index</i>	80-84	Peringkat	85 98,82
PP 4. Pengentasan Kemiskinan			N/A
1 Meningkatnya penduduk miskin dan rentan yang berdaya secara ekonomi			
a. Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif ^{a)}	28,1	Persen	N/A N/A
b. Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang mengakses pendanaan usaha ^{a)}	20,9	Persen	N/A N/A
PP 5. Revolusi Mental, Pembangunan Kebudayaan, dan Prestasi Bangsa			100
1 Meningkatnya pemajuan kebudayaan dalam memperkuat ketahanan budaya dan kerukunan			
a. Indeks Pembangunan Kebudayaan ^{a)}	Meningkat	Nilai	N/A N/A
b. Indeks Kerukunan Umat Beragama	Meningkat	Nilai	Meningkat 100
2 Meningkatnya kualitas keluarga, anak, perempuan dan pemuda			
a. Indeks Komposit Kesejahteraan Anak (IKKA) ^{d)}	Meningkat	Nilai	N/A N/A
b. Proporsi Perempuan 20-24 Tahun yang Menikah Sebelum 18 Tahun	10,19	Persen	10,19 100
c. Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir ^{e)}	Menurun	Persen	N/A N/A
d. Persentase pemuda berumur 16-30 tahun	Meningkat	Persen	N/A N/A

Sasaran/Indikator	Target	Capaian	Kinerja (%) dan Notifikasi
yang mengikuti kegiatan organisasi dalam tiga bulan terakhir ^{b)}			
e. Median Usia Kawin Pertama Perempuan	21,9	Tahun	21,9 100
3 Meningkatkan prestasi olahraga di internasional			
a. Jumlah perolehan medali emas pada <i>Olympic Games</i> 2020 ^{f)}	2	Medali Emas	N/A N/A
b. Jumlah perolehan medali emas pada <i>Paralympic Games</i> 2020 ^{f)}	1	Medali Emas	N/A N/A

Sumber: Perhitungan data hingga Triwulan III 2020

Keterangan: realisasi >90% target; realisasi 60-90% target; realisasi <60% target;

belum dapat diberikan notifikasi

a) data tersedia di triwulan IV

b) tidak ada data tahunan

c) tidak dilaksanakan di tahun 2020 - dilakukan setiap 3 Tahun, akan dikeluarkan kembali tahun 2021.

d) IKKA tidak digunakan lagi, diusulkan menjadi Indeks Perlindungan Anak (IPA) sesuai dengan RPJMN 2020-2024.

e) Angka belum tersedia. SNPCHAR akan dilaksanakan pada tahun 2021.



















f) Penyelenggaraan *Olympic* dan *Paralympic Games* Tokyo 2020 ditunda ke tahun 2021 karena pandemi COVID-19.

Tabel B.1.3
Pencapaian Sasaran KP
PN 1. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan,
Hingga Triwulan III Tahun 2020

Sasaran/Indikator	Target	Capaian	Kinerja (%) dan Notifikasi
PP 1. Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan			
KP 1. Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan Peningkatan Kepesertaan Mandiri			83,95
1 Meningkatkan cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan			
a. Persentase penduduk yang tercapuk dalam program JKN	85	Persen	82,5 97,06
b. Jumlah Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional dari 40 persen penduduk berpendapatan rendah	107,2	Juta Jiwa	96,7 90,21
c. Persentase pekerja yang tercapuk dalam program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	35	Persen	22,60 64,57
KP 2. Bantuan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran			94,13
1 Meningkatkan komplementaritas program bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran yang diterima oleh penduduk miskin dan rentan			
a. Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang memperoleh bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)	10.000.000	KPM	10.000.000 100

Sasaran/Indikator	Target	Capaian	Kinerja (%) dan Notifikasi
b. Jumlah Keluarga penerima manfaat (KPM) yang memperoleh Pangan melalui Kartu Sembako Murah	20.000.000	KPM	19.413.909 97,07
c. Jumlah siswa miskin SD, SMP, SMA/SMK yang memperoleh bantuan pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP)	17.900.000	Orang	13.934.646 77,85
d. Jumlah siswa miskin MI/MTs/MA/Ula/Wustha/Ulya/SDTK/ SMPTK/SMAK/SMTK yang memperoleh bantuan pendidikan melalui KIP	2.200.000	Orang	2.084.747 94,76
e. Jumlah kepala keluarga Miskin dan tidak mampu sesuai dengan data terpadu yang memperoleh subsidi listrik daya 450 VA dan 900 VA	31.400.000	KPM	31.528.901 100
f. Jumlah kepala keluarga yang memperoleh subsidi elpiji 3 kg ^{a)}	31.400.000	KPM	N/A N/A
g. Jumlah mahasiswa penerima bantuan Bidikmisi	370.810	Orang	352.706 95,12
KP 3. Kesejahteraan Sosial			71,52
1 Meningkatnya kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial			
a. Jumlah penyandang disabilitas yang memiliki akses terhadap layanan pendidikan dasar ^{a)}	325.000	Jiwa	N/A N/A
b. Jumlah K/L dan Pemda yang memperkerjakan penyandang disabilitas ^{a)}	10	K/L dan Pemda	N/A N/A
c. Jumlah perusahaan swasta yang mempekerjakan penyandang disabilitas ^{a)}	500	Perusahaan	N/A N/A
d. Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan bantuan kesejahteraan sosial	45.000	Jiwa	29.212 64,92
e. Jumlah literasi khusus bagi penyandang disabilitas Netra	47.000	Eksemplar	25.632 54,54
f. Jumlah lanjut usia yang mendapatkan bantuan kesejahteraan sosial	30.200	Jiwa	30.200 100
g. Jumlah keluarga Komunitas Adat yang memperoleh pemberdayaan	2.373	Kepala Keluarga	1.020 42,98
h. Jumlah orang dengan HIV/AIDS yang memperoleh rehabilitasi sosial	1.300	Jiwa	1.237 95,15
KP 4. Penguatan Sistem Layanan Terpadu dan Pendampingan			85,25
1 Meningkatnya Pendampingan dan Layanan Dasar Terpadu bagi Seluruh Penduduk			
a. Jumlah Kabupaten/Kota yang melakukan verifikasi validasi data terhadap penduduk miskin dan rentan	420	Kab/Kota	300 71,43

Sasaran/Indikator	Target	Capaian	Kinerja (%) dan Notifikasi
b. Jumlah Daerah yang menyelenggarakan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu	80	Kab/Kota	80 100
c. Jumlah daerah yang mengesahkan peraturan terkait dengan penerapan SPM	508	Kab/Kota	391 76,97
d. Jumlah pendamping yang memperoleh Pelatihan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga	9.285	Pendamping	8.625 92,89
e. Jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial yang memperoleh pemberdayaan di tingkat kecamatan dan desa	10.301	Pendamping	8.041 78,06
f. Jumlah desa yang memperoleh pendampingan pada proses perencanaan dan pelaporan pembangunan desa ^{a)}	74.957	Desa	N/A N/A
g. Jumlah SDM Kesejahteraan Sosial yang telah dikembangkan profesinya	17.500	Pendamping	17.443 99,67
h. Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang terakreditasi	3.000	Lembaga	2.039 67,97
i. Jumlah konselor Adiksi yang memperoleh pelatihan	600	Jiwa	570 95,00
KP 5. Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan			98,40
1 Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan			
a. Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0–17 tahun	92	Persen	90,53 98,40
b. Persentase cakupan kepemilikan akta kematian atas peristiwa kematian di fasilitas kesehatan ^{b)}	20	Persen	N/A N/A
c. Persentase cakupan kepemilikan buku nikah dan akta perkawinan bagi pasangan yang menikah ^{b)}	20	Persen	N/A N/A
d. Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian bagi pasangan yang sudah bercerai ^{b)}	20	Persen	N/A N/A
KP 6. Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan			100
1 Menguatnya integrasi sistem administrasi kependudukan			
Jumlah K/L yang mengintegrasikan data dengan data administrasi kependudukan berbasis NIK	41	K/L	51 100
PP 2. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan			
KP 1. Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Keluarga Berencana (KB), dan Kesehatan Reproduksi			61,50
1 Meningkatnya kesehatan ibu dan anak, KB, serta kesehatan reproduksi			
a. Persentase persalinan di fasilitas kesehatan	87	Persen	45,61 52,43
b. Cakupan kunjungan neonatal	86	Persen	50,71 58,97

Sasaran/Indikator	Target	Capaian	Kinerja (%) dan Notifikasi
c. Jumlah fasilitas kesehatan yang mendapat jaminan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi	18.786	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	13.447 73,11 
KP 2. Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat			100 
1 Meningkatnya percepatan perbaikan gizi masyarakat			
a. Persentase ibu hamil kurang energi kronik (KEK)	16	Persen	13,9 100 
b. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI Eksklusif	40	Persen	56,2 100 
KP 3. Peningkatan Pengendalian Penyakit			82,56 
1 Meningkatnya pengendalian penyakit			
a. Persentase angka keberhasilan pengobatan TBC (TBC Success Rate)	90	Persen	75 83,33 
b. Jumlah kabupaten/kota yang mencapai API kurang dari 1 per 1.000 penduduk	466	Kab/Kota	463 99,36 
c. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki cakupan deteksi dini faktor resiko Penyakit Tidak Menular (PTM) ^{a)}	52	Kab/Kota	N/A N/A 
d. Persentase orang dengan HIV/AIDS yang menjalani terapi ARV (ODHA on ART)	40	Persen	26 65,00 
KP 4. Pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)			74,77 
1 Menguatnya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dalam rangka mencegah penyakit tidak menular			
a. Persentase desa/kelurahan stop buang air besar sembarangan (SBS)	40	Persen	33,36 83,40 
b. Persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan Germas ^{a)}	30	Persen	N/A N/A 
c. Jumlah kabupaten/kota sehat	110	Kab/Kota	45 40,91 
d. Jumlah pekerja yang mendapatkan peningkatan pelayanan kualitas kesehatan di tempat kerja	1.400	Pekerja	1.400 100 
KP 5. Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan			78,40 
1 Meningkatnya pelayanan kesehatan dan pengawasan obat dan makanan			
a. Persentase RS Kabupaten/kota kelas C yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang	70	Persen	18 25,71 
b. Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	85	Persen	88,86 100 
c. Jumlah kabupaten/kota yang telah melakukan perbaikan tata kelola pembangunan kesehatan	25	Kab/Kota	35 (proses pendampingan, masih menunggu hasil penilaian dokumen di akhir tahun) 100 

Sasaran/Indikator	Target	Capaian	Kinerja (%) dan Notifikasi
d. Persentase sampel makanan yang diperiksa sesuai standar dan memenuhi syarat	75	Persen	64,52 86,03
e. Persentase sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diperiksa sesuai standar	82	Persen	65,83 80,28
PP 3. Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas dan Pengembangan Iptek-Inovasi			
KP 1. Penguatan Kualitas Pengajaran dan Cara Pembelajaran			90,95
1 Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak			
a. Proporsi sekolah/madrasah menerapkan Kurikulum 2013	100	Persen	100 100
b. Rata-rata nilai sikap siswa minimal baik	Baik	Sikap	Baik 100
c. Proporsi anak yang mencapai nilai AKSI:			
- Kompetensi Membaca	57,2	Persen	Baik 6,14 Cukup 38,01 Total 44,15 77,19
- Kompetensi Matematika	26,5	Persen	Baik 1,58 Cukup 18,98 Total 20,56 77,58
- Kompetensi Sains	30,4	Persen	Baik 1,78 Cukup 32,12 Total 33,9 100
KP 2. Afirmasi Akses dan Percepatan Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun			92,55
1 Meningkatnya partisipasi pendidikan di daerah 3T dan daerah dengan jumlah anak tidak sekolah yang tinggi			
a. Jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS)	3.800.000	Anak	4.337.503 85,86
b. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD daerah 3T	22,27	Persen	29,01 100
c. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Sederajat di Daerah 3T	112,83	Persen	108,75 96,38
d. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/Mts/Sederajat di Daerah 3T	91,09	Persen	87,23 95,76
e. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/Sederajat di Daerah 3T	89,91	Persen	69,48 77,28
f. Angka Partisipasi Kasar (APK) PT di Luar Jawa	21,92	Persen	30,28 100
KP 3. Peningkatan Kualitas, Pengelolaan dan Penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan			77,77
1 Tersedianya pendidik yang berkualitas dan terdistribusikannya guru ke seluruh satuan pendidikan secara merata			
a. Nilai rata-rata kompetensi pendidik	80	Poin	76,62 95,78
b. Nilai rata-rata kinerja pendidik	82,4	Poin	76,43 92,75
c. Rasio Guru: Siswa pada jenjang SD/MI/Sederajat	1/32	Rasio	1/16 50,00

Sasaran/Indikator	Target	Capaian	Kinerja (%) dan Notifikasi
d. Rasio Guru: Siswa pada jenjang SMP/MTs/SMA/SMK/MA/Sederajat	1/36	Rasio	1/17 47,22
e. Jumlah dosen yang lulus sertifikasi	8.000	Orang	8.643 100
f. Persentase guru yang bersertifikat pendidik	67,47	Persen	54,56 80,87
KP 4. Penjaminan Mutu Pendidikan			89,86
1 Meningkatnya PAUD, Sekolah/Madrasah/ Sederajat, dan Prodi Pendidikan Tinggi yang terakreditasi minimal B			
a. Proporsi lembaga PAUD yang terakreditasi minimal B	89,9	Persen	67 74,53
b. Proporsi SD/MI/Sederajat yang terakreditasi minimal B	83,9	Persen	82,57 98,41
c. Proporsi SMP/MTs/Sederajat yang terakreditasi minimal B	82,1	Persen	76,81 93,56
d. Proporsi SMA/SMK/MA/Sederajat yang terakreditasi minimal B	87,4	Persen	72,38 82,81
e. Proporsi Prodi PT yang terakreditasi minimal B	63,87	Persen	78,45 100
KP 5. Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas			99,38
1 Meningkatnya keterserapan lulusan pendidikan tinggi di pasar kerja			
a. Persentase lulusan perguruan tinggi yang langsung bekerja	80	Persen	79 98,75
b. Persentase lulusan perguruan tinggi bersertifikasi kompetensi dan profesi	74	Persen	101 100
2 Meningkatnya produktivitas riset dan inovasi perguruan tinggi			
a. Jumlah publikasi ilmiah di jurnal internasional bereputasi ^{a)}	27.000	Dokumen	N/A N/A
b. Jumlah prototipe dari perguruan tinggi ^{a)}	133	Prototipe	N/A N/A
KP 6. Peningkatan Tata Kelola Pendidikan			73,00
1 Meningkatnya kualitas tata kelola pendidikan di pemerintah dan daerah serta satuan pendidikan			
a. Persentase kab/kota memenuhi SPM pendidikan	100	Persen	62 62,00
b. Jumlah provinsi memenuhi SPM	100	Persen	57 57,00
c. Proporsi satuan pendidikan yang menerapkan manajemen berbasis sekolah	60	Persen	100 100
KP 7. Kapabilitas Adopsi Iptek dan Penciptaan Inovasi			80,20
1 Terbangunnya kapabilitas Iptek Indonesia untuk menjadi <i>Research and Innovation Power-House</i>			
a. Jumlah hasil inovasi Prioritas Riset Nasional	1	Produk Inovasi	1 90,00
b. Jumlah aplikasi pendaftaran paten (<i>resident</i>)	3.000	Paten	6.145 100
c. Persentase SDM Iptek berkualitas S3	15	Persen	15,02 100

Sasaran/Indikator	Target	Capaian	Kinerja (%) dan Notifikasi
d. Jumlah tenant yang dibina menjadi Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi	400	Tenant	44 11,00 ●
e. Jumlah Pusat Unggulan Iptek yang dibina	85	Lembaga	85 100 ●
PP 4. Pengentasan Kemiskinan			
KP 1. Akselerasi Penguatan Ekonomi Keluarga			100 ●
1 Meningkatnya ketahanan ekonomi keluarga miskin dan rentan			
a. Jumlah keluarga yang mendapatkan bimbingan perkawinan ^{b)}	50.000	Pasangan	N/A N/A ○
b. Jumlah keluarga miskin yang memperoleh modal dan pelatihan usaha	341	KPM	341 100 ●
KP 2. Keperantaraan Usaha dan Dampak Sosial			40,93
1 Meningkatnya produktifitas usaha kelompok miskin dan rentan			
a. Jumlah kerjasama Usaha Rintisan dan Pemda untuk keperantaraan usaha ^{a)}	250.000	Keluarga	N/A N/A ○
b. Jumlah petani, nelayan, dan UMKM yang ditingkatkan kapasitas usahanya	114.500	Orang	2.812 2,46 ●
c. Jumlah Desa yang memiliki BUMDes yang dikembangkan untuk mendukung Produk Unggulan Desa termasuk di Desa Wisata destinasi prioritas ^{a)}	600	Desa (unit)	N/A N/A ○
d. Jumlah dunia usaha yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	170	Dunia Usaha	135 79,41 ●
KP 3. Peningkatan Akses Pembiayaan Ultra Mikro			65,00 ●
1 Meningkatnya cakupan penduduk miskin dan rentan yang dapat mengakses dana ultra mikro			
a. Jumlah pelaku usaha ultra mikro yang difasilitasi	1.600.000	Orang	2.807.680 100 ●
b. Jumlah lokasi yang mendapatkan zakat dan waqaf produktif	10	Lokasi	3 30,00 ●
KP 4. Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial			74,68 ●
1 Mengurangi ketimpangan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T), serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan hutan yang berkelanjutan			
a. Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	46.500	Hektare	71.899,16 100 ●
b. Jumlah bidang tanah yang didistribusi	602.135	Bidang	201.196 33,41 ●
c. Jumlah bidang tanah yang dilegalisasi	7.000.000	Bidang	3.131.473 44,74 ●
d. Jumlah masyarakat penerima TORA yang memperoleh pemberdayaan	176	Kelompok Masyarakat	27 15,34 ●

Sasaran/Indikator	Target	Capaian	Kinerja (%) dan Notifikasi
e. Luas hutan yang dikelola oleh masyarakat desa melalui hutan kemasyarakatan, Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat (HA) dan kemitraan kehutanan	125.000 Hektare	175.554	100 ●
f. Jumlah kelompok usaha masyarakat desa perhutanan sosial dan kemitraan	300 Kelompok	287	95,67 ●
g. Jumlah pendamping kompeten dalam pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Tani Hutan/Kelompok Masyarakat	200 Orang	200	100 ●
h. Luas kawasan hutan yang direncanakan dan ditetapkan	500.000 Hektare	309.987	62,00 ●
i. Luasan Tanah Satuan Permukiman (SP) Transmigrasi yang difasilitasi sampai terbitnya SK HPL	5.000 Hektare di 5 provinsi	6.724,69	100 ●
j. Bidang Tanah yang difasilitasi penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigran	2.792 Bidang di 26 Provinsi	2.671	95,67 ●
PP 5. Revolusi Mental, Pembangunan Kebudayaan, dan Prestasi Bangsa			
KP 1. Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila			71,68 ●
1 Semakin mantapnya internalisasi nilai esensial revolusi mental (integritas, etos kerja, gotong royong) untuk memperkuat karakter dan jati diri bangsa			
a. Penguatan dan pengembangan gugus tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM)	3 Gugus tugas GNRM	2	66,67 ●
b. Penguatan pusat perubahan GNRM di daerah	15 Provinsi	5	33,33 ●
c. Layanan diseminasi GNRM pada masyarakat	4 Layanan	3	75,00 ●
d. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan karakter bangsa	63 konten	63	100 ●
e. Jumlah laboratorium kebhinekaan bahasa dan sastra ^{b)}	1.000 Unit Laboratorium	N/A	N/A ○
f. Jumlah peserta dialog wawasan kebangsaan	190 Orang	100	52,63 ●
g. Jumlah Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Aksi Bela Negara	1 Aksi	1	100 ●
h. Jumlah pembentukan kader bela negara ^{c)}	400.000 Orang	N/A	N/A ○
i. Jumlah nilai budaya dan tradisi yang direvitalisasi	1.971 Nilai budaya/tradisi	903	45,81 ●
j. Jumlah film dan produk siaran lainnya yang mengkampanyekan nilai-nilai persatuan dalam kebhinekaan, nasionalisme, patriotisme, dan mentalitas bangsa unggul	15 Film	22	100 ●
KP 2. Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan			62,00 ●

Sasaran/Indikator	Target	Capaian	Kinerja (%) dan Notifikasi
1 Semakin mantapnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan			
a. Jumlah museum yang direvitalisasi ^{d)}	5	Museum/taman budaya	N/A N/A ○
b. Jumlah festival kebudayaan INDONESIA di daerah	19	Festival	5 24,00 ●
c. Jumlah Komunitas Adat yang difasilitasi	33	Komunitas Adat	72 100 ●
d. Jumlah partisipasi Indonesia dalam forum internasional bidang kebudayaan ^{d)}	320	Orang	N/A N/A ○
KP 3. Penguatan Moderasi Beragama			61,52 ●
1 Menguatnya harmoni dan kerukunan umat beragama			
Jumlah kabupaten/kota mendapatkan bantuan operasional SEKBER FKUB	482	Kab/kota	432 89,63 ●
2 Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama			
a. Jumlah penyuluh agama yang dibina	33.460	Orang	22.465 67,14 ●
b. Jumlah rumah ibadah yang bersih dan sehat	939	Unit di 34 Provinsi	444 47,28 ●
3 Menguatnya penyelenggaraan jaminan produk halal			
a. Jumlah produk halal yang teregistrasi	88.000	Register	0 0,00 ●
b. Jumlah produk halal yang tersertifikasi	220.000	Sertifikat	777 0,35 ●
c. Jumlah stakeholder JPH yang terbina	20	Lembaga	3.693 100 ●
4 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan haji dan umrah			
a. Jumlah petugas haji yang profesional	4.620	Orang	4.620 100 ●
b. Jumlah penyelenggara umrah dan haji khusus yang dipantau dan diawasi	150	Orang	100 66,67 ●
c. Jumlah jemaah haji peserta bimbingan haji	204.000	Orang	204.000 100 ●
d. Asrama haji direvitalisasi dan dikembangkan	10	Lokasi	10 30,22 ●
e. Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu yang dibangun	40	Lokasi	40 82,12 ●
5 Berkembangnya ekonomi umat dan sumberdaya keagamaan			
a. Jumlah tanah wakaf yang dilegalisasi	227	Lokasi	75 33,04 ●
b. Jumlah lembaga zakat terakreditasi	53	Lembaga	40 75,47 ●
c. Lembaga yang mendapatkan pembinaan Manajemen Ekonomi Umat	1.269	Lembaga	880 69,35 ●
KP 4. Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas			75,00 ●
1 Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, kreatif, dan berkarakter			

Sasaran/Indikator	Target	Capaian	Kinerja (%) dan Notifikasi
a. Jumlah pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber pengetahuan dan pusat kegiatan masyarakat	7.500.000	Orang	8.183.246 100 ●
b. Jumlah perpustakaan umum yang memberikan pelayanan berbasis inklusi sosial	681	Unit perpustakaan	681 100 ●
c. Persentase perpustakaan umum yang sesuai standar	19,48	Persen	19,48 100 ●
d. Jumlah Gerakan Literasi Nasional (GLN) di daerah	11.957	Lokasi	0 0,00 ●
KP 5. Pemenuhan Hak dan Perlindungan bagi Anak, Perempuan, dan Pemuda			46,01 ●
1 Meningkatnya pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan serta pemuda			
a. Jumlah materi KIE pencegahan dan penanganan TPPO melalui media cetak dan elektronik	21	K/L	8 38,80 ●
b. Jumlah K/L yang mendapat Penguatan Kapasitas Kelembagaan Gugus Tugas TPPO	21	K/L	8 38,80 ●
c. Persentase perempuan korban TPPO yang mendapat fasilitasi layanan dan pemberdayaan ^{e)}	50	Persen	N/A N/A ○
d. Jumlah rekomendasi monitoring dan evaluasi SPPT-PKKT	1	Rekomendasi	0,6 60,00 ●
e. Jumlah provinsi yang difasilitasi dalam penguatan dan pembinaan kelompok BK-TKI dalam upaya Pemberdayaan Ekonomi, Ketahanan Keluarga, dan Pemenuhan Hak Anak TKI	15	Lokasi	1 26,00 ●
f. Jumlah SDM yang mendapat sosialisasi Program Teman Anak (Internet Aman untuk Anak)	660	Orang	600 100 ●
g. Jumlah pekerja anak yang dicegah dan ditarik dari tempat kerja	9.000	Pekerja Anak	2.240 24,89 ●
h. Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang terlindungi	18.000	CTKI/TKI	8.582 47,68 ●
i. CTKI/TKI yang memenuhi syarat kerja dan prosedural	179.860	CTKI/TKI	64.727 35,99 ●
j. Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	108.371	Orang	45.422 41,91 ●
KP 6. Peningkatan Kualitas Keluarga			65,21 ●
1 Meningkatnya peran keluarga untuk penyemaian nilai-nilai luhur dalam rangka membangun karakter bangsa			
a. Jumlah PIK Remaja dan Bina Keluarga Remaja (BKR) yang mendapatkan pembinaan genre	29.327	Kelompok Kegiatan	15.918 54,28 ●

Sasaran/Indikator	Target	Capaian	Kinerja (%) dan Notifikasi
b. Jumlah Keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	5.832.363	Keluarga	4.122.784 46,00 ●
c. Jumlah keluarga sakinah yang mendapatkan pembinaan	7.000	Pasang	10.612 100 ●
d. Jumlah satuan pendidikan yang memperoleh penyelenggaraan pendidikan keluarga	63	Konten	32 50,79 ●
e. Jumlah provinsi yang difasilitasi dalam Penguatan dan Pengembangan Pusat Pengembangan Keluarga (PUSPAGA)	4	Provinsi	3 75,00 ●
KP 7. Peningkatan Prestasi Olahraga			87,05 ●
1 Terselenggaranya event olahraga nasional dan meningkatnya prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional			
a. Jumlah event olahraga nasional [Pekan Olahraga Nasional (PON) XX dan Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) XVI Tahun 2020] ^{f)}	2	Event	N/A N/A ○
b. Jumlah cabang olahraga yang lolos kualifikasi pada <i>Olympic Games</i> 2020	3	Cabang Olahraga	5 100 ●
c. Jumlah keikutsertaan dalam multievent olahraga regional dan internasional ^{f)}	3	Event	N/A N/A ○
d. Jumlah olahragawan andalan yang dibina	1.000	Orang	741 74,10 ●
e. Jumlah penghargaan yang diperoleh olahragawan dan tenaga keolahragaan yang berprestasi			
- <i>Asean Para Games</i> ^{f)}	118/107/24	Medali emas/ perak/ perunggu	N/A N/A ○
- <i>Olympic Games</i> ^{f)}	2/1/1	Medali emas/ perak/ perunggu	N/A N/A ○
- <i>Paralympic Games</i> ^{f)}	1/3/4	Medali emas/ perak/ perunggu	N/A N/A ○

Sumber: Perhitungan data hingga Triwulan III 2020

Keterangan: ● realisasi >90% target; ● realisasi 60-90% target; ● realisasi <60% target;

○ belum dapat diberikan notifikasi

a) data tersedia di triwulan IV

b) data belum tersedia

c) tidak dilaksanakan karena adanya penghematan anggaran untuk COVID-19


d) seluruh kegiatan partisipasi dalam forum internasional bidang kebudayaan tidak jadi dilaksanakan karena pandemi COVID-19

e) terdapat perbedaan indikator dan target antara RKP dan Renja KPPPA. Indikator di Renja KPPPA adalah jumlah perempuan korban TPPO yang mendapat fasilitasi layanan dan pemberdayaan, dengan targetnya 100 Orang. Sampai pada TW3, capaian nya sudah 100%.





f) penyelenggaraan event olahraga ditunda karena pandemi COVID-19.

B.2. PRIORITAS NASIONAL 2 INFRASTRUKTUR DAN PEMERATAAN WILAYAH

Tabel B.2.1
Pencapaian Sasaran PN
PN 2. Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah,
Hingga Triwulan III Tahun 2020

Sasaran/Indikator	Target	Capaian	Kinerja (%) dan Notifikasi
PN 2. Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah			85,13 
1. Meningkatnya konektivitas antar wilayah			
a. Menurunnya waktu tempuh moda jalan pada koridor utama pulau	2,3	Jam/100 km	2,3 100 
b. Porsi rute pelayaran yang membentuk <i>loop</i>	24	Persen	24 100 
2. Meningkatnya indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)			
<i>Information and Communication Technologies (ICT) Development Index</i>	5,0-5,3	Nilai	4,33 86,60 
3. Meningkatnya ketahanan bencana terhadap daya rusak air			
Indeks bencana banjir	20	Provinsi	8 40,00 
4. Terpenuhinya perumahan dan permukiman layak, aman, dan terjangkau untuk rumah tangga			
Persentase rumah tangga yang menempati <i>perumahan</i> dan permukiman yang layak, aman, dan terjangkau	59,5	Persen	58,93 99,04 

Sumber: Perhitungan data hingga Triwulan III 2020


Keterangan:  realisasi >90% target;  realisasi 60-90% target;  realisasi <60% target;  belum dapat diberikan notifikasi

Tabel B.2.2
Pencapaian Sasaran PP
PN 2. Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah,
Hingga Triwulan III Tahun 2020

Sasaran/Indikator	Target	Capaian	Kinerja (%) dan Notifikasi
PP 1. Perluasan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar			91,56 
1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau			
a. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan kecukupan luas lantai per kapita	92,72	Persen	91,79 99,00 
b. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan ketahanan bangunan (atap, lantai, dinding)	82,88	Persen	81,46 98,29 


Sasaran/Indikator	Target		Capaian	Kinerja (%) dan Notifikasi	
c. Persentase rumah tangga yang memiliki sertifikat hak atas tanah untuk perumahan	55,46	Persen	48	86,55	
d. Proporsi rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi layak dan aman (air limbah) ^{a)}	78,1 akses air limbah layak (termasuk 9,65 akses air limbah aman)	Persen	N/A	N/A	
e. Proporsi rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik ^{a)}	61,79 penanganan dan 13,74 pengurangan (perkotaan)	Persen	N/A	N/A	
f. Proporsi rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak ^{a)}	91,83 (termasuk 23,23% akses perpipaan)	Persen	N/A	N/A	
g. Proporsi rumah tangga yang menempati hunian akses air minum aman* (perhitungan akses air minum aman melalui susenas dan PKAM dalam proses persiapan)	7,32	Persen	6,8	92,90	
h. Proporsi rumah tangga yang masih mempraktikkan buang air besar sembarangan di tempat terbuka ^{a)}	6,24	Persen	7,61 (2019)	78,04	
2. Meningkatnya tingkat keselamatan dan keamanan transportasi					
Penurunan Rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan (terhadap <i>baseline</i> 2010)	53	Persen	50,13	94,58	
PP 2. Penguatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana				68,43	
1. Meningkatnya konektivitas di daerah tertinggal					
a. Jumlah lintas perintis ASDP (Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan)	230	Lintas Perintis	264	100	
b. Jumlah rute perintis transportasi Jalan (Bus)	300	Rute Perintis	327	100	
c. Jumlah rute perintis transportasi Udara	188	Rute Perintis	188	100	

Sasaran/Indikator	Target		Capaian	Kinerja (%) dan Notifikasi	
d. Jumlah rute perintis transportasi Laut	140	Rute Perintis	113 Rute Perintis Laut 22 Tol Laut bersubsidi	96,43	
2 Meningkatnya ketangguhan masyarakat dalam mengurangi daya rusak air					
a. Panjang pengendali banjir yang dibangun	106,77	Km	61,13	57,25	
b. Panjang pengaman banjir yang dibangun	7,25	Km	4,24	58,48	
c. Jumlah pengendali lahar/sedimen yang dibangun	17	Unit	6	35,29	
3 Meningkatnya percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat					
Laju pertumbuhan ekonomi Pulau Papua	5,95	Persen	-2,98	0,00	
PP 3. Peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antarmoda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi				67,26	
1 Meningkatnya konektivitas di wilayah pusat-pusat pertumbuhan dan meningkatnya konektivitas multimoda dan antarmoda					
a. Persentase kondisi mantap jalan nasional dan daerah (provinsi, kabupaten/kota)	95/70/59	Persen (Provinsi, kabupaten /kota)	90/68/57	96,16	
b. Jumlah produksi penumpang dan angkutan barang kereta api	442; 60	Juta orang; juta ton	110,5; 31	38,36	
PP 4. Peningkatan Infrastruktur Perkotaan				100	
1 Meningkatnya layanan angkutan umum					
Jumlah layanan angkutan umum masal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan	7	Kota (kawasan Perkotaan)	7	100	
PP 5. Transformasi Digital				98,34	
1 Tersedianya layanan akses infrastruktur TIK					
Persentase kabupaten/kota yang terlayani <i>broadband</i> khususnya wilayah administrasi dan permukiman	95	Persen	91,84	96,67	

Sasaran/Indikator	Target	Capaian	Kinerja (%) dan Notifikasi
2 Terbangunnya ekosistem dan pemanfaatan TIK			
Proporsi pengguna Internet	72	Persen	73,7 100 










Sumber: Perhitungan data hingga Triwulan III 2020

Keterangan:  realisasi >90% target;  realisasi 60-90% target;  realisasi <60% target;

 belum dapat diberikan notifikasi

a) Data capaian di tahun 2020 belum dapat dihitung karena masih menunggu Susenas 2020

Tabel B.2.3
Pencapaian Sasaran KP
PN 2. Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah,
Hingga Triwulan III Tahun 2020

Sasaran/Indikator	Target	Capaian	Kinerja (%) dan Notifikasi
PP 1. Perluasan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar			
KP 1. Penyediaan Akses Perumahan serta Permukiman Layak, Aman, dan Terjangkau			59,28 
1 Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan serta permukiman yang layak, aman, dan terjangkau			
a. Jumlah hunian baru layak yang terbangun melalui peran pemerintah	2.834	Unit	0 57,64 
b. Jumlah peningkatan kualitas hunian melalui peran pemerintah	230.590	Unit	0 72,41 
c. Jumlah rumah tangga yang menerima fasilitas pembiayaan perumahan	118.700	Rumah Tangga	108.684 91,56 
d. Jumlah kabupaten/kota yang mengembangkan iklim kondusif perumahan melalui reformasi perizinan dan administrasi pertanahan	48	Kab/Kota	15 31,25 
e. Jumlah kabupaten/kota yang mengimplementasikan pemenuhan standar keandalan bangunan	48	Kab/Kota	45 93,75 
f. Jumlah Satuan Permukiman yang dibangun dan fungsional di kawasan transmigrasi prioritas	22	Satuan Permukiman	2 9,09 
KP 2. Penyediaan Akses Air Minum serta Sanitasi yang Layak dan Aman			56,36 
1 Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan air minum serta sanitasi yang layak dan aman			
a. Jumlah sambungan rumah SPALD-T skala kota dan skala kawasan berbasis institusi	221.462	Sambungan Rumah	254.046 100 

Sasaran/Indikator	Target	Capaian	Kinerja (%) dan Notifikasi
b. Jumlah rumah tangga yang terlayani SPALD-S	300.000	Kepala Keluarga	119.001 39,67 ●
c. Jumlah rumah tangga yang terlayani TPA dengan standar <i>sanitary landfill</i>	487.500	Kepala Keluarga	739.501 100 ●
d. Jumlah rumah tangga yang terlayani TPS3R	47.200	Kepala Keluarga	28.930 61,29 ●
e. Jumlah rumah tangga yang terlayani TPST	49.000	Kepala Keluarga	9.200 18,78 ●
f. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki sistem layanan lumpur tinja (FSM)	66	Kab/kota	5 7,58 ●
h. Jumlah rumah tangga dengan akses air minum perpipaan	15.285.600	Sambungan Rumah	661.857 4,33 ●
i. Jumlah rumah tangga dengan akses air minum layak non perpipaan (BJP, BPS) ^{a)}	49.809.600	Rumah Tangga	N/A N/A ○
j. Jumlah rumah tangga dengan akses air minum aman ^{a)}	5.340.000	Rumah Tangga	N/A N/A ○
k. Persentase PDAM dengan kinerja sehat	67,2	Persen	61,76 91,90 ●
l. Jumlah desa yang telah stop buang air besar sembarangan di tempat terbuka	32.733 (kumulatif sampai 2020)	Desa	27.392 83,68 ●
KP 3. Keselamatan dan Keamanan Transportasi			81,21 ●
1 Meningkatnya penyediaan fasilitas keselamatan dan keamanan transportasi			
a. Jumlah penanganan <i>blackspot</i> melalui penanganan infrastruktur jalan dan penyediaan perlengkapan fasilitas keselamatan transportasi jalan	33	Paket	33 100 ●
b. Penyediaan serta pemasangan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran/perairan	1	Unit/lokasi	1 100 ●
c. Panjang jaringan kereta api yang dirawat dan dioperasikan	6.382	Km	6.312 98,90 ●
d. Pengembangan SDM pencarian dan penyelamatan	10.000	Orang	1.850 18,50 ●
e. Penyediaan sarana dan prasarana pencarian dan penyelamatan	203	Paket	180 88,67 ●
KP 4. Penyediaan serta Pengamanan Air Baku dan Air Tanah			68,92 ●
1 Meningkatnya ketersediaan dan keberlanjutan pasokan air baku			
a. Jumlah embung air baku yang dibangun	53	Embung	32 60,73 ●
b. Jumlah kapasitas unit air baku yang dibangun	4,1	m3/detik	1,86 71,96 ●

Sasaran/Indikator	Target	Capaian	Kinerja (%) dan Notifikasi
c. Jumlah kabupaten/kota rawan air dan pulau kecil terluar yang memperoleh penyediaan air baku	172	Kab/Kota	73 70,33
d. Jumlah kapasitas air baku yang direhabilitasi	0,62	m3/detik	0,38 72,64
PP 2. Penguatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana			
KP 1. Aksesibilitas Daerah Tertinggal			73,57
1 Terselenggaranya pembangunan dan pengembangan aksesibilitas daerah tertinggal			
a. Jumlah bandara di daerah tertinggal yang ditingkatkan kapasitasnya	10	Lokasi	7 70,00
b. Jumlah kapal penyeberangan perintis yang dibangun untuk daerah tertinggal	4	Unit	5 100
c. Jumlah pelabuhan di daerah tertinggal pendukung tol laut yang dikembangkan	7	Lokasi	5 71,43
d. Jumlah pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan (SDP) di daerah tertinggal yang dibangun/dikembangkan	13	Pelabuhan	14 100
e. Jumlah terminal barang yang dibangun/dikembangkan di kawasan perbatasan	7	Lokasi	7 100
f. Panjang jalan desa strategis yang dibangun/ditingkatkan di daerah tertinggal dan kawasan perbatasan di daerah tertinggal	24	Km	0 0,00
KP 2. Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur			42,68
1 Meningkatnya keandalan infrastruktur terhadap bencana			
a. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki peta risiko bencana banjir	2	Unit	0 0,00
b. Panjang perkuatan tebing yang dibangun/ditingkatkan	10,09	Km	5,78 57,33
c. Jumlah check dam yang dibangun/ditingkatkan	10	Unit	4 42,34
d. Panjang sungai yang dinormalisasi dan tanggul yang dibangun/ditingkatkan	61,45	Km	37,56 61,12
e. Jumlah bangunan sabo yang dibangun/ditingkatkan	7	Unit	2 35,21
f. Panjang seawall dan bangunan pengamanan pantai lainnya yang dibangun/ditingkatkan	7,05	Km	4,24 60,06
g. Panjang tanggul penahan lumpur yang direhabilitasi/ditingkatkan ^{b)}	0	Km	0 N/A
KP 3. Pembangunan Terpadu Pesisir Utara Pulau Jawa			30,97

	Sasaran/Indikator	Target	Capaian	Kinerja (%) dan Notifikasi	
1	Terlindungnya kawasan perkotaan di pesisir utara Pulau Jawa dari bencana lingkungan				
	a. Panjang tanggul sungai yang dibangun/ditingkatkan	33,64	Km	16,85	50,09 ●
	b. Panjang <i>seawall</i> , <i>breakwater</i> , dan bangunan pengamanan pantai lainnya yang dibangun/ditingkatkan	0,2	Km	0,01	3,02 ●
	c. Jumlah kabupaten/kota yang membangun sistem pemantauan air tanah dan penurunan tanah	1	Kab/Kota	0	0,00 ●
	d. Kapasitas air baku dari sumber air permukaan yang dibangun	0,6	m3/detik	0,42	70,77 ●
KP 4. Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat				62,58	●
1	Terselenggaranya Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat				
	a. Jumlah kapasitas unit air baku yang dibangun	0,101	m3/detik	0,08	83,22 ●
	b. Bangunan pengendali banjir yang dibangun	1,6	Km	0,94	58,62 ●
	c. Bendung dan jaringan irigasi permukaan yang dibangun	2	Bendung	1	42,82 ●
	d. Pengeboran sumur eksporasi air tanah	18	Titik	0	0,00 ●
	e. Pembangunan <i>Base Transceiver Station</i> (BTS)	100	Unit	81	81,00 ●
	f. Penyediaan layanan akses internet	150	Unit	102	68,00 ●
	g. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) ^{c)}	88,5	Lpd	N/A	N/A ○
	h. Jumlah sambungan SPALD-T skala kota dan skala kawasan berbasis institusi ^{c)}	1.488	Sambungan Rumah (SR)	N/A	N/A ○
	i. Tambahan jumlah desa yang berhasil stop buang air besar sembarangan di tempat terbuka	425	Desa/Kelurahan	226	53,18 ●
	j. Jumlah rencana pembangunan infrastruktur permukiman ^{c)}	2	Dokumen	N/A	N/A ○
	k. Luas kawasan permukiman yang dikembangkan ^{c)}	46,42	Hektar	N/A	N/A ○
	l. Luas infrastruktur permukiman berbasis masyarakat di perkotaan yang dibangun ^{c)}	8	Hektar	N/A	N/A ○
	m. Luas bangunan gedung hijau yang dibangun dan direhabilitasi ^{c)}	38.200	m ²	N/A	N/A ○
	n. Luas bangunan kawasan pos lintas batas negara yang ditata ^{c)}	1	Kawasan	N/A	N/A ○
	o. Bangunan kawasan prioritas tertentu yang ditata ^{c)}	2	Kawasan	N/A	N/A ○

Sasaran/Indikator	Target	Capaian	Kinerja (%) dan Notifikasi
p. Fasilitas peningkatan kualitas rumah swadaya ^{c)}	8.000	Unit	N/A N/A ○
q. Pembangunan rumah khusus ^{c)}	500	Unit	N/A N/A ○
r. Jumlah bandara yang dibangun dan ditingkatkan kapasitasnya	10	Lokasi	7 70,00 ●
s. Jumlah pelabuhan yang dibangun dan dikembangkan untuk memenuhi standar pelayanan operasional	5	Lokasi	4 80,00 ●
t. Panjang jalan nasional, trans papua, dan perbatasan yang dibangun dan ditingkatkan kapasitasnya	153	Km	136,07 88,93 ●
PP 3. Peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antarmoda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi			
KP 1. Konektivitas Transportasi Jalan			55,18 ●
1 Terselenggaranya pengembangan jaringan jalan mendukung kawasan prioritas nasional			
a. Panjang jalan tol baru yang terbangun	341	Km	210,3 61,67 ●
b. Panjang jalan baru yang dibangun	500	Km	137 27,40 ●
c. Jumlah simpul transportasi yang didukung akses jalan	18	Lokasi	11 61,11 ●
d. Panjang jalan yang dipreservasi	47.017	Km	33.173 70,56 ●
KP 2. Konektivitas Transportasi Kereta Api			40,37 ●
1 Terselenggaranya pengembangan kereta api mendukung kawasan prioritas nasional			
a. Panjang jalur kereta api lintas utama yang dibangun (termasuk jalur ganda dan reaktivasi)	218	Km	24 11,01 ●
b. Panjang jalur kereta api lintas utama yang ditingkatkan	229,48	Km	160 69,72 ●
KP 3. Konektivitas Transportasi Laut			100 ●
1 Terselenggaranya pengembangan pelabuhan mendukung kawasan prioritas nasional			
a. Jumlah pelabuhan hub yang mencapai standar sesuai kriteria <i>Integrated Port Network</i> (IPN)	1	Lokasi	1 100 ●
b. Jumlah pelabuhan mencapai standar pelayanan operasional	9	Lokasi	9 100 ●
KP 4. Konektivitas Transportasi Udara			93,75 ●
1 Terselenggaranya pengembangan bandara mendukung kawasan prioritas nasional			
a. Jumlah bandara baru yang dibangun	7	Lokasi	7 100 ●

Sasaran/Indikator	Target	Capaian	Kinerja (%) dan Notifikasi
b. Jumlah bandara yang ditingkatkan kapasitasnya	40	Lokasi	35 87,50
KP 5. Konektivitas Transportasi Darat			100
1 Terselenggaranya pengembangan transportasi darat mendukung kawasan prioritas nasional			
a. Jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun/dikembangkan	6	Lokasi	9 100
b. Jumlah terminal tipe A yang dibangun	1	Lokasi	1 100
PP 4. Peningkatan Infrastruktur Perkotaan			
KP 1. Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Rel			100
1 Terselenggaranya pembangunan dan pengembangan serta pelayanan angkutan transportasi perkotaan berbasis rel			
Jumlah layanan angkutan umum masal perkotaan berbasis rel yang dibangun dan dikembangkan	4	Kota (kawasan Perkotaan)	4 100
KP 2. Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Jalan			100
1 Terselenggaranya pembangunan dan pengembangan serta pelayanan angkutan transportasi perkotaan berbasis jalan			
a. Jumlah kota dengan layanan full bus rapid transit (BRT)	7	Kota (kawasan Perkotaan)	7 100
b. Jumlah penyediaan bus untuk BRT/semi BRT/ sistem transit	100	Unit	217 100
KP 3. Infrastruktur Jalan Perkotaan			66,67
1 Terselenggaranya pembangunan dan pengembangan infrastruktur jalan perkotaan			
Jumlah fly over dan underpass yang dibangun	6	Lokasi	4 66,67
KP 4. Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman di Perkotaan			N/A
1 Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan air minum dan sanitasi yang layak dan aman di perkotaan			
a. Jumlah PDAM dengan layanan Zona Air Minum Prima (ZAMP) ^{a)}	11	Kab/kota	N/A N/A
b. Jumlah PDAM yang menerapkan Smart Grid Water Management ^{a)}	2	PDAM	N/A N/A
c. Jumlah NSPK terusun terkait air minum dan sanitasi yang terintegrasi (dokumen) ^{a)}	4	Dokumen	N/A N/A
KP 5. Penyediaan Akses Perumahan serta Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau di Perkotaan			N/A
1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan yang layak, aman, dan terjangkau di perkotaan			

Sasaran/Indikator	Target	Capaian	Kinerja (%) dan Notifikasi
Jumlah penyediaan hunian layak di perkotaan melalui fasilitasi pemerintah ^{a)}	5.219	Unit	N/A N/A ○
KP 6. Energi Berkelanjutan terutama untuk Perkotaan			18,51 ●
1 Meningkatkan penggunaan energi ramah lingkungan terutama untuk perkotaan			
a. Jumlah pemanfaatan <i>photovoltaik (PV) rooftop</i>	800	Unit	1 0,13 ●
b. Jumlah penambahan stasiun pengisian listrik umum (SPKLU)	168	Unit	62 36,90 ●
KP 7. Infrastruktur dan Ekosistem TIK Perkotaan			75,00 ●
1 Berkembangnya infrastruktur dan ekosistem TIK untuk pembangunan kota yang lebih baik			
a. <i>Roadmap</i> dan implementasi 5G dalam layanan digital	2	Dokumen	1 50,00 ●
b. Persentase penetrasi <i>fixed broadband</i>	12,42	Persen	14,02 100 ●
PP 5. Transformasi Digital			
KP 1. Penuntasan Infrastruktur TIK			83,89 ●
1 Meratanya infrastruktur TIK ke seluruh wilayah Indonesia			
a. Jumlah BTS untuk desa <i>blank spot</i>	1.606	Lokasi	1.606 100 ●
b. Beroperasinya layanan jaringan serat optik Palapa Ring	95	Kab/Kota	98,32 100 ●
c. Penyediaan kapasitas satelit untuk layanan telekomunikasi	21	Gbps	21 100 ●
d. Penyelenggaraan infrastruktur SPBE berbasis <i>cloud</i>	1	Layanan	1 100 ●
e. Jumlah infrastruktur penyiaran publik radio yang dikembangkan	15	Stasiun	5 33,33 ●
f. Jumlah infrastruktur penyiaran publik televisi yang dikembangkan	20	Unit	14 70,00 ●
KP 2. Pemanfaatan Infrastruktur TIK			23,71 ●
1 Meningkatnya pemanfaatan akses telekomunikasi dan internet di seluruh wilayah Indonesia, baik daerah komersil maupun nonkomersil			
a. Jumlah penyediaan akses internet untuk sekolah, puskesmas, kantor pemerintah, dll.	8.400	Lokasi	7.965 94,82 ●
b. Jumlah <i>start up digital</i>	10	Start up aktif	0 0,00 ●
c. Jumlah UMKM online yang menjadi pengguna aktif	1	dokumen Framework Kajian Scalling Up UMKM	0 0,00 ●
d. Jumlah lokasi Petani dan nelayan <i>Go-online</i>	2	Dokumen <i>Desk Study</i>	0 0,00 ●

Sasaran/Indikator	Target	Capaian	Kinerja (%) dan Notifikasi
	(Pertanian dan Maritim)		
KP 3. Fasilitas Pendukung Transformasi Digital			76,54 ●
1 Meningkatnya literasi TIK masyarakat			
a. Jumlah orang yang mendapatkan peningkatan literasi digital	205.000	Orang	60.693 29,61 ●
b. Persentase penyelenggaraan sertifikasi elektronik	100	Persen	100 100 ●
c. Jumlah situs/konten yang bersifat negatif yang terblokir	50.000	Situs terblokir	106.567 100 ●

Sumber: Perhitungan data hingga Triwulan III 2020

Keterangan: ● realisasi >90% target; ● realisasi 60-90% target; ● realisasi <60% target;

○ belum dapat diberikan notifikasi














a) Data belum tersedia

b) Perubahan target menjadi 0 pascarevisi DIPA 2020 dan refocusing/realokasi anggaran




c) Proses identifikasi capaian triwulan III oleh K/L masih berjalan dan masih menunggu konfirmasi lebih lanjut


B.3. PRIORITAS NASIONAL 3 NILAI TAMBAH SEKTOR RIIL, INDUSTRIALISASI, DAN KESEMPATAN KERJA

Tabel B.3.1
Pencapaian Sasaran PN
PN 3. Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja,
Hingga Triwulan III Tahun 2020

Sasaran/Indikator	Target	Capaian	Kinerja (%) dan Notifikasi
PN 3. Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja			28,90 
1. Meningkatnya nilai tambah, investasi, ekspor, komponen dalam negeri dan lapangan kerja pada sektor unggulan pertanian, kemaritiman, industri, pariwisata dan ekonomi kreatif/digital			
a. Pertumbuhan PDB Pertanian	3,7	Persen	2,15 58,11 
b. Kontribusi PDB Kemaritiman ^{a)}	6,5	Persen	N/A N/A 
c. Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan	5	Persen	-4,31 0,00 
d. Nilai Devisa Pariwisata	21	Miliar USD	2,9 13,81 
e. Nilai Tambah Ekonomi Kreatif ^{b)}	1.189-1.214	Triliun Rupiah	N/A N/A 
f. Pertumbuhan Ekspor Barang dan Jasa	3,7	Persen	-7,52 0,00 
g. Pertumbuhan Investasi (PMTB)	6	Persen	-4,51 0,00 
h. Penyediaan Lapangan Kerja	2,7-3,0	Juta Orang	-0,31 0,00 
i. Laju Pertumbuhan PDB per Tenaga Kerja	3,0-4,0	Persen	-1,79 0,00 
j. Rasio Kewirausahaan Nasional	3,64	Persen	3,21 88,19 
k. Produk dengan TKDN >25%	6.000	Produk	8.270 100 
l. Kontribusi Ekonomi Digital	3,2	Persen	N/A N/A 

Sumber: Perhitungan data hingga Triwulan III 2020

Keterangan:  realisasi >90% target;  realisasi 60-90% target;  realisasi <60% target;

 belum dapat diberikan notifikasi

a) Penghitungan PDB Maritim dilakukan oleh BPS bekerjasama dengan Kemenkomarves, namun saat ini terhambat pelaksanaannya karena adanya penyelenggaraan sensus ekonomi dan pandemi COVID-19.

b) Data belum tersedia dikarenakan perhitungan dilakukan pada akhir tahun 2020.

Tabel B.3.2
Pencapaian Sasaran PP
PN 3. Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja,
Hingga Triwulan III Tahun 2020

Sasaran/Indikator	Target	Capaian	Kinerja (%) dan Notifikasi
PP 1. Penguatan Kewirausahaan dan UMKM			91,41 ●
1 Meningkatkan kualitas tata kelola pengelolaan kewirausahaan dan UMKM			
a. Rasio Wirausaha Berbasis Peluang	10,3	Persen	9,42 91,46 ●
b. Rasio Kredit UMKM terhadap Total Kredit Perbankan	19,75	Persen	19,31 97,77 ●
c. Proporsi Nilai Penyaluran Pinjaman Perbankan kepada IKM	2,4	Persen	2,04 85,00 ●
PP 2. Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi			48,56 ●
1 Meningkatnya nilai tambah dan investasi sektor pertanian, kemaritiman, industri, pariwisata, ekonomi kreatif, dan digital			
a. Pertumbuhan PDB industri pengolahan non-migas	5,69	Persen	-4,02 0,00 ●
b. Pertumbuhan PDB pertanian, peternakan, perburuan, dan jasa pertanian	3,1	Persen	3,06 98,71 ●
c. Pertumbuhan PDB kehutanan	2,70-2,90	Persen	-1,62 0,00 ●
d. Pertumbuhan PDB perikanan	7,90-8,50	Persen	-1,03 0,00 ●
e. Kontribusi PDB industri pengolahan	19,63	Persen	19,86 100 ●
f. Kontribusi PDB pariwisata ^{a)}	4,8	Persen	N/A N/A ○
g. Destinasi Pariwisata Prioritas yang dipercepat pembangunannya	4	Destinasi	4 100 ●
h. Destinasi wisata alam berkelanjutan berbasis taman nasional ^{a)}	10	Klaster	N/A N/A ○
i. Kontribusi PDB ekonomi kreatif ^{a)}	7,6	Persen	N/A N/A ○
j. Pertumbuhan PDB sektor informasi dan telekomunikasi	7,12-7,54	Persen	9,74 100 ●
k. Target realisasi investasi PMA dan PMDN	817,2	Triliun Rupiah	209 25,58 ●
l. Nilai realisasi PMA dan PMDN sektor manufaktur	227,2	Triliun Rupiah	29 12,76 ●
m. Peringkat kemudahan berusaha di Indonesia ^{a)}	Menuju 40	BoDB	N/A N/A ○
PP 3. Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja			72,72 ●
1 Meningkatnya produktivitas dan penciptaan lapangan kerja			
a. Proporsi Pekerja Berkeahlian Menengah dan Tinggi	43	Persen	40,67 94,58 ●
b. Proporsi Angkatan Kerja	45	Persen	44,12 98,04 ●

Sasaran/Indikator	Target	Capaian	Kinerja (%) dan Notifikasi
Berpendidikan Menengah Ke Atas			
c. Jumlah Lulusan Pelatihan Vokasi	1.100.000	Orang	248.302 22,57
d. Jumlah Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bersertifikat Kompetensi	1.100.000	Orang	299.604 27,24
e. Jumlah Tenaga Kerja Industri	19,7	Juta Orang	18,5 93,91
f. Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata	13	Juta Orang	15,8 100
g. Jumlah Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif ^{a)}	19	Juta Orang	N/A N/A
PP 4. Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)			57,12
1 Meningkatnya ekspor terutama yang bernilai tambah tinggi			
a. Pertumbuhan ekspor nonmigas	4,3	Persen	-3,83 0,00
b. Pertumbuhan ekspor pertanian	10	Persen	9,7 97,00
c. Nilai ekspor produk perikanan	6,17	Miliar USD	3,76 60,94
d. Kontribusi ekspor produk industri	49,5	Persen	80,52 100
e. Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi ^{a)}	10,80 - 11,00	Persen	N/A N/A
f. Nilai ekspor ekonomi kreatif ^{a)}	21,50-22,30	Miliar USD	N/A N/A
g. Jumlah wisatawan nusantara ^{a)}	312	Juta Perjalanan	N/A N/A
h. Jumlah wisatawan mancanegara	18	Juta Orang	3,41 28,00
i. Rasio ekspor jasa terhadap PDB	2,57	Persen	1,46 56,81
PP 5. Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi			100
1 Meningkatnya ketahanan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi			
a. Kontribusi Sektor Jasa Keuangan/PDB	4,23	Persen	4,32 100
b. Skor <i>Logistic Performance Index</i> ^{a)}	3,2	Nilai	N/A N/A
c. Biaya Logistik terhadap PDB ^{b)}	21	Persen	N/A N/A
d. Peringkat <i>Travel and Tourism Competitiveness Index</i> (TTCI)	40	Peringkat	40 100

Sumber: Perhitungan data hingga Triwulan III 2020

Keterangan: realisasi >90% target; realisasi 60-90% target; realisasi <60% target;

belum dapat diberikan notifikasi

a) Data belum tersedia

b) Masih dalam finalisasi perhitungan (tahap validasi data kepada pelaku usaha)

Tabel B.3.3
Pencapaian Sasaran KP
PN 3. Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja,
Hingga Triwulan III Tahun 2020

Sasaran/Indikator	Target	Capaian	Kinerja (%) dan Notifikasi
PP 1. Penguatan Kewirausahaan dan UMKM			
KP 1. Peningkatan Kemitraan Usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar			30,28 ●
1 Meningkatkan jumlah Usaha Mikro Kecil (UMK) yang bermitra dengan usaha menengah dan usaha besar			
a. Jumlah UMK/kelompok yang ditingkatkan kapasitas usahanya	2.130	UMK/Kelompok	1.186 55,68 ●
b. Jumlah UMK/kelompok yang difasilitasi untuk bermitra	225	UMK/Kelompok	11 4,89 ●
KP 2. Peningkatan Akses Pembiayaan bagi Wirausaha			21,45 ●
1 Meningkatkan jumlah wirausaha dan UMKM yang mengakses kredit di lembaga keuangan formal			
a. Jumlah UMKM yang didampingi untuk mengakses kredit perbankan	3.000	UMKM	0 0,00 ●
b. Jumlah wirausaha dan UMKM yang mendapat bantuan permodalan	1.900	Orang	815 42,89 ●
KP 3. Peningkatan Kapasitas, Jangkauan, dan Inovasi Koperasi			51,58 ●
1 Meningkatkan kualitas kelembagaan dan kapasitas usaha koperasi			
a. Jumlah pengurus dan manajer koperasi yang ditingkatkan kapasitasnya	5.050	Orang	3.594 71,17 ●
b. Jumlah kelompok yang didampingi untuk membentuk koperasi	500	Kelompok	160 32,00 ●
KP 4. Peningkatan Penciptaan Peluang Usaha			43,88 ●
1 Meningkatkan akses terhadap informasi dan fasilitasi peluang usaha bagi wirausaha dan UMKM			
a. Jumlah wirausaha yang mendapatkan pelatihan	57.700	Orang	27.998 48,52 ●
b. Jumlah wirausaha yang ide usahanya difasilitasi melalui pendampingan atau inkubasi	17.250	Orang	1.865 10,81 ●
c. Jumlah pelaku usaha yang ditingkatkan kapasitasnya ^{a)}	12.380	UMKM	N/A N/A ○
d. Jumlah sentra IKM yang difasilitasi	65	Sentra IKM	47 72,31 ●
e. Jumlah BUM Desa Bersama yang ditingkatkan kapasitas dan sarana serta permodalannya ^{a)}	60	BUMDes Bersama	N/A N/A ○
f. Jumlah UMKM Go <i>Online</i> ^{a)}	100.000	UMKM	N/A N/A ○
PP 2. Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi			
KP 1. Peningkatan Industri Berbasis Pertanian Terintegrasi Hulu-Hilir			51,47 ●
1 Meningkatkan produksi komoditas tanaman industri			

Sasaran/Indikator	Target	Capaian	Kinerja (%) dan Notifikasi
a. Peningkatan produksi kakao	0,3	Persen	-5,68 0,00
b. Peningkatan produksi kopi	0,9	Persen	1,64 100
c. Peningkatan produksi karet	0,6	Persen	2,81 100
d. Peningkatan produksi kelapa dalam	0,4	Persen	-1,03 0,00
e. Peningkatan produksi kelapa sawit	7,1	Persen	7,1 100
f. Peningkatan produksi lada	2	Persen	1,07 53,50
g. Peningkatan produksi pala	2,7	Persen	-14,8 0,00
h. Peningkatan produksi cengkeh	2,3	Persen	2,2 95,65
2 Meningkatkan produksi komoditas hortikultura			
a. Peningkatan produksi buah-buahan	2,7	Persen	3,46 100
b. Peningkatan produksi sayuran	2,4	Persen	7,26 100
c. Peningkatan produksi florikultura	3,5	Persen	-62,61 0,00
3 Meningkatkan industri fitofarmaka dan jamu			
a. Peningkatan produksi tanaman obat	3,5	Persen	-65,52 0,00
b. Tersedianya hasil penelitian dan pengembangan terapan koordinatif jamu	5	Rekomendasi	1 20,00
KP 2. Peningkatan Industri Berbasis Kemaritiman yang Terintegrasi Hulu-Hilir			60,00
1 Meningkatkan industri berbasis kemaritiman yang terintegrasi hulu-hilir			
a. Jumlah rumusan strategi penguatan dan pembinaan industri galangan kapal	1	Rumusan Strategi	1 100
b. Jumlah pembangunan/peningkatan pelabuhan perikanan (UPT Pusat)	22	Unit	22 100
c. Jumlah prasarana pengadaan dan penyimpanan ikan, termasuk <i>cold storage</i>	8	Unit	0 0,00
d. Jumlah sarana rantai dingin dan peralatan pengolahan hasil kelautan dan perikanan	600	Unit	0 0,00
e. Industrialisasi Komoditas Utama Perikanan Laut, mencakup:			
- Pertumbuhan produksi tuna	1	Persen	N/A N/A
- Pertumbuhan produksi udang	7	Persen	N/A N/A
- Pertumbuhan produksi rumput laut	2	Persen	N/A N/A
- Pertumbuhan produksi rajungan	1	Persen	N/A N/A
f. Jumlah Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) yang dioptimalkan	13	Lokasi	13 100
KP 3. Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Industri Non-Agro yang Didukung Sistem Bisnis Terintegrasi Hulu-Hilir			76,00
1 Meningkatkan nilai tambah dan investasi di subsektor industri kimia, logam, dan otomotif			
a. Jumlah perusahaan yang direstrukturasikan	3	Rekomendasi	3 100

Sasaran/Indikator	Target	Capaian	Kinerja (%) dan Notifikasi
b. Rekomendasi kebijakan dalam rangka mendorong iklim investasi industri ^{c)}	2	Rekomendasi	2 70,00
c. Penyusunan profil investasi ^{c)}	3	Paket	3 58,00
KP 4. Peningkatan Daya Saing Destinasi dan Industri Pariwisata, Termasuk Wisata Alam, yang Didukung Penguatan Rantai Pasok			80,00
1 Meningkatkan kesiapan destinasi dan daya saing industri pariwisata			
a. Jumlah destinasi pariwisata yang difasilitasi penyusunan dokumen pengembangan pariwisata terpadu	4	Destinasi	3 75,00
b. Jumlah destinasi pariwisata, termasuk dalam bentuk KEK, yang difasilitasi pembangunan infrastruktur di luar kawasan	11	Destinasi	18 100
c. Jumlah lokasi <i>cultural heritage regeneration</i> yang difasilitasi pengembangan atraksi berbasis <i>heritage</i> /ekonomi kreatif	4	Lokasi	1 25,00
d. Jumlah diversifikasi produk perjalanan pariwisata alam dan budaya ^{a)}	15	Dokumen	N/A N/A
e. Jumlah pengembangan wisata bahari ^{a)}	8	kawasan	N/A N/A
f. <i>Geopark</i> yang difasilitasi	2	Lokasi	2 100
g. Revitalisasi destinasi pariwisata	1	Lokasi	1 100
h. Jumlah desa wisata super prioritas yang didukung pengembangannya ^{a)}	11	Desa	N/A N/A
KP 5. Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kreatif dan Digital			58,78
1 Meningkatnya nilai tambah produk kreatif dan digital			
a. Jumlah pelaku/usaha kreatif di sektor unggulan (kuliner, fashion dan kriya) dan sektor prioritas (film, aplikasi digital, dan musik) yang mengakses akses skema insentif inovasi, pengembangan usaha, komersialisasi HKI, infrastruktur, dan inkubasi	40,375	Orang/Usaha	10.630 26,33
b. Jumlah pendaftaran hak cipta dan paten produk ekonomi kreatif ^{b)}	2.500	Orang	N/A N/A
c. Jumlah kabupaten/kota kreatif yang dikembangkan	4	Kab/Kota	3 75,00
d. Jumlah klaster kreatif yang dikembangkan	8	Lokasi	6 75,00
KP 6. Perbaiki Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi			76,33
1 Meningkatnya peringkat kemudahan berusaha dan realisasi investasi PMA dan PMDN			
a. Jumlah perangkat DPMPSTP yang mengikuti diklat teknis OSS	750	Orang	661 88,13

Sasaran/Indikator	Target	Capaian	Kinerja (%) dan Notifikasi
b. Jumlah sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang terstandardisasi	10	K/L/D	7 70,00
c. Jumlah implementasi Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	34	Provinsi	34 100
d. Strategi kebijakan EoDB dan Peningkatan Daya Saing Nasional	1	Strategi Kebijakan	6 100
e. Rekomendasi kebijakan percepatan pelaksanaan berusaha ^{a)}	1	Paket Kebijakan	N/A N/A
f. Jumlah peta potensi dan peluang investasi daerah ^{a)}	15	Peta Potensi Daerah	N/A N/A
g. Jumlah pemutakhiran data potensi investasi daerah	34	Provinsi	12 35,29
h. Jumlah fasilitasi penyelesaian masalah investasi wilayah I, II, III, dan IV	133	Perusahaan	145 100
i. Jumlah pelaku hubungan industrial yang mendapat pelatihan teknik negosiasi	3.000	Orang	2.300 76,67
j. Perusahaan di Kawasan Industri yang Menerapkan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	4.300	Perusahaan	3461 80,49
k. Perusahaan yang mendapatkan Sertifikasi Kelembagaan, Keahlian, dan SMK3	3.800	Perusahaan	3.183 83,76
l. Perusahaan yang menerapkan K3, lingkungan kerja, dan <i>hygiene</i> perusahaan	3.000	Perusahaan	870 29,00
KP 7. Peningkatan Hilirisasi Sumber Daya Alam, Termasuk Melalui Pengembangan Smelter dan Kawasan Industri Terutama di Luar Jawa			71,11
1 Meningkatnya jumlah kawasan industri yang beroperasi			
a. Jumlah kawasan industri yang difasilitasi pemerintah	5	Kawasan Industri	4 80,00
b. Jumlah KEK industri yang difasilitasi pemerintah	8	KEK	9 100
c. Jumlah <i>smelter</i> yang dibangun	3	<i>Smelter</i>	1 33,33
KP 8. Pengembangan Industri Halal			63,19
1 Berkembangnya industri halal			
a. Jumlah kawasan industri halal	2	Kawasan	1 50
b. Jumlah daerah tertib ukur ^{a)}	1	Daerah Tertib Ukur	N/A N/A
c. Jumlah pengawasan kemetrolgian	8.072	Unit	61,66 76,39
d. Jumlah dokumen keluaran Indonesia - <i>Middle East and Countries Summit on Halal Industries</i> ^{d)}	3	<i>Declaration, Work Plan Network</i>	N/A N/A
PP 3. Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja			
KP 1. Peningkatan Peran dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dengan Dunia Usaha			47,34

Sasaran/Indikator	Target	Capaian	Kinerja (%) dan Notifikasi
1 Meningkatkan kualitas dan relevansi standar kompetensi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan vokasi			
a. Standar kompetensi kerja yang ditetapkan	150	SKKNI	83 55,33
b. Sekolah yang Bekerjasama dengan Industri dan Pendidikan <i>Dual System</i> ^{e)}	534	Sekolah	N/A N/A
c. Jumlah perusahaan/ industri yang menjalin kerjasama dengan lembaga pelatihan	335	Perusahaan	98 29,25
2 Terbentuknya forum kerja sama pendidikan dan pelatihan vokasi antara pemerintah, lembaga diklat dan dunia usaha			
Jumlah pusat pengembangan keahlian/ <i>Skill Development Center</i> (SDC) yang terbentuk	20	Lokasi	21 100
3 Terwujudnya pelayanan informasi pasar kerja yang berkualitas, komprehensif, mutakhir, dan mudah dijangkau masyarakat			
Jumlah tenaga kerja dan calon tenaga kerja yang mendapat pekerjaan atau membuka usaha dengan fasilitasi pusat pelayanan informasi pasar kerja	2.000.000	Orang	95.763 4,79
KP 2. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi			N/A
1 Meningkatkan tenaga kerja keluaran lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi yang mampu langsung bekerja			
Proporsi keluaran lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi yang langsung bekerja terhadap jumlah peserta/siswa ^{a)}	70	Persen	N/A N/A
KP 3. Peningkatan Sertifikasi Kompetensi			60,04
1 Meningkatkan tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi			
a. Jumlah Lembaga Sertifikasi Berlisensi	50	LSP	36 72,00
b. SDM Bidang Sertifikasi (Asesor dan Master Asesor) yang Dilatih	1.040	Orang	500 48,08
KP 4. Peningkatan Tata Kelola Pendidikan dan Pelatihan Vokasi			100
1 Meningkatkan tata kelola pendidikan dan pelatihan vokasi			
a. Terbentuknya Lembaga Pengelola Kartu Pra-Kerja	1	Lembaga	1 100
b. Jumlah penerima manfaat Program Kartu Pra-Kerja	5.600.000	Orang	5.600.000 100
PP 4. Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)			
KP 1. Peningkatan Diversifikasi, Nilai Tambah, dan Daya Saing Produk Ekspor dan Jasa			78,41
1 Meningkatkan produk ekspor dan jasa			
a. Jumlah produk baru yang diekspor	454	Produk	287 63,22

Sasaran/Indikator	Target	Capaian	Kinerja (%) dan Notifikasi
b. Jumlah <i>Mutual Recognition Agreement</i> (MRA) dengan negara tujuan ekspor untuk sektor prioritas ^{a)}	2	MOU	N/A N/A ○
c. Rasio ekspor produk hilir CPO (dari sisi volume)	75	Persen	70,2 93,60 ●
KP 2. Peningkatan Akses dan Pendalaman Pasar Ekspor			86,76 ●
1 Meningkatkan pasar tujuan ekspor			
a. Jumlah negara tujuan ekspor	219	Negara	190 86,76 ●
b. <i>Share</i> ekspor produk Indonesia di kawasan Afrika, Amerika Latin, dan Eropa Timur ^{a)}	0,8	Persen	N/A N/A ○
c. <i>Share</i> ekspor produk Indonesia di pasar tradisional ^{a)}	3	Persen	N/A N/A ○
KP 3. Peningkatan Efektivitas <i>Free Trade Agreement</i> (FTA) dan Diplomasi Ekonomi			60,00 ●
1 Mempercepat penyelesaian perundingan dan peningkatan pemanfaatan implementasi FTA			
a. Jumlah perundingan FTA yang diselesaikan	5	FTA	1 20,00 ●
b. Jumlah promosi terintegrasi	2	Kegiatan Promosi Terintegrasi	2 100 ●
c. Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan nilai perdagangan dengan Indonesia ^{a)}	90	Negara	N/A N/A ○
d. Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia ^{a)}	70	Negara	N/A N/A ○
KP 4. Peningkatan Partisipasi Dalam Jaringan Produksi Global (Investasi <i>Inbound</i> dan <i>Outbound</i>)			44,21 ●
1 Meningkatkan partisipasi dalam jaringan produksi global (investasi <i>inbound</i> dan <i>outbound</i>)			
Peluang investasi sektoral dan perwilayahan	5	Lol Investasi	1 44,21 ●
KP 5. Pengelolaan Impor			68,58 ●
1 Meningkatnya efektivitas kebijakan pengelolaan impor			
a. Pertumbuhan impor barang konsumsi	9,2	Persen	-9,36 0,00 ●
b. Rasio impor bahan baku penolong terhadap ekspor	77,60 - 78,30	Persen	65 83,80 ●
c. Rasio neraca ekspor impor perusahaan penerima fasilitas kepabeanan	3	Poin	3,69 100 ●
d. Penerbitan sertifikat TKDN baru	1.000	Sertifikat	905 90,50 ●
KP 6. Peningkatan Pengadaan Pemerintah yang Menggunakan Produk Dalam Negeri			82,53 ●
1 Meningkatnya pengadaan pemerintah yang menggunakan produk dalam negeri			

Sasaran/Indikator	Target	Capaian	Kinerja (%) dan Notifikasi
a. Jumlah produk dalam negeri yang tersedia di e-katalog	60.000	Produk	39.033 65,06
b. Pertumbuhan jumlah produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintahan	5	Persen	12,9 100
c. Jumlah kontrak katalog lokal/ sektoral	12	Katalog	4 33,33
KP 7. Peningkatan Citra dan Diversifikasi Pemasaran Pariwisata dan Produk Kreatif			45,23
1 Meningkatkan citra dan diversifikasi pemasaran pariwisata dan produk kreatif			
a. Jumlah produk kreatif yang difasilitasi promosi dalam roadshow/pameran/platform e-commerce di dalam dan luar negeri	271	Produk/Brand	100 36,90
b. Jumlah platform e-commerce produk kreatif yang berorientasi ekspor	1	Platform	1 100
c. Jumlah pameran wisata 10 DPP dan 10 Destinasi Branding	26	Pameran	3 15,00
d. Jumlah misi penjualan 10 DPP dan 10 Destinasi Branding	28	Misi Penjualan	6 29,00
e. Perjalanan Wisata Pengenalan di 10 Destinasi Branding dan 10 Destinasi Prioritas ^{a)}	1.415	Orang	N/A N/A
PP 5. Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi			
KP 1. Peningkatan Pendalaman Sektor Keuangan			97,37
1 Meningkatkan pendalaman sektor keuangan			
a. Rasio M2/PDB ^{f)}	40,4	Persen	N/A N/A
b. Jumlah ATM per 100.000 penduduk dewasa	55,84	Unit	52,9 94,73
c. Jumlah kantor bank per 100.000 penduduk dewasa	15,39	Unit	16,79 100
KP 2. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Digital dan Industry 4.0			54,29
1 Berkembangnya teknologi digital untuk meningkatkan transformasi ekonomi dan efisiensi pelayanan			
a. Jumlah pelaku kreatif yang difasilitasi infrastruktur TIK	8.500	Orang	729 8,58
b. Kampanye Global Making Indonesia 4.0 ^{g)}	1	Kegiatan	N/A N/A
c. Pilot Project Learning Factory 4.0	1	Unit	1 100
KP 3. Penguatan Sistem Logistik dan Stabilitas Harga			54,60
1 Menurunnya biaya logistik dan tercapainya stabilitas harga			
a. Koefisien variasi harga antar wilayah	13	Persen	17,76 63,38
b. Jumlah sistem distribusi dan logistik yang memanfaatkan TIK ^{h)}	1	Pusat Distribusi	N/A N/A
c. Jumlah pelaku jasa logistik yang memiliki sertifikasi profesi ^{a)}	5.000	Pelaku Jasa Logistik Tersertifikasi	N/A N/A

Sasaran/Indikator	Target	Capaian	Kinerja (%) dan Notifikasi
d. Tingkat inflasi	3,1 Persen	1,42	45,81 ●
KP 4. Peningkatan Pengembangan Industri dan Pariwisata yang Berkelanjutan			40,00 ●
1 Meningkatnya pengembangan industri dan pariwisata yang berkelanjutan			
a. Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001 ^{a)}	2.845 Perusahaan	N/A	N/A ○
b. Jumlah lokasi penerapan <i>sustainable tourism development</i> (STDev)	10 Destinasi	3	40,00 ●
KP 5. Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi Perkembangan Ekonomi, Terutama Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital			N/A ○
1 Meningkatnya kualitas dan ketersediaan data serta informasi perkembangan ekonomi, terutama pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital			
a. Data statistik ekonomi kreatif yang sesuai standar ^{f)}	2 Database	N/A	N/A ○
b. Data statistik pariwisata yang sesuai standar ^{f)}	3 Database	N/A	N/A ○
c. Data statistik <i>e-commerce</i> yang sesuai standar ^{f)}	1 Database	N/A	N/A ○
KP 6. Reformasi Fiskal			25,33 ●
1 Terlaksananya reformasi fiskal			
Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (<i>core tax administration system</i>)	1,5 Persen	0,38	25,33 ●

Sumber: Perhitungan data hingga Triwulan III 2020

Keterangan: ● realisasi >90% target; ● realisasi 60-90% target; ● realisasi <60% target;

○ belum dapat diberikan notifikasi

a) Data belum tersedia

b) Perhitungan dilakukan di akhir tahun (triwulan IV)

c) Penyusunan dilakukan serentak namun belum sampai pada produk akhirnya.

d) Target indikator tidak berlanjut, sehingga data realisasinya tidak tersedia

e) Kegiatan dihapus akibat restrukturisasi organisasi di Kemendikbud

f) Data bersifat tahunan

g) Kegiatan ditiadakan dan diubah menjadi penyusunan Dasar Hukum untuk Substansi Mi 4.0 ke dalam RPePRES KIN 2020-2024

h) Adanya *refocusing* anggaran, sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan

B.4. PRIORITAS NASIONAL 4 KETAHANAN PANGAN, AIR, ENERGI DAN LINGKUNGAN HIDUP

Tabel B.4.1
Pencapaian Sasaran PN
PN 4. Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup,
Hingga Triwulan III Tahun 2020

Sasaran/Indikator	Target	Capaian	Kinerja (%) dan Notifikasi
PN 4. Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup			89,88
1. Mencukupi kebutuhan konsumsi pangan masyarakat			
a. Pola Pangan Harapan	93,3	Nilai	86,4 92,60
b. Konsumsi Kalori	2.100	Kkal/ Kapita/ Hari	2.112,06 100
c. Konsumsi Protein	57	Gram/ Kapita/ Hari	61,98 100
d. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment/PoU</i>)	6,4	Nilai	7,66 80,31
e. Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat (<i>Food Insecurity Experience Scale/FIES</i>)	5,21	Nilai	5,42 95,97
2. Meningkatnya kualitas, kuantitas dan aksesibilitas sumber daya air untuk kebutuhan masyarakat dan perekonomian			
a. Luas tutupan hutan dengan indeks jasa ekosistem tinggi ^{a)}	65	Juta Hektare	N/A N/A
b. Kapasitas tampungan air ^{a)}	12,71	Milliar m ³	N/A N/A
c. Koefisien limpasan ^{a)}	0,4	Nilai	N/A N/A
3. Terpenuhinya kebutuhan energi nasional			
Pemenuhan Kebutuhan Energi Nasional	192	MTOE	106,38 55,41
4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup			
a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	73,00 – 74,50	Nilai	69,17 94,75
b. Luas kawasan konservasi perairan	23,8	Juta Ha	23,9 100
5. Menurunkan Indeks Resiko Bencana Indonesia			
Indeks Resiko Bencana Indonesia ^{b)}	146,3	Nilai	N/A N/A

Sumber: Perhitungan data hingga Triwulan III 2020

Keterangan: realisasi > 90% target; realisasi 60-90% target; realisasi < 60% target;

belum dapat diberikan notifikasi

a) Data tidak tersedia, capaian baru dapat diperoleh pada akhir kegiatan

b) Data tidak tersedia, pengukuran capaian akan dilaksanakan pada tahun 2021 dikarenakan keterbatasan akibat pandemi serta proses pengukuran yang meliputi seluruh kab/kota.

Tabel B.4.2
Pencapaian Sasaran PP
PN 4. Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup,
Hingga Triwulan III Tahun 2020

Sasaran/Indikator	Target		Capaian	Kinerja (%) dan Notifikasi	
PP 1. Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan				27,17	
1 Meningkatnya produksi pangan					
a. Persentase Pertumbuhan produksi padi	2,4	Persen	-2,29	0,00	
b. Persentase Pertumbuhan produksi jagung	28,2	Persen	22,99	81,52	
c. Persentase Pertumbuhan produksi daging	3,6	Persen	-26	0,00	
d. Persentase Pertumbuhan produksi ikan ^{a)}	6,20 - 6,70	Persen	N/A	N/A	
e. Persentase Pertumbuhan produksi garam ^{a)}	5,0 – 10,0	Persen	N/A	N/A	
2 Meningkatnya kualitas konsumsi pangan					
a. Persentase Pertumbuhan Konsumsi Umbi-umbian ^{a)}	5,7	Persen	N/A	N/A	
b. Persentase Pertumbuhan Konsumsi Daging ^{a)}	5,2	Persen	N/A	N/A	
c. Persentase Pertumbuhan konsumsi ikan ^{a)}	7,0 – 8,0	Persen	N/A	N/A	
d. Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan ^{a)}	70	Kasus	N/A	N/A	
PP 2. Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air				41,93	
1 Tertatanya hutan dengan indeks jasa lingkungan tinggi					
a. Luas identifikasi pemetaan kawasan hutan dengan indeks jasa lingkungan tinggi	65	Juta Hektare	0	0,00	
b. Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang dibangun	15	Unit	10	66,67	
c. Jumlah kawasan konservasi yang dimantapkan (prakondisi) status dan fungsi serta penilaian efektivitasnya	127	Unit KK	106	83,46	
d. Luas inventarisasi dan verifikasi kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi	7.663.359	Ha	112.164	1,46	
e. Luas penetapan/pemantapan kawasan hutan terutama pada kawasan konservasi	30	Unit KK	72	100	
2 Menurunnya luas lahan kritis					
Luas lahan kritis yang direhabilitasi	56	Ribu Hektare	0	0,00	
3 Terbangunnya rencana indikasi program berbasis DAS					
Jumlah Sistem Data dan Informasi DAS terintegrasi dan <i>realtime</i> ^{b)}	1	Sistem	N/A	N/A	
4 Terbangunnya waduk multiguna					
Jumlah waduk multiguna yang dibangun ^{b)}	45	Unit Waduk	N/A	N/A	
5 Terkelolanya sistem irigasi secara modern					
Jumlah Daerah Irigasi yang dikelola secara modern ^{b)}	2	Daerah Irigasi	N/A	N/A	
PP 3. Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan EBT				76,59	

Sasaran/Indikator	Target	Capaian	Kinerja (%) dan Notifikasi
1 Meningkatnya Porsi Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi Nasional			
Persentase Porsi Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi Nasional	13,4	Persen	10,9 81,34
2 Meningkatnya akses dan pasokan tenaga listrik yang merata, handal dan efisien			
Konsumsi Listrik per Kapita	1.161	kWh	1.091 93,97
3 Meningkatkan Efisiensi Energi			
Penurunan Intensitas Energi Final	0,9	SBM/ Milliar Rupiah	0,49 54,44
PP 4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			98,29
1 Meningkatnya kualitas air, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan			
a. Indeks Kualitas Air	55,1	Nilai	52,05 94,46
b. Indeks Kualitas Udara	84,1	Nilai	87,02 100
c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut	61,6	Nilai	60,79 98,69
d. Indeks Kualitas Air Laut	58,5	Nilai	62,01 100
PP 5. Penguatan Ketahanan Bencana			100
1 Terwujudnya pembangunan berketahanan bencana			
a. Indeks Ketahanan Bencana Daerah ^{c)}	0,52 Kenaikan rata-rata 5%	Nilai	0,52 Kenaikan rata-rata 5% 100
b. Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat	5	Menit	5 100

Sumber: Perhitungan data hingga Triwulan III 2020

Keterangan: realisasi > 90% target; realisasi 60-90% target; realisasi < 60% target;

belum dapat diberikan notifikasi

a) Data tidak tersedia, baru dihitung pada akhir tahun

b) Data tidak tersedia, baru dihitung pada akhir kegiatan

c) Capaian sementara/indikatif karena capaian sesungguhnya baru diukur di tahun depan

Tabel B.4.3
Pencapaian Sasaran KP
PN 4. Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup,
Hingga Triwulan III Tahun 2020

Sasaran/Indikator	Target	Capaian	Kinerja (%) dan Notifikasi
PP 1. Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan			
KP 1. Peningkatan Kualitas Konsumsi, Keamanan, Fortifikasi, dan Biofortifikasi Pangan			65,11
1 Meningkatnya kualitas konsumsi pangan			
a. Jumlah konsumsi daging ^{a)}	12,93	Kg/ Kapita/ Tahun	N/A N/A

Sasaran/Indikator	Target	Capaian	Kinerja (%) dan Notifikasi
b. Jumlah konsumsi protein asal ternak ^{a)}	10,65	Gram/ Kapita/ Hari	N/A N/A ○
c. Akses terhadap beras biofortifikasi dan fortifikasi bagi keluarga yang kurang mampu dan kurang gizi ^{a)}	10 – 20	Persen Penerima BPNT	N/A N/A ○
d. Jumlah konsumsi ikan ^{a)}	56,39	Kg/ Kapita/ Tahun	N/A N/A ○
e. Jumlah konsumsi sayur dan buah	260,2	Gram/ Kapita/ Hari	216,89 83,36 ●
f. Jumlah Produksi Beras Biofortifikasi	50.000	Ton Padi Biofortifikasi	5.986 11,97 ●
g. Keterjangkauan pangan lokal untuk anak sekolah ^{a)}	20	Persen	N/A N/A ○
2 Meningkatkan keamanan konsumsi pangan			
Rasio kasus pelanggaran perkarantinaan yang diselesaikan terhadap total kasus komoditas pertanian	41	Persen	47,37 100 ●
KP 2. Peningkatan Ketersediaan Pangan Hasil Pertanian			75,64 ●
1 Terlaksananya upaya peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian dari produksi dalam negeri			
a. Jumlah produksi padi	59,1	Juta Ton	45,86 77,60 ●
b. Jumlah produksi jagung	30,9	Juta Ton	23,98 77,61 ●
c. Jumlah produksi daging	4,1	Juta Ton	3,33 81,18 ●
d. Jumlah produksi sagu	0,49	Juta Ton	0,47 95,92 ●
e. Jumlah produksi cabai	2,5	Juta Ton	1,78 71,20 ●
f. Jumlah produksi bawang merah	1,5	Juta Ton	1,14 76,00 ●
g. Jumlah produksi umbi-umbian	23,3	Juta Ton	11,64 49,96 ●
KP 3. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perikanan dan Produk Laut			72,06 ●
1 Meningkatkan produksi perikanan dan hasil laut			
a. Jumlah produksi ikan	15,15	Juta Ton	9,44 62,33 ●
b. Jumlah produksi rumput laut	10,99	Juta Ton	7,78 70,79 ●
c. Jumlah produksi garam	1,5	Juta Ton	0,59 39,49 ●
d. Jumlah Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang dikelola oleh lembaga	11	WPP	11 100 ●
e. Jumlah kapal perikanan yang terbangun ^{b)}	0	Unit	0 N/A ○
f. Jumlah benih ikan berkualitas	215,76	Juta ekor	176,16 81,65 ●
g. Jumlah Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) yang dioptimalkan	13	Lokasi	13 100 ●
h. Luas lahan garam yang difasilitasi	150	Hektar	150 100 ●
i. Jumlah Kawasan Strategis Nasional (KSN)/Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) yang memiliki rencana zonasi pesisir dan laut	9	Kawasan	2 22,22 ●
KP 4. Peningkatan Produktivitas dan Kesejahteraan SDM Pertanian			88,78 ●

Sasaran/Indikator	Target		Capaian	Kinerja (%) dan Notifikasi	
1 Meningkatkan Produktivitas dan Kesejahteraan Sumber Daya Manusia Pertanian					
a. Nilai Tukar Petani	103	Nilai	101,26	98,31	●
b. Nilai tambah tenaga kerja pertanian	36,19	Juta Rupiah/ Tenaga Kerja/ Tahun	23,72	65,54	●
c. Persentase kelembagaan petani yang menjadi Korporasi Petani	2,4	Persen	1,92	80,06	●
d. Rasio hasil penelitian yang dimanfaatkan terhadap penelitian yang dihasilkan (akumulasi 5 tahun terakhir)	65 – 80	Persen	82,7	100	●
e. Persentase peningkatan kepesertaan asuransi pertanian	35	Persen	72,89	100	●
KP 5. Peningkatan Produktivitas dan Keberlanjutan Sumber Daya Pertanian				77,42	●
1 Terlaksananya upaya peningkatan produktivitas dan perlindungan sumber daya pertanian					
a. Rasio rehabilitasi jaringan irigasi tersier terhadap total irigasi tersier yang dibutuhkan	33	Persen	22	66,67	●
b. Rasio ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) berdasarkan kebutuhan (pra dan pasca panen)	50	Persen	41,71	83,42	●
c. Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	50	Persen	59	100	●
d. Peningkatan indeks pertanaman padi	1,8	Nilai	1,27	70,76	●
e. Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas	16 VUB (tanaman) dan 7 galur (ternak)	Varietas Unggul Baru Galur	17	73,91	●
f. Sumber daya genetika tanaman dan hewan sumber pangan yang terlindungi/tersedia	3.884	Aksesi	2.709	69,75	●
KP 6. Tata Kelola Sistem Pangan Nasional				65,91	●
1 Sistem pangan terkelola dengan baik					
a. <i>Global Food Security Index</i>	56,9	Nilai	62,6	100	●
b. Persentase peningkatan jumlah cadangan beras	10	Persen	-27,9	0,00	●
c. Jumlah publikasi statistik pertanian yang disempurnakan	22	Publikasi/ Laporan Statistik	14	63,64	●
d. Tingkat inflasi bahan makanan	1,4	Persen	0,66	100	●
e. Tingkat pemborosan pangan ^{a)}	8	Persen	N/A	N/A	○
f. Tingkat susut produksi pangan ^{a)}	7	Persen	N/A	N/A	○
PP 2. Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air					
KP 1. Penataan Kawasan Hutan				0,00	●

Sasaran/Indikator	Target	Capaian	Kinerja (%) dan Notifikasi
1 Tercapainya penataan kawasan hutan sesuai daya dukung daya tampung			
a. Luas kawasan hutan dengan indeks jasa lingkungan tinggi	65	Juta Hektare	0 0,00 ●
b. Luas kawasan dan sumber air yang terinventarisasi dan verifikasi keanekaragaman hayati tinggi	745	Resort	0 0,00 ●
KP 2. Pemeliharaan, Pemulihan, dan Konservasi Sumber Daya Air dan Ekosistemnya			40,68 ●
1 Tercapainya pemeliharaan dan pemulihan sumber air dan ekosistemnya			
a. Jumlah unit konservasi tanah dan air (KTA) secara sipil teknis yang dibangun	3.000	Unit	1.036 34,53 ●
b. Luas tutupan hutan dan lahan melalui konservasi tanah dan air (KTA) secara vegetatif yang meningkat	56.000	Hektare	0 0,00 ●
2 Terwujudnya keberlanjutan fungsi wilayah sungai dan kawasan konservasi air			
Jumlah danau prioritas yang direvitalisasi	8	Danau	7 87,50 ●
KP 3. Optimalisasi Pemanfaatan Waduk Multiguna			48,55 ●
1 Pembangunan bendungan dan bangunan penampung air lainnya			
a. Jumlah bendungan dalam tahap pelaksanaan (on going)	45	Bendungan	45 100 ●
b. Jumlah embung dan bangunan penampung air lainnya yang dibangun	70	Embung	42,42 60,60 ●
2 Pembangunan bendungan dan bangunan penampung air lainnya			
a. Jumlah bendungan eksisting yang mengalami penambahan/pemanfaatan fungsi air baku	4	Unit	0 0,00 ●
b. Jumlah bendungan eksisting yang mengalami penambahan/pemanfaatan fungsi listrik	1	Unit	0 0,00 ●
3 Pelaksanaan peningkatan keamanan bendungan			
Jumlah bendungan yang dikelola dan ditingkatkan keamanan	43	Bendungan	13,2 30,70 ●
4 Pelaksanaan bendungan yang direhabilitasi			
Jumlah bendungan yang direhabilitasi	2	Bendungan	2 100 ●
KP 4. Pengelolaan Air Terpadu Berbasis Pemanfaatan Teknologi (Smart Water Management)			1,47 ●
1 Peningkatan efisiensi pengelolaan air menggunakan teknologi			
a. Jumlah unit sistem informasi terpadu data hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi	34	Unit	1 (di Ngawi, Jawa Timur) 2,94 ●
b. Jumlah unit teknologi <i>smart water management</i>	2	Unit	0 0,00 ●
KP 5. Modernisasi Pengelolaan Air Irigasi			51,45 ●
1 Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan			

Sasaran/Indikator	Target		Capaian	Kinerja (%) dan Notifikasi	
a. Luas jaringan irigasi permukaan yang dibangun	15.000	Ha	4.767,41	31,78	●
b. Jumlah bendung irigasi kewenangan pusat yang dibangun	5	Unit	3	60,00	●
c. Luas jaringan irigasi permukaan yang direhabilitasi atau ditingkatkan	80.000	Ha	20.388,16	25,49	●
2 Peningkatan kehandalan serta Pengembangan modernisasi sistem irigasi					
a. Jumlah Daerah Irigasi dengan penerapan standar pengukuran dan pencatatan debit ^{c)}	7	Daerah Irigasi	N/A	N/A	○
b. Jumlah Daerah Irigasi kelembagaan irigasi modern ^{c)}	7	Daerah Irigasi	N/A	N/A	○
c. Luas jaringan irigasi premium yang dibangun	1.000	Ha	399,86	39,99	●
d. Luas jaringan irigasi komoditas non padi yang dibangun	500	Ha	682,36	100	●
KP 6. Citarum Harum				47,78	●
1 Sistem Pemantauan Kualitas Air Citarum					
a. Jumlah stasiun pemantauan kualitas air secara otomatis	18	Unit	0	85,00	●
b. Jumlah pusat pemantauan kualitas air ^{c)}	1	DAS	N/A	40,00	●
2 Pengelolaan kualitas air klasifikasi minimal kelas IV					
a. Jumlah IPAL USK yang terbangun ^{c)}	4	Unit	N/A	N/A	○
b. Jumlah KK yang dilayani SPALDT skala permukiman, kota, dan regional	64.181	KK	4.500	7,01	●
c. Jumlah KK yang terlayani tangki septik ^{c)}	133.519	KK	N/A	N/A	○
d. Jumlah biogas limbah ternak yang terbangun	100	Unit	46	46,00	●
e. Jumlah rumah kompos limbah ternak yang terbangun	12	Titik	8	66,67	●
3 Kapasitas pengelolaan sampah: 30% kenaikan cakupan pelayanan					
a. Jumlah unit TPST yang terbangun ^{c)}	1	Unit	N/A	N/A	○
b. Jumlah TPS3R yang terbangun	4	Unit	46	100	●
c. Jumlah TPST Penanganan Sampah Sungai yang terbangun ^{c)}	1	Unit	N/A	N/A	○
d. Jumlah unit TPST POO, TPST PDU yang terbangun ^{c)}	25	Unit	N/A	N/A	○
e. Jumlah unit rumah kompos sampah yang terbangun ^{c)}	10	Unit	N/A	N/A	○
4 Penertiban KJA 65% dan pengurangan lahan yang berstatus sangat kritis					
a. Jumlah petak KJA yang ditertibkan ^{c)}	24.393	Petak	N/A	N/A	○
b. Luas penghijauan pada lahan kritis seluas (7,5%)	10.825	Hektare	576,65	5,33	●
5 Pengurangan skor genangan: 15%					
a. Panjang sungai yang dinormalisasi dan tanggul yang dibangun/ditingkatkan	20,66	Km	0	0,00	●
b. Panjang kanal banjir yang dibangun	1	Km	1	100	●
c. Panjang sungai yang direstorasi dan dipelihara	95	Km	71,81	75,59	●

Sasaran/Indikator	Target		Capaian	Kinerja (%) dan Notifikasi	
d. Jumlah <i>Check Dam</i> yang dibangun	2	Unit	0	0,00	●
PP 3. Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan EBT					
KP 1. Akselerasi Pembangunan Energi Terbarukan				93,71	●
1 Meningkatkan pembangunan pembangkit ET					
a. Pembangunan PLT Panas Bumi	2.273	MW	2.131	93,75	●
b. Pembangunan PLT Bioenergi	1.922,5	MW	1.896,7	98,66	●
c. Pembangunan PLT ET Lainnya ^{a)}	6.949,7	MW	N/A	N/A	○
2 Meningkatnya penyediaan bahan baku dan produksi BBN					
a. Jumlah produksi biofuel	9	Juta KL	7,5	83,33	●
b. Persentase Pemanfaatan BBN pada BBM	30	Persen	29,73	99,10	●
KP 2. Peningkatan Pasokan dan Akses Listrik				82,57	●
1 Memperluas penyediaan infrastruktur dan pemanfaatan tenaga listrik yang efisien					
a. Rasio elektrifikasi	99,9	Persen	99,15	99,25	●
b. Jumlah penjualan tenaga listrik	265,21	TWh	181,64	68,49	●
c. Persentase susut jaringan	9,2	Persen	8,83	100	●
d. <i>Domestic Market Obligation</i> (DMO) batubara	155	Juta Ton	96,91	62,52	●
KP 3. Peningkatan Produksi dan Akses Minyak dan Gas				60,00	●
1 Meningkatnya produksi migas					
a. Jumlah produksi minyak bumi	707,3	Ribu SBM/Hari	710	100	●
b. Jumlah produksi gas bumi	1.129,4	Ribu SBM/Hari	1.190	100	●
c. Jumlah WK migas yang ditawarkan	12	Wilayah Kerja (WK)	0	0,00	●
2 Meningkatnya akses infrastruktur migas					
a. Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga (tambahan)	127.864	Sambungan Rumah Tangga (SR)	0	0,00	●
b. Panjang jaringan pipa transmisi dan distribusi gas bumi (kumulatif)	15.300	Km	15.374	100	●
KP 4. Peningkatan Implementasi Efisiensi Energi				66,67	●
1 Meningkatnya implementasi efisiensi energi					
Jumlah Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM) dan label hemat energi pada peralatan pemanfaatan energi	3	Peralatan	2	66,67	●
KP 5. Pengembangan Industri Pendukung EBT				79,96	●
1 Meningkatnya kandungan komponen dalam negeri yang digunakan untuk infrastruktur EBT					
a. TKDN PLT Panas Bumi	30	Persen	55,56	100	●
b. TKDN PLTS	40	Persen	15,95	39,88	●
c. TKDN PLT Hidro (Sampai dengan 10 MW)	70	Persen	70	100	●
PP 4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup					
KP 1. Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup				99,72	●

Sasaran/Indikator	Target	Capaian	Kinerja (%) dan Notifikasi
1 Menurunnya potensi kejadian pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup			
a. Persentase penurunan luas hutan/lahan yang terbakar	2	Persen	92,08 100
b. Akurasi informasi meteorologi	76	Persen	87,6 100
c. Akurasi informasi klimatologi	75	Persen	75,8 100
d. Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang terpantau memenuhi baku utama lingkungan hidup	1.668	Unit Usaha/Kegiatan	1.645 98,62
e. Jumlah stasiun pemantauan kualitas air dan udara secara kontinyu untuk <i>early warning system</i> pencemaran dan kerusakan lingkungan	24	Unit	24 100
KP 2. Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup			58,09
1 Meningkatnya respons cepat dalam mengurangi intensitas pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup			
a. Jumlah sampah yang terkelola secara nasional	64,8	Juta Ton	42,12 65,00
b. Jumlah limbah B3 terkelola	30,3	Juta Ton	15,50 51,17
KP 3. Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup			87,57
1 Meningkatnya upaya pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup			
a. Luas ekosistem gambut terdegradasi yang dipulihkan dan difasilitasi restorasi gambut	122.200	Ha	74.473 60,94
b. Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang terehabilitasi	13	Lokasi	10 76,92
c. Jumlah spesies TSL terancam punah yang ditingkatkan populasinya	25	Jenis	25 100
d. Jumlah lahan terkontaminasi limbah B3 yang dipulihkan	182.500	Ton	233.000 100
e. Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direstorasi dalam rangka penanggulangan pencemaran	2	Kawasan	2 100
KP 4. Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup			99,35
1 Meningkatnya efektivitas sistem kelembagaan dan penegakan hukum pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup			
a. Persentase pemegang izin yang taat terhadap peraturan terkait bidang lingkungan hidup dan kehutanan	30	Persen	30,46 100
b. Jumlah kasus pidana dan perdata lingkungan hidup dan kehutanan yang ditangani	153	Kasus	150 98,04
c. Jumlah luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman	1,02	Juta Hektare	1,44 100

Sasaran/Indikator	Target	Capaian	Kinerja (%) dan Notifikasi		
PP 5. Penguatan Ketahanan Bencana					
KP 1. Penguatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana			100 ●		
1 Meningkatnya kesiapsiagaan bencana					
Indeks Kesiapsiagaan Daerah ^{d)}	10	Persen	10	100	●
KP 2. Penguatan Peringatan Dini Bencana			87,22 ●		
1 Terwujudnya sistem peringatan dini bencana terpadu					
a. Jumlah Sistem Peringatan Dini Terpadu	1	Sistem	1	100	●
b. Persentase kelengkapan sistem peringatan dini bencana hidrometeorologis dan tektonis	90	Persen	67	74,44	●
KP 3. Peningkatan Manajemen Kedaruratan			100 ●		
1 Meningkatnya kecepatan respon penanganan darurat bencana					
Persentase waktu respon kejadian bencana kurang dari 24 jam	100	Persen	100	100	●
KP 4. Percepatan Pemulihan Pascabencana			100 ●		
1 Terwujudnya percepatan pemulihan pascabencana menjadi lebih baik, lebih aman dan sesuai dengan pembangunan berkelanjutan					
Indeks Pemulihan Pascabencana ^{d)}	5	Persen	5	100	●

Sumber: Perhitungan data hingga Triwulan III 2020

Keterangan: ● realisasi >90% target; ● realisasi 60-90% target; ● realisasi <60% target;

○ belum dapat diberikan notifikasi

a) Data dihitung pada akhir tahun

b) usulan penyesuaian target menjadi nol karena pemotongan APBN dampak COVID-19 (Perpres 54/2020 dan Surat Menkeu S-302/2020) capaian sementara/indikatif karena capaian sesungguhnya baru diukur di tahun depan

c) Data belum tersedia

d) capaian sementara/indikatif karena capaian sesungguhnya baru diukur di tahun depan

B.5. PRIORITAS NASIONAL 5 STABILITAS PERTAHANAN DAN KEAMANAN

Tabel B.5.1
Pencapaian Sasaran PN
PN 5. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan,
Hingga Triwulan III Tahun 2020

Sasaran/Indikator	Target	Capaian	Kinerja (%) dan Notifikasi
PN 5 Stabilitas Pertahanan dan Keamanan			96,52
1. Terjaganya keutuhan wilayah dan rasa aman di masyarakat			
a. Indeks Kekuatan Militer	0,25	Nilai	0,25 100
b. <i>Crime Rate</i> ^{a)}	129	Orang/ 100.000 penduduk	N/A N/A
2. Meningkatnya pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI di luar negeri			
Indeks pelayanan dan perlindungan WNI/BHI	86	Nilai	81 94,19
3. Terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap			
Indeks Pembangunan Hukum	0,65	Nilai	0,62 95,38

Sumber: Perhitungan data hingga Triwulan III 2020

Keterangan: realisasi >90% target; realisasi 60-90% target; realisasi <60% target;

belum dapat diberikan notifikasi

^{a)} Data belum tersedia, akan tersedia pada triwulan IV

Tabel B.5.2
Pencapaian Sasaran PP
PN 5. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan,
Hingga Triwulan III Tahun 2020

Sasaran/Indikator	Target	Capaian	Kinerja (%) dan Notifikasi
PP 1. Penguatan Kemampuan Pertahanan			N/A
1 Terpenuhinya kekuatan pokok minimum			
Persentase Pemenuhan <i>Minimum Essential Force</i> (MEF) ^{a)}	72	Persen	N/A N/A
2 Meningkatnya kontribusi industri pertahanan terhadap pemenuhan alutsista pertahanan			
Persentase Kontribusi Industri Pertahanan ^{a)}	≥50	Persen	N/A N/A
PP 2. Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan Internasional			88,79
1 Meningkatnya peran serta terjaganya kedaulatan wilayah Indonesia			
a. Jumlah forum yang dipimpin oleh Indonesia pada tingkat regional dan multilateral	8	Forum	20 100

Sasaran/Indikator	Target	Capaian	Kinerja (%) dan Notifikasi
b. Indeks Kemajuan Perundingan Perbatasan Maritim ^{a)}	45,03	Nilai	N/A N/A ○
2 Meningkatnya pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI di luar negeri			
a. Persentase Penyelesaian Kasus WNI dan BHI di Luar Negeri	34,4	Persen	31,18 90,64 ●
b. Persentase Pemanfaatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan dan Perlindungan Terpadu bagi WNI di Luar Negeri	12,9	Persen	6,88 53,33 ●
c. Persentase Penguatan Sistem Kelembagaan Pelayanan dan Perlindungan WNI dan BHI di Luar Negeri	21,5	Persen	22,93 100 ●
d. Persentase Diplomasi Perlindungan WNI dan BHI di Luar Negeri	17,2	Persen	20 100 ●
3 Menguatnya pelaksanaan kerjasama pembangunan internasional			
Jumlah Program/Kegiatan Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular ^{b)}	68	Program/Kegiatan	N/A N/A ○
PP 3. Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi			95,69 ●
1 Terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap			
a. Indeks Pembangunan Hukum	0,65	Nilai	0,62 95,38 ●
b. Indeks Perilaku Anti Korupsi	4	Nilai	3,84 96,00 ●
PP 4. Penanggulangan Terorisme, Peningkatan Keamanan Siber, dan Penguatan Keamanan Laut			N/A ○
1 Meningkatnya penanggulangan aksi terorisme dan keamanan serta ketertiban masyarakat			
Skor <i>Global Terrorism Index</i> ^{a)}	4,44	Nilai	N/A N/A ○
2 Meningkatnya ketahanan dan keamanan siber			
Skor <i>Global Cybersecurity Index</i> Indonesia ^{a)}	0,79	Nilai	N/A N/A ○
3 Meningkatnya keamanan laut			
a. Jumlah penyelesaian kasus tindak pidana di wilayah perairan ^{a)}	108	Kasus	N/A N/A ○
b. <i>Relay time</i> informasi ^{a)}	300	Menit	N/A N/A ○
PP 5. Penanggulangan Narkotika dan Penguatan Kamtibmas			50,00 ●
1 Menurunnya penyalahgunaan narkotika			
Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika	1,77	Persen	TBD 0,00 ●
2 Menurunnya tingkat kejahatan			
<i>Clearance rate</i>	62,99	Persen	75 100 ●

Sumber: Perhitungan data hingga Triwulan III 2020



















Keterangan: ● realisasi >90% target; ● realisasi 60-90% target; ● realisasi <60% target;

○ belum dapat diberikan notifikasi

a) Data belum tersedia pada triwulan III, akan tersedia pada triwulan IV

b) Data bersifat tahunan

Tabel B.5.3
Pencapaian Sasaran KP
PN 5. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan,
Hingga Triwulan III Tahun 2020

Sasaran/Indikator	Target		Capaian	Kinerja (%) dan Notifikasi	
PP 1. Penguatan Kemampuan Pertahanan					
KP 1. Peningkatan Kekuatan Pertahanan				100	
1 Meningkatnya kuantitas dan kualitas alutsista					
a. Jenis Alutsista yang diadakan	12	Jenis	12	100	
b. Jenis Alutsista yang dipelihara dan dirawat	7	Jenis	7	100	
c. Jenis sarana-prasarana pertahanan yang dibangun	13	Jenis	13	100	
KP 2. Penguatan Kemandirian Pertahanan				100	
1 Meningkatnya kemandirian industri pertahanan					
a. Jumlah teknologi pertahanan industri pertahanan yang diteliti dan dikembangkan	1	Paket	1	100	
b. Jumlah Alutsista industri pertahanan yang diproduksi	1	Paket	1	100	
KP 3. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pertahanan dan Keamanan di Perbatasan dan Pulau Terluar				54,17	
1 Meningkatnya pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan dan pulau terluar					
a. Panjang Jalur Inspeksi Patroli Perbatasan (JIPP) yang dibangun ^{a)}	200	Km	0	N/A	
b. Jumlah pos pengamanan perbatasan (Pamtas) yang dibangun	12	Bangunan	9	75,00	
c. Jumlah Pos TNI AL (Posal) yang dibangun	15	Bangunan	5	33,33	
d. Jumlah Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang dibangun ^{b)}	11	Bangunan	N/A	N/A	
e. Panjang pilar batas wilayah negara yang difasilitasi ^{b)}	50	Km	N/A	N/A	
f. Jumlah Pilar Titik Referensi Batas Negara Wilayah Laut dan Udara yang diidentifikasi/diinventarisasi ^{b)}	20	Pilar	N/A	N/A	
g. Jumlah aparat pemerintah di kawasan perbatasan yang dilatih ^{b)}	300	Orang	N/A	N/A	
h. Jumlah masyarakat desa terdepan perbatasan negara sebagai bagian sistem hankam yang difasilitasi pemberdayaan ^{b)}	180	Orang	N/A	N/A	
PP 2. Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan Internasional					
KP 1. Penguatan Diplomasi Politik-Keamanan dan Perbatasan				78,86	
1 Meningkatnya peran serta terjaganya kedaulatan wilayah Indonesia					
a. Jumlah Dokumen Hasil Perundingan Batas Laut INA dengan Prioritas PLW, VNM, dan MLY, Pelaksanaan Konsultasi dalam rangka Persiapan Proses Realignment FIR dengan SIN dan MLY, Verifikasi Updating Batas Maritim RI dgn Negara Tetangga dalam rangka mendukung kebijakan 1 peta	1	Dokumen	1	100	

Sasaran/Indikator	Target	Capaian	Kinerja (%) dan Notifikasi
b. Jumlah tanda batas negara	50	Pilar	0 0,00
c. Jumlah peta batas negara	16	NLP	9 56,25
d. Jumlah Kesepakatan Teknis Perundingan Batas Laut	4	Kesepakatan Teknis	3 75
e. Jumlah Kesepakatan Teknis Perundingan Batas Darat	2	Kesepakatan Teknis	2 100
f. Jumlah Kesepakatan Perundingan Batas dan Kerjasama Wilayah Negara	1	Kesepakatan	1 100
g. Peringkat jumlah pasukan perdamaian (PKO) yang dikirim Pemerintah Indonesia	10 Besar	Peringkat	10 Besar (Peringkat 8) 100
h. Indeks Kepemimpinan dan pengaruh Indonesia dalam Forum Multilateral	95	Nilai	94,65 99,63
KP 2. Penguatan Perlindungan WNI di luar negeri			80,29
1 Meningkatnya pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI di luar negeri			
a. Persentase Kasus Khusus yang diselesaikan	55,9	Persen	57,17 100
b. Persentase Kasus Umum yang diselesaikan	30,1	Persen	22,52 74,82
c. Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi Pelayanan dan Perlindungan Terpadu bagi WNI di Luar Negeri	30,1	Persen	6,79 22,56
d. Persentase Tingkat Pengembangan Sistem Informasi	34,4	Persen	13,13 38,17
e. Persentase tingkat kepuasan pengguna (WNI dan Perwakilan RI) terhadap Portal Peduli WNI dan <i>Safe Travel</i>	17,2	Persen	16,85 97,97
f. Persentase SDM K/L/I/Perwakilan RI yang mendapatkan Sertifikat Pelatihan Peningkatan Kapasitas Terkait Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan dan Perlindungan WNI dan BHI di Luar Negeri	4,3	Persen	8,2 100
g. Persentase Kerja Sama di Bidang Pelayanan dan Perlindungan WNI dan BHI di Luar Negeri yang Ditandatangani	21,5	Persen	17,5 81,40
h. Persentase Standar / Panduan Teknis di Bidang Pelayanan dan Perlindungan WNI dan BHI di Luar Negeri yang Diterapkan	17,2	Persen	30 100
i. Persentase Produk Hukum Bidang Pelayanan dan Perlindungan WNI dan BHI di Luar Negeri yang Disahkan	21,5	Persen	27,5 100
j. Persentase SDM K/L/I/Perwakilan RI yang Mendapatkan Sertifikat Pelatihan Peningkatan Kapasitas Bidang Pelayanan dan Perlindungan WNI dan BHI di Luar Negeri	17,2	Persen	16,72 97,21
k. Persentase Kertas Kerja Analisis Pelayanan dan Perlindungan WNI dan BHI di Luar Negeri yang Dihasilkan	8,6	Persen	0 0,00
l. Persentase Rekomendasi Kemenlu pada Isu Pelayanan dan Perlindungan WNI dan BHI di Luar Negeri yang Diterima pada Forum Perundingan Internasional	30,1	Persen	35 100

Sasaran/Indikator	Target	Capaian	Kinerja (%) dan Notifikasi
m. Persentase Rekomendasi Kemenlu yang Diterima dalam Kebijakan/Regulasi Nasional terkait Pelayanan dan Perlindungan WNI dan BHI di Luar Negeri	30,1	Persen	35 100
n. Persentase Responden yang Memberikan Umpan Balik Positif atas <i>Public Awareness Campaign</i> (PAC) Pelayanan dan Perlindungan WNI dan BHI di Luar Negeri	25,8	Persen	30 100
o. Jumlah atase yang memberikan perlindungan pekerja migran	13	Atase	12 92,31
KP 3. Penguatan Kerjasama Pembangunan Internasional			100
1 Menguatnya pelaksanaan kerjasama pembangunan internasional			
a. Jumlah layanan Kerjasama Internasional	1	Layanan	1 100
b. Jumlah Bahan Kebijakan Koordinasi Hukum dan Perjanjian Maritim yang Diselesaikan ^{o)}	10	Dokumen	N/A N/A
c. <i>Knowledge sharing</i> Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular Bidang Infrastruktur	1	Laporan	1 100
PP 3. Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi			
KP 1. Penataan Regulasi			67,50
1 Terwujudnya regulasi yang berkualitas			
a. Jumlah SOP mengenai tindak lanjut hasil rekomendasi analisis dan evaluasi hukum	1	Dokumen	0,85 85,00
b. Jumlah Pedoman Konsultasi Publik	1	Dokumen	0,6 60,00
c. Jumlah Aplikasi Penjaringan Partisipasi Publik Berbasis Teknologi Informasi	1	Paket	1 100
d. Jumlah Anotasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan MK	12	Undang-Undang	12 100
e. Jumlah Monitoring dan Evaluasi Putusan MK	1	Rekomendasi	0 0,00
f. Jumlah Harmonisasi Kebijakan dan/atau Peraturan Perundang-undangan untuk Perlindungan dan Pemajuan Hak Korban dengan Perspektif Korban	10	Rekomendasi	7 70
g. KUHP yang diundangkan	1	Dokumen	0,75 75,00
h. Pembahasan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata di DPR	1	Dokumen	0,5 50,00
i. Penyusunan Rancangan Undang-Undang Jaminan Benda Bergerak di Tingkat PAK	1	Dokumen	0,5 50,00
j. Kebijakan pendukung penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Badan Usaha	1	Dokumen	0,75 75,00
k. Penyusunan Rancangan Undang-Undang Kepailitan di tingkat PAK	1	Dokumen	0,7 70,00
l. Naskah Akademik RUU Badan Usaha	1	Dokumen	0,75 75,00
KP 2. Perbaikan Peradilan Perdata untuk Kemudahan Berusaha			100
1 Terwujudnya peradilan perdata yang mendukung kemudahan berusaha			
a. Jumlah Kajian Evaluasi dan Urgensi Penguatan Kelembagaan Jurusita	1	Laporan	1 100
b. Jumlah Pengembangan Implementasi <i>e-court e-litigasi</i>	1	Sistem	1 100

Sasaran/Indikator	Target	Capaian	Kinerja (%) dan Notifikasi
KP 3. Perbaikan Peradilan Pidana dengan Pendekatan Keadilan Restoratif			63,17 
1 Meningkatnya penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif			
a. Jumlah Petunjuk Teknis Penanganan Perkara dengan Pendekatan Keadilan Restoratif	1	Juknis	1 100 
b. Bimtek Penuntut Umum sebagai Fasilitator dalam Penanganan Perkara dengan Pendekatan Keadilan Restoratif	1	Laporan	0 0,00 
c. Jumlah Peserta Diklat berbasis Kompetensi di Bidang Pembimbing Kemasyarakatan	320	Orang	120 37,50 
d. Jumlah peraturan mengenai pedoman penyelesaian perkara berbasis keadilan restoratif	1	Pedoman	1 100 
e. Jumlah Penanganan pelanggaran HAM yang berat melalui upaya pemenuhan hak-hak korban	387	Surat Keterangan	88 30,66 
f. Jumlah Standar norma dan setting HAM	2	Standar	1,24 62,00 
g. Jumlah Satker Pengembangan dan pemeliharaan CMS SPPT-TI	33	Satker	25 75,00 
h. Jumlah Satker Bimbingan Teknis dan Operasional CMS dan SPPT TI	70	Satker	28 40,00 
i. Jumlah Sistem Monitoring dan <i>Dashboard</i> Perkara CMS dan SPPT TI	1	Sistem	0 0,00 
j. Jumlah Wilayah yang melaksanakan Bimtek untuk Tenaga Pendukung SPPT TI	33	Wilayah	12 36,36 
k. Jumlah Wilayah yang melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Implementasi SPPT-TI	33	Wilayah	3 9,09 
l. Jumlah Satker Peningkatan Fungsi SPPT TI di Peradilan Umum	115	Satker	61 53,04 
m. Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi	4	Desain	4 100 
n. Rekomendasi Kebijakan di Bidang Penegakan Hukum	6	Rekomendasi	3 50,00 
o. Jumlah Karakterisasi putusan berbasis teknologi informasi	10	Putusan	3 33,00 
p. Jumlah Layanan Pos Bantuan Hukum	111.584	Jam Layanan	96.612 86,50 
q. Jumlah Perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung pengadilan	3.787	Perkara	3.687 97,30 
r. Jumlah Perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	81	Perkara	77 95,06 
s. Jumlah Perkara di lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	11.653	Perkara	11.600 99,00 
t. Jumlah Perkara di lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang di luar Gedung	24.850	Perkara	23.473 89,50
u. Jumlah Layanan Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Agama	128.022	Jam Pelayanan	91.307 71,32
v. Jumlah Perkara di lingkungan peradilan Agama yang diselesaikan melalui Sidang Terpadu	2.584	Perkara	4.020,24 100

Sasaran/Indikator	Target	Capaian	Kinerja (%) dan Notifikasi
w. Jumlah Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	44 Perkara	9	20,40
x. Jumlah Pelayanan Pos Bantuan Hukum	8.640 Jam Layanan	3.708	58,00
y. Jumlah Rekomendasi untuk Pelaksanaan Dukungan Pengakuan, Penghargaan, dan Perlindungan yang Mendukung Kerja-kerja Perempuan Pembela HAM	1 Rekomendasi	0,6	60,00
z. Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Hukum Litigasi	5.699 Orang	6.628	100
aa. Jumlah Kegiatan Bantuan Hukum non Litigasi	758 Kegiatan	1.430	100
ab. Jumlah Pemberdayaan Masyarakat untuk Pelaksanaan Keadilan Restoratif	35 Kelompok Masyarakat	23	65,00
KP 4. Penguatan Upaya Anti Korupsi			46,55
1 Berkurangnya praktik koruptif			
a. Jumlah Wilayah Zona Integritas (ZI) dan WBK dan WBBM	30 Satker	0	0,00
b. Jumlah Laporan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	1 Laporan	1	100
c. Jumlah Pengembangan ZI Wilayah I-IV	171 LHP	560	100
d. Jumlah pembangunan Zona Integritas	1 Laporan	1	100
e. Jumlah Satker yang Didampingi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	31 Satker	33	100
f. Jumlah Sosialisasi Revisi Pedoman Tuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi	31 Satker	0	0,00
g. Jumlah Angkatan Peserta Diklat Pemulihan Aset	4 Angkatan	0	0,00
h. Jumlah Laporan Penanganan Pemulihan Aset yang terkait Perkara	20 Laporan	10	50,00
i. Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas	1 Laporan	0	0,00
j. Jumlah Laporan Monitoring Implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi	2 Laporan	1	50,00
k. Jumlah Kegiatan Pengawasan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah ^{d)}	4.148 Kegiatan	N/A	N/A
l. Jumlah Kegiatan Pengawasan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah ^{d)}	40 Kegiatan	N/A	N/A
m. Jumlah Pemerintah Provinsi yang menerima pendampingan pengelolaan Arsip Terjaga dan Arsip Aset Daerah I	3 Provinsi	1	33,33
n. Jumlah Pemerintah Provinsi, Kab. Kota yang Menerima Pendampingan Pengelolaan Arsip Terjaga dan Arsip Aset Daerah II	2 Provinsi/ Kab/Kota	2	100
o. Jumlah Instansi Pemerintah yang Menerima Pendampingan Pengelolaan Arsip Terjaga dan Arsip Aset	2 Instansi Pemerintah	2	100
p. Jumlah Unit Kerja yang Dievaluasi untuk Mendapatkan Predikat WBK / WBBM di Wilayah I	165 Unit Kerja	0	0,00

Sasaran/Indikator	Target	Capaian	Kinerja (%) dan Notifikasi
q. Jumlah Unit Kerja yang Dievaluasi untuk Mendapatkan Predikat WBK / WBBM di Wilayah II	165	Unit Kerja	0 0,00
r. Jumlah Unit Kerja yang Dievaluasi untuk Mendapatkan Predikat WBK / WBBM di Wilayah III	165	Unit Kerja	0 0,00
s. Jumlah IP yang diberikan Asistensi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Wilayah I	182	Instansi Pemerintah	173 95,05
t. Jumlah IP yang dievaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Wilayah I	217	Instansi Pemerintah	112 51,61
u. Jumlah IP yang diberikan Asistensi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Wilayah II	159	Instansi Pemerintah	151 94,97
v. Jumlah IP yang dievaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Wilayah II	189	Instansi Pemerintah	127 67,20
w. Jumlah IP yang diberikan Asistensi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Wilayah III	175	Instansi Pemerintah	103 58,86
x. Jumlah IP yang dievaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Wilayah III	210	Instansi Pemerintah	133 63,33
y. Jumlah IP yang telah Mengimplementasikan Pembangunan Integritas ASN	30	Instansi Pemerintah	0 0,00
z. Instansi Pemerintah yang diawasi nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku	150	Instansi Pemerintah	250 100
aa. Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Pelaksanaan Seleksi JPT di Instansi Pemerintah	1.500	Rekomendasi	1.678 100
ab. Jumlah Instansi Pemerintah yang Menetapkan e-Arsip terintegrasi di Pemerintah Pusat	5	Instansi Pusat	1 20,00
ac. Jumlah Pemerintah Provinsi Kab/ Kota yang Menerapkan e-Arsip Terintegrasi di Kearsipan Daerah I	3	Kab/Kota	0 0,00
ad. Jumlah Pemerintah Provinsi Kab/ Kota yang Menerapkan e-Arsip Terintegrasi di Kearsipan Daerah II	3	Kab/Kota	0 0,00
ae. Rekomendasi Hasil Pembinaan SPIP dan Manajemen Resiko Bidang Ekonomi dan Keuangan	2	LHP	1 50,00
af. Rekomendasi Pembinaan SPIP dan Manajemen Resiko Bidang Pangan, Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Alam	1	LHP	0 0,00
ag. Rekomendasi Hasil Pembinaan SPIP dan Manajemen Resiko Bidang Infrastruktur, Tata Ruang dan Perhubungan	2	LHP	2 100
ah. Rekomendasi Hasil Pembinaan SPIP dan Manajemen Resiko Bidang Ekonomi Kreatif, Perdagangan dan Ketenagakerjaan	2	LHP	0 0,00

Sasaran/Indikator		Target	Capaian	Kinerja (%) dan Notifikasi		
ai.	Rekomendasi Hasil Pembinaan SPIP dan Manajemen Resiko Bidang Kerjasama Investasi dan Pembiayaan Pembangunan	1	LHP	0	0,00	●
aj.	Rekomendasi Hasil Pembinaan SPIP dan Manajemen Resiko Bidang Politik dan Penegakan Hukum	4	LHP	2	50,00	●
ak.	Rekomendasi Hasil Pembinaan SPIP dan Manajemen Resiko Bidang Sosial dan Penanganan Bencana	2	LHP	0	0,00	●
al.	Rekomendasi Hasil Pembinaan SPIP dan Manajemen Resiko Bidang Pengembangan SDM dan Kebudayaan	2	LHP	1	50,00	●
am.	Rekomendasi Hasil Pembinaan SPIP dan Manajemen Resiko Bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Reformasi Birokrasi	3	LHP	1	33,33	●
an.	Rekomendasi Hasil Pembinaan SPIP dan Manajemen Resiko Bidang Badan Usaha Konektivitas, Pariwisata, Kawasan Industri dan Perumahan	2	LHP	2	100	●
ao.	Rekomendasi Hasil Pembinaan SPIP dan Manajemen Resiko Pelaksanaan Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Daerah	3	LHP	1	33,33	●
ap.	Rekomendasi Hasil Pembinaan SPIP dan Manajemen Resiko Bidang Hankam	2	LHP	1	50,00	●
aq.	Rekomendasi Hasil Pembinaan SPIP dan Manajemen Resiko di Daerah	364	LHP	209	57,42	●
KP 5. Penataan Biaya Politik				57,07	●	
1 Terwujudnya prakondisi penataan biaya politik						
a.	Jumlah Pembentukan Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif	148	Daerah	4	26,00	●
b.	Jumlah Penegakan Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu ^{e)}	5	Laporan/ Dokumen	N/A	N/A	○
c.	Jumlah Pengembangan Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif Hasil Piloting	19	Daerah	4	19,00	●
d.	Jumlah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	126.376.418	Suara Sah	126.376.418	100	●
e.	Jumlah Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana	34	Satker	14	40,00	●
f.	Jumlah TV dengan Indeks Kualitas Program Siaran di atas 3	7	Stasiun TV	6	85,71	●
g.	Persentase Provinsi dengan Indeks Kemerdekaan Pers di atas 73	78	Persen	88	100	●
h.	Jumlah Regulasi/Kebijakan tata kelola informasi dan Komunikasi publik di K/L/D	2	Dokumen	4	100	●
i.	Jumlah Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tahun Berjalan yang Belum Diselesaikan	30	Sengketa	31	100	●
j.	Jumlah Badan Publik yang Informatif	35	Badan Publik	0	0,00	●

Sasaran/Indikator	Target	Capaian	Kinerja (%) dan Notifikasi
k. Jumlah Penguatan Pokja IDI	15 Provinsi	0	0,00
PP 4. Penanggulangan Terorisme, Peningkatan Keamanan Siber, dan Penguatan Keamanan Laut			
KP 1. Pencegahan dan Pemberantasan Terorisme			63,69
1 Meningkatnya upaya pencegahan dan pemberantasan terorisme			
a. Jumlah operasi intelijen kontra terorisme cipta kondisi dan Pengamanan PON Papua	100 Laporan	47	47,00
b. Jumlah operasi intelijen kontra separatisme cipta kondisi dan Pengamanan PON Papua	90 Laporan	40	44,44
c. Jumlah kegiatan koordinasi peran serta masyarakat dan pemerintah dalam pencegahan terorisme	1 Wilayah	1	75,00
d. Jumlah Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan Teroris yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	50 Orang	26	52,00
e. Jumlah warga masyarakat di lokasi rawan bencana yang mendapatkan pencegahan terorisme	10.000 Orang	15.128	100
KP 2. Penguatan Ketahanan dan Keamanan Siber			32,35
1 Menguatnya ketahanan masyarakat terhadap serangan siber dan menguatnya tata kelola pemangku kepentingan terkait siber			
a. Jumlah <i>Computer Security Incident Response Team</i> (CSIRT) yang dibentuk di sektor pemerintah	15 K/L/D	3	20,00
b. Jumlah operasi intelijen siber bidang kontra Pengamanan Kegiatan PON Papua	250 Laporan	120	48,00
c. Jumlah operasi intelijen siber bidang analisa dan forensik Pengamanan Kegiatan PON Papua	300 Laporan	241	80,33
d. Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitasnya dalam bidang keamanan siber	25 Lulusan	25	100
e. Jumlah ASN pada K/L/D yang ditingkatkan kompetensinya dalam bidang SPBE ¹⁾	0 Lulusan	0	0,00
f. Jumlah SDM pengelola keamanan siber pada sektor Infrastruktur Informasi Kritis Nasional (IIKN) (<i>Born to Defense Program</i>) ¹⁾	0 Lulusan	0	0,00
g. Pelaksanaan <i>National Cyber Exercise Drill Test</i>	370 Orang	370	100
h. Jumlah peningkatan kapabilitas National CSIRT	1 Sistem	0	20,00
i. Pembuatan Matriks Keamanan Siber	1 Standar	0	35,00
j. Jumlah Kegiatan Literasi dan Budaya Keamanan Siber	4 Nilai	4	100
k. Jumlah area cakupan <i>National Security Operation Center</i> (NSOC)	4 Titik	0	20,00
l. Jumlah ASN pada K/L/D yang mendapat diklat fungsional sandi ¹⁾	0 Lulusan	0	0,00

Sasaran/Indikator	Target	Capaian	Kinerja (%) dan Notifikasi		
m. Kegiatan ASEAN – <i>Japan Critical Infrastructure Information Protection 2020</i> ^{f)}	0	Kegiatan	0	0,00	●
n. Jumlah regulasi terkait manajemen krisis keamanan siber nasional ^{f)}	0	Regulasi	0	0,00	●
o. Jumlah regulasi terkait pembentukan CERT ^{f)}	0	Regulasi	0	0,00	●
p. Jumlah Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang ditingkatkan kemampuannya untuk menangani insiden pada sektor ekonomi digital, PGP dan Sertifikat Digital ^{f)}	0	PSE (Penyelenggara Sistem Elektronik)	0	0,00	●
q. Jumlah regulasi terkait tata kelola keamanan siber pada sektor IIKN (ISAC & VVDP) ^{f)}	0	Regulasi	0	0,00	●
r. Jumlah Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia bidang Keamanan Siber	1	Regulasi	0	30,00	●
s. Jumlah dokumen Rencana Strategis Keamanan Siber sektor IIKN ^{f)}	0	Regulasi	0	0,00	●
t. Jumlah Standar Audit Keamanan Siber Pemerintah ^{f)}	0	Dokumen	0	0,00	●
u. Jumlah Kerangka Regulasi Literasi Keamanan Siber dan Pengendalian Informasi	1	Regulasi	0	75,00	●
v. Jumlah penerapan standar kriptografi pada sektor ekonomi digital	12	PSE	10	83,33	●
KP 3. Penguatan Keamanan Laut			0,00	●	
1 Meningkatnya jumlah penyelesaian kejahatan di wilayah laut					
a. Pengadaan Senjata Penyelenggaraan Patroli Keamanan dan Keselamatan Laut	332	Pucuk	0	0,00	●
b. Pengadaan Amunisi Penyelenggaraan Patroli Keamanan dan Keselamatan Laut	1	Paket	0	0,00	●
PP 5. Penanggulangan Narkotika dan Penguatan Kamtibmas					
KP 1. Pencegahan, Pemberantasan, dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika			67,13	●	
1 Meningkatnya upaya pemberantasan narkotika dan prekursor narkotika					
a. Jumlah laporan kajian hukum sistem peradilan pidana narkotika	1	Laporan	0	75,00	●
b. Jumlah kawasan rawan kultivasi, produksi, penyelundupan, peredaran gelap, dan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika yang diintervensi program <i>Alternative Development</i>	6	Kawasan	3	50,00	●
c. Jumlah fasilitas layanan rehabilitasi berbasis komponen masyarakat yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	10	Fasilitas	8	80,00	●
d. Jumlah petugas agen (pendamping) pemulihan bagi penyalahguna narkotika dan prekursor narkotika yang ditingkatkan kapasitasnya	200	Orang	200	100	●
e. Jumlah desa yang memiliki alokasi anggaran program ketahanan keluarga	173	Desa	21	12,14	●

Sasaran/Indikator	Target	Capaian	Kinerja (%) dan Notifikasi
dari dana desa (Desa Bersih Narkoba)			
f. Jumlah Laporan Kajian Desain Strategi "Active Defense" dalam pencegahan peredaran gelap narkoba	1	Laporan	0 70,00 ●
g. Jumlah Korban Penyalahgunaan Napza yang mendapatkan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial	21.714	Orang	17.974 82,78 ●
KP 2. Peningkatan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban			42,99 ●
1 Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat			
a. Jumlah <i>Command Center</i> yang dibangun	5	Lokasi	4 80,00 ●
b. Jumlah rumah susun yang dibangun	18	Paket	3,95 22,00 ●
c. Jumlah Ruang Pelayanan Khusus (RPK) yang dibangun	3	Lokasi	0,9 30,00 ●
d. Jumlah Perangkat Data Center yang dioptimalisasikan	42	Unit	20 47,62 ●
e. Jumlah Sistem Aplikasi E-Manajemen Penyidikan yang dibangun	727	Unit	300 41,27 ●
f. Jumlah SKCK Online yang dibangun	100	Unit	70 70,00 ●
g. Persentase Timdu PKS Provinsi yang Melaksanakan RAD secara Efektif	34	Provinsi	34 53,00 ●
h. Jumlah warga masyarakat di lokasi rawan bencana yang mendapatkan pencegahan konflik sosial ^{b)}	43.018	Orang	N/A N/A ○
i. Jumlah korban bencana sosial yang mendapat pemenuhan kebutuhan dasar ^{b)}	120.000	Orang	N/A N/A ○
j. Jumlah aparaturnya pemerintah daerah yang berkapasitas melakukan kewaspadaan dan deteksi dini	200	Orang	0 0,00 ●

Sumber: Perhitungan data hingga Triwulan III 2020

Keterangan: ● realisasi >90% target; ● realisasi 60-90% target; ● realisasi <60% target;

○ belum dapat diberikan notifikasi

a) Anggaran mengalami pemotongan sehingga tidak dapat terlaksana pada tahun 2020

b) Data tersedia pada triwulan IV

c) Kegiatan tidak dilanjutkan sebagai Prioritas Nasional di tahun 2020 akibat adanya pandemi COVID-19.

d) kegiatan sudah dihapus dan tidak ada dalam RKP 2020

e) Data belum tersedia

f) kegiatan ditunda seluruhnya karena kegiatan dilaksanakan secara tatap muka yang melibatkan banyak peserta dan *stakeholder*